

Trump: Kevin Warsh Seharusnya Tolak Kenaikan Suku Bunga The Fed

Jumat, 2 Oktober 2026 06:00 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/123392/trump-kevin-warsh-seharusnya-tolak-kenaikan-suku-bunga-the-fed/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan Gubernur Federal Reserve (The Fed) Kevin Warsh seharusnya menentang keputusan menaikkan suku bunga pada bulan lalu. Namun, Trump mengaku tidak menyalahkan Warsh atas keputusan bank sentral tersebut.

"Saya tidak menyalahkan Kevin Warsh. Jika saya berada di posisinya, mungkin saya akan memberikan suara menentang keputusan dewan," kata Trump kepada majalah Time dalam wawancara yang diterbitkan pada Kamis (1/10).

Ketika ditanya mengenai pernyataannya tersebut pada Kamis, Trump mengatakan bahwa ia ingin Warsh "memberikan suara sesuai dengan keinginannya sendiri".

Trump telah lama mendesak The Fed untuk menurunkan biaya pinjaman. Namun, pada bulan lalu, bank sentral itu tetap menaikkan suku bunga sebesar 0,25 poin persentase, mengabaikan tekanan dari Trump. The Fed juga mengisyaratkan kemungkinan kenaikan suku bunga tambahan pada akhir tahun ini. Langkah tersebut ditujukan untuk mengendalikan inflasi. Keputusan kenaikan suku bunga itu disetujui secara bulat.

Pada Kamis, Trump menyalahkan pendahulunya, Joe Biden, atas inflasi dan mengeluhkan bahwa "masalahnya adalah suku bunga akan menghambat pertumbuhan ekonomi kami".

Meski sebelumnya kerap mengkritik pendahulu Warsh, Jerome Powell, karena dinilai tidak cukup agresif menurunkan suku bunga, Trump bersikeras bahwa ia masih memercayai gubernur The Fed pilihannya sendiri. Trump justru menyalahkan jajaran dewan gubernur yang menurutnya memiliki motif politik.

"Ini sudah menjadi sangat politis. Saya tidak menyalahkan Anda, Kevin. Saya rasa ini sangat disayangkan. Ini tidak adil," kata Trump dalam wawancara tersebut.

"Kita punya dewan yang sangat memusuhi saya, dan dewan itu berkata, 'Kami ingin merugikan Trump.' Mereka tidak melakukan ini demi Anda. Mereka melakukannya karena mengalami sindrom kebencian terhadap Trump (Trump derangement syndrome)," tambahnya.

Klaim Pengangguran AS Turun, Sinyal Pasar Kerja Kuat

Jumat, 2 Oktober 2026 05:30 WIB

Mark Niquette

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/123390/klaim-pengangguran-as-turun-sinyal-pasar-kerja-kuat/2>

Bloomberg, Jumlah warga Amerika Serikat (AS) yang mengajukan klaim awal tunjangan pengangguran turun tipis ke level terendah sejak Juli. Sementara itu, jumlah klaim berkelanjutan merosot ke level terendah dalam tiga tahun terakhir. Data tersebut mengindikasikan kondisi pasar tenaga kerja yang masih cukup baik.

Berdasarkan data Departemen Tenaga Kerja AS yang dirilis pada Kamis, jumlah klaim awal tunjangan pengangguran turun 1.000 menjadi 197.000 pada pekan yang berakhir 26 September. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan estimasi median 200.000 klaim dalam survei ekonom Bloomberg.

Sementara itu, klaim berkelanjutan, yang menjadi indikator jumlah orang yang masih menerima tunjangan pengangguran, turun 11.000 menjadi 1,7 juta pada pekan yang berakhir 19 September. Angka tersebut merupakan yang terendah sejak Maret 2023.

Dalam beberapa bulan terakhir, klaim awal tunjangan pengangguran bertahan di dekat level terendah secara historis. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perusahaan masih enggan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah aktivitas ekonomi yang kuat. Namun, perekrutan tenaga kerja berlangsung lebih terbatas.

Laporan ketenagakerjaan bulanan pemerintah yang akan dirilis pada Jumat diperkirakan menunjukkan tingkat pengangguran AS tetap sebesar 4,1% pada September. Sementara itu, jumlah tenaga kerja nonpertanian (nonfarm payrolls) diperkirakan bertambah sekitar 85.000 orang, setelah mencatat kenaikan bulanan terbesar kedua sejak 2024.

Rata-rata pergerakan empat pekan klaim awal tunjangan pengangguran, yang digunakan untuk meredam fluktuasi data, turun ke level terendah dalam tujuh pekan, yakni 200.000 klaim.

Sebelum disesuaikan dengan faktor musiman, klaim awal tunjangan pengangguran turun di sebagian besar negara bagian, termasuk Hawaii, Georgia, dan Texas.

Pasar Kerja AS Cuma Tambah 29.000 Pekerja di September, Jauh di Bawah Proyeksi

Jumat, 2 Oktober 2026 19:42 WIB

Reporter: Harris Hadinata, Editor: Harris Hadinata

<https://internasional.kontan.co.id/news/pasar-kerja-as-cuma-tambah-29000-pekerja-di-september-jauh-di-bawah-proyeksi>

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pasar tenaga kerja Amerika Serikat (AS) menunjukkan pertumbuhan yang sangat terbatas pada September 2026. Jumlah penyerapan pekerja swasta di luar sektor pertanian atau nonfarm payroll hanya bertambah 29.000 orang, jauh di bawah konsensus proyeksi analis sebesar 89.000 orang.

Menurut rilis resmi Bureau of Labor Statistics (BLS) AS, Jumat (2/10/2026), perubahan jumlah pekerja nonfarm pada September relatif kecil setelah rata-rata bertambah 45.000 per bulan dalam 12 bulan sebelumnya. Lapangan kerja di seluruh industri utama juga relatif tidak banyak berubah selama September.

Pelemahan terlihat semakin jelas setelah BLS merevisi data dua bulan sebelumnya. Pertumbuhan payroll Juli direvisi turun 31.000, dari sebelumnya bertambah 21.000 menjadi berkurang 10.000. Sementara itu, pertumbuhan Agustus direvisi turun 29.000, dari 162.000 menjadi 133.000.

Dengan revisi tersebut, penambahan lapangan kerja pada Juli dan Agustus secara gabungan tercatat 60.000 lebih rendah dibandingkan laporan sebelumnya. BLS menyebut revisi dilakukan berdasarkan tambahan laporan dari perusahaan dan lembaga pemerintah serta penghitungan ulang faktor musiman.

Di sisi lain, tingkat pengangguran AS juga bertambah. Pada September, tingkat pengangguran berada di 4,2%, naik dari 4,1% pada Agustus. Jumlah penganggur mencapai 7,1 juta orang. BLS mencatat tingkat pengangguran berada dalam kisaran sempit 4,1% hingga 4,3% sejak Maret.

Jumlah pengangguran jangka panjang, yakni mereka yang tidak bekerja selama 27 minggu atau lebih, relatif tidak berubah pada September, yakni sekitar 1,9 juta orang. Kelompok tersebut mencakup 27,1% dari seluruh pengangguran.

Di sisi lain, partisipasi angkatan kerja naik menjadi 61,8% dari 61,6% pada Agustus. Rasio penduduk bekerja terhadap populasi juga meningkat tipis menjadi 59,2% dari 59,1%. Kedua indikator tersebut menunjukkan perubahan bersih yang relatif kecil sejak Januari.

Dari sisi sektoral, kesehatan masih menjadi salah satu sumber pertumbuhan lapangan kerja. Industri kesehatan menambah 17.000 pekerja pada September, tetapi lajunya lebih lambat dibandingkan rata-rata kenaikan 33.000 per bulan selama 12 bulan sebelumnya. Lapangan kerja bertambah di layanan kesehatan rawat jalan sebesar 13.000 dan rumah sakit sebesar 12.000, sementara fasilitas keperawatan dan perawatan residensial kehilangan 9.000 pekerjaan.

Sektor konstruksi menambah 11.000 pekerjaan pada September, sedikit di atas rata-rata kenaikan 10.000 per bulan selama setahun terakhir. Di sektor manufaktur, lapangan kerja bertambah 9.000 dan telah meningkat 72.000 sejak mencapai titik terendah terakhir pada Desember 2025. Penambahan pada September terutama berasal dari industri produk plastik dan karet serta manufaktur mesin, masing-masing 5.000 pekerjaan.

Namun, sejumlah sektor mencatat penurunan. Lapangan kerja di aktivitas keuangan berkurang 7.000 pada September. Sejak mencapai puncak terakhir pada Mei 2025, pekerjaan di sektor tersebut telah turun 129.000, dengan sebagian besar penurunan berasal dari perusahaan asuransi dan aktivitas terkait yang berkurang 90.000.

Di tengah pertumbuhan pekerjaan yang terbatas, upah rata-rata masih meningkat. Pendapatan per jam rata-rata seluruh pekerja pada payroll nonpertanian swasta naik 5 sen atau 0,1% menjadi US\$37,81 pada September. Dalam 12 bulan terakhir, pendapatan per jam tersebut meningkat 3,0%.

Untuk pekerja produksi dan nonsupervisory di sektor swasta, pendapatan per jam naik 7 sen atau 0,2% menjadi US\$32,60. Sementara itu, rata-rata jam kerja per minggu untuk seluruh pekerja pada payroll nonpertanian swasta tidak berubah pada 34,4 jam.

Inflasi Tokyo Melesat, Peluang Bank Sentral Jepang Naikkan Suku Bunga Makin Terbuka

Jumat, 2 Oktober 2026 11:01 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/inflasi-tokyo-melesat-peluang-bank-sentral-jepang-naikkan-suku-bunga-makin-terbuka>

KONTAN.CO.ID – TOKYO. Inflasi inti di Tokyo, Jepang, kembali meningkat tajam pada September 2026. Kenaikan tersebut memperkuat tekanan harga sekaligus membuka ruang bagi Bank of Japan (BOJ) untuk kembali menaikkan suku bunga dalam beberapa bulan ke depan.

Data inflasi Tokyo yang dirilis pada Jumat (2/10) menunjukkan indeks harga konsumen (CPI) inti, yang tidak memasukkan harga makanan segar tetapi masih memperhitungkan harga bahan bakar, meningkat 2,7% secara tahunan pada September.

Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan 1,8% pada Agustus sekaligus melampaui median perkiraan pasar sebesar 2,4%.

Inflasi inti Tokyo pada September juga untuk pertama kalinya sejak Januari kembali berada di atas target inflasi BOJ sebesar 2%. Laju kenaikan tersebut merupakan yang tercepat sejak November, ketika inflasi mencapai 2,8% secara tahunan.

Data inflasi Tokyo menjadi salah satu indikator awal yang digunakan untuk melihat kecenderungan inflasi nasional. Angka tersebut juga akan menjadi salah satu pertimbangan BOJ ketika memperbarui proyeksi inflasinya dalam pertemuan kebijakan moneter pada 29-30 Oktober 2026.

Peluang kenaikan suku bunga BOJ

Reuters melaporkan, pelaku pasar kini mengurangi ekspektasi terhadap kenaikan suku bunga BOJ secara beruntun pada bulan ini. Namun, banyak pelaku pasar masih memperkirakan bank sentral Jepang akan kembali menaikkan suku bunga pada Desember untuk mengantisipasi risiko inflasi yang melampaui target.

Yoshiki Shinke, senior executive economist di Dai-ichi Life Research Institute, mengatakan tekanan inflasi Jepang masih cukup kuat meskipun sejumlah faktor temporer diperhitungkan.

"Jika mengabaikan faktor-faktor satu kali, angka inflasi tetap kuat dan menunjukkan perusahaan secara bertahap meneruskan kenaikan biaya akibat pelemahan yen dan perang Iran," ujar Shinke.

Ia memperkirakan inflasi inti secara nasional dapat menembus 3% dalam beberapa bulan mendatang.

"Inflasi inti nasional kemungkinan akan melampaui 3% dalam beberapa bulan mendatang. Dengan adanya risiko kenaikan pada inflasi yang mendasarinya, BOJ akan menghadapi tekanan untuk kembali menaikkan suku bunga paling cepat pada Desember," katanya.

Inflasi tanpa makanan segar dan energi meningkat

Selain inflasi inti, indikator yang mengeluarkan dampak harga makanan segar dan bahan bakar juga menunjukkan peningkatan cukup signifikan.

Indeks tersebut naik 3,0% secara tahunan pada September, setelah tumbuh 2,0% pada Agustus. Kenaikan itu menjadi yang tercepat sejak Agustus 2025.

BOJ memantau erat indikator tersebut karena dinilai dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai tren inflasi yang mendasarinya.

Kenaikan inflasi sebagian dipengaruhi oleh berakhirnya sejumlah subsidi untuk tagihan air dan pengasuhan anak. Namun, tekanan harga juga meluas ke berbagai jenis makanan dan kebutuhan sehari-hari akibat meningkatnya biaya bahan baku.

Harga komputer pribadi dan tablet juga meningkat karena lonjakan harga chip.

Masato Koike, senior economist di Sampo Institute Plus, memperkirakan tekanan inflasi masih berlanjut.

"Inflasi inti akan terus meningkat sebagai sebuah tren akibat kenaikan biaya energi yang dipicu konflik di Timur Tengah dan dampak lanjutan putaran keduanya," kata Koike.

Ia juga memperkirakan BOJ akan kembali menaikkan suku bunga pada Desember.

Kenaikan harga jasa mulai menguat

Tekanan inflasi juga mulai terlihat semakin luas pada sektor jasa. Inflasi sektor jasa mencapai 2,3% pada September, naik dari 1,4% pada bulan sebelumnya.

Kondisi tersebut menunjukkan perusahaan mulai meneruskan peningkatan biaya tenaga kerja kepada konsumen di tengah ketatnya pasar tenaga kerja Jepang.

BOJ menaikkan suku bunga acuannya ke level tertinggi dalam 31 tahun pada bulan lalu. Gubernur BOJ juga mengisyaratkan bahwa bank sentral telah memasuki fase kebijakan yang berfokus pada pencegahan inflasi mendasar agar tidak melampaui target.

Bank sentral Jepang sebelumnya menyatakan bahwa inflasi yang mendasari, yakni tren kenaikan harga yang didorong oleh permintaan dan telah menghilangkan faktor-faktor temporer, sudah mendekati target 2%, tetapi belum sepenuhnya memenuhi target tersebut.

Harga minyak jadi perhatian BOJ

Analisis menilai salah satu faktor penting bagi arah kebijakan BOJ adalah bagaimana kenaikan harga grosir dan harga konsumen terbaru memengaruhi ekspektasi masyarakat terhadap pergerakan harga ke depan.

Ekspektasi tersebut penting untuk menjaga inflasi yang mendasari tetap berada di sekitar target 2% BOJ.

Pada Juli 2026, BOJ memperkirakan inflasi konsumen inti mencapai 2,5% pada tahun fiskal 2026 dan 2,4% pada 2027. Proyeksi tersebut telah memperhitungkan dampak kenaikan biaya yang berasal dari konflik di Timur Tengah.

Kini, perhatian pasar tertuju pada kenaikan kembali harga minyak mentah dalam beberapa waktu terakhir. Jika harga energi terus meningkat, BOJ berpotensi mempertimbangkan revisi naik terhadap proyeksi inflasinya dalam pertemuan Oktober.

"Gelombang kedua guncangan energi dapat membuat inflasi bertahan pada level tinggi lebih lama dari perkiraan, yang dapat memperkuat posisi kelompok hawkish di dewan BOJ," ujar Shinke.

Valas Asia Bergerak Terbatas Jumat (2/10), Rupiah Bertahan di Rp17.940

Jumat, 2 Oktober 2026 09:50 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/valas-asia-bergerak-terbatas-jumat-210-rupiah-bertahan-di-rp17940>

KONTAN.CO.ID - Pergerakan mata uang Asia relatif terbatas terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (2/10/2026). Rupiah tercatat stagnan, sementara peso Filipina menjadi salah satu mata uang yang menguat terhadap greenback.

Mengutip data Reuters pada pukul 02.13 GMT atau 09.13 WIB, rupiah berada di level Rp17.940 per dolar AS, tidak berubah dibandingkan posisi sebelumnya.

Peso Filipina menguat 0,16% menjadi 62,622 per dolar AS. Yen Jepang juga menguat 0,08% ke level 157,950 per dolar AS.

Sementara itu, dolar Singapura melemah 0,06% menjadi 1,281 per dolar AS. Dolar Taiwan terkoreksi 0,23% ke 31,915, won Korea Selatan turun 0,10% menjadi 1.360,10, sedangkan baht Thailand melemah tipis 0,03% ke 33,650 per dolar AS.

Ringgit Malaysia turun 0,02% menjadi 4,083 per dolar AS. Rupee India stagnan di 96,315, sementara yuan China menguat tipis 0,02% menjadi 6,705 per dolar AS.

Rupiah Melemah 6,11% Sepanjang 2026

Jika dibandingkan dengan posisi akhir 2025, sebagian besar mata uang Asia masih mencatat perubahan yang cukup signifikan sepanjang tahun ini.

Rupiah menjadi salah satu mata uang yang mencatat pelemahan terbesar. Berdasarkan data Reuters, rupiah berada di level Rp17.755 per dolar AS pada akhir 2025 dan kini berada di Rp17.940. Dengan demikian, rupiah telah melemah sekitar 6,11% sepanjang 2026.

Rupee India mencatat pelemahan lebih besar, yakni 5,81%. Peso Filipina melemah 4,79%, sedangkan baht Thailand turun 4,13%.

Won Korea Selatan menjadi salah satu mata uang Asia yang menguat terhadap dolar AS sepanjang tahun, yakni 4,39%. Yuan China menguat 3,97%, sementara dolar Singapura naik 1,16%.

Ringgit Malaysia juga menguat 0,75% sepanjang 2026.

Di sisi lain, yen Jepang melemah 1,70% dan dolar Taiwan turun 0,90% dibandingkan posisi akhir tahun lalu.

Pergerakan mata uang Asia berlangsung di tengah penguatan dolar AS yang berada di sekitar level tertinggi 17 bulan.

Investor juga mencermati volatilitas pasar obligasi global serta data tenaga kerja AS yang berpotensi memengaruhi ekspektasi terhadap arah kebijakan suku bunga The Fed.

Inflasi Korea Selatan Melandai Jadi 2,9% pada September 2026

Jumat, 2 Oktober 2026 07:27 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/inflasi-korea-selatan-melandai-jadi-29-pada-september-2026>

KONTAN.CO.ID - Inflasi konsumen Korea Selatan melandai pada September 2026, seiring kebijakan pengendalian harga pemerintah dan penurunan harga produk pertanian.

Mengutip Reuters, Jumat (2/10/2026), indeks harga konsumen (CPI) Korea Selatan naik 2,9% secara tahunan (year on year/YoY) pada September.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan kenaikan 3,1% pada Agustus dan sesuai dengan median proyeksi ekonom dalam jajak pendapat Reuters.

Secara bulanan, CPI Korea Selatan masih meningkat 0,3% pada September. Kenaikan tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 0,2% pada bulan sebelumnya.

Kementerian Keuangan Korea Selatan mengatakan perlambatan inflasi tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah. Salah satunya penerapan batas harga bahan bakar domestik yang membantu menekan tekanan inflasi.

Selain itu, harga produk pertanian, peternakan dan perikanan turun secara tahunan untuk bulan kedua berturut-turut. Pemerintah menyebut penurunan tersebut turut didukung langkah-langkah khusus menjelang perayaan Chuseok.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, harga produk pertanian, peternakan dan perikanan turun 0,3% yoy pada September. Penurunan tersebut membantu menahan laju inflasi secara keseluruhan.

Meski demikian, tekanan harga dari biaya yang berkaitan dengan impor masih cukup tinggi. Harga produk industri naik 4,2% yoy, terutama didorong oleh produk minyak bumi yang melonjak 11,8%.

Harga diesel bahkan tercatat melesat 20% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di sisi lain, biaya transportasi meningkat 7,7% yoy, sementara harga restoran dan hotel naik 2,8% pada periode yang sama.

Perkembangan inflasi tersebut menjadi perhatian bagi perekonomian Korea Selatan, terutama karena tekanan harga masih terlihat pada sejumlah komponen yang berkaitan dengan energi dan biaya transportasi.

Inflasi 3,28% YoY, Airlangga Sebut Perekonomian RI Masih Tangguh

Jumat, 2 Oktober 2026 17:10 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/123492/inflasi-3-28-yoy-airlangga-sebut-perekonomian-ri-masih-tangguh/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menilai bahwa ekonomi Indonesia masih tangguh dengan inflasi yang terkendali di level 3,28%, lantaran masih berada pada rentang sasaran nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$.

Inflasi inti yang tercatat melandai menjadi sebesar 2,84% (yoy) dinilai mencerminkan ekspektasi inflasi yang tetap terjangkau dan stabilitas harga terjaga di tengah fluktuasi kondisi global maupun domestik.

Sementara itu, inflasi Administered Prices (AP) juga mereda menjadi sebesar 3,25% (yoy) didukung oleh normalisasi mobilitas pascapandemi yang menahan tekanan tarif angkutan udara, serta dampak penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang relatif terbatas.

Di sisi lain, inflasi Volatile Food sebesar 5,03% (yoy), dipengaruhi dinamika permintaan serta penurunan produksi sejumlah komoditas hortikultura akibat cuaca ekstrem, El Nino, dan bencana alam.

"Pemerintah terus menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Terjaganya inflasi, kembali ekspansifnya sektor manufaktur, dan tetap tumbuhnya ekspor menunjukkan bahwa fondasi perekonomian Indonesia tetap kuat di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (2/10/2026).

"Ke depan, Pemerintah akan terus memperkuat sinergi kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong investasi dan aktivitas industri, serta meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk Indonesia."

Kemenko Perekonomian menyebut bahwa saat ini, pemerintah tetap mewaspadai tekanan pada kelompok Volatile Food dan terus mengarahkan koordinasi untuk memastikan kecukupan pasokan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Sementara, memasuki Triwulan IV 2026, pemerintah memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus menopang daya beli masyarakat.

Upaya tersebut ditempuh melalui penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap III, Bantuan Pangan Beras sebesar 10 kg per bulan yang akan disalurkan pada Oktober–Desember 2026, serta percepatan penyaluran SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) beras medium oleh Perum Bulog.

Stabilitas pasokan juga diperkuat melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), serta optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD).

Dari sisi produksi dan distribusi, Pemerintah terus mendorong efisiensi biaya logistik sekaligus memitigasi risiko imported inflation melalui bea masuk 0% untuk LPG industri dan suku cadang pesawat, serta menyiapkan kebijakan serupa untuk bahan baku plastik. Dukungan juga diperkuat dengan pembiayaan sektor produktif melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Airlangga juga menyebut bahwa langkah antisipatif juga diperkuat untuk menjaga ketahanan pangan melalui optimalisasi pengelolaan air dan jaringan irigasi, percepatan dan pengaturan pola tanam, pemanfaatan lahan produktif, pemetaan wilayah rawan, serta penguatan Early Warning System (EWS).

Keseluruhan langkah tersebut diarahkan untuk menjaga kesinambungan produksi dan distribusi pangan serta stabilitas harga hingga akhir tahun.

Tekanan Dolar AS Mereda, Rupiah Menguat ke Rp17.875/US\$

Jumat, 2 Oktober 2026 15:37 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/123477/tekanan-dolar-as-mereda-rupiah-menguat-ke-rp17-875-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah menutup perdagangan dengan penguatan 0,42% ke Rp17.875/US\$, sejalan dengan penguatan yang masif di pasar mata uang Asia.

Dari kawasan, rupiah menguat bersama won Korea Selatan 0,72%, baht Thailand 0,39%, peso Filipina 0,35%, yen Jepang 0,18%, yuan offshore 0,16%, dolar Singapura 0,11%, dan ringgit Malaysia 0,06%. Sebaliknya, dolar Taiwan melemah 0,12%.

Penguatan won Korea Selatan berbanding lurus dengan pergerakan yield di pasar obligasinya yang mengalami penurunan 9,7 bps ke 4,33% pada tenor 10 tahun.

Sementara, yield obligasi Jepang terpankas 1,4 bps ke 3,08% dan yield obligasi Singapura turun 3,4 bps ke 2,42%.

Meredanya tekanan yield di pasar obligasi dipicu oleh stabilisasi yield di pasar obligasi Amerika Serikat (AS) ke level 5,24% setelah sempat menyentuh 5,34% kemarin, menandai level tertingginya sejak 2002.

Pergerakan itu memberikan ruang bagi aset negara berkembang, termasuk rupiah, untuk bernapas. Sebab, indeks dolar AS juga ikut terpankas 0,21% ke 101,87, setelah berada di level 102,09 kemarin.

Penurunan US Treasury, meskipun tipis saja, mengurangi tekanan terhadap selisih imbal hasil (yield spread) antara obligasi AS dan obligasi negara berkembang.

Turunnya yield di pasar US Treasury diikuti obligasi di pasar domestik. Aksi beli obligasi masih berlanjut sore ini ditandai adanya penurunan yield pada sebagian besar tenor, terutama tenor pendek.

Di tenor 1 tahun, misalnya, yield terpankas cukup dalam 7 bps ke 6,7%, sedangkan tenor 5 tahun turun 2,5 bps jadi 7,03%. Namun, pada tenor acuan 10 tahun, yield masih naik terbatas 0,3 bps jadi 7,16%.

Meskipun yield US Treasury terpancang dan berupaya dinormalisasi, namun level 5,24% masih tergolong tinggi. Dengan begitu, penurunan yield itu belum bisa dibaca sebagai berakhirnya tekanan di pasar obligasi global.

Kondisi tersebut membuat ruang penguatan rupiah jadi cukup terbatas. Apalagi harga minyak masih berada di sekitar US\$100/barel, dan berpotensi memperbesar risiko inflasi.

Dari domestik, inflasi diperkirakan masih akan meningkat di bulan Oktober ini, setelah September mencatat kenaikan jadi 3,28%. Meskipun lebih rendah dari ekspektasi pasar yang sebesar 3,3%, kenaikan ini tak bisa diabaikan. Sebab, sumbernya berasal dari kenaikan harga pangan.

Inflasi yang hanya 0,22 poin presentasi di bawah batas atas sasaran Bank Indonesia (BI) yang sebesar 1,5%-3,5% membuat ruang untuk menghadapi tambahan guncangan harga jadi makin terbatas.

"Bagi Bank Indonesia, inflasi umum yang lebih tinggi mempersempit fleksibilitas kebijakan meskipun inflasi inti melandai," kata Harry Su, Managing Director Research Samuel Sekuritas.

Ia menambahkan, ruang untuk pelonggaran kebijakan tampak terbatas, sementara mempertahankan kondisi keuangan yang ketat dapat membebani permintaan kredit dan investasi yang saat ini masih lemah.

"Kami tetap berhati-hati terhadap prospek inflasi hingga akhir 2026. Gangguan lebih lanjut pada pasokan pangan, kenaikan harga energi, dampak El Nino, atau pass-through nilai tukar dapat mendorong inflasi umum menembus batas atas sasaran BI," kata Harry.

Bahkan, Harry menyebut jika inflasi tetap berada dalam sasaran, tekanan berkelanjutan terhadap kebutuhan pokok dapat melemahkan konsumsi rumah tangga.

Obligasi Korporasi Kini Bisa Jadi Agunan Repo Operasi Moneter BI

Jumat, 2 Oktober 2026 13:20 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/123455/obligasi-korporasi-kini-bisa-jadi-agonal-repo-operasi-moneter-bi/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) melakukan perluasan terhadap surat berharga yang dapat dipergunakan untuk melakukan operasi moneter. Salah satunya dengan memasukan obligasi dan sukuk korporasi berkualitas tinggi.

Hal ini resmi diumumkan oleh BI lewat peresmian Perluasan Surat Berharga sebagai Underlying Operasi Moneter oleh Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Suhasil Nazara, di Jakarta (1/10/2026).

Turut hadir pula Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Otoritas Jasa Keuangan Hasan Fawzi, Ketua Umum Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia (Apuvindo) Ari Rizaldi, serta perbankan dan lembaga/institusi terkait lainnya.

Perluasan ini menurut BI menjadi bagian dari penguatan operasi moneter pro-market yang terintegrasi dengan pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA).

Melalui kebijakan tersebut, BI mengelola likuiditas, suku bunga, dan nilai tukar sekaligus mendorong transaksi di pasar keuangan.

Perluasan underlying juga diharapkan meningkatkan transaksi pasar sekunder dan mendukung pembiayaan sektor riil, termasuk perumahan dan infrastruktur.

"Efektivitas kebijakan moneter sangat bergantung pada transmisi melalui pasar keuangan yang dalam, likuid, dan efisien," ujar Destry Damayanti, Gubernur Bank Indonesia, dalam keterangan tertulis dikutip Jumat (2/10/2026).

Hal tersebut dinilai sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjaga perekonomian Indonesia dan memperkuat kredibilitas kebijakan di mata investor.

"Kami di Kementerian Keuangan, bersama LPS dan Danantara selaku sovereign wealth fund, akan terus menjaga perekonomian Indonesia dan membangun kredibilitas kebijakan bagi seluruh investor, dimanapun mereka berada," kata Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (2/10/2026)

Implementasi perluasan underlying operasi moneter telah dilakukan secara bertahap. Sejak diluncurkan pada 10 November 2025 hingga 30 September 2026, total transaksi repo operasi moneter dengan underlying obligasi dan sukuk korporasi PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF telah mencapai Rp1,25 triliun.

Perluasan underlying tersebut kemudian dilakukan dengan menambahkan obligasi dan sukuk korporasi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI, dengan lelang repo perdana pada 28 September 2026 sebesar Rp60 miliar.

Kebijakan ini juga diklaim memberikan dampak positif terhadap aktivitas di pasar keuangan, tercermin dari peningkatan volume transaksi surat berharga PT SMF di pasar sekunder dari rata-rata Rp31,9 miliar per hari pada Oktober 2025 menjadi Rp179,9 miliar per hari pada akhir Agustus 2026. Pada periode yang sama, kepemilikan bank atas obligasi PT SMF meningkat 18 persen, dari Rp8,69 triliun menjadi Rp10,22 triliun.

Perluasan underlying operasi moneter tersebut diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas perbankan, mendorong aktivitas transaksi surat berharga korporasi di pasar sekunder, dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

Inflasi Tembus 3,28%, Suahasil Klaim Ekonomi Gerak & Masih Sehat

Jumat, 2 Oktober 2026 11:50 WIB

Dovana Hasiana

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/123434/inflasi-tembus-3-28-suahasil-klaim-ekonomi-gerak-masih-sehat/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Suahasil Nazara merespons data yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait laju inflasi pada September 2026 yang mencapai 3,28% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Menurut dia, inflasi 3,28% merupakan angka yang masih nyaman karena berada di dalam kisaran target pemerintah dan Bank Indonesia, yakni 2,5%+-1 atau 1,5%-3,5%.

"Jadi menunjukkan gerak ekonomi masyarakat itu terjadi. Kalau kita lihat jenis-jenis barangnya, inflasinya menurut saya sangat sehat," ujar Suahasil, dikutip Jumat (2/10/2026).

Dia meyakini inflasi yang masih berada dalam sasaran menunjukkan kondisi ekonomi masih terjaga. menurut dia, hal itu juga memberi sinyal bagi dunia usaha untuk menjalankan proses produksi barang dan jasa lebih banyak demi menumbuhkan ekonomi nasional.

Berdasarkan data BPS, inflasi pada September 2026 tercatat mencapai 3,28%. Artinya, Indeks Harga Konsumen (IHK) meningkat dari 108,74 pada September 2025 menjadi 112,31 pada September 2026.

Realisasi inflasi ini lebih tinggi ketimbang realisasi inflasi pada Agustus yang sebesar 3,19% (yoy).

Berdasarkan data BPS, IHK pada September mengalami inflasi secara bulanan terhadap Agustus 2026, yakni 0,3%. Sementara itu, inflasi dalam perhitungan tahun kalender (year-to-date/ytd) tercatat sebesar 2,17%.

Rupiah dan Mata Uang Asia Melawan Balik, Dolar AS Tersudut

Jumat, 2 Oktober 2026 09:28 WIB

<https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/123420/rupiah-dan-mata-uang-asia-melawan-balik-dolar-as-tersudut/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah membuka perdagangan dengan depresiasi 0,04% ke Rp17.957/US\$, bersama sebagian besar mata uang Asia. Dari kawasan, dolar Taiwan melemah paling tajam 0,19%, disusul dolar Singapura 0,02%.

Sebaliknya, sebagian mata uang berhasil defensif dan mencatat penguatan. Seperti, peso Filipina, baht Thailand, dan yuan offshore.

Namun tak lama berselang, rupiah berbalik ke zona hijau dengan penguatan terbatas 0,1% ke Rp17.932/US\$ pada 09:10 WIB, bersama dengan won Korea Selatan dan ringgit Malaysia masing-masing 0,03%, dan yen Jepang 0,14%.

Harga minyak masih bertahan tinggi di level US\$102,67/barel. Namun, indeks dolar Amerika Serikat (AS) sedikit menyusut tipis ke 102,06.

Penguatan mata uang Asia ditopang oleh meredanya tekanan dolar AS dan stabilisasi yield US Treasury tenor 10 tahun yang kembali di 5,25% setelah kemarin sempat menyentuh 5,34%.

Setidaknya, pasar keuangan Asia mendapat sedikit ruang bernapas setelah aksi jual besar-besaran di pasar obligasi global. Akan tetapi, ruang itu masih sangat terbatas mengingat yield US Treasury belum benar-benar berbalik turun. Selama yield AS berada di atas 5%, daya tarik aset dolar AS masih relatif kuat dan tekanan bagi mata uang Asia belum sepenuhnya hilang.

Dari sisi domestik, penguatan rupiah yang berbalik arah dari posisi pembukaannya pagi ini ditopang oleh langkah intervensi Bank Indonesia (BI). Bank sentral kini tidak lagi terlalu mengandalkan intervensi di pasar spot. Gubernur BI Destry Damayanti menyebut posisi intervensi spot hanya sekitar 30% dari total intervensi valuta asing.

Sementara sisanya, BI menggunakan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) dan NDF. Strategi itu dimaksudkan untuk mengurangi penggunaan cadangan devisa secara langsung.

Di pasar NDF, rupiah terkonsolidasi ke posisi Rp17.966/US\$ setelah mampu defensif dan menguat sangat terbatas 0,07% pada 09:15 WIB.

Sementara di pasar obligasi, yield tenor pendek kembali turun dengan tenor 1 tahun terpankas 3,1 bps ke 6,74% dan tenor 3 tahun turun tipis 0,04 bps ke 6,93%.

Di tengah pergerakan aset-aset rupiah itu, pelaku pasar juga mencermati arah kebijakan ekonomi dan fiskal usai terjadinya perombakan kabinet. Kocok ulang posisi dalam pemerintahan dapat menimbulkan pertanyaan mengenai desain kelembagaan dan pembagian kewenangan, terutama jika posisi-posisi itu berkaitan langsung dengan sektor strategis dan pengelolaan sumber daya ekonomi.

Pelaku pasar akan mencermati bagaimana perubahan kabinet itu dan menerjemahkan kondisi ini menjadi ekspektasi soal kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah ke depan.

Di tengah kondisi dan sentimen yang ada, rupiah hari berpotensi konsolidasi di rentang Rp17.870-17.980/US\$.

Rupiah Nyaris Rp18.000/US\$, Ini Jurus Kemenkeu Jaga Stabilitas

Jumat, 2 Oktober 2026 09:10 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/123413/rupiah-nyaris-rp18-000-us-ini-jurus-kemenkeu-jaga-stabilitas/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan mengungkapkan sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang kini nyaris berada di level psikologis Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS).

Wakil Menteri Keuangan Junda Agung mengatakan Kemenkeu sejatinya berperan cukup signifikan dalam menjaga stabilitas rupiah, baik melalui upaya mempertahankan daya tarik Surat Berharga Negara (SBN) maupun memperkuat cadangan devisa.

Sejalan dengan itu, Kemenkeu turut menjalin koordinasi dengan Bank Indonesia.

"Rupiah 17.900/US\$ apa yang dilakukan Kemenkeu? yang dilakukan Kemenkeu adalah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, baik untuk menjaga daya tarik SBN kita supaya ada inflow (aliran modal masuk)," kata Junda dalam agenda Media Gathering Kemenkeu, di Bogor, Jawa Barat, Kamis (1/10/2026).

Di sisi lain, menurut dia kebijakan Kemenkeu juga diarahkan untuk memperkuat cadangan devisa. Salah satunya melalui penerbitan surat utang pemerintah di pasar global.

Ia mencontohkan ketika pemerintah menerbitkan obligasi global atau global bonds, termasuk Panda Bonds, dana yang diperoleh dan ditempatkan di BI akan menambah cadangan devisa.

Di samping itu, Kemenkeu akan terus menjaga kredibilitas kebijakan fiskal untuk mempertahankan kepercayaan investor terhadap aset-aset keuangan Indonesia.

"Saya kira itu bagian dari kita untuk terus menjaga daya tarik Indonesia, sehingga Investor mau masuk ke aset-asetnya seperti SBN," pungkasnya.

Sebagai catatan, rupiah menutup perdagangan Kamis (1/10/2026) dengan pelemahan yang lebih dalam dari pembukaan paginya.

Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup melemah 0,45% ke Rp17.950/US\$, kala harga minyak brent kembali terkerek dan hampir kembali menyentuh level US\$100/barel.

Kekhawatiran akan inflasi di tengah ketidakpastian resolusi konflik Timur Tengah membuat harga minyak sulit turun karena pasokan masih terganggu. Ekspektasi inflasi ini membuat yield US Treasury

semakin tinggi dan tercatat di 5,32% untuk tenor 10 tahun, sebab pelaku pasar memperkirakan bank sentral AS akan kembali mengerek suku bunga acuan dalam rapat bulan ini.

Kondisi tersebut membuat mata uang Asia kompak melemah. Yen Jepang terpangkas paling tajam, disusul won Korea Selatan, rupiah, baht Thailand, rupee India, dolar Singapura, peso Filipina, dan ringgit Malaysia, serta yuan offshore dan dolar Taiwan. Sementara, dolar Hong Kong dan yuan China stagnan.

Penerimaan Pajak Ditarget Rp2.593 T, DJP Perluas Basis Pajak

Jumat, 2 Oktober 2026 08:20 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/123404/penerimaan-pajak-ditarget-rp2-593-t-djp-perluas-basis-pajak/2>

Bloomberg Technoz, Bogor - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan mengandalkan perluasan basis pajak hingga intensifikasi teknologi untuk mengejar target penerimaan pajak 2027 sebesar Rp2.593,4 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan strategi penerimaan pajak pada 2027 nampak diarahkan pada intensifikasi berbasis teknologi, optimalisasi coretax, hingga penguatan pemetaan berbasis risiko.

Bimo juga mengatakan optimalisasi administrasi perpajakan juga diarahkan untuk menggali potensi pajak, membentuk basis pajak baru, serta memperkuat proses strategi dan koordinasi secara keseluruhan.

"Tentu ini merupakan buah daripada selain intensifikasi yang semakin baik dan menggunakan mesin cortex, kemudian pemanfaat mesin coretax yang juga semakin optimum untuk menggali potensi," kata Bimo dalam Media Gathering Kemenkeu di Bogor, Kamis (1/10/2026).

Bimo mengatakan target penerimaan pajak pada 2027 akan mencapai sekitar 2,3 kali dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak pada 2016. Menurutnya, peningkatan tersebut mencerminkan penguatan kapasitas administrasi perpajakan dalam satu dekade terakhir.

Dalam catatannya, penerimaan pajak pada 2026 dan target 2027 sama-sama tumbuh dua digit atau di atas 10%. Menurutnya, capaian tersebut berbeda dengan periode sebelumnya yang turut dipengaruhi kondisi ekonomi dan harga komoditas.

Sementara pada 2018, penerimaan pajak tumbuh 14,1% seiring kenaikan harga komoditas dan peningkatan keuntungan sejumlah sektor komoditas. Sementara pada 2021-2022, pertumbuhan penerimaan pajak juga terdorong pemulihan setelah kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Adapun pada 2020 penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar 19,6%.

"Artinya dalam satu dekade ini ada peningkatan kapasitas 2,3 kali dari administrasi perpajakan yang semakin berbasis teknologi, semakin berbasis data yang sudah semakin luas, semakin dalam dari setiap sektor, dari setiap kementerian lembaga, dari setiap stakeholders, dan tentu juga ada perluasan basis pajak yang nyata di situ," jelasnya.

Adapun target penerimaan pajak 2027 ditetapkan sebesar Rp2.593,4 triliun, tumbuh sekitar 12,2% dibandingkan dengan outlook penerimaan pajak 2026 sebesar Rp2.310,8 triliun.

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah menyepakati target penerimaan perpajakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebesar Rp2.911,95 triliun.

Angka tersebut naik Rp4 triliun dibanding usulan pemerintah dalam RAPBN 2027 yang sekitar Rp2.907 triliun.

Penerimaan perpajakan tersebut ditargetkan berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp2.593 triliun dari sebelumnya Rp2.591 triliun. Kemudian, penerimaan kepabeanan dan cukai yang turut disepakati sebesar Rp316 triliun.

Mayoritas Harga Pangan Turun, tapi Cabai Masih Rp100 Ribu

Jumat, 2 Oktober 2026 10:10 WIB

Ibnu Affan

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/123425/mayoritas-harga-pangan-turun-tapi-cabai-masih-rp100-ribu/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Mayoritas rata-rata harga komoditas pangan nasional hari ini, Jumat (2/10/2026) mulai menunjukkan penurunan, tetapi, cabai masih berada di kisaran harga Rp100.000/kg.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia per pukul 9.15 WIB, harga cabai merah besar turun 2,26% atau Rp1.300 menjadi Rp56.100/kg. Begitu juga cabai rawit hijau yang turun 11,55% atau Rp7.850 menjadi Rp60.100/kg.

Namun, harga cabai merah keriting masih naik 19,78% atau Rp13.700 menjadi Rp82.950/kg, serta cabai rawit merah yang juga naik 4,35% atau Rp4.200 menjadi Rp100.650/kg.

Sementara itu, harga beras bawah I naik 0,67% atau Rp100 menjadi Rp15.000/kg. Tapi, beras kualitas bawah II turun 1,02% atau Rp150 menjadi Rp14.550/kg. Beras kualitas medium I juga turun 0,30% atau Rp50 menjadi Rp16.550/kg.

Beras kualitas medium II turun 1,52% atau Rp250 menjadi Rp16.150/kg. Harga beras kualitas super I juga turun 1,95% atau Rp350 menjadi Rp17.600/kg. Beras kualitas super II turun 1,73% atau Rp300 menjadi Rp17.050/kg.

Lalu, harga daging sapi kualitas I turun 1,05% atau Rp1.600 menjadi Rp150.950/kg. Begitu juga daging sapi kualitas II turun 4,12% atau Rp5.900 menjadi Rp137.350/kg. Namun, daging ayam ras segar naik 2,38% atau Rp1.000 menjadi Rp43.050/kg.

Harga minyak goreng curah masih naik 0,74% atau Rp150 menjadi Rp20.550/kg. Tapi minyak goreng kemasan bermerek 1 turun 0,21% atau Rp50 menjadi Rp24.300/kg. Begitu juga minyak goreng kemasan bermerek 2 yang turun 2,98% atau Rp700 menjadi Rp22.800/kg.

Harga telur ayam ras segar juga turun 5,34% atau Rp1.600 menjadi Rp28.350/kg, diikuti bawang putih ukuran sedang yang turun 2,69% atau Rp1.050 menjadi Rp37.950/kg. Sementara, bawang merah ukuran sedang masih naik 3,47% atau Rp1.300 menjadi Rp38.750/kg.

Terakhir, harga gula pasir kualitas premium turun 0,98% atau Rp200 menjadi Rp20.150/kg. Begitu juga harga gula pasir lokal turun 2,09% atau Rp400 menjadi Rp18.750/kg.

BI Perluas Underlying Operasi Moneter, Korporasi dan Bank Fleksibel Kelola Likuiditas

Jumat, 2 Oktober 2026 14:40 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Khomarul Hidayat

<https://nasional.kontan.co.id/news/bi-perluas-underlying-operasi-moneter-korporasi-dan-bank-fleksibel-kelola-likuiditas>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank Indonesia (BI) memperluas surat berharga yang dapat digunakan sebagai underlying dalam operasi moneter. Kebijakan ini membuka ruang yang lebih besar bagi perbankan untuk mengelola likuiditas sekaligus mendorong aktivitas transaksi surat berharga korporasi di pasar keuangan.

Perluasan tersebut dilakukan dengan memasukkan obligasi dan sukuk korporasi berkualitas tinggi sebagai underlying operasi moneter. Kebijakan ini merupakan bagian dari penguatan operasi moneter yang lebih berorientasi pasar (pro-market) dan terintegrasi dengan pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA).

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, operasi moneter pro-market memungkinkan kebijakan moneter tidak hanya diarahkan untuk mengelola likuiditas, suku bunga, dan nilai tukar, tetapi juga mendorong aktivitas transaksi di pasar keuangan.

Menurut dia, transmisi kebijakan moneter perlu mengalir melalui pasar uang dan pasar valuta asing agar dapat memengaruhi transaksi serta pembiayaan dunia usaha dan rumah tangga.

"Efektivitas kebijakan moneter sangat bergantung pada transmisi melalui pasar keuangan yang dalam, likuid, dan efisien," ujar Destry dalam keterangan resmi, Kamis (1/10/2026).

Melalui perluasan underlying ini, perbankan mendapatkan instrumen yang lebih beragam dalam mengelola likuiditasnya. Di sisi lain, korporasi penerbit surat berharga juga memperoleh dukungan terhadap likuiditas dan aktivitas perdagangan instrumennya di pasar sekunder.

Implementasi perluasan underlying telah dilakukan secara bertahap. Sejak diluncurkan pada 10 November 2025 hingga 30 September 2026, total transaksi repo operasi moneter dengan underlying obligasi dan sukuk korporasi PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF telah mencapai Rp1,25 triliun.

BI kemudian kembali memperluas instrumen tersebut dengan memasukkan obligasi dan sukuk korporasi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI. Lelang repo perdana dengan underlying surat berharga SMI telah dilakukan pada 28 September 2026 sebesar Rp60 miliar.

Perluasan ini juga mulai terlihat dari meningkatnya aktivitas perdagangan surat berharga SMF di pasar sekunder. Volume transaksi meningkat dari rata-rata Rp31,9 miliar per hari pada Oktober 2025 menjadi Rp179,9 miliar per hari pada akhir Agustus 2026.

Pada periode yang sama, kepemilikan bank atas obligasi SMF juga meningkat 18%, dari Rp8,69 triliun menjadi Rp10,22 triliun.

Destry mengatakan, perluasan underlying diharapkan terus berkembang sehingga dapat mendorong transaksi pasar sekunder, memperkuat pembentukan harga, dan pada akhirnya mendukung pembiayaan sektor riil, termasuk perumahan dan infrastruktur.

Sementara itu, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pemerintah bersama lembaga terkait akan terus menjaga perekonomian Indonesia dan memperkuat kredibilitas kebijakan di mata investor.

“Kami di Kementerian Keuangan, bersama LPS dan Danantara selaku sovereign wealth fund, akan terus menjaga perekonomian Indonesia dan membangun kredibilitas kebijakan bagi seluruh investor, di manapun mereka berada,” tegas Suhasil.

BI akan terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta lembaga terkait untuk mendukung implementasi operasi moneter pro-market.

Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas perbankan, mendorong transaksi surat berharga korporasi di pasar sekunder, serta memperkuat pembiayaan bagi sektor riil.

Serapan Anggaran Kementerian PKP Capai 49,78%, Kejar Target 97,48% di Akhir 2026

Jumat, 2 Oktober 2026 11:07 WIB

Reporter: Prayogi Ikhrwinata, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/serapan-anggaran-kementerian-pkp-capai-4978-kejar-target-9748-di-akhir-2026>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat realisasi belanja mencapai Rp 5,13 triliun atau 49,78% dari pagu anggaran di luar Anggaran Biaya Tambahan (ABT) per 1 Oktober 2026. Kementerian masih perlu mengakselerasi penyerapan dalam tiga bulan terakhir untuk mengejar target realisasi sebesar 97,48% hingga akhir tahun.

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choroel mengatakan, realisasi anggaran meningkat dari sekitar 33% pada 1 September 2026 menjadi 49,78% pada 1 Oktober 2026. Sementara itu, jika pagu ABT untuk pembangunan hunian tetap (huntap) sekitar Rp 2,2 triliun turut diperhitungkan, realisasi anggaran tercatat sebesar 41,20%.

Didyk menyebut, capaian tersebut telah melampaui target realisasi anggaran per 1 Oktober 2026 sebesar 44,89%. Kementerian menargetkan realisasi anggaran mencapai 74,24% pada 1 November 2026 dan 82,54% pada 1 Desember 2026.

“Target kita 44,89%, alhamdulillah sudah tercapai 49,78%. Ini akselerasi dalam satu bulan yang luar biasa,” ujar Didyk dalam rapat evaluasi penyerapan anggaran Kementerian PKP di Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Adapun total pagu anggaran Kementerian PKP mencapai Rp 12,527 triliun, termasuk ABT sebesar Rp 2,218 triliun untuk penanganan pascabencana di Sumatera. Untuk mengejar target realisasi 97,48% pada akhir tahun, kementerian perlu mempercepat penyerapan anggaran pada Oktober.

“Ini yang perlu menjadi perjuangan kita, akselerasi sekitar 30%-an harus kita serap di bulan Oktober ini,” kata Didyk.

Berdasarkan program, realisasi dukungan manajemen telah mencapai 75,73%, sedangkan program perumahan dan kawasan permukiman tercatat 47,23%. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah mencapai 47,65%.

Sementara itu, realisasi rumah susun mencapai 68,48% dan rumah khusus 17,31%. Adapun program penanganan kawasan kumuh, sanitasi, serta prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) masih berada di kisaran 10%. Sejumlah kegiatan tersebut masih dalam tahap awal pelaksanaan kontrak.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan, realisasi anggaran di direktoratnya mencapai 57,06% jika anggaran tambahan untuk huntap dikecualikan. Namun, jika anggaran huntap turut dihitung, realisasi tercatat sebesar 32,36%.

Fitrah menyebut, realisasi BSPS di bawah direktoratnya telah mencapai 60,60% atau senilai Rp 1,56 triliun. Sementara itu, realisasi keuangan penanganan kawasan kumuh masih 5,48%, sanitasi 7,89%, dan PSU 11,80%.

Menurut Fitrah, rendahnya realisasi keuangan PSU tidak sepenuhnya mencerminkan progres fisik pekerjaan. Sebagian kontraktor memilih tidak mengambil uang muka dan baru menerima pembayaran setelah pekerjaan selesai.

“Rata-rata PSU ini fisiknya lebih cepat, tetapi kontraktor pelaksana tidak mau mengambil uang muka,” ujar Fitrah dalam rapat evaluasi tersebut.

Ia menjelaskan, sebagian kontraktor baru menerima pembayaran setelah pekerjaan rampung sepenuhnya. Kondisi tersebut membuat realisasi keuangan belum mencerminkan progres fisik pekerjaan yang telah berjalan.

“Mereka mengambil pas 100% setelah pekerjaan selesai sehingga realisasi keuangan tidak tercatat tinggi, padahal realisasi fisik sudah 35,63%,” kata Fitrah.

Di luar program reguler, percepatan pembangunan huntap bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera menjadi salah satu fokus Kementerian PKP menjelang akhir tahun. Dari pagu ABT sebesar sekitar Rp 2,2 triliun, realisasi anggaran huntap per 1 Oktober 2026 tercatat Rp 29,89 miliar atau 1,35%.

Kementerian menargetkan realisasi kumulatif anggaran huntap mencapai 95,07% pada 31 Desember 2026, setara sekitar Rp 2,109 triliun. Percepatan tersebut mencakup penyelesaian proses pengadaan, pelaksanaan konstruksi, pengendalian mutu, dan pengawasan di lapangan.

Kementerian PKP juga melaporkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan telah mencapai sekitar Rp 26,69 triliun kepada 112.437 debitur. Pembiayaan tersebut mendukung renovasi dan pembelian rumah, pembangunan rumah untuk kegiatan usaha, serta pembiayaan pelaku usaha di sisi pasokan perumahan.

BRI mencatat penyaluran KUR Perumahan sebesar Rp 12,53 triliun kepada 85.501 debitur. Sementara itu, BTN menyalurkan Rp 5,80 triliun kepada 8.743 debitur, sedangkan BNI menyalurkan Rp 2,42 triliun atau 89,97% dari target internal Rp 2,70 triliun.

Dalam upaya mempercepat penyaluran KUR Perumahan, sejumlah bank menyiapkan kegiatan sosialisasi hingga akhir tahun. BRI menargetkan penyaluran Rp 27 triliun, sedangkan BTN menargetkan Rp 10 triliun. Bank Mandiri memperkirakan penyaluran dapat mencapai Rp 2,87 triliun, atau sekitar 115% dari target Rp 2,5 triliun.

Kementerian PKP juga akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk membahas dukungan kebijakan moneter dan insentif bagi sektor perumahan.

Gaet Investor dari Berbagai Daerah, Pemprov Jateng Siapkan Ekosistem Industri Halal

Jumat, 2 Oktober 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/gaet-investor-dari-berbagai-daerah-pemprov-jateng-siapkan-ekosistem-industri-halal/>

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan ekosistem industri halal di wilayahnya, guna menggaet investor dari berbagai daerah.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, di sela Sharia Economic Leaders Forum (SELF) Jateng 2026, di Padma Hotel Semarang, Jumat (2/10/2026).

Dia mengatakan, pembentukan kawasan industri halal tersebut saat ini masih dibahas bersama Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), serta para pegiat ekonomi syariah.

Menurutnya, pembahasan bersama berbagai pihak diperlukan, agar kawasan tersebut nantinya mampu menarik industri dari luar Jawa Tengah.

Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin ini juga menekankan pentingnya memperkuat ekosistem ekonomi syariah, termasuk dari sisi pariwisata dan kuliner. Jawa Tengah, kata dia, telah merasakan apresiasi wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara, terhadap layanan yang ramah bagi wisatawan muslim.

Apalagi, imbuh Taj Yasin, penguatan ekonomi syariah tersebut juga akan menjadi bagian dari arah pembangunan Jateng pada 2027. Karena itu, ekonomi syariah dan pariwisata ramah muslim yang berkelanjutan, menjadi salah satu tema yang akan dikembangkan.

Dia berharap, kepengurusan baru MES Jateng dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah. Menurutnya, potensi anak muda dengan pengalaman di bidang industri, ekspor-impor, perekonomian, hingga fesyen, dapat menjadi tenaga baru dalam pengembangan ekonomi syariah.

“Tenaga baru ini harus benar-benar menambah sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan masyarakat ekonomi syariah, yang sudah terbangun dengan baik ini,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum MES Jateng, Rezza Arief Budy Artha mengatakan, kepengurusan MES periode 2026-2031 ingin mengambil peran lebih besar dalam pembangunan ekonomi Jawa Tengah, salah satunya melalui penguatan ekspor. Karenanya, koperasi ekspor diangkat dalam agenda SELF Jateng 2026.

Dia mengatakan, MES Jateng mengusung tema ekonomi syariah yang inklusif, progresif, dan inovatif. Kolaborasi akan dibuka seluas-luasnya dengan berbagai kelompok masyarakat, untuk memperkuat kontribusi ekonomi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Jateng.

“Jadi, semua masyarakat Jawa Tengah, siapa pun Anda, apa pun background-nya, apa pun latar belakangnya, kita mari sama-sama berkolaborasi mengembangkan ekonomi di Jawa Tengah,” ujarnya.

Rezza juga menilai keterlibatan anak muda menjadi bagian penting dalam pengembangan ekonomi syariah. Menurutnya, generasi muda Jateng memiliki potensi, untuk ikut memperbesar kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian daerah. (Humas Jateng)*ul

Ekonomi Kudus tumbuh 7,64 persen di triwulan II 2026

Jumat, 2 Oktober 2026 19:50 WIB

Pewarta: Akhmad Nazaruddin, Editor: Teguh Imam Wibowo

<https://jateng.antaranews.com/berita/647255/ekonomi-kudus-tumbuh-764-persen-di-triwulan-ii-2026>

Kudus, Jawa Tengah (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus pada triwulan II 2026 tumbuh 7,64 persen secara tahunan atau year on year (yoy), dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berkontraksi 0,11 persen.

"Sementara, secara kuartal ke kuartal, ekonomi Kudus pada triwulan II 2026 tumbuh 1,86 persen dibandingkan triwulan I 2026. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi secara c-to-c atau kumulatif semester I 2026 dibandingkan semester I 2025 tercatat sebesar 6,45 persen," kata Kepala BPS Kabupaten Kudus Eko Suharto saat rilis inflasi di Kantor BPS Kudus, Jumat.

Ia mengungkapkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus itu, karena adanya kontribusi terbesar dari sektor industri pengolahan sebesar 75,36 persen.

Kontribusi tersebut jauh lebih besar dibandingkan sektor perdagangan sebesar 6,31 persen, konstruksi 4,48 persen, serta pertanian sebesar 2,68 persen.

Sementara sektor lainnya, seperti transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa pendidikan, pertambangan, serta pengadaan air memberikan kontribusi yang bervariasi, mulai dari sekitar 2 persen hingga 0,50 persen.

Menurut Eko, seluruh lapangan usaha di Kabupaten Kudus mencatatkan pertumbuhan positif selama triwulan II 2026. Adapun lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian daerah masih didominasi industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi.

Ia menjelaskan peningkatan aktivitas industri pengolahan, termasuk industri hasil tembakau (IHT), turut mendorong pertumbuhan ekonomi Kudus pada triwulan II 2026.

Pada periode yang sama tahun 2025, kata dia, aktivitas industri tembakau sempat mengalami penurunan sehingga turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sementara pada tahun ini, aktivitas industri mulai menunjukkan peningkatan.

Selain industri pengolahan, sejumlah lapangan usaha juga mencatat pertumbuhan cukup tinggi, di antaranya pertanian, pengadaan listrik dan gas, serta informasi dan komunikasi.

Pertumbuhan sektor pertanian, kata Eko, antara lain dipengaruhi musim panen raya. Selain tanaman pangan, aktivitas peternakan juga mendapat dorongan dari momentum Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.

Wow! Ekonomi Vietnam Tumbuh Nyaris 10% di Kuartal III 2026

Sabtu, 3 Oktober 2026 09:35 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Khomarul Hidayat

<https://internasional.kontan.co.id/news/wow-ekonomi-vietnam-tumbuh-nyaris-10-di-kuartal-iii-2026>

KONTAN.CO.ID - HANOI. Produk Domestik Bruto (PDB) Vietnam tumbuh 9,95% pada kuartal III 2026 dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Angka ini juga pertumbuhan ekonomi kuartalan Vietnam tercepat sejak pandemi COVID, dan meningkat dari angka pertumbuhan yang telah direvisi sebesar 8,81% pada kuartal II 2026, menurut data pemerintah Vietnam yang dirilis pada Sabtu (3/10/2026), seperti dikutip Reuters.

Pertumbuhan ekonomi Vietnam pada kuartal Juli-September 2026 didorong ekspor yang kuat dan investasi infrastruktur yang masif, namun masih berada di bawah target pertumbuhan tahunan negara tersebut yang dipatok di atas 10%.

Perekonomian yang sangat bergantung pada ekspor ini menghadapi kenaikan biaya impor tahun ini akibat konflik terkait Iran, dengan defisit perdagangan dalam sembilan bulan pertama tahun ini mencapai rekor tertinggi.

Ekspor barang Vietnam pada bulan September 2026 naik 39,1% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi US\$ 59,48 miliar. Sementara impor melonjak 45,8% menjadi US\$ 58,21 miliar, sehingga menghasilkan surplus perdagangan sebesar US\$ 1,27 miliar pada bulan tersebut, demikian laporan Kantor Statistik Nasional Vietnam.

Selama sembilan bulan pertama tahun ini, ekspor Vietnam naik 24,5% menjadi US\$ 434,30 miliar, sementara impor naik 36,7% menjadi US\$ 453,72 miliar. Dus, Vietnam menghasilkan defisit perdagangan sebesar US\$ 19,42 miliar yang menjadi rekor tertinggi.

Harga impor energi yang lebih tinggi menjadi salah satu penyebab melebarnya defisit perdagangan tersebut. Menurut laporan tersebut, volume impor minyak mentah pada periode itu turun 13,5%, namun nilainya naik 14,4%. Impor bahan bakar olahan meningkat 11,5% secara volume dan nilainya melonjak 79,3%.

NSO menyatakan bahwa harga konsumen pada bulan September naik 5,08% dibandingkan tahun sebelumnya. Lembaga tersebut menambahkan bahwa produksi industri pada bulan September meningkat 16,7% secara tahunan.

Data menunjukkan total investasi selama periode sembilan bulan tersebut naik 16,7% dibandingkan tahun sebelumnya, seiring langkah negara itu meningkatkan investasi publik di sektor infrastruktur sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan.

Arus masuk investasi asing selama periode sembilan bulan itu naik 12,1% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi US\$21,1 miliar, menurut NSO.

Asian Development Bank (ADB)—yang pekan lalu menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Vietnam tahun ini menjadi 7,8% dari sebelumnya 7,2%—menyatakan bahwa prospek pertumbuhan jangka pendek negara tersebut tetap kuat. Hal ini didukung oleh ekspansi berkelanjutan di sektor manufaktur, konsumsi domestik yang tinggi, serta investasi asing langsung yang terus mengalir.

Namun, untuk jangka panjang, ADB menyatakan permintaan global yang lebih lemah dan ketidakpastian eksternal yang meningkat dapat menghambat pertumbuhan, sementara harga energi yang lebih tinggi serta kondisi keuangan global yang lebih ketat dapat menambah tekanan terhadap inflasi dan nilai tukar.

Laura Schwartz, analis senior untuk kawasan Asia di perusahaan intelijen risiko Verisk Maplecroft, mengatakan, kekhawatiran mulai muncul mengenai potensi ekonomi Vietnam yang mengalami overheating atau tumbuh terlalu cepat hingga melampaui kapasitas, terutama mengingat percepatan inflasi dalam beberapa bulan terakhir.

"Potensi kekurangan pasokan listrik dalam jangka pendek dan menengah juga akan menghadirkan tantangan yang signifikan," tambahnya.

Pasar Kerja AS Melemah, Lapangan Kerja Cuma Naik 29.000 pada September

Sabtu, 3 Oktober 2026 05:33 WIB

Alfi Dinilhaq

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/3031036/pasar-kerja-as-melemah-lapangan-kerja-cuma-naik-29000-pada-september>

Washington, Beritasatu.com - Pasar tenaga kerja Amerika Serikat (AS) menunjukkan pelemahan pada September 2026. Pertumbuhan lapangan kerja hanya mencapai 29.000, jauh di bawah perkiraan ekonom, sementara tingkat pengangguran meningkat menjadi 4,2%.

Berdasarkan laporan Biro Statistik Tenaga Kerja AS, jumlah pekerjaan nonpertanian bertambah 29.000 secara musiman pada September. Angka tersebut berada jauh di bawah proyeksi ekonom yang disurvei Dow Jones sebesar 84.000 pekerjaan dengan tingkat pengangguran diperkirakan 4,1%.

Data bulan sebelumnya juga mengalami revisi. Penambahan pekerjaan Agustus direvisi menjadi 133.000, sedangkan data Juli berubah dari kenaikan menjadi penurunan dengan pengurangan 10.000 pekerjaan. Secara keseluruhan, revisi tersebut menunjukkan jumlah pekerjaan 60.000 lebih rendah dibandingkan laporan sebelumnya.

Pelemahan pasar kerja tersebut langsung mendapat respons dari pasar keuangan. Investor menilai data ketenagakerjaan yang lebih lemah dapat memperbesar peluang Federal Reserve atau The Fed mempertahankan suku bunga pada pertemuan Oktober.

Kontrak berjangka saham AS menguat setelah laporan dirilis, sedangkan imbal hasil obligasi pemerintah turun. Peluang pasar bahwa The Fed mempertahankan suku bunga pada pertemuan 27-28 Oktober meningkat menjadi 82,8%, berdasarkan CME FedWatch.

"Bagi The Fed, angka ini seharusnya menjadi pukulan telak bagi kenaikan suku bunga di bulan Oktober," kata kepala ekonom AS dari lembaga Jefferies Thomas Simons.

"Data penggajian melonjak pada bulan Agustus dan kami memperkirakan momentum tersebut akan berlanjut bulan ini, mengingat angka klaim pengangguran yang sangat rendah dalam beberapa minggu terakhir. Namun, sekarang tampaknya angka Agustus hanyalah pemulihan dari perekrutan yang sangat lemah pada bulan Juni dan Juli," ucap dia.

Meski pertumbuhan pekerjaan melemah, sejumlah indikator dari survei rumah tangga justru menunjukkan perkembangan yang lebih kuat. Jumlah rumah tangga yang bekerja bertambah 406.000 pada September, sedangkan angkatan kerja meningkat 485.000.

Tingkat partisipasi angkatan kerja juga naik 0,2 poin persentase menjadi 61,8%, level tertinggi sejak Mei. Sementara itu, ukuran alternatif pengangguran yang mencakup pekerja putus asa dan pekerja paruh waktu karena alasan ekonomi turun tipis menjadi 7,6%, terendah sejak Januari 2025.

Data tersebut menjadi perhatian utama para pejabat The Fed ketika menentukan arah kebijakan suku bunga berikutnya. Pasar kini memperkirakan bank sentral AS akan menunda kenaikan suku bunga berikutnya hingga Desember.

Sebelumnya, The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada September. Para pembuat kebijakan juga masih melihat inflasi sebagai ancaman yang lebih besar dibandingkan kondisi pasar tenaga kerja.

Inflasi inti berdasarkan indikator pilihan The Fed masih berada di level tahunan 3%, lebih tinggi dari target inflasi bank sentral sebesar 2%. Namun, pertumbuhan upah mulai menunjukkan tanda-tanda perlambatan.

Pendapatan rata-rata per jam hanya meningkat 0,1% pada September. Secara tahunan, pertumbuhan upah mencapai 3%, menjadi yang terendah sejak Mei 2021. Angka tersebut berada di bawah ekspektasi Wall Street yang memperkirakan kenaikan bulanan 0,3% dan tahunan 3,1%.

“Warga Amerika frustrasi dengan kurangnya peluang saat ini. Pertumbuhan upah turun ke level terendah baru dalam 5 tahun dan sepenuhnya terhapus oleh inflasi. Itu sangat menyakitkan menjelang liburan,” kata kepala ekonom di Navy Federal Credit Union Heather Long.

Namun, Long menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja sebagai stabil dan mengatakan dia tidak berpikir The Fed akan terhalang untuk menaikkan suku bunga pada Desember.

Dari sisi sektoral, penambahan lapangan kerja terbesar terjadi di sektor kesehatan yang mencatat tambahan 17.000 pekerja. Sektor konstruksi bertambah 11.000 pekerjaan, sedangkan manufaktur meningkat 9.000 pekerjaan.

Sebaliknya, jumlah pegawai pemerintah berkurang 17.000. Jasa tenaga kerja sementara turun 11.000 pekerjaan dan sektor informasi kehilangan 10.000 pekerjaan di tengah perhatian terhadap dampak kecerdasan buatan terhadap pasar tenaga kerja. Aktivitas keuangan juga berkurang 7.000 pekerjaan.

Di tengah pelemahan pasar tenaga kerja, ekonomi AS secara keseluruhan masih menunjukkan pertumbuhan. Departemen Perdagangan merevisi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) kuartal pertama dan kedua masing-masing menjadi 2,5% dan 2,2%.

Sementara itu, Bank Sentral AS di Atlanta memperkirakan pertumbuhan PDB kuartal ketiga mencapai 3,7%.

Asia Dihajar Dolar: Yen hingga Ringgit Keok, Won-Rupiah Malah Menguat

Sabtu, 3 Oktober 2026 12:00 WIB

Elvan Widyatama, CNBC Indonesia

<https://www.cnbcindonesia.com/research/20261003075143-128-773014/asia-dihajar-dolar-yen-hingga-ringgit-keok-won-rupiah-malah-menguat>

Jakarta, CNBC Indonesia - Mata uang Asia banyak yang tertekan pada pekan ini di tengah lonjakan dolar Amerika Serikat (AS).

Pada perdagangan terakhir pekan ini, Jumat (2/10/2026), nilai tukar rupiah berhasil berbalik menguat dan mengakhiri perdagangan di posisi Rp17.868/US\$.

Penguatan pada akhir pekan membuat rupiah masih mampu mencatat kinerja positif secara mingguan. Merujuk data Refinitiv, mata uang Garuda menguat tipis 0,07% sepanjang pekan ini.

Kinerja rupiah terbilang lebih baik dibandingkan sebagian besar mata uang Asia. Pasalnya, dolar AS justru sedang berada dalam tren penguatan kuat, ditopang tingginya imbal hasil obligasi pemerintah AS dan ekspektasi suku bunga The Federal Reserve/The Fed yang masih tinggi.

Mayoritas Mata Uang Asia Melemah

Tekanan dolar AS cukup terasa di kawasan Asia sepanjang pekan.

Merujuk data Refinitiv, dari 10 mata uang Asia yang dipantau, sebanyak tujuh mata uang melemah terhadap dolar AS. Hanya won Korea Selatan, yuan China, dan rupiah yang mampu mencatat penguatan.

Won Korea Selatan menjadi mata uang dengan kinerja paling kuat setelah menguat 0,82% sepanjang pekan ke posisi KRW1.342,53/US\$.

Yuan China menyusul dengan penguatan 0,12%, sedangkan rupiah naik tipis 0,07%.

Di sisi lain, baht Thailand mengalami tekanan paling dalam dengan pelemahan 0,45%. Yen Jepang turun 0,36%, disusul dolar Taiwan yang terkoreksi 0,30% dan ringgit Malaysia sebesar 0,27%.

Peso Filipina melemah 0,15%, dolar Singapura turun 0,13%, sementara dong Vietnam terkoreksi tipis 0,04%.

Tekanan terhadap mayoritas mata uang Asia tidak lepas dari kuatnya dolar AS sepanjang pekan.

Indeks dolar AS atau DXY tercatat menguat 0,95% secara mingguan ke posisi 101,932. Penguatan tersebut membuat dolar AS membukukan kenaikan selama tiga pekan berturut-turut.

Salah satu penopangnya adalah imbal hasil obligasi pemerintah AS yang masih sangat tinggi. Yield Treasury AS tenor 10 tahun pada Jumat berada di sekitar 5,19%, tidak jauh dari level tertinggi dalam beberapa dekade.

Imbal hasil yang tinggi membuat aset AS tetap menarik bagi investor dan menjaga permintaan terhadap dolar.

Tekanan juga datang dari pasar obligasi Eropa. Kekhawatiran terhadap kondisi fiskal dan politik sejumlah negara, terutama Prancis dan Italia, mendorong aksi jual obligasi pemerintah di kawasan tersebut dan ikut membuat dolar relatif lebih menarik.

Harga minyak yang masih tinggi juga menjadi faktor lain. Negara-negara yang banyak mengimpor energi menghadapi tekanan lebih besar karena kenaikan biaya minyak dapat memperburuk neraca perdagangan sekaligus meningkatkan inflasi.

Kondisi tersebut ikut membebani sejumlah mata uang, termasuk yen Jepang.

Data Tenaga Kerja AS Sedikit Redam Dolar

Dolar AS sebenarnya sempat kehilangan sebagian tenaganya pada perdagangan Jumat setelah laporan tenaga kerja AS menunjukkan hasil yang lebih lemah dari perkiraan.

Pertumbuhan lapangan kerja AS pada September berada di bawah perkiraan ekonom, sementara tingkat pengangguran naik tipis menjadi 4,2%.

Data tersebut sedikit meredakan kekhawatiran bahwa The Fed harus kembali menaikkan suku bunga dalam waktu dekat.

"Kalau melihat keseluruhan data tenaga kerja, menurut saya angkanya cukup pas. Aktivitas ekonomi masih cukup kuat, tetapi belum menimbulkan tekanan inflasi yang besar," ujar Dominic Bunning, kepala strategi valuta G10 Nomura, dikutip dari Reuters.

Menurut Bunning, kondisi tersebut masih cukup baik bagi perekonomian karena pasar tenaga kerja belum menunjukkan pelemahan tajam, tetapi juga tidak terlalu panas hingga memicu tekanan harga baru.

Pasar pun mulai mengurangi perkiraan kenaikan suku bunga The Fed pada Oktober. Berdasarkan CME FedWatch, pelaku pasar kini memperkirakan peluang 86% The Fed akan mempertahankan suku bunga pada pertemuan bulan ini, jauh lebih tinggi dibandingkan 36% pada pekan sebelumnya.

Namun, perubahan ekspektasi tersebut belum cukup untuk menghapus penguatan dolar AS yang sudah terjadi sepanjang pekan.

Imbal Hasil Tinggi dan Harga Minyak Masih Topang Dolar AS

Dolar AS masih mendapat dukungan dari tingginya imbal hasil obligasi pemerintah AS serta kekhawatiran terhadap kondisi fiskal di sejumlah negara Eropa.

Harga minyak yang masih tinggi juga ikut menopang dolar AS. Kenaikan harga energi membuat investor mengurangi kepemilikan pada mata uang negara-negara yang sangat bergantung pada impor energi, termasuk euro dan yen.

Euro berada di jalur pelemahan terhadap dolar AS selama empat pekan berturut-turut, periode penurunan terpanjang sejak Mei 2025.

Sementara itu, dolar AS juga berada di jalur penguatan terhadap yen selama tiga pekan berturut-turut.

Tekanan di Eropa semakin besar karena kekhawatiran terhadap kondisi fiskal Prancis dan Italia. Imbal hasil obligasi pemerintah Prancis tenor 10 tahun bahkan sempat melonjak ke level tertinggi sejak 2002.

Selisih imbal hasil obligasi pemerintah Prancis dan Jerman juga melebar hingga lebih dari 150 basis poin, terbesar sejak akhir 2011.

Kombinasi imbal hasil obligasi AS yang tinggi, harga minyak yang masih mahal, serta kekhawatiran fiskal di Eropa membuat dolar AS tetap diminati oleh pelaku pasar.

Ekonom: Belanja Negara 2027 Harus Dorong Produktivitas Ekonomi

Sabtu, 3 Oktober 2026 13:39 WIB

Akmalal Hamdhi

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/3031091/ekonomi-belanja-negara-2027-harus-dorong-produktivitas-ekonomi>

Jakarta, Beritasatu.com - Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai belanja negara pada 2027 perlu diarahkan pada program yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan menurunkan biaya ekonomi. Hal ini penting agar belanja pemerintah tidak hanya terserap dalam anggaran, tetapi memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pada APBN 2027, pemerintah menetapkan belanja negara sebesar Rp 4.106,3 triliun dengan target pertumbuhan ekonomi 6%. Menurut Syafruddin, efektivitas belanja menjadi kunci agar kebijakan fiskal dapat memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi.

“Belanja 2027 harus diarahkan ke pos yang memperbesar kapasitas produksi dan menurunkan biaya ekonomi,” kata Syafruddin kepada Beritasatu.com, Jumat (2/10/2026).

Dia menjelaskan, salah satu prioritas belanja adalah pembangunan infrastruktur yang dapat mengatasi hambatan atau bottleneck ekonomi. Infrastruktur tersebut mencakup logistik, irigasi, listrik, konektivitas, perumahan dasar, hingga ketahanan bencana.

Selain infrastruktur, pemerintah perlu memperkuat modal manusia melalui belanja pendidikan, kesehatan, serta peningkatan keterampilan yang terhubung dengan kebutuhan industri.

“Prioritas kedua ialah modal manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keterampilan yang terhubung dengan kebutuhan industri,” ujarnya.

Syafruddin juga menilai program pangan, energi, dan hilirisasi perlu diarahkan pada pencapaian hasil yang terukur. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran, tetapi dari dampaknya terhadap produktivitas dan perekonomian.

“Prioritas ketiga ialah program pangan, energi, dan hilirisasi yang memiliki indikator hasil terukur, bukan hanya target penyerapan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Syafruddin menyoroti alokasi transfer ke daerah yang mencapai Rp 735 triliun. Menurut dia, transfer tersebut perlu dikaitkan lebih kuat dengan kualitas layanan publik dan peningkatan produktivitas di daerah.

Dia menilai pemerintah perlu memperhatikan trade off dalam pengalokasian anggaran. Belanja yang tidak tepat sasaran, proyek yang berulang, maupun belanja administratif berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk investasi yang lebih produktif.

“Setiap rupiah yang masuk ke subsidi tidak tepat sasaran, proyek berulang, atau belanja administratif mengurangi ruang bagi investasi produktif,” tuturnya.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu menerapkan evaluasi berbasis hasil atau outcome, termasuk menghentikan program dengan dampak ekonomi yang rendah. Selain itu, proyek yang telah siap dijalankan perlu dipercepat sejak awal tahun agar manfaat belanja negara dapat segera dirasakan masyarakat dan dunia usaha.

“Belanja efektif bukan belanja yang paling besar, tetapi belanja yang paling cepat mengubah produktivitas, investasi, dan pendapatan masyarakat,” pungkas Syafruddin.

Belanja Negara Rp 4.000 Triliun Tak Jamin Ekonomi Tumbuh 6 Persen

Sabtu, 3 Oktober 2026 07:02 WIB

Akmalal Hamdhi

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/3031007/belanja-negara-rp-4000-triliun-tak-jamin-ekonomi-tumbuh-6-persen>

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah merancang belanja negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2027 hingga menembus Rp 4.000 triliun. Angka tersebut menjadi rekor tertinggi dalam sejarah pengelolaan keuangan negara Indonesia.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai belanja negara yang mencapai Rp 4.106,26 triliun pada 2027 tidak serta-merta menjamin pertumbuhan ekonomi mencapai target 6%. Efektivitas dan komposisi belanja menjadi faktor penting untuk memastikan anggaran tersebut mampu mendorong aktivitas ekonomi.

Menurutnya, besarnya anggaran negara perlu dilihat dari seberapa besar dampaknya terhadap perekonomian, bukan hanya dari nominal belanja yang meningkat.

“Belanja sebesar Rp 4.106,26 triliun memang merupakan angka tertinggi, tetapi besarnya anggaran tidak otomatis menunjukkan kuatnya dampak terhadap ekonomi,” ujar Yusuf kepada Beritasatu.com, Jumat (2/10/2026).

Menurut Yusuf, target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027 tergolong ambisius. Pasalnya, perekonomian Indonesia pada kuartal II 2026 tumbuh 5,29%, melambat dibandingkan pertumbuhan 5,61% pada kuartal sebelumnya.

Di sisi lain, konsumsi rumah tangga pada kuartal II 2026 hanya tumbuh 5,06%. Untuk mencapai pertumbuhan 6%, Indonesia membutuhkan percepatan investasi dan konsumsi yang hingga kini dinilai belum cukup kuat.

Yusuf juga menilai dorongan fiskal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pada 2027 relatif terbatas. Hal ini tercermin dari target defisit yang turun dari 2,68% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2026 menjadi 2,4% pada 2027.

Dengan kondisi tersebut, pencapaian pertumbuhan ekonomi 6% tidak dapat hanya mengandalkan belanja pemerintah, tetapi membutuhkan percepatan investasi dan aktivitas sektor swasta. Dalam posisi ini, APBN lebih berperan mengarahkan pertumbuhan melalui belanja produktif daripada menjadi sumber utama akselerasi ekonomi.

Karena itu, menurut Yusuf, besarnya belanja negara perlu diikuti kualitas dan ketepatan alokasi anggaran. Sebagian anggaran yang terserap untuk pembayaran bunga utang dan subsidi memiliki daya ungkit yang berbeda dibandingkan belanja yang secara langsung meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan menambah pendapatan masyarakat.

“Anggaran yang diarahkan secara tepat pada kegiatan produktif akan memberikan dampak lebih kuat terhadap pertumbuhan riil dibandingkan anggaran besar yang sebagian besar terserap untuk bunga utang, subsidi harga, dan belanja dengan daya ungkit rendah,” jelasnya.

Yusuf mendorong pemerintah mengarahkan belanja 2027 pada program yang mampu menghasilkan keluaran dan menyerap tenaga kerja secara lebih cepat. Beberapa di antaranya pembangunan irigasi, jalan menuju sentra produksi, perumahan rakyat, serta infrastruktur logistik pangan.

Menurutnya, program prioritas berskala besar juga perlu dirancang agar manfaat belanjanya mengalir ke sektor riil, termasuk petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dengan demikian, belanja pemerintah tidak hanya meningkatkan penyerapan anggaran, tetapi juga memperkuat rantai pasok domestik dan mendorong aktivitas ekonomi di daerah.

Selain efektivitas belanja, Yusuf menilai asumsi makro dalam APBN 2027 juga perlu menjadi perhatian. Pergerakan nilai tukar rupiah dan harga energi dunia yang berada di atas asumsi pemerintah dapat meningkatkan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi.

Risiko tersebut menjadi lebih besar apabila penerimaan negara tidak mencapai target akibat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari asumsi. Dalam kondisi tersebut, pemerintah berpotensi menghadapi tekanan fiskal dari sisi penerimaan sekaligus meningkatnya kebutuhan belanja.

“Pada akhirnya, kualitas dan komposisi belanja lebih menentukan daripada besarnya APBN,” pungkas Yusuf.

Menkeu Suahasil Tegaskan Fokus pada Anggaran, Jaga Defisit APBN

Sabtu, 3 Oktober 2026 14:30 WIB

Grace Sihombing dan Haslinda Amin

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/123530/menkeu-suahasil-tegaskan-fokus-pada-anggaran-jaga-defisit-apbn/2>

Bloomberg, Menteri Keuangan (Menkeu) baru RI, Suahasil Nazara, mengisyaratkan akan tetap berfokus pada kewenangannya dan membiarkan bank sentral serta badan pengelola dana kekayaan negara (sovereign wealth fund/SWF) Danantara menjalankan mandat masing-masing. Langkah ini menjadi upaya untuk memulihkan kepercayaan investor terhadap kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang memiliki cakupan luas.

Dalam wawancara pertamanya dengan media asing sejak menjabat bulan lalu, Suahasil mengatakan akan berfokus pada pengelolaan anggaran negara dan menjaga defisit tetap berada di bawah batas legal sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB). Menurut dia, angka tersebut merupakan "simbol dari seberapa disiplin kita".

Ia mengisyaratkan perubahan arah dari rencana pendahulunya yang ingin menggunakan dividen Danantara untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Suahasil mengatakan dividen tersebut tidak dimasukkan dalam APBN 2026 maupun 2027. Ia juga enggan berkomentar mengenai kemungkinan langkah Bank Indonesia (BI) terkait suku bunga berikutnya, meskipun berjanji menurunkan biaya pinjaman pemerintah di tengah aksi jual obligasi global.

"Kami memahami mandat masing-masing. Kami bersedia berkoordinasi dan berkomunikasi," kata Suahasil kepada Haslinda Amin dari Bloomberg Television pada Jumat (2/10).

Sejauh mana Suahasil memiliki keleluasaan untuk menentukan arah kebijakannya sendiri masih belum jelas. Hampir dua tahun setelah menjabat, Prabowo telah memusatkan pengambilan keputusan ekonomi pada prioritasnya, yang sebagian besar sudah tertuang dalam APBN 2027. Program makan bergizi gratis (MBG), pengembangan koperasi desa, dan belanja terkait pertahanan secara keseluruhan mencakup sekitar 15% dari rencana belanja negara. Suahasil mengakui bahwa kebijakan pemerintah harus tetap berada dalam "visi besar" presiden.

Kerangka kebijakan yang disampaikan Suahasil sangat berbeda dengan pendekatan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya beberapa kali mendesak BI dan Danantara untuk turut membantu pengelolaan anggaran serta mendorong pertumbuhan ekonomi terbesar di Asia Tenggara tersebut.

Purbaya dicopot dari jabatannya bulan lalu setelah baru setahun menjabat. Ia sebelumnya berupaya memperoleh dividen hampir US\$7 miliar dari Danantara untuk menambah penerimaan negara. Langkah tersebut dilakukan ketika APBN menghadapi tekanan akibat pembiayaan program-program prioritas Prabowo dan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang lebih besar dari perkiraan.

Purbaya juga secara terbuka mengkritik bank sentral karena membiarkan rupiah melemah hingga mencapai rekor terendah. Ia turut menyalahkan kenaikan suku bunga BI yang dinilai memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Suahasil menunjukkan sikap berbeda pada Jumat ketika ditanya mengenai rupiah yang diperdagangkan mendekati level psikologis Rp18.000 per dolar AS. "Saya merasa tenang karena Bank Indonesia telah melakukan apa yang bisa mereka lakukan," ujarnya. Ketika ditanya lebih lanjut apakah bank sentral perlu mempertimbangkan kenaikan suku bunga, ia mengatakan tidak membahas "angka-angka spesifik" dengan BI.

Ia menambahkan bahwa pemerintah "nyaman dengan setiap langkah" yang diambil BI selama masih berada dalam koridor mandatnya.

Suahasil mengatakan dirinya bertemu dengan Gubernur BI yang baru, Destry Damayanti, tidak lama setelah mulai menjabat untuk menunjukkan koordinasi antara kedua lembaga. Kedua pejabat tinggi pembuat kebijakan tersebut juga telah menggelar konferensi pers bersama yang terbilang jarang dilakukan untuk memaparkan rencana kebijakan masing-masing.

Kini, kedua lembaga menghadapi tekanan global yang sama, tetapi dari sisi yang berbeda. Kementerian Keuangan harus menjaga kredibilitas fiskal dan menekan biaya pinjaman, sementara BI berupaya mengendalikan tekanan terhadap rupiah tanpa mengabaikan pertumbuhan ekonomi.

Suahasil juga menepis kemungkinan menghidupkan kembali pembelian kembali obligasi harian yang dimulai Purbaya pada Mei untuk menjaga imbal hasil tetap stabil. Menurut dia, kondisi pasar saat ini belum mengharuskan pemerintah mengaktifkan kerangka stabilisasi obligasi. Ia menyebut selisih imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia dan AS bertenor 10 tahun, yang berada di kisaran 220-225 basis poin, sebagai kondisi yang "sangat sehat".

Indonesia masih memiliki ruang untuk menerbitkan obligasi global pada kuartal ini, kata Suahasil, seiring pemerintah menyusun program pembiayaan untuk sisa tahun ini dan 2027. Indonesia terakhir kali menerbitkan obligasi di pasar internasional pada Mei, ketika menjual surat utang berdenominasi dolar AS dan euro senilai US\$3,45 miliar.

"Pertanyaan besar saya sekarang adalah perekonomian global," kata Suahasil. Ia menyoroti ketegangan geopolitik dan dampaknya terhadap komoditas yang diimpor Indonesia, seperti minyak dan gas, serta komoditas ekspor, termasuk nikel dan batu bara.

Dua Pilar

Suahasil juga menggambarkan APBN dan Danantara, lembaga pengelola dana kekayaan negara yang dibentuk Prabowo tahun lalu, sebagai "dua tangan" pemerintahan yang bekerja secara terpisah, tetapi tetap berkoordinasi erat.

Ia membela penggunaan Danantara oleh pemerintah sebagai sarana investasi yang berjalan berdampingan dengan APBN. Namun, ia tidak secara langsung menanggapi kekhawatiran bahwa keberadaan lembaga tersebut dapat menimbulkan risiko fiskal di luar angka defisit anggaran yang

diumumkan. Kekhawatiran itu sebelumnya disoroti Fitch Ratings dan Moody's Ratings ketika kedua lembaga pemeringkat tersebut menurunkan prospek peringkat kredit Indonesia menjadi negatif pada awal tahun ini.

"Danantara adalah entitas berdaulat," kata Suahasil. "Komunikasi yang erat dengan Danantara akan membuka berbagai pilihan, gagasan baru, dan cara berpikir baru, tetapi semuanya harus tetap berada dalam koridor aturan sektor keuangan yang tepat."

Ia menambahkan bahwa Kementerian Keuangan telah memutuskan untuk tidak mengambil saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Keputusan tersebut disampaikan setelah Direktur Utama Danantara mengatakan bahwa konsorsium sejumlah lembaga pemerintah, termasuk Danantara dan Kementerian Keuangan, dapat bersama-sama mengambil kepemilikan saham hingga 40%.

Pemerintah di berbagai negara Asia harus meningkatkan belanja tahun ini melalui subsidi bahan bakar dan berbagai langkah stimulus lainnya untuk meredam dampak ekonomi akibat perang Iran. Namun, ruang fiskal negara-negara tersebut semakin menyempit karena belum ada kepastian mengenai berakhirnya konflik. Harga minyak, pangan, dan pupuk diperkirakan tetap tinggi hingga 2027.

Defisit APBN Indonesia diperkirakan mencapai 2,85% dari PDB tahun ini, sedikit di bawah batas legal sebesar 3%. Pemerintah memperkirakan defisit akan menyusut menjadi 2,4% pada tahun depan. Namun, proyeksi tersebut bergantung pada asumsi harga minyak mentah rata-rata US\$75 per barel dan nilai tukar rupiah yang menguat hingga rata-rata Rp17.500 per dolar AS. Saat ini, harga minyak telah melampaui US\$100 per barel, sementara nilai tukar rupiah mendekati level Rp18.000 per dolar AS.

Wawancara pada Jumat tersebut berlangsung di sebuah gedung di kompleks Kementerian Keuangan yang dinamai berdasarkan nama menteri keuangan pertama Indonesia, A.A. Maramis. Lokasi tersebut dipilih sendiri oleh Suahasil. Ia mengatakan kementerian telah merevitalisasi gedung yang sebelumnya "mati" selama pandemi, di bawah arahan mantan atasannya, Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani diberhentikan tahun lalu untuk digantikan oleh Purbaya.

Tax Ratio Ditargetkan Tembus 9,26% di 2027, Bagaimana Mencapainya?

Sabtu, 3 Oktober 2026 11:48 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Khomarul Hidayat

<https://nasional.kontan.co.id/news/tax-ratio-ditargetkan-tembus-926-di-2027-bagaimana-mencapainya>

KONTAN.CO.ID - BOGOR. Pemerintah memasang target kenaikan rasio pajak (tax ratio) menjadi sebesar 9,26% pada tahun 2027. Bila kelak tercapai, angka tax ratio tersebut merupakan yang tertinggi dalam satu dekade terakhir.

Menurut Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, kenaikan target tax ratio tersebut sejalan dengan peningkatan penerimaan pajak. Jurus menaikkan penerimaan pajak ini dilakukan melalui penguatan administrasi perpajakan, perluasan basis pajak, serta optimalisasi teknologi.

"Jadi rasio pajak dari sisi indikator kinerja perpajakan di tahun 2027 itu ditargetkan di angka 9,26%. Ini Alhamdulillah bisa kembali berada di angka di atas 9%," ujar Bimo dalam Media Gathering, Kamis (1/10/2026).

Menurut Bimo, dalam satu dekade terakhir Indonesia belum pernah mencatat tax ratio di atas 9%. Adapun level tertinggi sebelumnya berada di angka 8,9% pada 2016.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kemudian kembali menargetkan tax ratio di atas 9% pada outlook 2026 dan APBN 2027. Target tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas administrasi perpajakan sekaligus meningkatkan basis penerimaan negara.

Tax Buoyancy

Bimo menjelaskan, peningkatan tax ratio tersebut juga berjalan beriringan dengan perbaikan tax buoyancy. Dalam outlook 2026, tax buoyancy diproyeksikan mencapai 2,49, sedangkan dalam APBN 2027 berada di level 1,41.

Tax buoyancy menggambarkan respons penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan angka 1,41 pada 2027, setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1% diproyeksikan diikuti kenaikan penerimaan pajak sebesar 1,41%.

"Peningkatan tax buoyancy di 2026 dan 2027 ini menunjukkan bahwa proyeksi peningkatan pajak ini lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Bimo mengatakan, peningkatan kinerja perpajakan tersebut akan didukung oleh penguatan administrasi perpajakan, perluasan basis pajak, dan implementasi Coretax yang semakin optimal.

DJP juga akan memanfaatkan data dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Coretax akan terus dikembangkan agar semakin sederhana, mudah digunakan, serta mampu mengintegrasikan data eksternal dan internal.

"Ke depan peningkatan rasio pajak dan juga tax buoyancy yang didukung dengan penguatan administrasi perpajakan, perluasan basis pajak serta implementasi Coretax yang semakin optimal ini akan semakin meningkatkan efektivitas pemungutan pajak," kata Bimo.

Perluas Basis Pajak

Selain penguatan sistem administrasi, DJP menyiapkan sejumlah strategi untuk memperluas basis pajak. Salah satunya melalui pemanfaatan data dan teknologi terhadap aktivitas ekonomi digital, ekonomi bayangan, serta sektor informal.

DJP juga akan memperkuat pengawasan terhadap transaksi digital dan e-commerce, termasuk penerapan PPh Pasal 22 e-commerce sebesar 0,5%.

Di sisi lain, mekanisme surat pernyataan bebas akan terus disederhanakan untuk melindungi pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp 500 juta per tahun.

Bimo menambahkan, DJP juga akan meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak grup, transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, kasus under invoicing, transfer pricing, serta wajib pajak orang pribadi prominen.

Harga Pangan Sepekan: Cabai Melonjak, Beras Cenderung Stabil

Sabtu, 3 Oktober 2026 09:30 WIB

Muhammad Fikri

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/123519/harga-pangan-sepekan-cabai-melonjak-beras-cenderung-stabil>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Harga sejumlah komoditas pangan strategis mengalami perubahan dalam sepekan terakhir hingga 2 Oktober 2026. Kenaikan paling tinggi terjadi pada komoditas cabai, sementara sejumlah harga beras dan minyak goreng relatif stabil.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, Sabtu (3/10/2026), harga cabai merah besar tercatat Rp63.150 per kilogram (kg), naik 10,02% atau Rp5.750 dibandingkan pekan sebelumnya.

Harga cabai merah keriting juga meningkat 7,87% atau Rp5.450 menjadi Rp74.700/kg. Kemudian harga cabai rawit hijau naik 3,68% atau Rp2.500 menjadi Rp70.450/kg.

Sementara itu, harga cabai rawit merah tercatat Rp100.700/kg. Harga komoditas tersebut naik 4,41% atau Rp4.250 dalam sepekan terakhir.

Berbeda dengan cabai, harga bawang merah ukuran sedang turun tipis 0,13% atau Rp50 menjadi Rp37.400/kg. Sedangkan bawang putih ukuran sedang naik 0,13% atau Rp50 menjadi Rp39.050/kg.

Pada komoditas beras, harga beras kualitas bawah I tercatat Rp14.900/kg, sedangkan beras kualitas bawah II Rp14.700/kg. Keduanya tercatat tidak mengalami perubahan dalam sepekan.

Harga beras kualitas medium I naik 0,3% atau Rp50 menjadi Rp16.650/kg. Sementara beras kualitas medium II berada di level Rp16.400/kg dan tidak mengalami perubahan.

Adapun harga beras kualitas super I tercatat Rp17.950/kg, sedangkan beras kualitas super II Rp17.350/kg. Kedua harga tersebut juga tercatat tetap.

Untuk komoditas daging, harga daging ayam ras segar turun 0,24% atau Rp100 menjadi Rp41.950/kg. Sebaliknya, daging sapi kualitas I naik 0,1% atau Rp150 menjadi Rp152.700/kg.

Harga daging sapi kualitas II juga meningkat 0,52% atau Rp750 menjadi Rp144.000/kg.

Sementara harga gula pasir kualitas premium naik 0,25% atau Rp50 menjadi Rp20.400/kg. Adapun gula pasir lokal berada di level Rp19.150/kg dan tercatat tetap.

Untuk minyak goreng curah, harga turun 0,49% atau Rp100 menjadi Rp20.300/kg. Harga minyak goreng kemasan bermerek I tercatat Rp24.350/kg dan tidak berubah.

Sedangkan minyak goreng kemasan bermerek II naik tipis 0,21% atau Rp50 menjadi Rp23.550/kg.

Harga cabai di Purwokerto kembali naik

Sabtu, 3 Oktober 2026 13:16 WIB

Pewarta: Sumarwoto, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/647294/harga-cabai-di-purwokerto-kembali-naik>

Purwokerto (ANTARA) - Harga beberapa jenis cabai di Pasar Manis, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, kembali mengalami kenaikan akibat minimnya pasokan dari petani seiring dengan regenerasi tanaman dan dampak kekeringan pada musim kemarau 2026.

Dari pantauan di Pasar Manis, Purwokerto, Sabtu, kenaikan signifikan terjadi pada cabai rawit merah karena besarnya mencapai Rp20.000 per kilogram, yakni dari Rp70.000/kg menjadi Rp90.000/kg.

Sementara harga cabai merah besar naik dari Rp65.000/kg menjadi Rp70.000/kg dan cabai merah keriting naik dari Rp65.000/kg menjadi Rp75.000/kg, sedangkan harga cabai rawit hijau masih bertahan di harga Rp70.000/kg dalam satu pekan terakhir.

Salah seorang pedagang sayuran di Pasar Manis, Anjar mengatakan kenaikan harga beberapa jenis cabai terjadi karena minimnya pasokan dari petani.

“Informasinya saat ini petani hanya mengandalkan panen dari tanaman lama meskipun produksinya menurun karena tanaman baru belum berbuah, sehingga pasokan berkurang,” katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) Kabupaten Banyumas Gatot Eko Purwadi mengakui kenaikan harga beberapa jenis cabai dipengaruhi penurunan pasokan dari petani.

“Kami akan terus memantau perkembangan harga cabai di pasaran, semoga pasokan bisa kembali stabil seiring dengan adanya tanaman baru yang diharapkan segera berbuah karena saat sekarang petani sedang regenerasi tanaman,” katanya.

Saat dihubungi dari Purwokerto, petani pegiat Asosiasi Champion Cabai Indonesia (ACCI) Kabupaten Banjarnegara Teguh Suprpto mengakui saat sekarang tanaman cabai sedang memasuki masa transisi atau regenerasi dari tanaman lama ke tanaman baru.

Dalam hal ini, kata dia, produksi cabai tanaman lama sudah menurun, sedangkan tanaman baru belum banyak yang berbuah sehingga berdampak pada ketersediaan pasokan.

Di sisi lain, lanjut dia, musim kemarau yang berkepanjangan berdampak pada ketersediaan air di sentra tanaman cabai sehingga kondisi tanaman lama yang seharusnya masih bisa memproduksi menjadi kering dan produksinya berkurang.

Terkait dengan harga cabai di tingkat petani, dia mengatakan berdasarkan data hari Sabtu (3/10), harga cabai rawit merah di wilayah atas Banjarnegara naik dari Rp63.000/kg menjadi Rp65.000/kg, cabai merah keriting naik dari Rp40.000/kg menjadi Rp42.000/kg, dan cabai rawit hijau naik dari Rp28.000/kg menjadi Rp30.000/kg.

“Kalau di wilayah atas Banjarnegara, cabai merah besar banyak yang dipetik saat masih hijau, harganya sekitar Rp30.000/kg. Kalau di wilayah bawah Banjarnegara, belum terinfo,” katanya.

Ia mengatakan petani sayuran di wilayah atas Banjarnegara saat sekarang juga mengalami kendala karena banyak tanaman tomat yang roboh dan diduga karena faktor keberatan buah.

Menurut dia, harga tomat di tingkat petani saat sekarang berkisar Rp5.000-Rp6.000/kg setelah naik dari kisaran Rp500/kg.

“Tomat roboh, tidak masalah, sebenarnya nggak dibetulkan pun aman buahnya. Yang ambrol ada tapi nggak banyak, ke harga nggak berdampak terkait tomat roboh, cuma untuk perawatan yang susah untuk jalan,” katanya.

Teguh mengatakan saat sekarang petani di wilayah atas Banjarnegara sedang menyiapkan tanaman baru, baik cabai maupun tomat, untuk memenuhi kebutuhan saat Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

MES mendorong ekonomi syariah sebagai kekuatan baru di Jateng

Sabtu, 3 Oktober 2026 13:15 WIB

Pewarta: Zuhdiar Laeis, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/647293/mes-mendorong-ekonomi-syariah-sebagai-kekuatan-baru-di-jateng>

Semarang (ANTARA) - Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Tengah terus mendorong ekonomi dan keuangan syariah sebagai kekuatan baru di Jateng, sekaligus mendorong pelaku usaha, pesantren, UMKM hingga industri halal agar naik kelas.

Ketua Umum MES Jateng Rezza Arief Budy Artha, usai pelantikan sebanyak 226 pengurus MES Jateng periode 2026–2030 di Semarang, Jumat, mengatakan ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kekuatan penggerak perekonomian daerah.

Menurut dia, pelantikan bukan sekadar agenda organisasi, melainkan awal dari kerja bersama untuk menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Karena itu, kata dia, MES Jateng akan mengedepankan kolaborasi dan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

"Kami ingin MES Jateng tidak hanya hadir sebagai organisasi, tetapi menjadi rumah bersama bagi seluruh pihak yang ingin membangun ekonomi yang berkeadilan, produktif dan memberikan manfaat," katanya.

Ia menjelaskan bahwa MES Jateng akan membangun kolaborasi dengan pendekatan pentahelix, yakni melibatkan unsur dunia usaha, pemerintah, akademisi, komunitas dan ulama, serta media.

Kolaborasi tersebut dinilai penting karena pengembangan ekonomi syariah tidak dapat berjalan sendiri.

Dibutuhkan sinergi antara kebijakan pemerintah, inovasi dunia usaha, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan masyarakat dan penyebarluasan informasi kepada publik.

"Ekonomi syariah bukan hanya tentang transaksi keuangan. Di dalamnya ada pemberdayaan, keadilan, kemandirian, peningkatan kualitas SDM dan bagaimana masyarakat bisa memiliki kesempatan untuk tumbuh," katanya.

Sejumlah program strategis telah disiapkan MES Jateng, di antaranya penguatan koperasi dan UMKM, ekonomi pesantren, industri halal, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta penguatan dana sosial Islam.

Salah satu agenda yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan Koperasi Ekspor yang diarahkan untuk membuka akses produk-produk Jateng ke pasar internasional.

Program tersebut ditargetkan mulai mendorong ekspor ke kawasan Timur Tengah pada November 2026.

Bagi Rezza, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mengubah paradigma bahwa pelaku UMKM tidak selamanya hanya menjadi pemain di pasar lokal.

"Produk-produk kita memiliki potensi untuk menembus pasar yang lebih luas. Tantangannya adalah bagaimana kualitas produk, legalitas, sertifikasi halal, kemasan, kapasitas produksi dan akses pasarnya kita siapkan bersama," katanya.

Ekonomi Kudus Tumbuh 7,64 Persen, Industri Jadi Penopang Utama

Sabtu, 3 Oktober 2026 11:00 WIB

Penulis: Rifqi Gozali, Editor: Muh Radlis

<https://jateng.tribunnews.com/muria/1268312/ekonomi-kudus-tumbuh-764-persen-industri-jadi-penopang-utama>

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Perekonomian Kabupaten Kudus mengalami pertumbuhan 7,64 persen pada triwulan II 2026.

Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi 0,11 persen.

“Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus pada Triwulan II 2026 mencapai 7,64 persen secara year-on-year. Seluruh lapangan usaha juga tumbuh positif pada periode ini,” ujar Ketua Badan Pusat Statistik (BPS) Kudus, Eko Suharto.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus ini ditopang sejumlah sektor. Mulai dari industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi dengan kontribusi terbesar dalam perekonomian Kudus. Kemudian pertumbuhan tertinggi tercatat pada sektor pertanian, pengadaan listrik dan gas, dan sektor informasi dan komunikasi.

Selain itu, kata Eko, industri pengolahan masih menjadi sektor paling dominan dalam kontribusi perekonomian di Kudus. Sumbangsih sektor industri pengolahan dalam perekonomian Kudus mencapai 75,36 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB). Dan pada saat ini sektor ini mengalami pertumbuhan 7,34 persen secara year on year.

Kemudian dari sisi pengeluaran, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 11,77 persen. Sementara itu, konsumsi pemerintah menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi, yakni 22,70 persen secara year on year.

Dari sisi inflasi, Kabupaten Kudus pada September 2026 tercatat sebesar 0,32 persen secara month-to-month (m-to-m) dibandingkan Agustus 2026. Inflasi tahun kalender mencapai 2,06 persen, sedangkan inflasi tahun ke tahun tercatat 3,16 persen.

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi bulanan dengan inflasi sebesar 0,95 persen dan andil 0,27 persen. Komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar antara lain beras, cabai rawit, telur ayam ras, daging ayam ras, dan cabai merah.

Kepala Dinas Perhubungan Kudus, Mundir, mengatakan, pihaknya berupaya mendukung kelancaran distribusi barang di wilayah Kabupaten Kudus. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus menyampaikan bahwa pihaknya terus mengawal kelancaran mobilitas dan distribusi barang agar aktivitas perekonomian masyarakat dapat berjalan dengan baik.

“Kelancaran distribusi barang menjadi salah satu hal yang terus kami kawal. Koordinasi dengan berbagai pihak dilakukan agar mobilitas barang dan aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar,” kata Mundir.

Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Kudus terus mencermati perkembangan ekonomi berikut harga sebagai bagian dari upaya menjaga aktivitas perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi positif yang saat ini ada, diharapkan bisa diikuti dengan penguatan produksi, konsumsi masyarakat, dan investasi. (Goz)

Menkeu Australia ke Jepang, Bahas Peluang Investasi dan Pembiayaan Strategis

Minggu, 4 Oktober 2026 09:00 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Tri Sulistiowati

<https://internasional.kontan.co.id/news/menkeu-australia-ke-jepang-bahas-peluang-investasi-dan-pembiayaan-strategis>

KONTAN.CO.ID - SYDNEY. Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers mengatakan dia akan melakukan perjalanan ke Jepang pada Minggu (4/10) untuk melakukan pembicaraan dengan mitranya dari Jepang dalam forum tahunan pertama yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan bilateral.

Tujuan utama Dialog Tingkat Menteri Keuangan Australia-Jepang yang pertama adalah untuk membahas “peluang investasi, pembiayaan strategis dan keterlibatan internasional secara lebih luas”, kata Chalmers dalam sebuah pernyataan.

Dia akan berupaya mencapai kesepakatan dengan Menteri Keuangan Jepang, Satsuki Katayama, untuk meningkatkan kerja sama investasi, kata pernyataan itu.

Jepang adalah investor asing terbesar keempat di Australia pada tahun 2024, dengan total investasi senilai A\$282,9 miliar (US\$196,7 miliar), menurut pemerintah.

“Kedua negara menghadapi banyak tantangan serupa sebagai akibat dari ketidakpastian global, baik itu harga energi yang lebih tinggi yang mendorong inflasi atau imbal hasil obligasi yang lebih tinggi yang memberi tekanan pada anggaran kita”, tambah bendahara tersebut.

Selama berada di Jepang, Chalmers mengatakan ia juga akan bertemu dengan lebih dari 30 CEO dan pemimpin bisnis untuk menunjukkan Australia sebagai tujuan investasi utama.

Pasar Tenaga Kerja AS Landai pada September 2026, Angka Pengangguran Naik

Minggu, 4 Oktober 2026 04:03 WIB

Im Fathimah Timorria

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20261004/620/2009461/pasar-tenaga-kerja-as-landai-pada-september-2026-angka-pengangguran-naik>

Bisnis.com, JAKARTA — Perekonomian Amerika Serikat (AS) hanya menambah 29.000 pekerjaan pada September 2026, jauh di bawah ekspektasi pasar, sementara tingkat pengangguran naik menjadi 4,2%.

Laporan terbaru Biro Statistik Tenaga Kerja AS (Bureau of Labor Statistics/BLS) memperlihatkan bahwa nonfarm payrolls naik 29.000 secara seasonally adjusted pada September. Ekonom yang disurvei Dow Jones sebelumnya memperkirakan penambahan 84.000 pekerjaan dengan tingkat pengangguran 4,1% mengutip CNBC.

Data tersebut menunjukkan perlambatan pasar tenaga kerja AS setelah pertumbuhan pekerjaan pada Agustus juga direvisi turun menjadi 133.000. Sementara itu, data Juli yang sebelumnya menunjukkan penambahan 21.000 pekerjaan direvisi menjadi penurunan 10.000 pekerjaan.

Dengan revisi tersebut, jumlah pekerjaan pada Juli dan Agustus secara gabungan 60.000 lebih rendah dibandingkan laporan sebelumnya. BLS mencatat rata-rata penambahan pekerjaan dalam 12 bulan terakhir mencapai 45.000 per bulan.

Pasar keuangan langsung merespons laporan tersebut. Data pekerjaan yang lebih lemah dari perkiraan dipandang meningkatkan ekspektasi bahwa Federal Reserve (The Fed) akan menahan suku bunga pada pertemuan Oktober.

Kontrak berjangka saham AS menguat setelah laporan dirilis, sementara imbal hasil obligasi pemerintah AS (Treasury yield) turun.

Ekonom AS Jefferies Thomas Simons mengatakan data tersebut memperkuat alasan bagi The Fed untuk tidak menaikkan suku bunga pada Oktober.

“Bagi The Fed, angka ini seharusnya menjadi penegas terakhir untuk tidak menaikkan suku bunga pada Oktober,” kata Simons dalam catatannya.

“Data penggajian melonjak pada Agustus, dan kami memperkirakan momentum tersebut akan berlanjut pada bulan ini, mengingat klaim pengangguran berada pada level yang secara historis rendah dalam beberapa pekan terakhir. Namun, kini tampaknya angka Agustus tidak lebih dari sekadar pemulihan dari lemahnya perekrutan pada Juni dan Juli,” lanjutnya.

Tingkat Pengangguran Naik

Selain jumlah pekerjaan, perkembangan tingkat pengangguran menjadi perhatian The Fed dalam menilai kondisi pasar tenaga kerja.

Data survei rumah tangga yang digunakan untuk menghitung tingkat pengangguran menunjukkan perkembangan yang lebih kuat dibandingkan survei perusahaan yang menjadi dasar perhitungan nonfarm payrolls.

Jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan survei rumah tangga meningkat 406.000 pada September. Angkatan kerja juga bertambah 485.000, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja naik 0,2 poin persentase menjadi 61,8%, level tertinggi sejak Mei.

BLS mencatat tingkat pengangguran berada pada kisaran sempit 4,1%–4,3% sejak Maret 2026.

Ukuran alternatif tingkat pengangguran yang mencakup pekerja yang tidak masuk angkatan kerja karena berkecil hati serta pekerja paruh waktu yang ingin bekerja lebih lama turun menjadi 7,6%, level terendah sejak Januari 2025.

Di sisi lain, pasar tenaga kerja AS masih menunjukkan pola perekrutan yang terbatas. Klaim pengangguran mingguan tetap relatif rendah, sementara tingkat pemutusan hubungan kerja juga berada pada level rendah.

Kondisi tersebut menjadi pertimbangan bagi pejabat The Fed dalam menentukan langkah suku bunga berikutnya. Pada September, bank sentral AS menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin.

Namun, inflasi masih menjadi perhatian utama The Fed. Inflasi inti berdasarkan indikator yang menjadi acuan bank sentral berada pada laju tahunan 3%, masih di atas target inflasi The Fed sebesar 2%.

Pertumbuhan upah juga menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Rata-rata upah per jam pekerja sektor swasta meningkat 0,1% pada September menjadi US\$37,81.

Secara tahunan, rata-rata upah per jam meningkat 3%, menjadi pertumbuhan terendah sejak Mei 2021. BLS mencatat kenaikan tersebut lebih rendah dari ekspektasi pasar sebesar 0,3% secara bulanan dan 3,1% secara tahunan.

Rata-rata jam kerja per pekan tidak berubah pada 34,4 jam. Perkembangan tersebut menunjukkan perlambatan pertumbuhan upah sekaligus pelemahan penambahan pekerjaan, meskipun tingkat pengangguran masih berada di kisaran 4%.

Data pasar tenaga kerja September menjadi salah satu indikator yang akan diperhatikan The Fed dalam menentukan kebijakan suku bunga pada pertemuan berikutnya yang dijadwalkan berlangsung pada 27–28 Oktober 2026.

Dilanda Krisis, Negara Ini Utang IMF Rp 33 T-Mulai Setop Subsidi BBM

Minggu, 04 Oktober 2026 10:30 WIB

Andi Hidayat

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8691465/dilanda-krisis-negara-ini-utang-imf-rp-33-t-mulai-setop-subsidi-bbm>

Jakarta - Dewan Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) menyetujui program pinjaman selama 36 bulan untuk Bolivia melalui Extended Fund Facility (EFF). Dalam program ini, Bolivia mendapat akses pendanaan hingga SDR 1,369 miliar (US\$ 1,9 miliar) atau sekitar Rp 33,98 triliun (asumsi kurs Rp 17.888).

Dengan persetujuan tersebut, pemerintah Bolivia bisa langsung mencairkan dana sekitar US\$ 214 juta atau sekitar Rp 3,82 triliun. Sementara itu, pencairan dana berikutnya akan dilakukan secara bertahap selama program berjalan, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program.

Program tersebut diberikan IMF untuk membantu Bolivia memulihkan stabilitas ekonomi, memperkuat perlindungan sosial, dan menambah kembali cadangan devisa. Selain itu, program ini juga ditujukan untuk mengurangi risiko fiskal dan eksternal, memperkuat ketahanan sektor keuangan, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dengan dukungan sektor swasta.

Kebijakan fiskal akan diarahkan untuk menekan utang pemerintah secara bertahap, sekaligus melindungi masyarakat rentan. Pemerintah juga akan membuat nilai tukar lebih fleksibel, memperkuat kebijakan moneter dan pengawasan sektor keuangan, serta memperbaiki tata kelola dan transparansi.

Berbagai langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih baik, mendorong investasi swasta, dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Dukungan dari IMF juga diharapkan dapat menarik tambahan pendanaan dari lembaga keuangan internasional lainnya.

"Pihak berwenang Bolivia telah mengambil tindakan signifikan selama setahun terakhir untuk mengatasi ketidakseimbangan makroekonomi yang telah berlangsung lama," kata Anggota Dewan Eksekutif sekaligus Wakil Direktur Pelaksana IMF, Nigel Clarke, dikutip dari laman resmi IMF, Minggu (4/10/2026).

Ia menjelaskan, keberlanjutan fiskal menjadi landasan utama program EFF yang bertujuan untuk memperkuat dukungan kepada rumah tangga yang rentan. Upaya fiskal yang dilakukan pada tahap awal mencakup penghapusan bertahap subsidi bahan bakar minyak (BBM).

"Upaya fiskal yang dilakukan di awal mencakup penghapusan bertahap subsidi bahan bakar yang tersisa melalui mekanisme penetapan harga otomatis bersamaan dengan perlindungan sosial yang lebih kuat dan lebih tepat sasaran," jelasnya.

Selain itu, Bolivia dinilai perlu meningkatkan efisiensi pengeluaran, penanganan utang, reformasi perusahaan publik, dan penguatan lembaga fiskal. Dalam hal ini mencakup kerangka fiskal jangka menengah untuk menekan utang.

Sementara pada nilai tukar, lembaga moneter Bolivia perlu mengedepankan pengelolaan yang kredit untuk mendorong keseimbangan eksternal dan mempertahankan stabilitas harga. Menurutnya, bank sentral Bolivia perlu mempercepat transisi ke penargetan uang cadangan.

"Penghapusan pembiayaan anggaran bank sentral baru dan transisi ke penargetan uang cadangan merupakan langkah penting dalam hal ini. Manajemen likuiditas yang bijaksana, akumulasi cadangan, intervensi valuta asing yang terbatas pada penanganan kondisi pasar yang tidak teratur, dan reformasi untuk memperkuat otonomi, tata kelola, dan akuntabilitas bank sentral akan sangat penting untuk meningkatkan kredibilitas," pungkasnya.

Lihat Apa yang Dilakukan AS di Timur Tengah

Minggu, 4 Oktober 2026 09:17 WIB

Hesti Puji Lestari

<https://kabar24.bisnis.com/read/20261004/19/2009481/lihat-apa-yang-dilakukan-as-di-timur-tengah>

Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat meningkatkan kekuatan militernya di Timur Tengah dengan mengerahkan sekitar 9.000 personel tambahan bersama armada kapal perang.

Pengerahan tersebut berpotensi membuat tiga kapal induk AS berada di kawasan tersebut pada akhir Oktober atau November 2026.

Dua kapal induk AS, USS George H.W. Bush dan USS George Washington, saat ini telah berada di Timur Tengah. Sementara itu, USS Theodore Roosevelt meninggalkan San Diego pada Minggu untuk menjalani penugasan yang sebelumnya telah dijadwalkan, menurut laporan media AS.

Pengerahan terbaru ini menjadi salah satu konsentrasi kekuatan angkatan laut AS terbesar di Timur Tengah sejak operasi militer Amerika Serikat di Irak pada 2003.

Langkah tersebut dilakukan ketika upaya diplomatik untuk meredakan konflik dengan Iran belum mencapai kesepakatan. Presiden AS Donald Trump juga kembali membuka kemungkinan perluasan operasi militer terhadap Iran.

Kelompok kapal perang yang menuju Timur Tengah membawa lebih dari 7.000 pelaut dan sekitar 2.000 Marinir. Jika digabungkan dengan personel AS yang sudah berada di kawasan tersebut, jumlah pelaut dan Marinir dapat melampaui 20.000 orang, didukung ratusan pesawat.

Trump Ancam Iran

Peningkatan kekuatan militer AS berlangsung bersamaan dengan pernyataan Trump mengenai kemungkinan serangan lebih lanjut terhadap Iran.

Trump mengatakan kepada wartawan bahwa indikasi awal dalam penyelidikan insiden penerbangan Flydubai menunjukkan kemungkinan adanya keterkaitan tersangka dengan Iran. Namun, ia menegaskan penyelidikan masih berlangsung.

Trump kemudian memperingatkan bahwa jika hubungan tersebut terbukti, Iran akan menghadapi respons militer yang keras.

Dalam wawancara dengan majalah Time yang diterbitkan Kamis, Trump juga menyebut kemungkinan meningkatkan kampanye pengeboman terhadap Iran setelah pemilihan paruh waktu AS pada 3 November.

Sebelumnya, Trump menolak proposal terbaru Iran terkait penghentian konflik. Ia mengatakan tawaran Teheran, termasuk pembukaan Selat Hormuz, belum memenuhi tuntutan AS.

Tekanan Ekonomi Ikut Diperluas

Selain memperkuat kehadiran militernya, Washington juga meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran.

Departemen Keuangan AS pada Kamis menjatuhkan sanksi baru terhadap sektor kereta api dan otomotif Iran serta sejumlah pemasok asingnya. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya AS meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Teheran.

Di sisi lain, situasi keamanan di kawasan juga terus berkembang. Koalisi pimpinan Arab Saudi mengatakan kelompok Houthi Yaman menargetkan stasiun distribusi listrik di Madinah.

Serangan terhadap Madinah memicu kecaman karena kota tersebut merupakan salah satu lokasi paling suci dalam Islam. Pada malam yang sama, ledakan juga terdengar di Sanaa, ibu kota Yaman yang dikuasai Houthi.

Rangkaian perkembangan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pengerahan militer AS berlangsung di tengah konflik regional yang melibatkan Iran, Israel, kelompok Houthi, serta negara-negara Teluk.

G20 Bahas Excess Capacity, Kerja Paksa, dan MFN, Ini Sikap Indonesia

Minggu, 4 Oktober 2026 01:12 WIB

Im Fathimah Timorria

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20261004/12/2009459/g20-bahas-excess-capacity-kerja-paksa-dan-mfn-ini-sikap-indonesia>

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia mendorong kerja sama antarnegara anggota G20 dalam menangani persoalan excess capacity, praktik kerja paksa (forced labour), dan penerapan tarif Most Favored Nation (MFN) dalam sistem perdagangan multilateral.

Ketiga isu tersebut menjadi bagian dari pembahasan Pertemuan Menteri Perdagangan G20 (G20 Trade Ministers' Meeting/TMM) di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat (AS), pada 30 September–1 Oktober 2026.

Budi mengatakan Indonesia bersama negara anggota G20 memandang penyelesaian isu tersebut membutuhkan kolaborasi dan aksi bersama. Namun, kerja sama tetap perlu mempertimbangkan perbedaan prinsip kebijakan dan orientasi ekonomi masing-masing negara.

Dalam pembahasan excess capacity, Budi menekankan pentingnya melihat dinamika penawaran dan permintaan, tingkat utilisasi kapasitas, perilaku pasar, serta faktor yang mendorong produksi.

Menurutnya, tingginya kapasitas produksi, lonjakan ekspor, maupun ketidakseimbangan perdagangan tidak serta-merta menunjukkan adanya excess capacity yang bersifat struktural.

“Setiap penilaian mengenai excess capacity harus berdasarkan bukti yang spesifik untuk masing-masing sektor. Setiap sektor memiliki siklus produksi, struktur rantai pasok, serta cakupan pasar dan teknologi yang berbeda. Excess capacity harus mengacu pada temuan yang analitis dan berbasis bukti, bukan pada label politik,” ujar Mendag Budi.

Indonesia, lanjutnya, mengedepankan tiga pendekatan dalam menyikapi persoalan tersebut.

Pertama, melakukan diagnosis sebelum menentukan langkah penanganan. Penilaian terhadap excess capacity perlu mempertimbangkan kondisi dan karakteristik setiap sektor secara menyeluruh.

Kedua, memberikan perlindungan tanpa menciptakan ketegangan. Instrumen pengamanan perdagangan (trade remedies) dinilai penting agar anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dapat merespons praktik perdagangan yang merugikan secara transparan dan berdasarkan aturan.

Ketiga, mendorong transformasi melalui kerja sama. Penanganan excess capacity dinilai membutuhkan tindakan kolektif dan lingkungan yang mendukung transformasi struktural.

Dalam pembahasan mengenai kerja paksa, Indonesia menegaskan komitmen terhadap penghapusannya sebagai bagian dari perlindungan hak dan martabat pekerja.

Budi mengatakan upaya perlindungan tersebut harus berorientasi pada tujuan yang sah dan tidak menjadi instrumen politik untuk menekan negara lain.

“Melindungi hak pekerja harus tetap menjadi komitmen yang nyata, bukan instrumen politik untuk kontrol dan subordinasi. Tidak ada negara yang boleh memperoleh keunggulan kompetitif melalui kerja paksa. Namun, tidak seharusnya ada negara yang memperoleh pengaruh strategis dengan mendefinisikan, menghakimi, dan menjatuhkan sanksi atas dugaan pelanggaran pihak lain sepenuhnya berdasarkan ketentuannya sendiri,” kata Mendag Budi.

Indonesia telah meratifikasi sembilan dari 10 Konvensi Fundamental Organisasi Buruh Internasional (ILO).

Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur larangan impor barang hasil produksi kerja paksa.

Ketentuan mengenai penghapusan kerja paksa juga tercantum dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dengan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (Indonesia-EFTA CEPA) dan dengan Uni Eropa (I-EU CEPA).

Sementara itu, dalam pembahasan mengenai MFN, Budi menyatakan WTO perlu mempertahankan dan menegakkan prinsip tersebut dalam sistem perdagangan multilateral.

Menurutnya, MFN diperlukan untuk menjaga kepastian dan prinsip nondiskriminasi dalam perdagangan internasional. Prinsip tersebut juga berperan dalam menyederhanakan negosiasi tarif serta menjaga kepastian dan nilai komitmen akses pasar yang telah dinegosiasikan.

Budi menilai pelemahan prinsip MFN dapat berdampak terhadap penerapan Special and Differential Treatment (SDT) dalam sistem perdagangan.

“Prinsip MFN perlu terus dipertahankan, setidaknya hingga terdapat sistem atau prinsip lain yang dapat memberikan manfaat yang lebih baik. Harapannya, prinsip ini tidak hanya aturan di atas kertas, tetapi benar-benar dapat diterapkan oleh negara-negara yang terlibat,” ujar Mendag Budi.

Bidik PDB Syariah hingga Data Perdagangan, BPS Perluas Kerja Sama Statistik di Forum OKI

Surya Dua Artha Simanjuntak

Minggu, 4 Oktober 2026 18:04 WIB

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20261004/9/2009551/bidik-pdb-syariah-hingga-data-perdagangan-bps-perluas-kerja-sama-statistik-di-forum-oki>

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) memperluas kerja sama internasional dengan sejumlah otoritas statistik negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), sebagai upaya penyempurnaan penghitungan produk domestik bruto (PDB) syariah, statistik halal, hingga sinkronisasi data ekspor-impor.

Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi memimpin delegasi Indonesia dalam Sidang ke-15 Organisation of Islamic Cooperation Statistical Commission (OIC-StatCom) yang digelar di Jeddah, Arab Saudi, pada 29–30 September 2026.

Di sela-sela forum yang dihadiri oleh pimpinan 57 National Statistical Office (NSO) tersebut, BPS memacu diplomasi data melalui serangkaian pertemuan bilateral.

Sonny, dengan didampingi pihak Konsulat Jenderal RI di Jeddah, menyepakati sejumlah kerja sama krusial dengan Presiden Turkish Statistical Institute (TURKSTAT), Presiden General Authority for Statistics (GASTAT) Arab Saudi, Kepala Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS) Mesir, serta pimpinan Islamic Development Bank (IsDB).

"Beberapa kesepakatan kerja sama meliputi pengembangan statistik halal, penghitungan PDB syariah, sinkronisasi data ekspor-impor untuk perbaikan statistik perdagangan, inisiasi statistik haji dan umrah, serta penyempurnaan metode penghitungan kemiskinan multidimensi," jelas keterangan resmi BPS, Minggu (4/10/2026).

Perinciannya, sejumlah kerja sama BPS dengan otoritas mitra antara lain. Pertama, BPS menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan otoritas statistik Turki (TURKSTAT) untuk penguatan kerja sama pertukaran pengalaman terkait metodologi sensus modern, pemanfaatan dan integrasi data administrasi, serta transformasi digital dalam penyelenggaraan statistik resmi.

Kedua, dengan otoritas statistik Arab Saudi (GASTAT) untuk kolaborasi pengembangan statistik haji dan umrah, statistik halal, PDB syariah, serta statistik ekspor-impor. Pihak Arab Saudi juga menawarkan percepatan transfer pengetahuan terkait digitalisasi dan transformasi statistik bagi Indonesia.

Ketiga, dengan otoritas statistik Mesir (CAPMAS) untuk kerja sama modernisasi statistik dan penerapan standar statistik internasional yang baru. Penandatanganan MoU ini nanti juga akan masuk dalam agenda kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia dalam waktu dekat.

Keempat, dengan Islamic Development Bank (IsDB) untuk membahas pengembangan statistik kemiskinan multidimensi, yang mana Indonesia akan didorong menjadi negara percontohan bagi negara-negara Islam lainnya. Kerja sama ini rencananya juga akan melibatkan partisipasi Yordania dan Malaysia.

Rekam Aktivitas Ekonomi Informal

Dalam sesi presentasi di forum multilateral tersebut, Sonny turut memaparkan kesiapan Indonesia dalam mengimplementasikan System of National Accounts (SNA) 2025. Pembaruan sistem neraca nasional ini bertujuan agar statistik ekonomi mampu merekam perkembangan struktur produksi,

perubahan pola konsumsi, dinamika ketenagakerjaan, hingga aktivitas ekonomi informal secara lebih komprehensif.

Oleh sebab itu, BPS saat ini telah memanfaatkan hasil Experimental Time Use Study 2023 guna menghitung nilai tambah dari jasa rumah tangga yang tidak dibayar (unpaid household services). Berdasarkan asesmen BPS, angka aktivitas informal tersebut diperkirakan setara dengan 13,63% dari total PDB Indonesia pada 2023.

Selain perumusan sistem neraca yang baru, delegasi Indonesia juga berbagi pengalaman mengenai modernisasi sensus penduduk dan perumahan yang bertransformasi menuju integrasi data administrasi, serta pemantauan Sustainable Development Goals (SDGs) yang memanfaatkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) guna mengukur akses air bersih dan sanitasi rumah tangga.

Di samping itu, BPS melakukan pertemuan khusus dengan Statistical, Economic, Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC) dan secara resmi mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi ke-16 OIC-STATCOM pada 2027 mendatang.

Cadangan Devisa September 2026 Diproyeksi Bertahan di US\$ 145 Miliar–US\$ 148 Miliar

Minggu, 4 Oktober 2026 18:27 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/cadangan-devisa-september-2026-diproyeksi-bertahan-di-us-145-miliar-us-148-miliar>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Cadangan devisa Indonesia diperkirakan masih berada pada level relatif tinggi pada akhir September 2026. Namun, ruang kenaikannya dinilai tidak akan sebesar pada Agustus seiring meningkatnya tekanan terhadap rupiah dan ketidakpastian global.

Senior Analyst Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita memperkirakan, posisi cadangan devisa Indonesia pada September 2026 masih berada di kisaran US\$ 145 miliar - US\$ 148 miliar.

“Saya memperkirakan cadangan devisa akhir September masih berada pada level yang relatif tinggi, tetapi ruang kenaikannya kemungkinan tidak sebesar Agustus. Kalau harus memberikan kisaran, saya melihat posisi September masih berpeluang berada di sekitar US\$ 145 miliar - US\$ 148 miliar,” ujar Ronny kepada Kontan, Minggu (10/9/2026).

Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang bergerak berlawanan terhadap posisi cadangan devisa.

Dari sisi positif, neraca perdagangan Indonesia pada Agustus menunjukkan perbaikan cukup signifikan. Secara kumulatif Januari–Agustus 2026, Indonesia masih mencatat surplus perdagangan sebesar US\$ 7,25 miliar.

Kondisi tersebut memberikan tambahan suplai devisa yang cukup positif bagi perekonomian Indonesia. Namun, di sisi lain, tekanan terhadap rupiah pada akhir September berpotensi meningkatkan kebutuhan intervensi Bank Indonesia (BI) di pasar valuta asing.

BI mencatat rupiah berada di level Rp 17.855 per dolar AS pada 22 September. Sementara itu, pada 29 September rupiah sempat menembus level Rp 18.000 per dolar AS.

Ronny mengatakan, tekanan terhadap rupiah tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal, antara lain kenaikan yield US Treasury, penguatan dolar AS, kenaikan harga minyak, serta meningkatnya ketidakpastian global.

Tekanan tersebut berpotensi mendorong BI melakukan stabilisasi melalui pasar valuta asing. Dengan demikian, sebagian cadangan devisa dapat digunakan untuk meredam volatilitas nilai tukar.

Meski demikian, Ronny menegaskan penggunaan cadangan devisa untuk stabilisasi rupiah tidak serta-merta menunjukkan bahwa cadangan devisa Indonesia memasuki tren penurunan secara struktural.

“Posisi US\$ 146,5 miliar masih setara dengan 5,4 bulan impor atau 5,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor,” jelasnya.

Menurut Ronny, persoalan utama cadangan devisa Indonesia saat ini bukan semata-mata terkait levelnya, melainkan seberapa kuat sumber pembentukan devisa dapat menopang kebutuhan eksternal ketika volatilitas global meningkat.

"Memang, neraca perdagangan sempat mencatat surplus yang sangat tipis pada Juli. Namun, data Agustus menunjukkan adanya perbaikan yang cukup berarti," ujarnya.

Di sisi lain, komposisi perdagangan juga perlu diperhatikan. Pada periode Januari–Agustus 2026, nilai ekspor Indonesia mencapai US\$ 186,39 miliar atau tumbuh 19,84% secara tahunan. Namun, neraca perdagangan migas masih mencatat defisit sebesar US\$ 28,54 miliar.

“Artinya, cadangan devisa masih sangat mungkin meningkat apabila surplus perdagangan, penerimaan pemerintah, jasa, dan arus modal masuk lebih besar daripada kebutuhan intervensi valas serta pembayaran eksternal,” kata Ronny.

Sebaliknya, apabila harga minyak terus tinggi, impor meningkat, yield global tetap tinggi dan terjadi capital outflow, posisi cadangan devisa berpotensi kembali mengalami koreksi.

Karena itu, Ronny menilai prospek cadangan devisa Indonesia masih relatif aman, tetapi semakin sensitif terhadap perkembangan faktor eksternal.

Dari sisi kebijakan moneter, BI pada September mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate di level 5,75%. Bank sentral juga terus memperkuat kebijakan stabilisasi rupiah sekaligus mendorong masuknya arus modal ke Indonesia.

Menurut Ronny, posisi cadangan devisa yang besar memberikan amunisi bagi BI untuk meredam volatilitas rupiah. Namun, hal tersebut bukan berarti BI harus mempertahankan nilai rupiah pada level tertentu.

“Cadangan devisa sebaiknya digunakan untuk mencegah pergerakan yang disorderly, bukan untuk melawan seluruh tekanan fundamental pasar,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, Ronny melihat cadangan devisa Indonesia saat ini masih menjadi bantalan eksternal yang kuat.

Menurutnya, tantangannya adalah memastikan bantalan tersebut terus diisi oleh surplus transaksi berjalan dan devisa hasil ekspor, bukan semakin sering terkuras untuk menghadapi tekanan nilai tukar.

Dalam jangka panjang, ketahanan rupiah tidak cukup hanya dibangun melalui cadangan devisa yang besar. Ketahanan tersebut juga perlu ditopang oleh kemampuan ekonomi Indonesia untuk menghasilkan devisa dalam jumlah besar dan secara berkelanjutan.

Hadapi Suku Bunga Global Tinggi, BI Jaga Rupiah Tanpa Kerek BI-Rate

Minggu, 4 Oktober 2026 17:59 WIB

Reporter: Hervin Jumar, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/hadapi-suku-bunga-global-tinggi-bi-jaga-rupiah-tanpa-kerek-bi-rate>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) menghadapi kondisi suku bunga global yang tinggi dalam waktu lebih lama (higher for longer) dengan tetap memprioritaskan stabilitas rupiah, tanpa menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate.

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, fenomena suku bunga global tinggi dalam waktu lebih lama meningkatkan ketidakpastian dan berdampak terhadap sektor keuangan domestik, terutama melalui nilai tukar dan arus modal.

"Jadi yang kami sarankan sekarang adalah kita harus menciptakan ekonomi yang kondusif. Oleh karena itu stabilisasi itu tetap menjadi prioritas kami. Karena iklim ekonomi kondusif akan tercapai kalau stabilitas ekonomi terjaga," ujar Destry kepada awak media di Gedung BI, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Destry menjelaskan, BI menghadapi dilema antara menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sesuai mandat dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), BI juga perlu menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.

Alhasil, BI membagi fokus kebijakannya. Kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga stabilitas, sementara kebijakan makroprudensial dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Destry menambahkan, BI tidak menaikkan BI-Rate untuk menghadapi tekanan dari kondisi suku bunga global tersebut. Sebagai gantinya, BI menempuh inovasi kebijakan berupa pengurangan biaya lindung nilai atau hedging bagi investor asing yang masuk ke Indonesia.

"Walaupun kami tidak menaikkan suku bunga BI-Rate, tapi kami memberikan suatu inovasi kebijakan dalam bentuk insentif untuk hedging, biaya hedging kalau asing masuk ke sini, capital inflow masuk, kita berikan insentif dalam bentuk pengurangan biaya hedging-nya," jelas Destry.

Kebijakan tersebut telah diberlakukan sejak September 2026. Destry menyebut arus modal yang memanfaatkan pengurangan biaya hedging tersebut telah mencapai sekitar US\$ 7 miliar.

"Jadi sejak kami berlakukan bulan lalu, inflow yang memanfaatkan hedging cost kita ini sudah mencapai sekitar US\$ 7 miliar," katanya.

Menurut Destry, kebijakan tersebut membantu menjaga stabilitas rupiah dan memperkuat cadangan devisa tanpa harus menaikkan BI-Rate.

Sementara itu, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian BI adalah perumahan karena memiliki keterkaitan yang luas dengan sektor ekonomi lainnya.

Destry mengatakan, sektor perumahan memiliki forward and backward linkage yang tinggi. Pembangunan rumah tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan warung, transportasi, perdagangan bahan bangunan, serta berbagai aktivitas ekonomi pendukung lainnya.

"Jadi interlinkage-nya itu menjadi sangat tinggi. Nah ini makanya dengan apa yang tadi kita capai, saya rasa ini menjadi hal yang sangat positif karena bahwa apa yang kami keluarkan ini ternyata memberikan dampak nyata, dampak di sektor riil, pertumbuhan sektor perumahan, dan juga tentunya untuk penciptaan lapangan kerja yang lebih besar," jelas Destry.

Salah satu dukungan BI terhadap sektor perumahan dilakukan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Hingga September 2026, pemanfaatan KLM untuk sektor perumahan, real estat, dan konstruksi mencapai 1,32% atau sekitar Rp118 triliun dan telah digunakan oleh 111 bank.

Destry mengatakan masih terdapat ruang 0,08% hingga batas KLM sebesar 1,4% yang dapat dioptimalkan untuk mendorong pembiayaan sektor tersebut.

Dibayangi Isu Geopolitik & Kebijakan BI, Simak Proyeksi Rupiah Senin (5/10)

Minggu, 4 Oktober 2026 09:24 WIB

Reporter: Muhammad Fatih, Editor: Tri Sulistiowati

<https://investasi.kontan.co.id/news/dibayangi-isu-geopolitik-kebijakan-bi-simak-proyeksi-rupiah-senin-510>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pergerakan nilai tukar rupiah diproyeksikan bakal bergerak fluktuatif, namun berisiko ditutup melemah pada perdagangan Senin (5/10/2026).

Pada penutupan perdagangan Jumat (2/10/2026), rupiah di pasar spot menguat 0,47% atau 84 poin ke level Rp 17.882 per dolar AS menurut data Bloomberg, sementara kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia mencatat penguatan sekitar 0,22% dari Rp 17.937 per dolar AS pada 1 Oktober 2026 menjadi Rp 17.898 per dolar AS pada 2 Oktober 2026.

Menurut pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi, penguatan rupiah pada akhir pekan lalu terdorong oleh kombinasi sentimen melandainya ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed pasca-rilis data inflasi AS serta langkah Bank Indonesia (BI) memperluas underlying operasi moneter untuk menjaga fleksibilitas likuiditas pasar keuangan.

Menjelang perdagangan awal pekan, Ibrahim menilai pergerakan mata uang Garuda akan diwarnai oleh sentimen geopolitik dan arah kebijakan moneter global.

Dari ranah global, pasar mengantisipasi potensi eskalasi konflik AS-Iran pasca-pemilu paruh waktu AS yang memicu kekhawatiran gangguan pasokan energi di Selat Hormuz.

Potensi peningkatan risiko inflasi global ini mendukung argumen kebijakan moneter ketat, di mana pejabat The Fed seperti Philip Jefferson dan Neel Kashkari tetap bersikap dari hawkish hingga sabar.

Di sisi lain, pelaku pasar mencermati laporan nonfarm payrolls AS bulan September yang diperkirakan melambat ke angka 90.000 pekerjaan.

Sementara dari dalam negeri, sentimen positif datang dari kebijakan Bank Indonesia yang memperluas surat berharga, termasuk obligasi dan sukuk korporasi berkualitas tinggi, sebagai underlying dalam operasi moneter.

Langkah ini memberikan fleksibilitas tambahan bagi perbankan nasional dalam mengelola likuiditas sekaligus menyokong pembiayaan sektor riil.

"Kebijakan ini merupakan bagian dari penguatan operasi moneter yang lebih berorientasi pasar (pro-market) dan terintegrasi dengan pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA)," kata Ibrahim dalam keterangannya, Jumat (2/10/2026).

Ibrahim menambahkan, operasi moneter pro-market memungkinkan kebijakan moneter tidak hanya diarahkan untuk mengelola likuiditas, suku bunga, dan nilai tukar, tetapi juga mendorong aktivitas transaksi di pasar keuangan.

"BI melalui perluasan underlying ini, perbankan mendapatkan instrumen yang lebih beragam dalam mengelola likuiditasnya. Di sisi lain, korporasi penerbit surat berharga juga memperoleh dukungan terhadap likuiditas dan aktivitas perdagangan instrumennya di pasar sekunder," jelas Ibrahim.

Mempertimbangkan dinamika ketegangan geopolitik global serta penyesuaian pasar uang domestik, Ibrahim memproyeksikan pergerakan mata uang rupiah pada perdagangan Senin (5/10/2026) akan bergerak fluktuatif, namun cenderung ditutup melemah.

Menurut perkiraannya, mata uang rupiah untuk perdagangan awal pekan Senin (5/10/2026) diproyeksikan bakal bergerak dalam rentang Rp 17.880 hingga Rp 17.930 per dolar AS.

Impor Melaju 19,94% pada Semester I-2026, Pemerintah Genjot Kinerja Ekspor

Minggu, 4 Oktober 2026 14:11 WIB

Reporter: Prayogi Ikhrawinata, Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

<https://industri.kontan.co.id/news/impor-melaju-1994-pada-semester-i-2026-pemerintah-genjot-kinerja-ekspor>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertumbuhan impor Indonesia masih jauh lebih tinggi dibandingkan ekspor pada Januari–Juli 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor tumbuh 19,94% secara kumulatif (cumulative to cumulative/etc), sementara ekspor tumbuh 4,43% etc.

Meski demikian, surplus perdagangan Indonesia masih terjaga sebesar US\$3,70 miliar atau sekitar Rp66,22 triliun, ditopang surplus perdagangan nonmigas sebesar US\$22,45 miliar atau sekitar Rp401,81 triliun.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan (Kemendag), Ni Made Kusuma Dewi mengatakan, disparitas pertumbuhan impor dan ekspor tidak dapat diartikan secara parsial sebagai pelemahan kinerja eksternal Indonesia.

Menurutnya, kenaikan impor terutama didorong oleh kebutuhan produksi dan barang modal. Impor untuk kebutuhan produksi tumbuh 20,42%, sedangkan impor barang modal tumbuh 20%. Struktur impor juga masih didominasi barang nonkonsumsi, dengan porsi kebutuhan produksi mencapai 71,45% dan barang modal sekitar 19,88%.

“Kondisi tersebut merefleksikan ekspansi dan peningkatan capacity utilization sektor manufaktur domestik,” ujar Kusuma dalam jawaban tertulis kepada KONTAN, Minggu (4/10/2026).

Ekspor Masih Dibayangi Ketidakpastian Global

Di sisi lain, nilai ekspor Indonesia pada Januari–Juli 2026 mencapai US\$167,03 miliar atau sekitar Rp2.989,50 triliun, tumbuh 4,43% etc. Ekspor nonmigas tumbuh 5,21% menjadi US\$160,01 miliar atau sekitar Rp2.863,86 triliun.

Kusuma mengatakan, pertumbuhan ekspor masih relatif terbatas di tengah perlambatan perdagangan global dan tingginya ketidakpastian kebijakan perdagangan. World Bank memperkirakan pertumbuhan perdagangan global melambat pada 2026, antara lain akibat “front-loading” perdagangan sebelum perubahan kebijakan.

Ketidakpastian juga dari adanya perubahan kebijakan tarif Amerika Serikat. Dalam US–Indonesia “Agreement on Reciprocal Trade” yang difinalisasi pada 19 Februari 2026, AS menetapkan tarif resiprok 19% terhadap impor dari Indonesia, dengan pengecualian produk tertentu yang memperoleh tarif 0%.

Pada Juli 2026, AS juga kembali menerapkan tindakan tarif berdasarkan Section 301 terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Perubahan kebijakan tersebut dapat meningkatkan ketidakpastian bagi eksportir dalam menentukan harga, kontrak, tujuan pasar maupun rencana produksi.

“Ketidakpastian mengenai arah kebijakan perdagangan dan implementasinya juga dapat memengaruhi arus perdagangan serta penyesuaian rantai pasok global,” ujar Kusuma.

Selain kebijakan perdagangan, pergerakan harga komoditas dunia turut memengaruhi kinerja ekspor. Berdasarkan World Bank Pink Sheet Juli 2026, harga batu bara turun 4,77% secara bulanan, minyak kelapa sawit turun 0,27%, dan nikel turun 5,33%.

Namun, penurunan harga tersebut tidak otomatis diikuti penurunan nilai ekspor Indonesia. Pada Januari–Juli 2026, ekspor lemak dan minyak hewan/nabati tumbuh 9,07%, bahan bakar mineral tumbuh 11,05%, sedangkan ekspor nikel dan barang daripadanya meningkat 49,84%.

Sebaliknya, ekspor logam mulia, perhiasan dan permata turun 40,08%, mesin dan peralatan mekanis turun 9,90%, serta karet dan barang dari karet turun 3,18%.

“Hal ini menunjukkan bahwa perubahan harga dunia bukan satu-satunya faktor yang menentukan nilai ekspor, karena perkembangan permintaan dan kinerja masing-masing komoditas juga turut berpengaruh,” ujar Kusuma.

Meski pertumbuhan Januari–Juli masih terbatas, kinerja ekspor menunjukkan penguatan pada periode berikutnya. Pada Januari–Agustus 2026, nilai ekspor mencapai US\$193,64 miliar atau sekitar Rp3.465,77 triliun, tumbuh 4,74% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penguatan terutama ditopang industri pengolahan dengan nilai ekspor US\$159,55 miliar atau sekitar Rp2.855,63 triliun, tumbuh 7,87%. Khusus Agustus 2026, nilai ekspor mencapai US\$26,61 miliar atau sekitar Rp476,27 triliun, tumbuh 6,72%, sedangkan ekspor nonmigas mencapai US\$25,62 miliar atau sekitar Rp458,55 triliun. Ekspor industri pengolahan pada Agustus 2026 tumbuh 12,48%.

Strategi Pemerintah Jaga Surplus

Untuk mempercepat pertumbuhan ekspor sekaligus mempertahankan surplus perdagangan, Kemendag menjalankan tiga program prioritas yang saling terintegrasi, yakni Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Akses Pasar Ekspor, serta Dari Lokal untuk Global.

Pengamanan pasar dalam negeri dilakukan melalui peningkatan penetrasi produk dalam negeri, penguatan pengawasan barang beredar, perlindungan dan pemberdayaan UMKM dalam ekosistem perdagangan digital, serta stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok.

Pemerintah juga mengoptimalkan instrumen trade remedies, seperti antidumping dan safeguard untuk memastikan perdagangan berlangsung secara adil dan memberikan ruang bagi industri dalam negeri untuk tumbuh.

Sementara itu, perluasan akses pasar ekspor dilakukan melalui percepatan penyelesaian dan optimalisasi pemanfaatan perjanjian perdagangan, diversifikasi pasar tujuan ekspor, promosi dagang, business matching, serta penguatan informasi dan intelijen pasar.

Kemendag juga mengawal berbagai hambatan perdagangan yang dihadapi eksportir Indonesia agar akses pasar tetap terbuka. Langkah ini ditujukan agar pertumbuhan ekspor tidak hanya bergantung pada pasar dan komoditas tertentu.

Dorong Hilirisasi dan Basis Eksportir

Program Dari Lokal untuk Global mencakup UMKM BISA Ekspor, Desa BISA Ekspor, dan Campuspreneur. BISA merupakan akronim dari Berani Inovasi dan Siap Adaptasi.

Program tersebut diarahkan untuk memperluas basis eksportir, tidak hanya perusahaan besar, tetapi juga UMKM, pelaku usaha daerah dan desa, serta generasi muda. UMKM BISA Ekspor diarahkan pada peningkatan kesiapan produk, pemahaman persyaratan pasar, informasi dan akses pasar, serta business matching melalui jaringan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri.

Desa BISA Ekspor diarahkan untuk mengembangkan produk unggulan desa agar masuk ke rantai pasok dan pasar global. Sementara Campuspreneur dikembangkan untuk membangun ekosistem kewirausahaan di perguruan tinggi dengan mendorong mahasiswa menjadi wirausaha inovatif dan berorientasi pasar.

“Pertumbuhan ekspor tidak hanya bertumpu pada pasar dan komoditas tertentu, tetapi semakin terdiversifikasi baik dari sisi negara tujuan maupun produk,” ungkap Kusuma.

Kemendag juga menilai pembukaan pasar baru dan optimalisasi perjanjian perdagangan penting untuk meningkatkan kinerja ekspor. Perjanjian perdagangan diharapkan tidak berhenti sebagai kesepakatan, tetapi dapat dikonversi menjadi peluang bisnis dan transaksi nyata bagi eksportir Indonesia, termasuk UMKM.

Karena itu, pemerintah memperkuat sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha, penyediaan informasi peluang pasar, fasilitasi business matching, serta optimalisasi peran perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri.

Dalam waktu dekat, sektor industri pengolahan menjadi salah satu prioritas karena menjadi penopang utama ekspor nonmigas. Komoditas yang terus dikembangkan antara lain lemak dan minyak hewan/nabati, besi dan baja, mesin dan perlengkapan elektrik, kendaraan dan bagiannya, produk kimia, serta nikel dan barang daripadanya.

Kemendag juga mencatat sejumlah komoditas dengan pertumbuhan ekspor tinggi, seperti tembaga, timah, olahan sereal, alas kaki, aluminium, dan berbagai produk kimia.

Pengembangan ekspor diarahkan pada peningkatan nilai tambah dan hilirisasi agar ekspor tidak hanya bertumpu pada bahan mentah atau produk antara, tetapi semakin banyak menghasilkan produk olahan dan manufaktur bernilai tambah lebih tinggi.

Dengan langkah tersebut, pemerintah menargetkan basis eksportir Indonesia semakin luas dan produk yang masuk ke pasar global semakin beragam serta bernilai tambah. Upaya itu diharapkan dapat memperkuat daya saing ekspor sekaligus menjaga keberlanjutan surplus perdagangan Indonesia.

Harga Pangan Hari Ini: Cabai Mulai Naik Tinggi

Minggu, 4 Oktober 2026 09:30 WIB

Sabrina Mulia Rhamadanty

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/123564/harga-pangan-hari-ini-cabai-mulai-naik-tinggi/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) mencatat kenaikan harga sejumlah komoditas pangan pada Minggu (4/10/2026) pukul 09.00 WIB.

Seluruh varian cabai mengalami kenaikan harga. Cabai merah besar mencatatkan kenaikan tertinggi sebesar 10,02% (naik Rp5.750) menjadi Rp63.150 per kg, disusul oleh cabai merah keriting yang naik 7,87% (naik Rp5.450) menjadi Rp74.700 per kg, cabai rawit merah yang naik 4,41% (naik Rp4.250) menjadi Rp100.700 per kg, serta cabai rawit hijau yang meningkat 3,68% (naik Rp2.500) menjadi Rp70.450 per kg.

Pada kelompok daging, kenaikan tipis dialami oleh daging sapi kualitas 2 sebesar 0,52% (naik Rp 750) menjadi Rp144.000 per kg. Sementara daging sapi kualitas 1 juga naik tipis sebesar 0,1% menjadi Rp152.700 per kg.

Di sisi lain, gula pasir kualitas premium naik 0,25% (naik Rp50) menjadi Rp 20.400 per kg. Sedangkan harga gula pasir lokal tidak mengalami kenaikan dan penurunan alias tetap pada Rp19.150 per kg.

Untuk komoditas minyak goreng, pada minyak kemasan bermerk 2 naik 0,21% (naik Rp50) menjadi Rp 23.550 per kg, minyak goreng curah seharga Rp20.300 per kg atau turun 0,49% (turun Rp100), sementara minyak goreng kemasan bermerk 1 seharga Rp24.350 per kg atau harga tetap.

Pada komoditas bawang, yang mengalami kenaikan hanya bawang putih ukuran sedang dengan harga Rp39.050 per kg sedangkan bawang merah ukuran sedang seharga Rp 37.400 per kg atau turun 0,13%.

Di sisi lain, komoditas unggas dan turunannya mengalami penurunan harga tipis. Harga daging ayam ras segar melandai sebesar 0,24% (turun Rp100) menjadi Rp41.950 per kg. Senada dengan hal tersebut, harga telur ayam ras segar juga terkoreksi 0,17% (turun Rp50) sehingga kini diperdagangkan pada level Rp29.900 per kg.

Adapun, seluruh varian beras terpantau stabil tanpa mengalami perubahan harga. Beras Kualitas Bawah I dan II masing-masing dijual seharga Rp14.900 per kg dan Rp14.700 per kg.

Untuk segmen kualitas menengah, Beras Kualitas Medium II berada di angka Rp16.400 per kg. Sementara itu, beras kualitas premium yaitu Beras Kualitas Super I dan II masing-masing bertahan pada harga Rp17.950 per kg dan Rp17.350 per kg.

Bapanas Siapkan Subsidi Angkut untuk Jaga Harga Daging Ayam

Minggu, 4 Oktober 2026 20:06 WIB

Penulis: Antara

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/3031366/bapanas-siapkan-subsidi-angkut-untuk-jaga-harga-daging-ayam>

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyiapkan subsidi biaya angkut daging ayam ke daerah yang mengalami gejolak harga. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga harga daging

ayam tetap wajar sekaligus memperkuat distribusi dan memastikan pasokan bagi masyarakat serta peternak.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Hermawan mengatakan, subsidi biaya angkut dapat diberikan untuk membantu menyalurkan produksi dari daerah surplus ke wilayah yang kekurangan pasokan.

"(Untuk) angkutan distribusi, kita bisa subsidi dari Bapanas, supaya penyerapan produksi dari tempat produsen yang lebih, bisa menyebar ke seluruh daerah," kata Hermawan, Minggu (4/10/2026).

Kebijakan tersebut disiapkan setelah daging ayam ras kembali memberikan andil terhadap inflasi nasional pada September 2026. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi tersebut dipengaruhi peningkatan permintaan daging ayam, antara lain untuk kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG) di sejumlah daerah, serta faktor harga pakan ternak.

Untuk mengantisipasi fluktuasi harga yang berlebihan, Bapanas akan membantu pemerintah daerah yang bukan merupakan sentra produksi ayam ras tetapi mengalami kekurangan pasokan.

Hermawan mengatakan kenaikan harga daging ayam dalam beberapa bulan terakhir masih berada dalam batas kewajaran dan tidak terjadi di seluruh daerah.

"Jadi begini, ini ada kebutuhan semakin banyak, mungkin dalam bulan-bulan terakhir terjadi kenaikan, tetapi masih harga yang wajar, masih di batasnya, tidak secara keseluruhan. Di daerah pun masih banyak yang murah. Hanya tempat-tempat tertentu saja yang mungkin produsen ayamnya kurang," ujar dia.

Menurut Hermawan, biaya distribusi dari daerah produsen menjadi salah satu kendala pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Persoalan tersebut terutama dirasakan daerah yang tidak memiliki sentra produksi daging ayam.

"Bapanas memastikan mana daerah yang kurang (pasokan) akan disuplai dari daerah-daerah produsen. Kita anggaran masih ada," kata Hermawan.

Temanggung terima DBHCHT tahun 2026 sebesar Rp28 miliar

Minggu, 4 Oktober 2026 11:29 WIB

Pewarta: Heru Suyitno, Editor: Teguh Imam Wibowo

<https://jateng.antaranews.com/berita/647342/temanggung-terima-dbhcht-tahun-2026-sebesar-rp28-miliar>

Temanggung (ANTARA) - Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk tahun 2026 sebesar Rp28 miliar.

Bupati Temanggung Agus Setyawan di Temanggung, Minggu, menyampaikan besaran DBHCHT yang diterima Kabupaten Temanggung pada 2026 tercatat sekitar Rp28 miliar, turun dibandingkan alokasi pada 2025 yang mencapai sekitar Rp61 miliar.

"Penurunan DBHCHT 2026 ini berpengaruh pada kelancaran kegiatan yang ada di Kabupaten Temanggung. Pastinya tidak seluas lagi seperti dulu," katanya.

Ia mengatakan keterbatasan anggaran tersebut membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan kembali berbagai program dan kegiatan yang sebelumnya dapat dilaksanakan dengan dukungan DBHCHT.

Menurut dia, besaran DBHCHT untuk 2027 hingga kini belum ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Temanggung berharap alokasi DBHCHT pada tahun tersebut dapat kembali meningkat sehingga ruang pemerintah daerah untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat menjadi lebih besar.

"Harapannya bisa kembali lagi di angka Rp61 miliar sehingga kita bisa berbuat lebih banyak dalam rangka pemberdayaan masyarakat," katanya.

Ia menuturkan DBHCHT merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah sebagai bagian dari penerimaan negara dari cukai hasil tembakau.

Penggunaannya diarahkan untuk sejumlah program sesuai ketentuan pemerintah, termasuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan sektor terkait tembakau.

Realisasi pajak kendaraan bermotor di Kudus mencapai Rp76,7 miliar

Minggu, 4 Oktober 2026 06:09 WIB

Pewarta: Akhmad Nazaruddin, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/647330/realisasi-pajak-kendaraan-bermotor-di-kudus-mencapai-rp767-miliar>

Kudus (ANTARA) - Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, hingga Agustus 2026 mencapai Rp76,7 miliar atau 54,47 persen dari target sebesar Rp140,8 miliar.

"Kami optimistis, hingga akhir tahun bisa merealisasikan target penerimaan pajak kendaraan," kata Kepala Unit Pengelola Pendapatan Daerah (UPPD) Kudus Ridimanjaya, di Kudus, Sabtu.

Menurut dia, realisasi penerimaan PKB tersebut merupakan yang tertinggi di Jawa Tengah dengan capaian lebih dari separuh target yang telah ditetapkan.

Sedangkan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hingga Agustus 2026 mencapai Rp41,6 miliar atau 57,9 persen dari target sebesar Rp71,8 miliar.

Ia mengatakan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kudus saat ini mencapai sekitar 113.000 wajib pajak, sedangkan tingkat kepatuhannya baru sekitar 52 persen.

Untuk meningkatkan kepatuhan tersebut, UPPD Kudus terus melakukan penagihan, sekaligus mengingatkan masyarakat agar memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

"Kami terus mengingatkan wajib pajak agar membayar pajaknya tepat waktu. Kesadaran masyarakat sangat diperlukan karena membayar pajak merupakan kewajiban," ujarnya.

Upaya meningkatkan penerimaan pajak juga dilakukan melalui sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kudus, terutama setelah adanya penerapan opsen pajak kendaraan bermotor.

Ridimanjaya berharap sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten semakin diperkuat, termasuk melalui sosialisasi kepada masyarakat serta pelaksanaan razia gabungan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.

"Kami berharap ada razia gabungan sehingga masyarakat semakin sadar untuk membayar pajak kendaraan," katanya pula.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan kebijakan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan denda pajak progresif yang berlaku mulai 21 September hingga 28 Desember 2026.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya. Pembebasan denda juga diberikan terhadap sejumlah tunggakan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk denda pajak kendaraan.

Untuk pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), terdapat pula kebijakan pembebasan denda untuk tunggakan tahun 2025 sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Kebijakan tersebut juga menyasar kendaraan pribadi, kendaraan berpelat merah, serta kendaraan milik badan hukum sesuai persyaratan yang berlaku.

Ridimanjaya menjelaskan penerapan opsen pajak merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dengan adanya opsen, sebagian penerimaan pajak kendaraan bermotor menjadi bagian pendapatan pemerintah kabupaten/kota, sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Oleh karena itu, Pemkab Kudus juga diharapkan aktif melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

"Karena ada manfaat yang diterima pemerintah kabupaten melalui opsen, tentu diperlukan kerja sama dan sinergi. Salah satunya dengan menggencarkan sosialisasi kepada wajib pajak," ujarnya lagi.

IMF Sepakati Pendanaan US\$345 Juta untuk Bantu Pemulihan Ekonomi Sri Lanka

Senin, 5 Oktober 2026 11:21 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Noverius Laoli

<https://internasional.kontan.co.id/news/imf-sepakati-pendanaan-us345-juta-untuk-bantu-pemulihan-ekonomi-sri-lanka>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sri Lanka kembali mendapat akses pendanaan dari Dana Moneter Internasional (IMF) setelah lembaga tersebut mencapai kesepakatan tingkat staf (staff-level agreement) untuk pencairan dana sekitar US\$345 juta.

Kesepakatan tersebut merupakan bagian dari tinjauan ketujuh atas program Extended Fund Facility (EFF) senilai US\$2,9 miliar yang diberikan IMF kepada Sri Lanka. Negara tersebut masih dalam proses pemulihan dari krisis ekonomi parah pada 2022 yang dipicu antara lain oleh kekurangan devisa.

Namun, pencairan dana tersebut belum final. Kesepakatan tingkat staf masih harus mendapat persetujuan Dewan Eksekutif IMF. Pencairan juga bergantung pada sejumlah persyaratan, termasuk penyusunan anggaran Sri Lanka untuk 2027 yang akan diajukan ke parlemen bulan depan.

IMF juga akan menyelesaikan peninjauan atas jaminan pembiayaan untuk memastikan kontribusi pendanaan dari mitra multilateral serta menilai apakah proses restrukturisasi utang Sri Lanka sudah memadai.

"Kesepakatan ini membuka jalan bagi pencairan sekitar US\$345 juta setelah seluruh persyaratan tinjauan terpenuhi," kata IMF dalam pernyataannya, Minggu (4/10).

Jika tinjauan tersebut selesai dan mendapat persetujuan, dana yang diterima Sri Lanka akan setara dengan sekitar US\$345 juta dalam bentuk Special Drawing Rights (SDR). Dengan pencairan itu, total dana yang telah disalurkan IMF kepada Sri Lanka melalui program tersebut akan mencapai sekitar US\$2,7 miliar.

Pada Mei 2026, IMF memperkirakan ekonomi Sri Lanka tumbuh 3% tahun ini. Saat itu, IMF juga menyetujui pencairan dua tahap sekaligus senilai US\$700 juta untuk memperkuat cadangan devisa negara tersebut.

Meski pemulihan terus berjalan, IMF masih melihat sejumlah risiko terhadap perekonomian Sri Lanka. Negara yang mengimpor seluruh kebutuhan bahan bakarnya itu menghadapi ketidakpastian akibat konflik di Timur Tengah, perkembangan perdagangan global, serta dampak fenomena cuaca El Niño.

IMF juga mendorong pemerintah Sri Lanka untuk membiarkan harga bahan bakar domestik menyesuaikan dengan harga internasional. Namun, kebijakan tersebut tetap perlu disertai perlindungan bagi kelompok masyarakat yang rentan.

Dolar AS Menguat di Pagi Ini (5/10): Masalah Fiskal Prancis Membuat Euro Terpuruk

Senin, 5 Oktober 2026 09:47 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://internasional.kontan.co.id/news/dolar-as-menguat-di-pagi-ini-510-masalah-fiskal-prancis-membuat-euro-terpuruk>

KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. Dolar Amerika Serikat (AS) memulai pekan ini dengan pijakan yang kuat dan berada di dekat level tertinggi 17 bulan pada hari ini karena para investor mempertimbangkan menurunnya peluang kenaikan suku bunga Federal Reserve (The Fed) di bulan ini setelah data pekerjaan AS yang lemah, sementara kekhawatiran fiskal di Prancis membuat euro rentan.

Euro berada di level US\$ 1,1246, terjebak di dekat level terendahnya sejak Mei 2025 setelah mencatat empat penurunan mingguan berturut-turut karena tingkat utang Prancis dan kekhawatiran tentang kebuntuan politik menjelang pemilihan tahun depan memukul mata uang bersama tersebut.

Poundsterling diperdagangkan pada US\$ 1,3241, sementara yen Jepang diperdagangkan pada 157,69 per dolar AS pada awal perdagangan Asia. Hal itu membuat indeks dolar AS, yang mengukur mata uang AS terhadap enam mata uang utama, berada di angka 101,97.

Pasar juga masih terguncang akibat penurunan tajam obligasi pekan lalu, yang mendorong biaya pinjaman global ke level tertinggi dalam beberapa dekade dan menghantam utang Prancis karena investor khawatir akan risiko inflasi akibat melonjaknya harga minyak.

Imbal hasil obligasi US Treasury tenor 10 tahun berada di 5,262%, di bawah level tertinggi 24 tahun yang dicapai pekan lalu yang mengguncang pasar.

"Dolar AS adalah pemenang utama dalam lingkungan saat ini karena tidak hanya kenaikan imbal hasil US Treasury yang meningkatkan daya tarik aset AS, tetapi aksi jual besar-besaran utang secara global juga memicu aliran dana ke aset safe-haven, yaitu dolar AS," kata Matthew Ryan, kepala strategi pasar di Ebury.

Para ahli strategi OCBC mengatakan jika volatilitas suku bunga tetap tinggi, tekanan pada carry trade, mata uang siklikal, dan euro kemungkinan akan berlanjut, sementara aset safe haven tradisional seperti franc Swiss dan dolar AS akan tetap didukung.

Franc Swiss diperdagangkan pada 0,8286 per dolar AS. Nilai tukarnya mencapai 0,9312 per euro setelah naik lebih dari 1% di pekan lalu. Dolar Australia tetap stabil di US\$ 0,6956, sementara dolar Selandia Baru melemah 0,1% menjadi US\$ 0,5610.

JALUR SUKU BUNGA THE FED

Terlepas dari masalah euro, sebagian besar penguatan dolar dalam beberapa pekan terakhir berasal dari para pedagang yang memperkirakan kenaikan suku bunga The Fed dalam beberapa bulan mendatang, tetapi data pada hari Jumat merusak ekspektasi tersebut setelah pertumbuhan lapangan kerja AS melambat lebih dari yang diperkirakan pada bulan September.

Mansoor Mohi-uddin, kepala ahli strategi makro di Bank of Singapore, mengatakan data tersebut menunjukkan pasar tenaga kerja tidak mengalami overheating meskipun inflasi tetap di atas target 2% The Fed sejak pandemi, dan memperkirakan suku bunga akan tetap tidak berubah bulan ini.

Para pedagang kini memperkirakan peluang 78% bagi The Fed mempertahankan suku bunga tetap stabil pada bulan Oktober, dibandingkan dengan 36% seminggu sebelumnya, menurut alat CME FedWatch. Mereka masih memperkirakan kenaikan suku bunga pada bulan Desember dan dua kenaikan lagi pada paruh pertama tahun 2027.

Namun, para analis berpendapat bahwa perkiraan pasar terlalu agresif dan The Fed mungkin tidak akan menaikkan suku bunga sebanyak itu.

Strategi Jefferies, Mohit Kumar, mengatakan skenario dasar perusahaan adalah satu kenaikan suku bunga masing-masing dari The Fed dan Bank Sentral Eropa. "Pada saat kita memasuki bulan Maret, harga minyak akan lebih rendah atau, jika kita salah dan harga minyak tinggi, kita akan berbicara tentang pertumbuhan yang lebih lambat," katanya.

"Dalam kedua skenario tersebut, kami tidak melihat bank sentral akan menaikkan suku bunga seperti yang diperkirakan saat ini."

Moody's: Ekonomi AS Mulai Melambat Akibat Kenaikan Suku Bunga

Senin, 5 Oktober 2026 14:00 WIB

Thurfah Mahira Ahnaf

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/8306043/moodys-ekonomi-as-mulai-melambat-akibat-kenaikan-suku-bunga>

Liputan6.com, Jakarta - Kepala ekonom Moody's Mark Zandi menyebutkan ekonomi Amerika Serikat atau ekonomi (AS) melambat akibat kenaikan suku bunga acuan sudah mulai terjadi sejak bank sentral AS atau The Federal Reserve (the Fed) kembali menaikkan suku bunga bulan ini.

Sebelum pertemuan The Fed, Zandi sempat memperingatkan kenaikan suku bunga adalah kesalahan kebijakan Fed yang serius. Kini, dengan angka yang sudah naik dan kenaikan lanjutan diperkirakan masih akan terjadi, prediksinya mulai terbukti.

"Saya pikir ekonomi akan mulai melambat akibat kenaikan suku bunga ini," kata Zandi kepada Yahoo Finance, dikutip Senin (5/10/2026).

Ia mencatat bukan hanya suku bunga acuan The Fed yang terkerek, tetapi juga yield obligasi jangka panjang yang memengaruhi suku bunga pinjaman. Yield obligasi Treasury 10 tahun naik ke 5,22% pada Senin, setelah sempat mencapai level tertinggi dalam 20 tahun pekan sebelumnya.

Sementara itu, bunga kredit pemilikan rumah (KPR) tetap 30 tahun mencapai 7,5%, tertinggi sejak musim semi 2024, sehingga membebani masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman properti.

Menurut Zandi, kuncinya terletak pada berapa lama suku bunga tinggi ini bertahan. Jika kondisi ini hanya berlangsung beberapa bulan, konflik di Iran berakhir, harga minyak turun, dan kenaikan suku bunga lanjutan tidak terjadi, maka dampaknya tidak sampai melumpuhkan ekonomi.

"Tapi jika ini berlangsung jauh lebih lama dari itu dan berlanjut hingga tahun depan, saya pikir ekonomi akan benar-benar mulai kesulitan," ujarnya.

Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga Lanjutan

Sementara, pasar memperkirakan tiga hingga empat kali kenaikan suku bunga tambahan selama setahun ke depan, salah satunya diperkirakan terjadi tahun ini.

Bank sentral AS telah menaikkan suku bunga 25 basis poin (25 bps) ke kisaran 3,75-4% pada 16 September lalu, pertama dalam lebih dari tiga tahun.

Zandi memperingatkan, jika ekspektasi pasar benar-benar terwujud, gelombang kebangkrutan korporasi bisa menyusul. Banyak perusahaan dengan utang besar selama ini bertahan hanya karena pemilik ekuitas swasta memperpanjang jatuh tempo utang mereka.

Kenaikan suku bunga yang berlangsung lebih lama juga diperkirakan menekan rumah tangga dengan utang kartu kredit dan jalur kredit berbasis ekuitas rumah.

Di sisi lain, perusahaan teknologi yang berinvestasi besar dalam kecerdasan buatan (AI) disebut sebagai pengecualian. Margin keuntungan tinggi mereka memungkinkan penyerapan biaya pinjaman yang lebih mahal untuk membangun pusat data dan infrastruktur AI.

"AI berjalan dengan dinamikanya sendiri, dan ekspektasi laba masa depan cukup tinggi. Jadi selama itu berlanjut, perusahaan teknologi besar akan mampu membayar suku bunga ini plus lebih banyak lagi, dan itu tidak akan banyak merusak," kata Zandi.

Ia juga menyoroti perdebatan soal penyebab lonjakan yield obligasi jangka panjang. Jika sebagian pejabat The Fed memandangnya sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang kuat, Zandi justru menunjuk gesekan geopolitik dan ketidakpastian pasar sebagai pemicunya.

Kekhawatiran soal Pertarungan Batas Utang

Ia menambahkan, ketiadaan panduan kebijakan ke depan dari Ketua The Fed turut membuat investor meminta kompensasi tambahan atas ketidakpastian arah kebijakan selanjutnya.

Ke depan, Zandi makin khawatir soal pertarungan batas utang yang membayangi musim gugur tahun depan. Jika pemilu sela menghasilkan pemerintahan terbelah, situasi ini berpotensi menciptakan kebuntuan yang merugikan pasar obligasi.

Meski demikian, Zandi tidak percaya suku bunga tinggi saja akan memicu keruntuhan mendadak di pasar saham yang tengah berjaya. "Kenaikan suku bunga itu bersifat korosif terhadap valuasi. Ini bukan peristiwa jatuh tiba-tiba," katanya.

Data Neraca Perdagangan AS hingga Risalah The Fed Jadi Perhatian Pekan Ini

Senin, 5 Oktober 2026 14:37 WIB

Agustina Melani

<https://www.liputan6.com/saham/read/8306220/data-neraca-perdagangan-as-hingga-risalah-the-fed-jadi-perhatian-pekan-ini>

Liputan6.com, Jakarta - Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berlawanan arah pada pekan lalu. Lalu apa saja yang perlu dicermati pekan ini? Data ekonomi AS akan menjadi perhatian, salah satunya neraca perdagangan.

Berdasarkan riset Syailendra Capital, Senin, (5/10/2026), Indonesia merilis beberapa data ekonomi domestik antara lain Manufaktur PMI September 2026 tercatat 52,4 dari sebelumnya 49,8. Selain itu, inflasi September 2026 tercatat 3,28% dari sebelumnya 3,19% dan inflasi inti September 2026 mencapai 2,84% dari sebelumnya 2,92%. Di sisi lain, neraca dagang Agustus 2026 surplus US\$ 3,55 miliar dari sebelumnya US\$ 0,13 miliar.

“Surplus neraca dagang Agustus 2026 melebar menjadi US\$ 3,55 Miliar (Juli: US\$ 0,13 miliar), ditopang impor yang tercatat US\$ 23,06 miliar, jauh di bawah harapan ekonom di kisaran US\$ 26,5 miliar. Ekspor mencapai US\$ 26,61 miliar (6,72% YoY) didorong nikel, besi baja, dan aluminium. Impor masih naik 19,09% YoY,” demikian seperti dikutip dari riset Syailendra Capital.

Selain itu, pemerintah melaporkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang telah disahkan DPR pada 29 September 2026 dengan target pendapatan negara Rp 3.400 triliun dan belanja negara Rp 4.100 triliun, dengan defisit dipatok 2,4% Produk Domestik Bruto (PDB).

“Presiden Prabowo meminta APBN tetap kredibel dengan efisiensi terukur, sementara investasi akan lebih banyak dijalankan melalui Danantara,” demikian seperti dikutip dari riset Syailendra Capital.

Dari sentimen eksternal imbal hasil atau yield obligasi pemerintah AS turun dari level tertinggi multi-tahun setelah Presiden New York The Federal Reserve John Williams menuturkan, the Fed tidak perlu terburu-buru melanjutkan kenaikan suku bunga.

Sentimen Lainnya

Yield bertenor 10 tahun turun 4 bps ke 5,214% dan yield bertenor 30 turun 4,3 bps ke 5,550% (sehari sebelumnya 30 tahun sempat menyentuh 5,621%, tertinggi dalam 24 tahun). Data personal consumption expenditures (PCE) Agustus 2026 juga di bawah ekspektasi: headline 0,3% MoM (vs cons: 0,4%), core 0,2% MoM (vs cons: 0,3%), dengan core PCE 3,0% YoY (vs cons: 3,3%).

“Namun, tekanan di tenor panjang belum hilang akibat term premium yang tinggi dari defisit fiskal, besarnya pasokan Treasury, dan penerbitan utang korporasi untuk infrastruktur Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan,” demikian seperti dikutip dari riset Syailendra.

Selain itu, negara-negara G7 menyepakati pelepasan hingga 100 juta barel cadangan minyak mentah dan diesel dalam empat bulan ke depan.

Hal itu dikoordinasikan oleh International Energy Agency (IEA) setelah Presiden AS Donald Trump menekan Eropa dengan ancaman larangan ekspor diesel AS. Pelepasan diesel dalam jumlah besar dijadwalkan dalam 20 hari pertama, dan Trump menuturkan, AS tidak akan memberlakukan larangan ekspor. “Merespons hal tersebut, harga Brent dan WTI turun ke level US\$ 91 per barel dan US\$ 120 per barel,” demikian seperti dikutip dari riset Syailendra.

Hal yang Perlu Dicermati

Seiring sentimen itu, berikut dampak terhadap rupiah dan IHSG:

Pada pekan lalu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS naik tipis 0,10% ke level 17.888 per dolar AS. Selain itu, indeks dolar AS tercatat menguat ke level 101,92 pada pekan lalu.

Di pasar obligasi, obligasi bertenor 10 tahun naik ke level 7,17% yang diikuti dengan aliran dana asing sebesar Rp 715 miliar pada pekan lalu. Sementara itu, imbal hasil obligasi AS bertenor 10 tahun naik ke level 5,27% pada pekan lalu.

Di pasar saham, IHSG melemah 3,28% pada pekan lalu ke level 6.037 dengan aliran dana investor asing Rp 3,75 triliun. Sementara itu, indeks saham AS kompak melemah pekan lalu. Indeks S&P 500 turun 1%, indeks Nasdaq tergelincir 0,7% dan indeks Dow Jones merosot 1,7%.

Ekonomi Melambat, China Bersih-Bersih 670 Bank

Senin, 5 Oktober 2026 21:34 WIB

Agustina Melani

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/8306615/ekonomi-melambat-china-bersih-bersih-670-bank>

Liputan6.com, Jakarta - China mempercepat konsolidasi bank-bank kecil yang sebagian besar beroperasi di wilayah pedesaan. Hal ini untuk memperkuat sistem keuangan di tengah kekhawatiran yang terus berlanjut mengenai perlambatan ekonomi China.

Mengutip CNBC, Senin, (5/10/2026), menurut analisis Fitch Ratings, konsolidasi yang didorong kebijakan pemerintah China ini menyebabkan penutupan rekor sebanyak 670 lembaga pemberi pinjaman pada 2025, sekitar seperempat dari total bank di negara itu. Hal ini seiring langkah otoritas meningkatkan merger dan pembubaran demi menciptakan insitusi yang lebih sedikit jumlahnya, tetapi lebih besar dan memiliki modal kuat.

Dalam laporan Fitch, bank komersial kecil dan pedesaan "tetap menjadi bagian terlemah dari sistem" keuangan China. Laporan tersebut menyoroti "kualitas aset yang buruk, permodalan rendah, dan kelemahan tata kelola" pada bank-bank tersebut, khususnya di wilayah-wilayah yang kurang berkembang.

Lembaga pemeringkat tersebut menyatakan imbal hasil aset (return on assets) bank-bank pedesaan turun menjadi 0,45% pada semester pertama, dari sebelumnya 0,56% pada 2021. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (non-performing loans) pada bank-bank tersebut naik menjadi 2,8% pada periode yang sama, melampaui rata-rata sektor sebesar 1,5% akibat besarnya eksposur terhadap perusahaan kecil, pengembang properti, dan kendaraan pendanaan pemerintah daerah.

"Upaya konsolidasi ini bertujuan meningkatkan pengawasan, membatasi arbitrase regulasi, dan memperbaiki transparansi," kata Fitch.

Lembaga tersebut juga mencatat tekanan pada bank-bank kecil kemungkinan besar tidak akan memicu penularan masalah ke seluruh sistem keuangan, mengingat operasi mereka yang sebagian besar bersifat lokal dan terbatasnya eksposur antarbank.

Tekanan Ekonomi

Lembaga pemeringkat itu, menyebutkan langkah-langkah tersebut pada akhirnya dapat "mengubah dinamika persaingan di antara bank-bank kecil, meskipun kelemahan struktural mereka mungkin masih akan bertahan dalam jangka pendek.

Langkah ini diambil di tengah tanda-tanda tekanan ekonomi yang terus berlanjut pada ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut.

Produk Domestik Bruto (PDB) China tumbuh 4,3% pada kuartal kedua, laju pertumbuhan paling lambat sejak 2022, sementara laba industri tercatat tumbuh 4,2% secara tahunan pada Agustus, yang merupakan laju pertumbuhan terlemah sepanjang tahun ini.

Beban Wajib Masyarakat Naik 6,4%, Konsumsi Bisa Ikut Tertekan

Senin, 5 Oktober 2026 19:55 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/beban-wajib-masyarakat-naik-64-konsumsi-bisa-ikut-tertekan>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Beban pengeluaran masyarakat untuk pajak, pungutan, dan asuransi meningkat pada Maret 2026. Kenaikan ini dinilai berpotensi menekan ruang belanja rumah tangga, terutama jika pertumbuhan pendapatan tidak mampu mengimbangnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk kelompok pajak, pungutan, dan asuransi mencapai Rp 68.869 pada Maret 2026. Angka tersebut naik 6,43% dibandingkan Maret 2025 yang sebesar Rp 64.711.

Kenaikan tersebut menjadi yang tertinggi di antara kelompok komoditas bukan makanan.

BPS menyebut peningkatan pengeluaran pada kelompok tersebut tidak terlepas dari faktor penyesuaian tarif atau kebijakan terkait, serta semakin luasnya cakupan kepemilikan produk asuransi di masyarakat.

"Kenaikan pada kelompok pajak, pungutan, dan asuransi ini tidak terlepas dari faktor penyesuaian tarif atau kebijakan terkait, serta semakin luasnya cakupan kepemilikan produk asuransi di masyarakat," tulis BPS dalam laporan Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia Maret 2026 yang diunggah Senin (5/10/2026).

Jika dirinci, komponen terbesar berasal dari asuransi kesehatan yang mencapai Rp 41.904 per kapita per bulan. Kemudian, pengeluaran untuk pajak kendaraan bermotor dan tidak bermotor mencapai Rp 16.251.

Sementara pengeluaran untuk pungutan atau retribusi tercatat Rp 3.975 per kapita per bulan. Pengeluaran untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai Rp 2.497, sedangkan asuransi jiwa dan asuransi kerugian sebesar Rp 3.080.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Dipo Satria Ramli mengatakan kenaikan tersebut menunjukkan biaya hidup masyarakat memang semakin besar.

Namun, tekanan tersebut berbeda dengan kenaikan biaya hidup yang disebabkan oleh inflasi barang dan jasa.

"Di kasus ini bukan karena harga barang naik (seperti inflasi pada umumnya), tetapi dari beban wajib (fixed obligation). Kenaikan 6,4% per tahun ini hampir 2 kali dari inflasi," ujar Dipo kepada Kontan.co.id, Senin (5/10/2026).

Menurut Dipo, secara agregat dampak kenaikan pengeluaran pajak dan asuransi terhadap konsumsi rumah tangga masih relatif kecil karena porsinya baru sekitar 4,2% dari total pengeluaran.

Meski demikian, dia menilai persoalan utama bukan semata-mata besarnya porsi pengeluaran tersebut, melainkan siapa yang menanggung beban tersebut.

Dipo menjelaskan, kelas menengah formal merupakan kelompok yang memiliki peran penting dalam konsumsi barang dan jasa non-esensial. Ketika beban pengeluaran yang bersifat wajib meningkat, ruang untuk konsumsi diskresioner dapat semakin terbatas.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurrahman menilai, kenaikan pengeluaran pajak dan asuransi dapat memperberat biaya hidup ketika pendapatan masyarakat tidak tumbuh sebanding.

Namun, menurut dia, kenaikan 6,4% tersebut perlu dibedah lebih lanjut karena tidak seluruhnya dapat diartikan sebagai kenaikan tarif.

"Kenaikan pengeluaran pajak dan asuransi memperberat biaya hidup ketika pendapatan tidak tumbuh sebanding. Namun, kenaikan 6,4% tersebut perlu dibedah karena dapat berasal dari kenaikan tarif, bertambahnya kepesertaan, atau perluasan perlindungan," kata Rizal.

Menurut Rizal, persoalan yang lebih penting adalah kemampuan masyarakat dalam membayar kewajiban tersebut.

"Persoalan utamanya adalah kemampuan bayar. Ketika pembayaran yang sulit ditunda semakin besar, ruang belanja rumah tangga semakin sempit," ujarnya.

Dia memperkirakan apabila tekanan tersebut terus berlanjut, rumah tangga akan melakukan sejumlah penyesuaian. Masyarakat dapat menunda pembelian barang, beralih ke produk yang lebih murah, atau bahkan menggunakan tabungan.

Menurut dia, kondisi tersebut dapat membuat pengeluaran nominal masyarakat tetap meningkat, tetapi kemampuan memenuhi kebutuhan justru melemah.

Rizal menegaskan asuransi tetap penting untuk memberikan perlindungan kepada keluarga dari berbagai risiko finansial. Namun, penyesuaian pajak, iuran, dan premi harus mempertimbangkan kemampuan bayar masyarakat serta kualitas manfaat layanan.

Di sisi lain, Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai kenaikan pengeluaran tersebut perlu dilihat dengan memperhitungkan inflasi.

Dia mencatat pengeluaran pajak dan asuransi per kapita meningkat Rp 4.158, dari Rp 64.711 pada Maret 2025 menjadi Rp 68.869 pada Maret 2026.

Secara nominal, kenaikan tersebut mencapai 6,4%. Namun, dengan memperhitungkan inflasi Maret 2026 yang mencapai 3,48% secara tahunan, kenaikan riilnya hanya sekitar 2,92%.

"Mengingat inflasi Maret 2026 mencapai 3,48% yoy, kenaikan riil sesungguhnya hanya 2,92% saja. Bukanlah kenaikan yang signifikan," ujar Wijayanto.

Dia juga menyoroti besarnya porsi pengeluaran untuk asuransi kesehatan. Dari total pengeluaran Rp 68.869 per kapita per bulan, sekitar Rp 49.104 disebut merupakan pengeluaran untuk asuransi kesehatan.

Sementara itu, inflasi kelompok kesehatan pada Maret 2026 mencapai 6,7% secara tahunan.

"Jika inflasi kesehatan tersebut diperhitungkan, sesungguhnya kenaikan 6,4% semakin tidak signifikan," kata Wijayanto.

Kabinet Prabowo Makin Gemuk, Beban Permanen APBN Ikut Membesar

Senin, 5 Oktober 2026 18:49 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/kabinet-prabowo-makin-gemuk-beban-permanen-apbn-ikut-membesar>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Struktur pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang semakin gemuk berpotensi menambah beban permanen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bahkan ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah kabinet pemerintahan presiden di Indonesia.

Persoalannya bukan semata-mata besaran gaji menteri, wakil menteri atau pejabat baru, melainkan biaya yang mengikuti pembentukan struktur birokrasi baru.

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, biaya langsung berupa gaji pejabat relatif kecil yakni hanya ratusan miliar rupiah pertahun jika dibandingkan dengan total belanja negara yang sebesar Rp 3.942,4 triliun pada 2026.

Namun, pembentukan jabatan dan lembaga baru akan diikuti kebutuhan sekretariat, pejabat pendukung, kantor, fasilitas, hingga anggaran operasional yang berpotensi menjadi belanja rutin setiap tahun.

Menurutnya, biaya yang perlu dicermati justru berasal dari struktur pendukung yang tercipta setelah jabatan atau lembaga baru dibentuk. Ketika kebutuhan tersebut telah masuk dalam baseline APBN, belanja tersebut cenderung menjadi rutin dan sulit dikurangi kembali.

"Persoalannya bukan sekadar berapa besar gaji pejabat, tetapi seberapa besar biaya permanen yang tercipta dari struktur pemerintahan yang semakin besar," kata Yusuf kepada Kontan, Senin (5/10/2026).

Hal ini menjadi sorotan karena pemerintah sejak awal periode pemerintahan Prabowo justru mendorong efisiensi anggaran. Penghematan dilakukan pada sejumlah belanja teknis seperti perjalanan dinas dan belanja barang. Namun, pada saat yang sama, struktur birokrasi di level atas terus bertambah.

Data belanja pemerintah menunjukkan tekanan tersebut. Pada kuartal I 2026, belanja pegawai kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp 97,1 triliun atau tumbuh 22,2% secara tahunan. Sementara itu, hingga Juni 2026, belanja kementerian dan lembaga meningkat sekitar 40% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Yusuf menegaskan, kenaikan belanja tersebut memang tidak seluruhnya disebabkan oleh penambahan jumlah pejabat. Ada pula faktor lain, seperti penyesuaian penghasilan aparatur sipil negara (ASN) dan pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah. Namun, semakin besar struktur birokrasi, semakin besar pula belanja rutin yang harus dipertahankan.

"Di sinilah saya melihat pentingnya membedakan efisiensi operasional dengan efisiensi struktural. Kalau pemerintah hanya menghemat perjalanan dinas dan belanja barang, tetapi pada saat yang sama menciptakan struktur baru yang membutuhkan anggaran rutin setiap tahun, maka penghematannya belum menyentuh sumber biaya yang paling permanen," jelas Yusuf.

Menurut Yusuf, risiko fiskal dari kabinet yang semakin gemuk bukan berupa lonjakan belanja yang langsung mengguncang APBN. Risiko yang lebih besar justru berasal dari akumulasi biaya rutin yang terus terbawa ke tahun-tahun berikutnya.

Hal tersebut menjadi semakin relevan ketika ruang fiskal pemerintah terbatas. Defisit APBN 2026 diperkirakan mencapai Rp 734,3 triliun atau 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi dari target awal sebesar 2,68%.

Dengan kondisi tersebut, setiap tambahan belanja rutin perlu diuji secara ketat. Pasalnya, belanja birokrasi yang terus meningkat dapat mengurangi ruang pemerintah untuk mengalokasikan anggaran ke belanja yang lebih produktif.

“Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, setiap tambahan belanja rutin perlu diuji lebih ketat karena akan mengurangi ruang untuk belanja produktif atau menambah kebutuhan pembiayaan yang pada akhirnya menimbulkan beban bunga di tahun berikutnya,” ujar Yusuf.

Kabinet Prabowo Terbesar di Sejarah Indonesia

Jumlah pejabat dalam pemerintahan Prabowo memang meningkat signifikan dibandingkan sejumlah pemerintahan sebelumnya. Struktur Kabinet Merah Putih membesar seiring pemekaran kementerian, pembentukan lembaga baru, serta penambahan posisi pejabat di lingkungan pemerintahan.

Terbaru, Prabowo membentuk Kementerian Koordinator (Kemenko) Hilirisasi dan Energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga ditunjuk merangkap sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Energi.

Selain itu, pemerintah juga melantik 28 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada Jumat lalu.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penambahan struktur pemerintahan tersebut telah mulai diakomodasi dalam anggaran APBN tahun ini.

“Kalau sudah ada kantor Kemenko-nya, sudah ada anggarannya, sudah ada biaya operasionalnya ya harus dilengkapi. Tinggal nanti kita bikin apakah namanya bagian anggaran, tata kelolanya, administrasinya, bagian anggarannya, BA-nya berapa, dan seterusnya, itu dalam proses kita buat,” ujar Suahasil kepada awak media di Istana Kepresidenan, Senin (5/10/2026).

Gemuknya struktur kabinet baru tersebut menunjukkan bahwa pada akhirnya membutuhkan dukungan anggaran. Artinya, dampaknya terhadap APBN tidak berhenti pada biaya pelantikan atau gaji pejabat, tetapi berlanjut pada kebutuhan operasional lembaga.

Dalam riset/temuan Kontan, jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, jumlah pejabat dalam kabinet Prabowo juga menunjukkan peningkatan. Pada era Presiden Soeharto, jumlah anggota kabinet berada di kisaran 24 hingga 44 pejabat dalam tujuh periode Kabinet Pembangunan.

Pada era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, jumlah pejabat dalam Kabinet Persatuan Nasional sekitar 36–37 orang. Gus Dur bahkan membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, serta membentuk Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Setelah itu, struktur pemerintahan kembali membesar. Pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), jumlah pejabat kabinet mencapai sekitar 54 orang dan meningkat menjadi sekitar 70 pejabat pada era Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, struktur pemerintahan Prabowo menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Indonesia modern, setelah pembatasan jumlah kementerian maksimal 34 kementerian dihapus melalui revisi Undang-Undang Kementerian Negara.

Yusuf menilai, membesarnya struktur pemerintahan tidak otomatis menjadi masalah apabila menghasilkan manfaat yang sepadan. Bahkan Ia menilai hingga sampai saat ini di tahun kedua pemerintahan Prabowo, belum ada bukti yang menunjukkan bahwa penambahan kementerian, lembaga ataupun jabatan telah menghasilkan peningkatan kinerja yang sebanding dengan biaya tambahannya.

“Yang perlu dibuktikan adalah apakah struktur baru tersebut benar-benar mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas layanan, atau menghasilkan output yang sebelumnya tidak bisa dicapai. Kalau tidak ada peningkatan yang terukur, maka tambahan biaya birokrasi akan sulit dibenarkan,” tegasnya.

Data BPS: Warga Indonesia Makin Tertekan Tarif Pajak dan Asuransi

Senin, 5 Oktober 2026 16:43 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/data-bps-warga-indonesia-makin-tertekan-tarif-pajak-dan-asuransi>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pengeluaran masyarakat untuk kelompok pajak, pungutan, dan asuransi meningkat pada Maret 2026. Kenaikan tersebut menjadi yang tertinggi di antara kelompok komoditas bukan makanan.

Berdasarkan laporan Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia Maret 2026 yang diunggah pada 5 Oktober 2026, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk pajak, pungutan, dan asuransi mencapai Rp 68.869 pada Maret 2026.

Angka tersebut meningkat 6,43% dibandingkan Maret 2025 yang sebesar Rp 64.711.

BPS menyebut kenaikan pengeluaran pada kelompok tersebut tidak terlepas dari faktor penyesuaian tarif atau kebijakan terkait, serta semakin luasnya cakupan kepemilikan produk asuransi di masyarakat.

"Kenaikan pada kelompok pajak, pungutan, dan asuransi ini tidak terlepas dari faktor penyesuaian tarif atau kebijakan terkait, serta semakin luasnya cakupan kepemilikan produk asuransi di masyarakat," tulis BPS, Senin (5/10/2026).

Asuransi Kesehatan Jadi Komponen Terbesar

Jika dirinci, pengeluaran masyarakat dalam kelompok pajak, pungutan, dan asuransi paling banyak berasal dari asuransi kesehatan, yakni sebesar Rp 41.904 per kapita per bulan.

Sementara itu, pengeluaran untuk pajak kendaraan bermotor dan tidak bermotor mencapai Rp 16.251 per kapita per bulan. Pengeluaran untuk pungutan atau retribusi tercatat Rp 3.975, sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 2.497.

Adapun pengeluaran untuk asuransi jiwa dan asuransi kerugian mencapai Rp 3.080 per kapita per bulan.

Dengan demikian, dari total Rp 68.869 pengeluaran untuk kelompok pajak, pungutan, dan asuransi, komponen asuransi kesehatan menjadi yang terbesar.

Pengeluaran Kota Hampir Dua Kali Lipat Desa

Berdasarkan wilayah, terdapat perbedaan cukup besar antara masyarakat perkotaan dan perdesaan.

Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk pajak, pungutan, dan asuransi di perkotaan mencapai Rp 85.214, sedangkan di perdesaan Rp 44.263. Artinya, pengeluaran masyarakat perkotaan untuk kelompok tersebut hampir dua kali lipat dibandingkan masyarakat perdesaan.

Secara keseluruhan, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Indonesia pada Maret 2026 mencapai Rp 1.657.281. Di perkotaan, angkanya mencapai Rp 1.902.997, sedangkan di perdesaan Rp 1.287.359.

Porsi Pajak dan Asuransi Berbeda Antarkelas

Perbedaan juga terlihat berdasarkan kelompok pengeluaran. Pada kelompok masyarakat dengan pengeluaran terendah atau kuintil 1, pajak, pungutan, dan asuransi menyumbang 10,86% dari total pengeluaran non makanan.

Sementara itu, pada kuintil 5, atau kelompok dengan pengeluaran tertinggi, porsinya justru lebih kecil, yakni 7,72%. Namun secara nominal, kelompok kuintil 5 mengeluarkan jauh lebih besar.

Pengeluaran untuk pajak, pungutan, dan asuransi mencapai Rp 176.399 per kapita per bulan, dibandingkan hanya Rp 24.999 pada kuintil 1.

Cadangan Devisa Diprediksi Menyusut Jadi US\$ 144,9 Miliar pada September 2026

Senin, 5 Oktober 2026 15:30 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/cadangan-devisa-diprediksi-menyusut-jadi-us-1449-miliar-pada-september-2026>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Cadangan devisa Indonesia pada September 2026 diproyeksikan kembali mengalami penurunan seiring meningkatnya tekanan terhadap rupiah dan keluarnya modal asing dari pasar keuangan domestik.

Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede memproyeksikan, cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2026 berada di kisaran US\$ 144,9 miliar, turun sekitar US\$ 1,6 miliar dibandingkan posisi Agustus 2026 sebesar US\$ 146,5 miliar.

Menurut Josua, penurunan tersebut terutama dipengaruhi kondisi pasar keuangan pada September yang lebih menantang. Sepanjang September, terjadi arus keluar (outflow) modal asing sekitar Rp 23,72 triliun.

Outflow terbesar berasal dari Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sekitar Rp 15,02 triliun, diikuti pasar saham sekitar Rp 7,07 triliun. Sementara itu, Surat Berharga Negara (SBN) juga mencatat arus keluar sekitar Rp 1,63 triliun.

"Data portofolio yang kami gunakan juga menunjukkan total arus portofolio September tercatat net outflow sekitar US\$ 1,81 miliar, berbalik dari inflow sekitar US\$ 1,64 miliar pada Agustus," ujar Josua kepada Kontan, Senin (5/10/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pasokan devisa dari investasi portofolio berkurang ketika kebutuhan stabilisasi rupiah justru meningkat. Tekanan terhadap rupiah juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi posisi cadangan devisa.

Sepanjang September, nilai tukar rupiah sempat kembali mendekati level Rp 18.000 per dolar AS akibat kombinasi kenaikan imbal hasil surat utang Amerika Serikat (AS), harga minyak yang tinggi, serta meningkatnya ketidakpastian global.

Dalam kondisi tersebut, Bank Indonesia (BI) perlu tetap melakukan stabilisasi untuk menjaga nilai tukar rupiah. Namun, Josua bilang, tekanan terhadap cadangan devisa kemungkinan tidak sebesar episode intervensi sebelumnya.

Pasalnya, strategi stabilisasi BI saat ini semakin beragam dan tidak hanya mengandalkan penjualan dolar AS di pasar tunai. BI juga menggunakan instrumen seperti non deliverable forward (NDF), domestic non deliverable forward (DNDF), transaksi pertukaran valuta asing, serta pengelolaan daya tarik SBN dan SRBI.

"Materi BI akhir September secara eksplisit menunjukkan strategi stabilisasi melalui kombinasi pasar tunai, NDF dan DNDF, sekaligus penguatan instrumen lindung nilai. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa kami memperkirakan penurunan cadangan devisa bersifat moderat, bukan sangat tajam," jelas Josua.

Data pasar domestik juga menunjukkan tekanan terhadap aliran modal asing selama September. Posisi SRBI turun dari sekitar Rp 1.062,9 triliun pada akhir Agustus menjadi sekitar Rp 1.028,1 triliun pada akhir September.

Sementara itu, kepemilikan SBN oleh investor nonresiden relatif stagnan, bahkan sedikit turun dari sekitar Rp 908 triliun menjadi sekitar Rp 907 triliun.

Dengan demikian, selama September belum terlihat tambahan arus modal asing melalui instrumen rupiah yang cukup besar untuk sepenuhnya mengimbangi tekanan dari kebutuhan devisa dan stabilisasi nilai tukar.

Meski begitu, Josua menilai kondisi sektor eksternal Indonesia belum menunjukkan tekanan yang bersifat sistemik. Secara kumulatif, arus modal asing sepanjang tahun berjalan masih positif sekitar Rp 131 triliun.

Selain itu, terdapat sejumlah faktor yang dapat menahan penurunan cadangan devisa agar tidak lebih dalam. Salah satunya berasal dari kinerja perdagangan Indonesia.

Neraca perdagangan Agustus 2026 mencatat surplus sekitar US\$ 3,55 miliar, sehingga fundamental pasokan devisa dari sektor perdagangan masih memberikan bantalan bagi sektor eksternal.

Posisi cadangan devisa pada Agustus juga masih setara sekitar 5,4 bulan impor, jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Josua menambahkan, pergerakan cadangan devisa setiap bulan tidak hanya ditentukan oleh intervensi BI terhadap rupiah. Penerimaan pajak dan jasa dalam valuta asing, penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, hingga pembayaran utang luar negeri pemerintah juga turut memengaruhi posisi cadangan devisa.

"Karena itu, arus pemerintah menjadi sumber ketidakpastian terbesar terhadap angka aktual September," ungkapnya.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, Josua memperkirakan cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2026 berada di kisaran US\$ 144,5 miliar hingga US\$ 145,5 miliar, dengan titik tengah sekitar US\$ 144,9 miliar.

"Jadi tekanan terhadap rupiah dan keluarnya modal asing selama September berpotensi menyebabkan cadangan devisa terkoreksi setelah meningkat pada Agustus," ujar Josua.

Meski begitu, menurut Josua penurunannya masih tertahan oleh posisi eksternal yang relatif memadai, surplus perdagangan, dan strategi intervensi Bi yang semakin hemat penggunaan cadangan devisa.

53.490 Pekerja Kena PHK hingga Agustus, Ini PR Pemerintah di Tahun Ketiga Prabowo

Senin, 5 Oktober 2026 11:06 WIB

Reporter: Lailatul Anisah, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/53490-pekerja-kena-phk-hingga-agustus-ini-pr-pemerintah-di-tahun-ketiga-prabowo>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menjadi tantangan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memasuki tahun ketiga. Data sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) menunjukkan sebanyak 53.490 pekerja melaporkan PHK sepanjang Januari hingga Agustus 2026.

Direktur Eksekutif Garuda Institute Bahtiar Sebayang mengatakan, angka tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penciptaan lapangan kerja perlu berjalan beriringan dengan upaya mempertahankan pekerjaan yang sudah ada.

“Ini menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja harus berjalan beriringan dengan kebijakan mempertahankan pekerjaan yang sudah ada. Transformasi industri jangan hanya dilihat dari sisi efisiensi, tetapi juga harus memperhatikan transisi pekerja,” ujar Bahtiar dalam keterangan resminya, Senin (5/10/2026).

Bahtiar menegaskan, data 53.490 pekerja tersebut merupakan jumlah pekerja yang tercatat melaporkan PHK melalui sistem JKP, sehingga tidak mencerminkan keseluruhan PHK yang terjadi di Indonesia.

Meski demikian, menurut dia, persoalan PHK perlu menjadi perhatian pemerintah di tengah perubahan struktur industri dan percepatan digitalisasi.

Pemerintah tidak cukup hanya mengejar penciptaan lapangan kerja baru, tetapi juga perlu memastikan pekerja yang terdampak perubahan industri memiliki akses untuk kembali masuk ke pasar kerja.

Karena itu, program JKP dinilai perlu terus diperkuat sebagai bantalan sosial sekaligus jembatan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.

“Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) harus terus diperkuat sebagai bantalan sosial sekaligus jembatan agar pekerja yang kehilangan pekerjaan dapat kembali memasuki pasar kerja,” jelas Bahtiar.

Selain persoalan PHK, tantangan lain yang perlu dihadapi pemerintah adalah meningkatkan kualitas pekerjaan yang tersedia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Mei 2026 jumlah angkatan kerja mencapai 155,41 juta orang, sementara penduduk yang bekerja sebanyak 148,19 juta orang.

Jumlah penduduk bekerja tersebut meningkat 522.000 orang dibandingkan Februari 2026. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Mei 2026 tercatat sebesar 4,65%, turun 0,03% poin dibandingkan Februari 2026.

Rata-rata upah buruh pada Mei 2026 tercatat sebesar Rp 3,39 juta per bulan.

Bahtiar menilai perkembangan tersebut menunjukkan pasar kerja Indonesia masih bergerak. Namun, indikator tersebut belum berarti persoalan ketenagakerjaan telah selesai.

“Angka tersebut menunjukkan bahwa pasar kerja Indonesia tetap bergerak. Ini tentu belum berarti seluruh persoalan ketenagakerjaan selesai, tetapi menjadi salah satu indikator bahwa pasar kerja memiliki daya tahan di tengah dinamika ekonomi global,” ujarnya.

Menurut Bahtiar, tantangan pemerintah ke depan bukan hanya menciptakan pekerjaan dalam jumlah besar, tetapi memastikan pekerjaan tersebut semakin produktif, layak, dan terlindungi serta mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 53.490 tenaga kerja melaporkan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari hingga Agustus 2026.

Data tersebut tercatat dalam Sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Kemnaker. Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi penyumbang PHK terbanyak, yakni 10.880 orang atau sekitar 20,34% dari total laporan.

"Tenaga kerja terkena PHK paling banyak menurut provinsi domisili tenaga kerja pada periode ini terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 20,34%," tulis Kemnaker.

Setelah Jawa Barat, Banten menjadi provinsi dengan jumlah laporan PHK terbanyak kedua, yakni 6.303 orang. Kemudian disusul Jawa Timur 5.400 orang, Jawa Tengah 4.769 orang, dan DKI Jakarta 3.900 orang.

Jika dilihat berdasarkan bulan terjadinya PHK, jumlah laporan tertinggi tercatat pada Juni 2026 sebanyak 9.028 orang. Selanjutnya Mei 9.019 orang, April 8.498 orang, Februari 7.913 orang, Maret 7.187 orang, Januari 5.967 orang, Juli 4.897 orang, dan Agustus 981 orang.

Rupiah Kalah Lawan Dolar dan Mata Uang Asia

Senin, 5 Oktober 2026 13:16 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/123629/rupiah-kalah-lawan-dolar-dan-mata-uang-asia/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pergerakan rupiah sepanjang 2026 menunjukkan pelemahan yang tak bisa diabaikan. Bukan cuma melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), bahkan rupiah juga melemah terhadap semua mata uang utama Asia.

Melansir data Bloomberg, per Senin (5/10/2026), sepanjang tahun ini rupiah melemah di hadapan semua mata uang Asia. Pelemahan rupiah paling tajam terjadi terhadap won Korea Selatan yang melemah hingga 12,8%. Bahkan pelemahan ini lebih tajam ketimbang rupiah melemah terhadap dolar AS yang tercatat 6,93%.

Sejak awal tahun ini, dolar AS memang cenderung menguat. Hanya won Korea Selatan, yuan China, dan yuan offshore, serta dolar Singapura yang mencatat penguatan terhadap dolar AS sepanjang 2026.

Sementara, sebagian mata uang Asia lainnya melemah. Bloomberg mencatat rupiah menjadi mata uang terlemah di kawasan Asia terhadap dolar AS dengan pelemahan 6,93% sepanjang tahun ini, per Senin (5/10/2026).

Posisi mata uang Asia terhadap rupiah yang menguat menunjukkan bahwa persoalan pelemahan rupiah tak cuma disebabkan oleh dolar AS. Fakta bahwa hampir semua mata uang Asia bergerak menguat terhadap rupiah, maka ada faktor spesifik domestik yang membuat rupiah tertinggal dibandingkan mata uang regional.

Tekanan Eksternal & Domestik

Tekanan terhadap rupiah memang pertama-tama berasal dari lingkungan global yang tidak bersahabat. Kenaikan harga minyak mentah sepanjang tahun ini, membuat posisi rupiah kian terjepit. Pasalnya, harga minyak mentah yang bertahan di atas US\$100/barel jauh dari harga minyak dalam acuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang ditetapkan senilai US\$70/barel.

Di samping itu, kenaikan harga minyak ini merembet pada kekhawatiran akan inflasi berkepanjangan dan menyebabkan US Treasury melonjak ke 5,25%. Kombinasi kenaikan harga minyak dan yield US Treasury mendorong investor global meningkatkan posisi bearish pada sejumlah mata uang di Asia.

Akan tetapi, faktor global saja tak cukup menjelaskan mengapa rupiah bisa tertinggal begitu jauh dari mata uang kawasan. Won Korea Selatan, misalnya, justru menjadi mata uang dengan penguatan terbesar. Padahal, negara ini juga mendapat sentimen serupa dengan tingginya harga minyak mentah dan kenaikan US Treasury.

Rupanya, salah satu pembeda utamanya adalah kondisi fundamental eksternal Korea Selatan yang lebih kuat. Terutama, dukungan dari ekspor semikonduktor dan surplus transaksi berjalan. Bantalan ini setidaknya membuat won tetap mendapat dukungan posisi bullish investor lantaran prospek ekspornya berbasis kecerdasan buatan (ASI) yang terhubung dengan rantai pasok global.

Kondisi itu membuat cadangan devisa Korea Selatan berada di US\$442,28 miliar. Jauh dari posisi Indonesia yang berada di level US\$146,5 miliar.

Lebih lanjut, ringgit Malaysia juga memiliki bantalan yang tak dipunya Indonesia dalam skala yang sama. Malaysia merupakan eksportir energi, sehingga ketika harga minyak melonjak, dampaknya terhadap neraca eksternal tidak sepenuhnya negatif. Bahkan, kenaikan harga energi dapat memberi tambahan penerimaan ekspor bagi Malaysia.

Tak seperti Korea Selatan yang mendapatkan keuntungan dari ledakan teknologi, Indonesia masih mengandalkan komoditas basis alam untuk menopang kinerja ekspornya. Komoditas alam sangat bergantung pada fluktuasi harga yang kemudian akan berpengaruh pada kinerja neraca dagang.

Selain itu, sebagai negara yang masih mengandalkan impor energi, kenaikan harga minyak justru meningkatkan kebutuhan dolar AS di dalam negeri, sekaligus menambah tekanan inflasi domestik yang masuk lewat jalur impor.

Perbedaan kondisi fundamental itu membuat perubahan yang terjadi pada harga minyak menjadi faktor yang memperlebar disparitas kinerja mata uang Asia. Ketika harga minyak global naik, investor tidak cuma melihat negara mana yang menawarkan suku bunga tinggi, tapi juga negara mana yang paling rentang terhadap kenaikan biaya energi.

Setidaknya ada tiga negara yang punya kerentanan terhadap kenaikan biaya energi. Indonesia, Thailand, Filipina, dan India. Keempat negara ini cenderung rentang lantaran importir minyak dan berisiko menghadapi inflasi serta adanya pelebaran defisit eksternal.

Sehingga, meskipun otoritas moneter menjaga yield obligasi melalui pembelian surat utang, namun yield itu bisa jadi dianggap belum cukup untuk mengimbangi risiko yang mereka tanggung. Sebab, risiko pelemahan rupiah dan ketidakpastian global jauh lebih besar daripada yield yang ditawarkan.

Pada perdagangan hari ini, yield sebagian besar tenor tercatat naik yang menandakan adanya aksi jual. Yield tenor 10 tahun, misalnya, terangkat 2,2 basis poin (bps) jadi 7,18%, begitu juga dengan tenor 5 tahun mengalami kenaikan yield 2,3 bps jadi 7,07%.

Untuk diketahui, posisi outstanding obligasi pemerintah RI sejak September kembali menghadapi tekanan. Setelah sempat mencapai puncak Rp920,26 triliun, posisi outstanding kembali turun dan kini berada di Rp908,7 triliun.

Koreksi ini terjadi kala yield US Treasury kembali berada di level tinggi, dan harga minyak persisten di atas US\$100/barel, membuat investor kembali mencermati risiko inflasi serta arah suku bunga global.

Kinerja Neraca Dagang

Seperti disebutkan bahwa Indonesia masih mengandalkan komoditas berbasis alam sebagai penopang kinerja eksportnya. Kinerja ini sangat bergantung pada fluktuasi harga komoditas global dan kondisi perekonomian negara mitra dagang sebagai pembeli.

Pada Agustus, surplus dagang Indonesia ada di US\$3,55 miliar. Angka ini memang jauh di atas perkiraan pasar.

Namun jika melihat secara kumulatif, maka surplus sepanjang Januari-Agustus adalah US\$7,25 miliar. Turun tajam dibandingkan US\$29,35 miliar pada periode sama tahun sebelumnya.

Artinya, surplus perdagangan tahun ini memang masih bisa menjadi bantalan bagi rupiah, tetapi kekuatannya tak lagi sebesar tahun lalu. Padahal, di saat yang sama harga minyak cenderung melambung dan kebutuhan valuta asing untuk impor energi justru bertambah. Hal ini membuat kemampuan surplus perdagangan untuk mengimbangi arus modal keluar jadi kian terbatas.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk (BNLI) Josua Pardede menyebut bahwa arah inflasi, arus modal, neraca perdagangan, dan respons Bank Indonesia (BI) akan menjadi penentu pergerakan rupiah berikutnya.

"Ada penyangga domestik yang perlu diperhitungkan. Surplus perdagangan Agustus meningkat menjadi US\$3,55 miliar dari US\$0,12 miliar pada Juli," sebut Josua.

Namun, menurutnya, peningkatan surplus tersebut yang berasal dari penurunan impor belum bisa diartikan sebagai penguatan ekspor yang berkelanjutan. Josua menambahkan, untuk membaca arah rupiah ke depan, pasar tak cukup hanya melihat pergerakan kurs, tetapi juga akan mencermati kualitas surplus perdagangan, arus dana asing, harga minyak, serta kecukupan cadangan devisa.

Pekan ini, pelaku pasar akan mencermati data cadangan devisa September. Pada Agustus, devisa Indonesia tercatat US\$146,5 miliar. Cadangan tersebut dinilai masih cukup bagi bank sentral dalam menjaga stabilitas rupiah.

Namun, pelaku pasar tak cuma melihat besaran nilai devisa, melainkan juga perubahan dari bulan sebelumnya dan faktor apa yang menyebabkan bertambahnya devisa tersebut. Sebagai catatan, posisi cadangan devisa pada Agustus sempat naik ketimbang posisi Juli yang sebesar US\$145,3 miliar. Namun, devisa tersebut didapat dari penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, bukan kinerja ekspor.

Ekonom: Tekanan Pangan & Energi Bisa Dorong Laju Inflasi Q4-2026

Senin, 5 Oktober 2026 08:40 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/123596/ekonom-tekanan-pangan-energi-bisa-dorong-laju-inflasi-q4-2026/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Laju inflasi pada September 2026 tercatat sebesar 3,28% secara tahunan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) meningkat dari 108,74 pada September 2025 menjadi 112,31 pada September 2026. Meski angka ini lebih rendah dari proyeksi konsensus, ekonom meminta agar pemerintah tetap waspada.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyebut bahwa saat ini inflasi September 2026 yang sebesar 3,28% secara tahunan masih berada dalam batas sasaran Bank Indonesia (BI) sebesar $2,5\% \pm 1\%$, sehingga secara teknis masih terkendali.

Meski demikian, patut diwaspadai karena posisinya sudah cukup dekat dengan batas atas 3,5%, sehingga ruang kenyamanannya semakin tipis.

Sementara itu, inflasi inti turun menjadi 2,84%, sementara inflasi umum naik dari 3,19% pada Agustus menjadi 3,28% pada September.

Hal ini menurutnya menunjukkan bahwa tekanan saat ini lebih banyak berasal dari sisi pasokan, terutama pangan dan energi, bukan karena permintaan masyarakat sudah terlalu kuat. Secara bulanan inflasi September mencapai 0,30%, sedangkan sejak awal tahun mencapai 2,17%.

“Risiko terbesar ke depan memang datang dari El Niño dan harga energi. Dalam proyeksi kami sebelum rilis September, harga cabai, beras, daging ayam dan telur sudah menunjukkan kecenderungan meningkat, dan dampak awal El Niño mulai terlihat pada harga pangan,” kata Josua kepada Bloomberg Technoz baru-baru ini.

Pada saat yang sama, harga minyak global yang tinggi meningkatkan harga bahan bakar nonsubsidi, avtur, biaya angkutan dan akhirnya biaya distribusi.

“Kami memperkirakan tekanan El Niño terhadap harga pangan akan semakin terasa menjelang akhir tahun, sementara tingginya harga energi meningkatkan kemungkinan kenaikan biaya transportasi dan produksi diteruskan kepada konsumen,” katanya.

Arah Risiko Condong ke Atas

Josua melihat angka inflasi 3,28% masih aman, tetapi arah risikonya sudah condong ke atas. Ia mewanti-wanti mengenai satu indikator yang perlu sangat diperhatikan, yaitu harga di tingkat produsen dan perdagangan besar.

Pada September, Indeks Harga Perdagangan Besar sudah meningkat 6,76% secara tahunan, jauh di atas inflasi konsumen 3,28%.

Komoditas yang mengalami kenaikan termasuk solar industri, elpiji nonsubsidi, beras, minyak pelumas, aspal, baja dan semen. Kesenjangan ini dapat dibaca sebagai tekanan biaya yang belum seluruhnya diteruskan kepada konsumen.

“Artinya, perusahaan masih menyerap sebagian kenaikan biaya melalui penurunan margin. Jika kondisi berlangsung lama, sebagian biaya tersebut akan mulai diteruskan ke harga jual,” kata Josua.

Josua menyebut bahwa transmisinya ke sektor riil terjadi melalui beberapa jalur. Pertama, industri dengan ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor akan menghadapi kombinasi rupiah lemah dan harga komoditas global tinggi. Biaya produksi naik, sehingga perusahaan harus memilih antara menaikkan harga atau menerima penurunan margin.

Kedua, energi mahal meningkatkan biaya transportasi, logistik, pergudangan dan distribusi sehingga tekanannya menyebar jauh melampaui sektor energi.

Ketiga, El Niño dapat mengurangi pasokan pangan dan mendorong harga bahan pangan, yang kemudian juga meningkatkan biaya industri makanan-minuman, restoran dan jasa boga.

“Kami memang sudah melihat risiko pelemahan rupiah menambah biaya bahan baku impor dan memperkuat inflasi dari sisi pasokan,” katanya.

Bagi daya beli rumah tangga, kuartal IV menjadi periode yang perlu diwaspadai, tetapi belum berarti konsumsi akan jatuh tajam.

Dampaknya akan paling terasa pada kelompok berpendapatan rendah dan menengah karena porsi belanja mereka untuk makanan, transportasi dan energi relatif besar.

Ketika harga pangan naik, rumah tangga biasanya tidak banyak mengurangi konsumsi beras, telur atau transportasi, tetapi mengurangi belanja lain yang lebih mudah ditunda seperti pakaian, elektronik, rekreasi dan makan di luar rumah.

“Jadi tekanan inflasi dapat berpindah dari sektor pangan menuju perlambatan permintaan sektor konsumsi lainnya. Risiko tersebut menjadi lebih besar apabila harga pangan tinggi bertepatan dengan kenaikan biaya transportasi menjelang akhir tahun,” katanya.

Namun menurut Josua, ada satu hal yang relatif menenangkan, yaitu inflasi inti masih moderat. Ini berarti kenaikan harga belum berubah menjadi tekanan inflasi yang menyebar luas melalui upah dan permintaan.

“Karena itu, respons kebijakan menurut saya jangan terlalu cepat hanya mengandalkan kenaikan suku bunga, sebab sumber masalah utamanya saat ini berada pada pasokan,” kata Josua.

Josua menyebut, salah satu pengendalian yang lebih efektif adalah memastikan stok beras dan pangan strategis, memperlancar distribusi antardaerah, memperkuat cadangan pangan, menjaga kelancaran impor ketika produksi domestik terganggu, serta menahan kenaikan biaya logistik dan energi selama ruang fiskal memungkinkan.

BI sendiri masih menilai inflasi berada dalam sasaran dan menekankan koordinasi pengendalian pangan untuk mengantisipasi El Niño.

Inflasi Bisa Capai 3,6%.

Sementara di akhir tahun, sebelumnya Josua memperkirakan inflasi akan mencapai di sekitar 3,13%, dengan asumsi harga energi bersubsidi tidak mengalami penyesuaian.

Setelah realisasi September sebesar 3,28%, yang sedikit lebih rendah dibanding perkiraan sebelumnya sebesar 3,35%, Josua masih melihat kisaran sekitar 3,1–3,3% pada Desember sebagai skenario dasar, dengan titik tengah sekitar 3,2%.

Namun dengan risiko yang cukup jelas ke atas, terlebih jika El Niño menjadi lebih kuat dari perkiraan, harga pangan melonjak, rupiah melemah lebih dalam atau pemerintah perlu menyesuaikan harga energi, inflasi bisa saja bergerak lebih liar.

“Inflasi dapat bergerak menuju 3,4–3,6%, sehingga berpotensi menyentuh atau sementara melewati batas atas sasaran BI,” kata Josua.

Sehingga Ia menyarankan agar pada tiga bulan ke depan perhatian utama pemerintah bukan hanya mempertahankan inflasi di bawah 3,5%, tetapi apakah kenaikan harga mulai menyebar dari pangan dan energi menuju barang serta jasa lain.

Selama inflasi inti tetap di bawah 3%, tekanan masih relatif terkonsentrasi dan dapat ditangani terutama melalui kebijakan pasokan.

“Tetapi jika harga pangan, energi, rupiah dan biaya produsen naik secara bersamaan serta mulai mendorong inflasi inti, maka risiko terhadap daya beli, margin dunia usaha, suku bunga dan pertumbuhan ekonomi akan menjadi jauh lebih besar,” kata Josua.

Ekonom: Stimulus Q4-2026 Berpotensi Ditambal PNBP & Realokasi

Senin, 5 Oktober 2026 10:40 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/123616/ekonom-stimulus-q4-2026-berpotensi-ditambal-pnbp-realokasi/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah mempersiapkan sejumlah insentif di kuartal IV-2026 yang bertujuan untuk memperkuat jaring pengaman sosial, kapasitas tenaga kerja, serta stimulus sektor manufaktur dan perumahan. Dalam rilis terakhirnya, pemerintah mempersiapkan pendanaan sebesar Rp31 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyebut bahwa komposisi stimulus Rp31 triliun tersebut 95%-nya merupakan bantuan belanja sosial, yang tak bisa dibiayai sendiri,

“Dengan rasio pajak sekitar 10% terhadap PDB [Produk Domestik Bruto], tambahan aktivitas ekonomi dari stimulus Rp31 triliun secara kasar hanya dapat menghasilkan penerimaan pajak sekitar Rp3 triliun. Dampaknya terhadap penerimaan tetap positif, tetapi tidak cukup untuk menutup seluruh biaya program,” katanya kepada Bloomberg Technoz, Senin (5/10/2026)

Sementara itu, dari sisi pendapatan negara, kinerja agregat hingga Agustus memang kuat, mencapai Rp2.055 triliun atau tumbuh 25,4%.

Namun, ruang dari penerimaan pajak tetap terbatas. Realisasinya baru 59,8% dari target, sedangkan proyeksi akhir tahun sekitar Rp2.310,8 triliun atau 98% dari target Rp2.357,7 triliun.

Artinya, masih ada kekurangan sekitar Rp47 triliun. Bea dan cukai juga belum dapat menjadi penopang utama karena pertumbuhannya hanya 7,8%.

Ruang yang paling memungkinkan menurut Yusuf berasal dari PNBP dengan realisasi yang telah mencapai Rp435,1 triliun atau 94,8% dari target, dengan pertumbuhan 41,7%.

PNBP menurutnya berpotensi melampaui target, terutama ketika harga minyak mendekati US\$100 per barel. Meski demikian, kenaikan harga minyak juga meningkatkan subsidi dan kompensasi energi. Tambahan bersih bagi APBN akan lebih kecil daripada kenaikan penerimaan migas secara bruto.

“Dengan kondisi tersebut, pembiayaan stimulus kemungkinan berasal dari kombinasi kelebihan PNBP dan realokasi anggaran yang penyerapannya lambat,” kata Yusuf.

Pentingnya Realokasi Agar Defisit tak Melebar

Proses penyisiran anggaran oleh Kementerian Keuangan juga menunjukkan bahwa realokasi akan menjadi sumber utama. Pilihan ini penting karena defisit akhir tahun diproyeksikan mencapai 2,85% terhadap PDB.

“Jika seluruh stimulus menjadi belanja tambahan tanpa realokasi, defisit akan bergerak sangat dekat dengan batas 3%, terutama ketika pasar SBN sedang sensitif,” katanya.

Menurutnya, insentif PPh 21 DTP dapat membantu menambah pendapatan siap belanja pekerja, sedangkan PPN DTP perumahan memiliki efek berantai ke berbagai sektor. Namun, desain kebijakannya perlu lebih terarah.

PPN DTP penuh untuk rumah hingga Rp2 miliar, yang manfaatnya juga dapat dinikmati pembeli rumah dengan harga hingga Rp5 miliar, belum sepenuhnya menyasar kelompok yang paling membutuhkan dukungan daya beli.

“Setiap insentif sebaiknya memiliki batas waktu, sasaran yang jelas, serta evaluasi dampak terhadap konsumsi, investasi, dan penerimaan. Ruang fiskalnya perlu dijaga melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan,” katanya.

Menurut Yusuf, secara keseluruhan, stimulus tersebut relatif kecil dibandingkan ukuran perekonomian sehingga lebih tepat dipandang sebagai bantalan konsumsi, bukan pengungkit utama pertumbuhan.

Bantuan kepada kelompok berpendapatan rendah cukup efektif menjaga daya beli karena sebagian besar tambahan pendapatan cenderung langsung dibelanjakan.

“Namun, kemampuannya untuk mendorong pertumbuhan kuartal IV tetap terbatas dan sangat bergantung pada kecepatan serta ketepatan penyaluran, mengingat aturan pelaksanaannya masih disiapkan,” katanya.

Pemerintah mempersiapkan sejumlah insentif di kuartal IV-2026 yang bertujuan untuk memperkuat jaring pengaman sosial, kapasitas tenaga kerja, serta stimulus sektor manufaktur dan perumahan.

“Penyiapan alokasi anggaran sementara sekitar Rp31 triliun yang tengah disisir Kementerian Keuangan difokuskan agar seluruh program tersebut dapat langsung dirasakan manfaatnya dan menjadi fondasi kokoh menuju pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2027,” sebut Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (5/10/2026).

Menurutnya, hal ini dilakukan untuk memperkuat perekonomian nasional melalui kebijakan yang berfokus pada perlindungan daya beli masyarakat, perluasan kesempatan kerja, dan keberlanjutan dunia usaha.

“Pemerintah berkomitmen memastikan pemulihan ekonomi berjalan inklusif dengan memperkuat proteksi sosial sekaligus mendorong produktivitas sektor riil. Berbagai program lanjutan untuk kuartal IV-2026 dan tahun 2027 dirancang terukur untuk menjaga daya beli, memperkuat daya saing pekerja, serta menopang keberlanjutan dunia usaha,” katanya.

Haryo bilang, sejumlah program prioritas yang akan dijalankan tersebut disepakati dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan, serta pimpinan kementerian/lembaga teknis terkait di Istana Negara.

Sebagai langkah responsif pada Kuartal IV-2026, Pemerintah menyiapkan sejumlah program dan stimulus. Berikut daftarnya:

Program Pembukaan Rekening Bank Untuk Warga di Atas 17 Tahun

Program pembukaan rekening bank bagi seluruh warga negara berusia di atas 17 tahun yang difokuskan pada masyarakat kelompok desil 1 hingga desil 4.

Saat ini, penetapan jumlah sasaran penerima manfaat tengah menjalani proses cross-check data antar Kementerian/Lembaga terkait guna memastikan ketepatan penyaluran.

Bantuan Beras Rp17,5 triliun

Guna menjaga ketahanan pangan, Pemerintah menyalurkan bantuan beras 10 kg per bulan untuk periode Oktober hingga Desember 2026 senilai Rp17,5 triliun kepada 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) desil 1–4.

Bantuan Subsidi Upah

Pelindungan pekerja juga diperkuat melalui Bantuan Subsidi Upah (BSU) tiga bulan sebesar Rp300 ribu per bulan bagi 13,3 juta pekerja dengan anggaran hampir Rp12 triliun.

Program Magang Nasional

Memasuki 2027, Pemerintah melanjutkan program magang bagi 150 ribu peserta dan pelatihan vokasi bagi 300 ribu orang.

Pengurangan PPh Pasal 21 bagi Pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 Juta

Pengurangan PPh Pasal 21 bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan diperluas ke seluruh sektor untuk 7,5 juta pekerja, serta dilakukan pembahasan penyesuaian PTKP bersama Kementerian Keuangan.

Perpanjangan Fasilitas PPN DTP Perumahan

Dukungan sektor perumahan dipacu melalui perpanjangan fasilitas PPN DTP hingga 2027 untuk rumah sampai Rp2 miliar, serta PPN DTP atas bagian harga hingga Rp2 miliar untuk rumah berharga sampai Rp5 miliar. Pemerintah juga menyiapkan KPR bersubsidi bunga 6% bagi masyarakat berpenghasilan tetap sekitar Rp17 juta untuk rumah hingga Rp500 juta.

Diskon Iuran JKK dan JKM

Pada aspek ketenagakerjaan, diskon iuran JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah dilanjutkan pada 2027, sementara pemanfaatan JKP selama enam bulan disesuaikan dengan skala penghasilan.

PPN Logam Mulia

Di sektor industri perhiasan, Pemerintah menyusun standar PPN baru untuk logam mulia kadar 99,9% guna mempermudah pemanfaatan fasilitas fiskal.

Awal Pekan Harga Cabai Makin Pedas, Rawit Tembus Rp101.000/Kg

Senin, 5 Oktober 2026 13:30 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/123631/awal-pekan-harga-cabai-makin-pedas-rawit-tembus-rp101-000-kg/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Sejumlah harga komoditas pangan mengalami kenaikan pada awal pekan ini, Senin (5/10/2026). Harga cabai rawit secara nasional mencapai Rp101.850 per kilogram, usai naik 2,21% dibandingkan kemarin. Varian cabai lainnya naik di atas 10% lebih.

Dilansir laman Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia, kenaikan juga terjadi pada komoditas beras medium II, yang naik 0,3% menjadi Rp16.450 per kilogram. Sementara itu pada beras medium I harga tetap di kisaran Rp16.600 per kilogram.

Kenaikan harga juga terjadi pada varian cabai lainnya. Cabai merah besar memimpin tren kenaikan 14,4% hingga hari ini tercatat pada Rp67.000 per kilogram. Cabai Merah Keriting naik sebesar 12,5% menjadi Rp80.350 per kilogram.

Sementara itu cabai rawit hijau naik 6,9% menjadi Rp73.700 per kilogram. Komoditas lainnya yang mengalami kenaikan yakni telur, yang naik sebesar 0,3% membuat harga rata-rata nasional mencapai Rp30.000 per kilogram.

Penurunan harga terjadi pada varian daging. Daging ayam segar berada di harga Rp41.750 per kilogram usai turun 0,95%. Penurunan juga terjadi pada komoditas daging sapi, meski hanya turun 0,05% dari harga kemarin. Daging sapi kualitas super berada pada kisaran harga Rp152.500 per kilogram.

PIHPS Nasional menyediakan informasi harga komoditas pangan strategis secara harian di 164 pasar tradisional di 82 kota di Indonesia. Pengembangan PIHPS Nasional ditujukan untuk memberikan akses informasi harga pangan terkini bagi masyarakat dan sekaligus mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi.

Nawal Yasin Dorong Inovasi Batik Lokal, Perkuat Identitas Wisata dan Ekonomi Kreatif

Senin, 5 Oktober 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/nawal-yasin-dorong-inovasi-batik-lokal-perkuat-identitas-wisata-dan-ekonomi-kreatif/>

SRAGEN – Inovasi batik di Jawa Tengah perlu terus dilakukan dengan mengangkat karakter dan potensi khas setiap daerah. Pengembangan itu dinilai dapat memperkuat identitas pariwisata, sekaligus membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi kreatif.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, saat menjadi narasumber dalam Talkshow Sragen Batik Heritage Fest 2026 bertema “Batik Sragen dan Situs Warisan Dunia: Potensi dan Peluang” yang digelar di Aula Lantai 2 Gedung SIKK Kabupaten Sragen, Minggu (4/10/2026).

Dia mengatakan, pengembangan batik tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang sama. Setiap daerah memiliki potensi yang dapat diterjemahkan menjadi motif maupun produk, dengan karakter dan segmen pasar tersendiri.

Menurut Nawal, salah satu bentuk inovasi yang dapat dikembangkan ialah mengolaborasikan batik dengan sektor pariwisata. Misalnya, Situs Sangiran menjadi inspirasi untuk menghasilkan motif batik, yang dapat memperkuat identitas Sragen sebagai daerah tujuan wisata.

“Bagaimana kolaborasi ini kita bentuk semisal batik, ya collab dengan pariwisata, kita lihat ada Sangiran. Itu sebagai tanda bahwa tujuan kita, misalnya untuk pariwisata di Sragen, dengan membeli batik yang motif ini,” katanya.

Kolaborasi juga dapat diperluas dengan generasi muda, warisan budaya, dan sektor ekonomi kreatif. Menurut Nawal, potensi lokal seperti Bengawan Solo dapat dikembangkan menjadi sumber inspirasi, untuk menghasilkan produk batik yang memiliki karakter khas.

Selain itu, pengembangan batik melalui ekonomi kreatif juga dapat dilakukan dengan memperluas bentuk produk, termasuk kriya. Dengan begitu, pemanfaatan batik tidak terbatas pada kain, tetapi berbagai produk yang lebih dekat dengan kebutuhan pasar.

“Jadi bagaimana kita bersama-sama lewat keunggulan masing-masing. Misalnya, lewat ekonomi kreatif, kita juga kembangkan dengan kriya seperti tas,” beber istri Wagub Jateng tersebut.

Nawal juga mendorong agar inovasi batik diarahkan untuk memperluas pasar global, seperti semangat yang digaungkan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen. Kolaborasi dengan berbagai sektor dinilai dapat membuka segmen pasar baru, sekaligus menjaga karakter batik yang berbasis pada potensi masing-masing daerah.

Di samping inovasi produk dan perluasan pasar, regenerasi juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan batik. Generasi muda perlu didorong tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga menjadi pelaku dan inovator di sektor batik.

“Maka anak-anak muda mungkin nanti bisa menjadi pengusaha batik, inovator segmen anak muda, dengan belajar membatik, berkarya lewat batik, menemukan potensi ekonomi di batik, dan kemudian bisa meningkatkan kesadaran melestarikan batik,” ucap Nawal.

Menurutnya, penguatan regenerasi tersebut perlu berjalan beriringan dengan inovasi dan kolaborasi, agar batik tetap berkembang mengikuti perubahan zaman, sekaligus mempertahankan identitas budaya daerah.

Nawal menambahkan, setiap daerah dapat mengembangkan batik sesuai dengan keunggulan dan potensinya masing-masing. Kolaborasi dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif serta keterlibatan generasi muda, diharapkan dapat memperluas pemanfaatan batik sekaligus memperkuat identitas daerah.

“Jadi ini menjadi salah satu potensi bagaimana kolaborasi-kolaborasi harus dijaga, kita kembangkan lewat ekonomi kreatif ataupun dengan keikutsertaan para pemuda,” pungkasnya. (At/UI, Diskomdigi Jateng)

Salatiga Bidik Peluang Jadi Giant Rest Area, Ekraf Jadi Penggerak Ekonomi

Senin, 5 Oktober 2026

Penulis: Kontributor Kota Salatiga, Editor: WH/DiskomdigiJtg

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/salatiga-bidik-peluang-jadi-giant-rest-area-ekraf-jadi-penggerak-ekonomi/>

SALATIGA — Keberadaan exit tol di Jalan Pattimura dan posisi Salatiga di jalur Semarang–Solo–Jogja, membuka peluang kota ini dikembangkan sebagai “giant rest area”. Konsep tersebut diarahkan bukan sekadar menjadi tempat singgah, tetapi menjadi pintu masuk bagi wisata, kuliner, kerajinan, dan produk ekonomi kreatif lokal.

Gagasan tersebut disampaikan Wali Kota Salatiga Robby Hernawan, saat pelantikan Pengurus Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Kota Salatiga periode 2026–2029, di Grand Wahid Hotel, Sabtu (3/10/2026).

Menurut Robby, posisi strategis dan konektivitas tol Semarang–Solo–Jogja merupakan modal yang perlu dimanfaatkan, untuk menggerakkan ekonomi baru berbasis kreativitas, produk lokal, dan potensi anak muda.

“Salatiga selain Kota Toleransi juga sebagai Kota Industri Kreatif. Banyak anak muda yang memiliki kreativitas dan inovasi. Ini harus kita dorong agar menjadi kekuatan ekonomi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Robby.

Dukungan tersebut diberikan kepada Gekrafs sebagai ruang kolaborasi untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, sekaligus membuka semakin banyak peluang bagi pelaku usaha dan kreator lokal.

Peluang kolaborasi juga semakin terbuka dengan jejaring Gekrafs yang kini hadir di 38 provinsi di Indonesia dan 18 negara. Ketua Umum DPP Gekrafs Kawendra Lukistian mengatakan, keberadaan Gekrafs di Salatiga dapat menjadi pintu kolaborasi yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Ketua DPC Gekrafs Kota Salatiga Dyah Ayu Phitaloka mengajak para pelaku ekraf, untuk terus menghasilkan karya yang memiliki nilai ekonomi sekaligus membawa identitas Salatiga.

“Kreativitas harus kita jadikan kekuatan ekonomi, kebanggaan daerah, sekaligus peluang untuk masa depan. Kami ingin semakin banyak pelaku ekraf Salatiga yang berani berkarya, berkembang, dan membawa produknya lebih jauh,” katanya.

Pelantikan turut dimeriahkan Tari Jurit Ampil dari Sanggar Tari Hasthasawanda. Pada kesempatan yang sama, Gekrafs Kota Salatiga juga menyerahkan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas.

Melalui kolaborasi pemerintah, Gekrafs, pelaku usaha, komunitas, dan generasi muda, Salatiga didorong tidak sekadar menjadi kota persinggahan. Kota ini diharapkan mampu menjadi tujuan untuk menikmati karya, produk, kuliner, dan kreativitas lokal yang sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.

Batik Sragen Didorong Jadi Kekuatan Budaya dan Ekonomi

Senin, 5 Oktober 2026

Penulis: Kufita/Yuli DiskominfoSragen, Editor: WH/DiskomdigiJtg

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/batik-sragen-didorong-jadi-kekuatan-budaya-dan-ekonomi/>

SRAGEN — Kabupaten Sragen mendorong batik tidak hanya dipertahankan sebagai warisan budaya, tetapi dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Pengembangan tersebut diarahkan melalui penguatan identitas lokal, inovasi produk, perluasan pasar, hingga pengembangan produk turunan.

Dorongan itu mengemuka dalam Talkshow Sragen Batik Heritage 2026 bertajuk “Batik Sragen dan Situs Warisan Dunia: Potensi dan Peluang” di Aula Lantai 2 Gedung Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan (SIKK) Sragen, Minggu (4/10/2026).

Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengatakan Sragen memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, salah satunya batik sebagai warisan budaya yang hidup dan terus berkembang melalui kreativitas serta keterampilan masyarakat.

Menurutnya, batik tidak sekadar kain, tetapi juga merepresentasikan nilai, filosofi, dan kehidupan masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itu, potensi tersebut perlu dikembangkan agar memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

“Bagaimana kekayaan budaya dan sejarah yang kita miliki tidak hanya kita banggakan, tetapi juga mampu menjadi kekuatan ekonomi masyarakat Sragen,” ujarnya.

Sigit berharap forum tersebut menghasilkan gagasan, jejaring, dan kolaborasi yang lebih konkret untuk mengembangkan batik Sragen. Penguatan sektor tersebut dinilai dapat mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus berkontribusi terhadap perekonomian Sragen dan Jawa Tengah.

Wakil Ketua Harian II Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Sri Suparni Bahlil Lahadalia, menilai Sragen memiliki potensi besar karena didukung sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kuat. Menurutnya, keterampilan para perajin batik Sragen telah menunjukkan kualitas yang mampu bersaing.

Ia mendorong pengembangan batik Sragen agar lebih banyak mengangkat cerita dan kekhasan budaya lokal sebagai bagian dari identitas produk.

“Sragen ini punya cerita yang unik, yang luar biasa. Kita tetap menonjolkan budaya dan sumber daya alam kita, tetapi juga mempertimbangkan aturan-aturan yang ada dalam kita membatik,” jelasnya.

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, mengatakan batik dan wastra merupakan salah satu kekuatan budaya sekaligus potensi ekonomi Jawa Tengah. Berdasarkan data yang disampaikannya, terdapat sekitar 22.299 perajin batik di Jawa Tengah.

Menurutnya, batik Sragen memiliki keunggulan karena motif dan karakter produknya dapat diterima berbagai segmen pasar, mulai dari menengah bawah hingga pasar eksklusif.

“Setelah inovasi, kita pastikan akses pemasarannya, baik domestik kemudian ke ekspor. Salah satu hal strategis adalah produk turunan juga harus dikembangkan di Sragen. Bukan hanya menjadi kain, tetapi produk turunannya disesuaikan dengan kreativitas dan inovasi yang ada,” katanya.

Sementara itu, CEO Batik Trusmi, Sally Giovanny, menekankan pentingnya inovasi, kolaborasi, dan kemampuan beradaptasi agar batik tetap relevan dengan perkembangan zaman. Pelaku usaha batik perlu memahami kebutuhan pasar sekaligus memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas promosi.

“Selain berinovasi dan berkolaborasi, kita juga perlu beradaptasi dengan situasi dan kondisi saat ini. Kita bisa memaksimalkan dunia digital untuk berpromosi dan mendengar pasar itu maunya apa,” ujarnya.

Pemkot Magelang Siapkan Lima Kampung Wisata, Targetkan Jadi Penggerak Ekonomi Warga

Senin, 5 Oktober 2026

Penulis: Prokompim, Editor: WH/DiskomdigiJtg

<https://jatengprov.go.id/beritadaraah/pemkot-magelang-siapkan-lima-kampung-wisata-targetkan-jadi-penggerak-ekonomi-warga/>

KOTA MAGELANG — Pemerintah Kota Magelang menyiapkan lima kampung wisata yang ditargetkan tidak berhenti pada penetapan administratif, tetapi berkembang menjadi kawasan dengan aktivitas wisata, kunjungan, usaha masyarakat, dan transaksi ekonomi.

Lima kampung wisata tersebut akan dipilih dari delapan kelurahan yang saat ini menjalani proses verifikasi dan penilaian kelayakan internal. Penetapan nantinya dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota Magelang sesuai target Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Delapan kelurahan yang masuk nominasi yakni Cacaban, Tidar Utara, Tidar Selatan, Rejowinangun Utara, Magelang, Kramat Selatan, Magersari, dan Kedungsari.

Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan, pengembangan kampung wisata tidak cukup hanya dengan menetapkan wilayah melalui SK. Setelah ditetapkan, kampung wisata harus memiliki aktivitas yang menarik, melibatkan masyarakat, mendatangkan kunjungan, serta membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan.

“Lima kampung wisata yang nantinya kita tetapkan, saya harap tidak cukup sampai penetapan. Kita ingin kampung wisata benar-benar hidup, memiliki aktivitas yang menarik, melibatkan masyarakat, dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya dalam kegiatan penancangan agen wisata di Pendopo Pengabdian, Kamis (1/10/2026).

Menurut Damar, pengembangan potensi wisata juga tidak hanya dilakukan pada delapan kelurahan yang masuk nominasi. Seluruh 17 kelurahan di Kota Magelang diminta mulai mengenali, memetakan, dan mengembangkan potensi yang dapat menjadi daya tarik wisata.

“Proses pengembangannya perlu dimulai dari seluruh kelurahan. Kota Magelang hanya memiliki 17 kelurahan. Karena itu, seluruh kelurahan kita minta mulai mengenali, memetakan, dan mengembangkan potensi yang dimiliki,” kata Damar.

Potensi tersebut meliputi sejarah dan cerita lokal, budaya dan tradisi, kuliner, kerajinan, seni, kreativitas masyarakat, hingga lingkungan. Potensi yang ditemukan selanjutnya dapat dikembangkan menjadi produk maupun aktivitas wisata.

Untuk mendukung proses tersebut, Pemkot Magelang menetapkan “Kawan Wisata” sebagai agen wisata di setiap kelurahan. Mereka menjadi bagian dari upaya mengenalkan sekaligus mengembangkan potensi wisata di wilayah masing-masing.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Magelang Imam Baihaqi mengatakan, pemetaan potensi menjadi bagian dari persiapan penancangan kampung wisata.

Kegiatan sosialisasi tersebut juga bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsep pengembangan kampung wisata berbasis potensi lokal.

Dalam kegiatan itu, peserta mendapat materi dari Wali Kota Magelang, akademisi Universitas Tidar, praktisi Forum Desa Wisata Jawa Tengah, serta Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.

Pemkot Pekalongan mendorong KDKMP berkonsep serba usaha

Senin, 5 Oktober 2026 16:48 WIB

Pewarta: Kutnadi, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/647469/pemkot-pekalongan-mendorong-kdkmp-berkonsep-serba-usaha>

Pekalongan, Jawa Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan, Jawa Tengah, mendorong koperasi desa/kelurahan merah putih (KDKMP) sebagai wadah ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan berkonsep serba usaha.

Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid di Pekalongan, Jateng, Senin, mengatakan bahwa terbentuknya kepengurusan KDKMP di 27 kelurahan menjadi modal positif untuk melanjutkan pengembangan koperasi ke tahap berikutnya.

"Para pengurus menunjukkan semangat yang cukup tinggi untuk mengembangkan koperasi di wilayah masing-masing," katanya.

Menurut dia, saat ini pihaknya masih menunggu proses selanjutnya termasuk dukungan, aturan, dan regulasi dari pemerintah pusat.

Ia mengaku sejumlah koperasi kelurahan merah putih di daerah ini sudah mulai menjalankan kegiatan usaha meski belum seluruhnya berjalan secara maksimal.

Kondisi tersebut, kata dia, dinilai wajar mengingat program dari pemerintah pusat ini masih dalam tahap awal dan membutuhkan proses serta penyesuaian di lapangan.

"Sudah ada beberapa di kelurahan kita yang berjalan tetapi memang belum maksimal. Kalau ditanya SHU-nya berapa, jualannya apa saja, ini juga belum maksimal karena semuanya masih proses berjalan," katanya.

Ke depan, ia mendorong agar koperasi merah putih dikembangkan dengan konsep koperasi serba usaha karena dinilai dapat memberikan ruang usaha yang lebih beragam sekaligus menyesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat di masing-masing kelurahan.

"Pesan saya kepada semua pengurus, lebih baik koperasi serba usaha saja. Jangan koperasi simpan pinjam karena kalau simpan pinjam itu pasti lebih ribet dan lebih berisiko," katanya.

Ia mengatakan pihaknya akan terus mengikuti perkembangan kebijakan dan arahan pemerintah pusat terkait implementasi koperasi kelurahan merah putih.

"Dengan telah terbentuknya kepengurusan di 27 kelurahan, kami berharap koperasi dapat tumbuh secara bertahap dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya.

Komandan Kodim 0710/Pekalongan Letkol Inf. Muhammad Nurul Chabibi mengatakan bahwa terkait pembangunan sarana pendukung KDKMP, pemerintah daerah memiliki peran dalam menyiapkan lahan.

"Kami siap membantu proses koordinasi dengan pihak terkait, termasuk PT Agrinas selaku pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Ini sebenarnya tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyediakan lahan sedangkan kami sifatnya membantu Agrinas," katanya.

Inflasi Filipina Melonjak, Sinyal Suku Bunga Naik Kian Kuat

Selasa, 6 Oktober 2026 13:20 WIB

Neil Jerome Morales dan Ditas B Lopez

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/123748/inflasi-filipina-melonjak-sinyal-suku-bunga-naik-kian-kuat/2>

Bloomberg, Inflasi Filipina kembali meningkat dan melampaui perkiraan ekonom pada September seiring lonjakan harga pangan dan bahan bakar. Kondisi ini memperkuat alasan bagi bank sentral untuk menaikkan suku bunga acuan lebih lanjut.

Indeks harga konsumen naik 7,2% pada bulan lalu dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menurut laporan badan statistik pada Selasa (6/10). Angka inflasi terbaru tersebut mengakhiri tren perlambatan selama empat bulan sekaligus melampaui perkiraan median 6,8% dalam survei Bloomberg News.

Kenaikan inflasi beras dan sayuran menjadi pendorong utama peningkatan inflasi umum setelah hujan monsun memicu banjir luas yang menghancurkan lahan pertanian pada bulan lalu. Kenaikan harga bensin dan solar juga semakin cepat seiring kenaikan harga minyak global akibat kembali memanasnya konflik di Timur Tengah.

Angka inflasi yang melampaui perkiraan mendukung pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut oleh Banko Sentral ng Pilipinas. Bank sentral telah menaikkan suku bunga kebijakan secara kumulatif sebesar 75 basis poin sejak April. Gubernur Eli Remolona sebelumnya telah memperingatkan risiko kenaikan harga lebih lanjut akibat dampak cuaca El Niño dan kenaikan upah. Keputusan kebijakan berikutnya dijadwalkan pada 22 Oktober.

Badan statistik juga memperingatkan ancaman inflasi lebih lanjut, terutama pada komoditas pangan seperti beras. Indeks saham acuan Filipina bergerak melemah setelah data inflasi dirilis, sementara peso melemah terhadap dolar AS.

Inflasi telah berada di atas target bank sentral sebesar 3% sejak perang Iran pecah, memicu guncangan pasokan energi global dan lonjakan harga minyak yang berdampak pada negara-negara yang bergantung pada impor seperti Filipina. Pelemahan peso terhadap dolar AS juga memperburuk tekanan inflasi.

Inflasi yang tinggi berisiko semakin memperlambat konsumsi di Filipina, yang mencatat pertumbuhan ekonomi terlemah kedua di antara negara-negara ekonomi utama Asia Tenggara pada kuartal II.

Sektor Jasa AS Melambat pada September, Tekanan Biaya Naik

Selasa, 6 Oktober 2026 06:30 WIB

Jeffrey Sparshott

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/123688/sektor-jasa-as-melambat-pada-september-tekanan-biaya-naik/2>

Bloomberg, Sektor jasa Amerika Serikat (AS) tumbuh lebih lambat pada September, sementara tekanan biaya meningkat pada laju tercepat dalam lebih dari empat tahun.

Indeks jasa Institute for Supply Management (ISM) turun 0,5 poin menjadi 54,9 pada bulan lalu, berdasarkan data yang dirilis pada Senin (5/10). Angka di atas 50 menunjukkan ekspansi.

Meskipun belanja konsumen yang tetap kuat, pasar tenaga kerja yang stabil, dan investasi bisnis yang solid terus menopang permintaan jasa, perusahaan juga harus menghadapi biaya yang semakin meningkat.

Indikator ISM untuk harga bahan baku dan jasa yang dibayarkan perusahaan naik menjadi 74, level tertinggi sejak Juli 2022. Indikator tersebut sempat mencapai level terendah dalam hampir satu tahun pada Februari, tepat sebelum perang Iran mendorong kenaikan biaya bahan bakar.

Rantai pasokan juga terdampak tarif dan konflik di Timur Tengah. Indikator waktu pengiriman pemasok mencapai level tertinggi sejak Juni.

"Tarif dan dampak biaya bahan bakar merupakan masalah yang paling banyak disebut dan memengaruhi rantai pasokan perusahaan yang disurvei. Bahkan, biaya bahan bakar disebut dua kali lebih sering dibandingkan masalah tunggal lainnya yang memengaruhi kinerja," kata Steve Miller, Ketua ISM's Services Business Survey Committee, dalam sebuah pernyataan. "Kendala rantai pasokan juga menjadi salah satu kekhawatiran utama responden dan berdampak pada waktu tunggu maupun biaya."

Pesanan baru, yang menjadi indikator permintaan, turun 1,1 poin menjadi 59,8. Meskipun turun dari Agustus, angka terbaru tersebut masih menjadi salah satu yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Indikator ISM untuk pesanan yang belum diselesaikan mencapai level tertinggi sejak Juli 2022.

Perusahaan di sektor jasa masih berhati-hati dalam merekrut pekerja sembari menyeimbangkan permintaan yang solid dengan kenaikan biaya. Indikator ketenagakerjaan ISM masuk ke zona ekspansi, menjadi 50,1, untuk pertama kalinya sejak Juni.

Sebanyak 13 industri jasa melaporkan pertumbuhan pada September, termasuk perdagangan grosir, real estat, serta jasa akomodasi dan makanan. Sementara itu, empat industri melaporkan kontraksi.

Euro Dekati Level Terendah 17 Bulan, Dolar AS Makin Perkasa

Selasa, 06 Oktober 2026 08:45 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/euro-dekati-level-terendah-17-bulan-dolar-as-makin-perkasa>

KONTAN.CO.ID - Nilai tukar euro kembali tertekan dan bergerak mendekati level terendah dalam 17 bulan terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Kekhawatiran terhadap kondisi fiskal dan ketidakpastian politik di zona euro menjadi beban bagi mata uang tunggal Eropa tersebut. Melansir Reuters pada perdagangan awal Asia, Selasa (6/10/2026), euro melemah tipis ke US\$ 1,1220. Sehari sebelumnya, euro sempat menyentuh level terendah sejak Mei 2025 dan mencatat penurunan sekitar 1,2% sepanjang pekan lalu.

Terhadap poundsterling, euro juga berada di posisi 84,83 pence setelah melemah lebih dari 1% terhadap mata uang Inggris tersebut pada pekan lalu.

Tekanan terhadap euro terutama berasal dari kekhawatiran terhadap tingginya utang serta kebuntuan politik di Prancis.

Rencana pemilu cepat di Spanyol juga menambah ketidakpastian terhadap prospek kawasan ekonomi tersebut.

Pelemahan euro menjadi perhatian bagi pembuat kebijakan Eropa karena terjadi bersamaan dengan meningkatnya biaya pinjaman pemerintah Prancis.

Kenaikan imbal hasil obligasi Prancis mulai memberikan dampak yang lebih luas terhadap pasar obligasi di zona euro.

Joseph Capurso, strategist Commonwealth Bank of Australia memperkirakan tekanan terhadap euro masih dapat berlanjut. Ia memperkirakan euro berpotensi turun di bawah US\$ 1,10.

Menurut Capurso, penguatan euro membutuhkan sejumlah perubahan besar, termasuk penurunan harga minyak yang signifikan, meningkatnya ekspektasi pengetatan kebijakan moneter Eropa, serta langkah nyata untuk mengendalikan defisit anggaran.

Di sisi lain, dolar AS terus menguat dengan dukungan dari imbal hasil US Treasury yang masih tinggi. Imbal hasil surat utang pemerintah AS bahkan mencapai level tertinggi dalam beberapa dekade pada perdagangan sebelumnya.

Terhadap yen, dolar AS naik tipis menjadi 157,92 yen. Sementara itu, poundsterling melemah 0,02% menjadi US\$ 1,3222.

Indeks dolar AS menguat ke 102,16 setelah mencapai level tertinggi dalam 18 bulan pada perdagangan sebelumnya.

Penguatan dolar terjadi meski ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve (The Fed) pada Oktober menurun setelah data ketenagakerjaan AS menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja yang lebih lemah dari perkiraan.

Namun, investor masih memperkirakan The Fed dapat mempertahankan kebijakan moneter ketat lebih lama.

Tekanan harga yang masih tinggi menjadi salah satu faktor yang membuat ruang pelonggaran kebijakan moneter tetap terbatas.

Analisis Barclays mengatakan, revisi data inflasi dan sejumlah indikator ekonomi memang mengurangi urgensi pengetatan kebijakan.

Namun, tekanan biaya masih menimbulkan keraguan apakah kondisi saat ini cukup untuk membawa inflasi secara berkelanjutan menuju target 2%.

Data terbaru juga menunjukkan aktivitas sektor jasa AS melambat pada September. Namun, kuatnya permintaan domestik kembali menekan rantai pasokan dan mendorong kenaikan harga yang dibayarkan perusahaan untuk input.

Kondisi tersebut mengindikasikan tekanan inflasi AS masih dapat bertahan hingga tahun depan dan menjadi penopang bagi dolar AS. Sementara itu, dolar Australia melemah 0,07% menjadi US\$ 0,6967. Dolar Selandia Baru juga turun 0,07% ke US\$ 0,5596.

Sentimen Konsumen Australia Anjlok, Suku Bunga Tinggi Tekan Keuangan Keluarga

Selasa, 6 Oktober 2026 07:28 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/sentimen-konsumen-australia-anjlok-suku-bunga-tinggi-tekan-keuangan-keluarga>

KONTAN.CO.ID - Sentimen konsumen Australia kembali merosot pada Oktober 2026 seiring kenaikan suku bunga yang semakin menekan biaya hidup dan kondisi keuangan rumah tangga.

Melansir Reuters Selasa (6/10/2026), Survei Westpac-Melbourne Institute menunjukkan, indeks sentimen konsumen Australia turun 4,7% menjadi 80,4 pada Oktober. Penurunan tersebut melanjutkan pelemahan 5,2% pada September.

Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, indeks sentimen konsumen Australia telah merosot hampir 13%.

Kondisi tersebut menunjukkan jumlah konsumen yang pesimistis jauh lebih banyak dibandingkan mereka yang optimistis.

Kepala Australian Macro-Forecasting Westpac Matthew Hassan mengatakan, level sentimen konsumen saat ini termasuk yang terburuk sejak survei bulanan tersebut dimulai pada awal 1970-an.

"Pada level sedikit di atas 80, indeks sentimen terbaru termasuk dalam 40 pembacaan terburuk sejak survei bulanan kami dimulai pada awal 1970-an," kata Hassan.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan periode terburuk dari sentimen yang sangat lemah secara berulang sejak resesi ekonomi Australia pada awal 1990-an.

Pelemahan sentimen terjadi setelah Reserve Bank of Australia (RBA) kembali menaikkan suku bunga. RBA menaikkan suku bunga untuk keempat kalinya sepanjang tahun ini sehingga mencapai 4,60%, level tertinggi dalam 15 tahun.

Bank sentral Australia juga memperingatkan bahwa kenaikan suku bunga lebih lanjut masih mungkin diperlukan untuk menekan inflasi.

Dampak kenaikan suku bunga terlihat jelas dalam hasil survei. Dari seluruh responden, sekitar 40% memberikan tanggapan setelah keputusan kenaikan suku bunga RBA.

Kelompok tersebut mencatat indeks kepercayaan hanya 67,2, jauh lebih rendah dibandingkan 86,9 pada 60% responden yang memberikan tanggapan sebelum rapat RBA.

Tekanan terhadap keuangan rumah tangga juga semakin terlihat. Indeks yang mengukur kondisi keuangan keluarga dibandingkan setahun sebelumnya anjlok 8,0%. Sementara itu, indikator mengenai prospek keuangan keluarga turun 6,4%.

Penilaian konsumen terhadap prospek ekonomi Australia juga mengalami penurunan signifikan. Di sisi lain, indikator mengenai apakah saat ini merupakan waktu yang tepat untuk membeli barang rumah tangga berukuran besar turun 7,1%.

Data tersebut menunjukkan kenaikan suku bunga mulai memberikan tekanan yang lebih besar terhadap daya beli dan keputusan belanja rumah tangga Australia.

Pelemahan sentimen konsumen juga menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap konsumsi domestik dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan suku bunga berada di level tertinggi dalam 15 tahun dan RBA masih membuka kemungkinan pengetatan lebih lanjut, tekanan terhadap rumah tangga Australia berpotensi berlanjut dalam waktu dekat.

Defisit Perdagangan AS Melebar pada Agustus 2026, Dipicu Lonjakan Impor

Selasa, 6 Oktober 2026 20:06 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://internasional.kontan.co.id/news/defisit-perdagangan-as-melebar-pada-agustus-2026-dipicu-lonjakan-impor>

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Defisit perdagangan AS melebar lebih besar dari perkiraan pada bulan Agustus, didorong oleh lonjakan impor barang di tengah kuatnya permintaan domestik; hal ini membuat sektor perdagangan kembali menjadi faktor pengurang pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga.

Mengutip Reuters, menurut data yang dirilis oleh Biro Analisis Ekonomi dan Biro Sensus di bawah Departemen Perdagangan AS pada Selasa (6/10/2026), defisit perdagangan meningkat 13,7% menjadi US\$ 105,6 miliar.

Para ekonom yang disurvei oleh Reuters sebelumnya memperkirakan defisit akan mencapai US\$ 102,0 miliar.

Indikasi awal mengenai pelebaran ini telah terlihat dari data pekan lalu yang menunjukkan lonjakan defisit perdagangan barang akibat tingginya impor pada bulan Agustus.

Permintaan domestik meningkat dengan laju tercepat dalam lebih dari 3,5 tahun pada kuartal kedua, mencerminkan kuatnya belanja konsumen serta belanja bisnis untuk peralatan—yang sebagian besar terkait dengan kecerdasan buatan (AI).

Tren ini tampaknya berlanjut hingga kuartal ketiga; data bulan lalu menunjukkan kuatnya belanja konsumen pada bulan Agustus, serta tingginya pesanan dan pengiriman barang modal non-pertahanan (di luar pesawat terbang).

Namun, dunia usaha mengandalkan impor untuk memenuhi permintaan tersebut. Peningkatan impor ini terjadi meskipun ada kebijakan tarif agresif dari Presiden Donald Trump, yang menurutnya bertujuan untuk memperkecil defisit perdagangan.

Impor meningkat 4,3% menjadi US\$ 420,8 miliar pada bulan Agustus. Impor barang melonjak 5,3% menjadi US\$ 342,2 miliar. Ekspor naik 1,4% menjadi US\$ 315,2 miliar. Ekspor barang meningkat 2,2% menjadi US\$ 205,7 miliar.

Sektor perdagangan telah menjadi faktor pengurang Produk Domestik Bruto (PDB) selama tiga kuartal berturut-turut, dan para ekonom memperkirakan sektor ini dapat memangkas hingga 2,5 poin persentase dari PDB pada kuartal ketiga.

Estimasi pertumbuhan untuk kuartal Juli-September sebagian besar berada di atas tingkat tahunan 3,0%, dengan belanja konsumen diperkirakan akan mengimbangi dampak negatif dari impor. Ekonomi tumbuh pada tingkat 2,2% pada kuartal kedua.

AS Peringatkan Bank Asing Terkait Transaksi Keuangan dengan Iran.

Selasa, 06 Oktober 2026 15:54 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Nina Dwiantika

<https://internasional.kontan.co.id/news/as-peringatan-bank-asing-terkait-transaksi-keuangan-dengan-iran>

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Amerika Serikat (AS) kembali memperketat tekanan terhadap Iran. Departemen Keuangan AS memperingatkan lembaga keuangan asing yang masih bertransaksi dengan Iran atau sektor keuangannya dapat dikenai sanksi tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Peringatan tersebut menambah tekanan terhadap akses Iran ke sistem keuangan global. Washington meminta lembaga keuangan asing segera menghentikan aktivitas maupun hubungan bisnis dengan entitas keuangan Iran yang telah masuk daftar sanksi AS.

Dalam laporan Reuters (6/10), Departemen Keuangan AS menegaskan, lembaga keuangan asing yang terus memfasilitasi transaksi dengan bank atau institusi keuangan Iran berisiko menjadi sasaran tindakan penegakan sanksi. Risiko tersebut juga berlaku bagi lembaga keuangan Iran yang beroperasi melalui anak perusahaan atau kantor cabang di negara ketiga.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya AS untuk semakin membatasi akses Iran terhadap sistem keuangan internasional. AS sebelumnya telah menjatuhkan berbagai sanksi terhadap Iran, terutama terhadap sektor keuangan dan ekonomi yang dinilai mendukung aktivitas Teheran.

Dalam beberapa pekan terakhir, AS juga meningkatkan peringatan kepada negara dan perusahaan asing agar memutuskan hubungan bisnis dengan Iran. Jika tidak, perusahaan maupun lembaga keuangan tersebut berpotensi kehilangan akses ke sistem keuangan berbasis dolar AS.

Departemen Keuangan AS menyebut lembaga keuangan asing yang memberikan layanan kepada bank-bank Iran dapat menghadapi konsekuensi serius. Termasuk di antaranya adalah lembaga yang membantu Iran memperoleh akses ke sistem keuangan global.

Risiko sanksi tidak hanya berupa pembatasan aktivitas bisnis. Departemen Keuangan AS juga memperingatkan kemungkinan penerapan sanksi perdata maupun pidana apabila transaksi terkait Iran membuat lembaga keuangan AS atau pihak AS lainnya melanggar aturan sanksi.

Salah satu konsekuensi paling berat adalah pembatasan terhadap rekening koresponden di AS. Lembaga keuangan asing yang dianggap terlibat dalam aktivitas yang dikenai sanksi dapat dilarang membuka atau mempertahankan rekening koresponden maupun rekening payable-through di AS.

Tekanan finansial tersebut datang di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Konflik yang bermula pada 28 Februari setelah serangan AS dan Israel terhadap Iran kemudian diikuti aksi balasan Teheran terhadap Israel dan sejumlah negara Teluk yang menjadi lokasi pangkalan militer AS.

Eskalasi konflik juga memperburuk kondisi kemanusiaan di kawasan tersebut. Serangkaian serangan AS-Israel terhadap Iran serta serangan Israel ke Lebanon telah menewaskan ribuan orang dan menyebabkan jutaan lainnya mengungsi.

Dengan peringatan terbaru ini, negeri paman sam ini semakin menempatkan akses terhadap sistem keuangan berbasis dolar sebagai instrumen untuk menekan Iran. Bagi lembaga keuangan asing, pilihan untuk tetap berbisnis dengan Iran kini membawa risiko kehilangan akses ke jaringan keuangan AS.

Prancis dan Jerman Dorong Uni Eropa Perketat Perdagangan

Selasa, 6 Oktober 2026 15:12 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Nina Dwiantika

<https://internasional.kontan.co.id/news/prancis-dan-jerman-dorong-uni-eropa-perketat-perdagangan>

KONTAN.CO.ID - BRUSSEL. Prancis dan Jerman mendorong Uni Eropa (UE) memperkuat pertahanan ekonominya dengan menyiapkan instrumen baru untuk membalas negara yang dinilai merugikan kepentingan ekonomi blok tersebut. China berpotensi menjadi salah satu sasaran utama kebijakan ini.

Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Friedrich Merz menyampaikan usulan tersebut melalui surat kepada Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Usulan itu disampaikan sekitar 10 hari sebelum para pemimpin UE membahas ketidakseimbangan perdagangan dengan China dalam pertemuan di Brussels.

Melansir laporan Reuters (6/10), Macron dan Merz menilai praktik pasar yang mendistorsi persaingan secara sistemik mulai mengancam ekonomi dan basis industri Eropa. Karena itu, UE dinilai membutuhkan respons yang lebih cepat dan efektif untuk menghadapi risiko tersebut.

Komisi Eropa menyambut baik surat dan dokumen usulan Prancis-Jerman tersebut. Komisi menilai usulan itu dapat menjadi bahan penting dalam pembahasan mengenai risiko geoekonomi dan ketidakseimbangan perdagangan global.

Instrumen baru yang diusulkan tidak secara khusus menyoroti negara tertentu. Namun, usulan tersebut menyoroti praktik seperti dumping, subsidi besar-besaran serta pembatasan konvertibilitas mata uang, yang selama ini menjadi sorotan sejumlah negara UE dalam hubungan dagang dengan China.

Pemerintah Jerman menilai UE membutuhkan instrumen yang memiliki kekuatan seperti tarif Section 301 milik Amerika Serikat atau pembatasan ekspor mineral kritis yang diterapkan China. Langkah itu dinilai penting di tengah perdagangan global yang semakin sering digunakan sebagai alat tekanan ekonomi.

Dalam dokumen tersebut, Prancis dan Jerman juga mendorong UE mempercepat dan meningkatkan efektivitas instrumen perlindungan perdagangan. Penyelidikan perdagangan dinilai perlu diperbanyak, dengan cakupan yang dapat diperluas dari produk tertentu menjadi sektor industri secara keseluruhan.

Kedua negara juga menilai langkah cepat diperlukan untuk menghadapi peningkatan impor sejumlah produk, termasuk bahan kimia, polyethylene terephthalate (PET) dan kendaraan hibrida. Selain itu, Komisi Eropa diminta segera mengusulkan dua instrumen baru untuk memperkuat keamanan ekonomi dan diversifikasi rantai pasok UE.

Instrumen pertama ditujukan untuk mengurangi ketergantungan perusahaan Eropa pada satu sumber pasokan untuk sejumlah komoditas penting. Sementara instrumen kedua akan membatasi akses ke pasar tunggal UE bagi negara yang dinilai merusak persaingan melalui tindakan politik maupun ekonomi.

Prancis dan Jerman mengusulkan agar keputusan Komisi Eropa untuk mengaktifkan tindakan balasan dapat berlaku secara otomatis, kecuali ditolak oleh mayoritas berkualifikasi negara anggota UE. Mekanisme ini dinilai dapat membuat respons blok tersebut lebih cepat.

Meski demikian, instrumen baru tersebut tetap membutuhkan persetujuan pemerintah negara-negara UE dan Parlemen Eropa. Prancis menilai langkah tersebut mendesak karena ketidakseimbangan perdagangan dengan sejumlah mitra dagang sudah semakin sulit dipertahankan.

Seorang penasihat kepresidenan Prancis mengatakan Prancis dan Jerman ingin UE segera menggunakan instrumen anti-dumping yang sudah tersedia. Menurut dia, kedua negara juga ingin mengakhiri pendekatan yang terlalu lunak dalam menghadapi persoalan perdagangan.

Mayoritas Mata Uang Asia Stabil Selasa (6/10), Peso Filipina dan Won Korea Melemah

Selasa, 6 Oktober 2026 09:41 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/mayoritas-mata-uang-asia-stabil-selasa-610-peso-filipina-dan-won-korea-melemah>

KONTAN.CO.ID - Mayoritas mata uang Asia bergerak relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa (6/10/2026).

Namun, peso Filipina dan won Korea Selatan mencatat pelemahan di tengah masih kuatnya dolar AS.

Berdasarkan data Reuters pada pukul 02.03 GMT, peso Filipina menjadi mata uang Asia dengan pelemahan terbesar dalam perdagangan hari ini. Peso turun 0,32% ke level 62,762 per dolar AS, dari posisi sebelumnya 62,561.

Won Korea Selatan juga melemah 0,12% menjadi 1.343,28 per dolar AS dari 1.341,64.

Baht Thailand turun tipis 0,05% menjadi 33,67 per dolar AS. Sementara itu, dolar Singapura melemah 0,03% menjadi 1,280 per dolar AS.

Rupiah juga bergerak melemah tipis 0,03% ke level Rp 17.900 per dolar AS dari posisi sebelumnya Rp 17.895 per dolar AS.

Di sisi lain, dolar Taiwan menguat 0,21% menjadi 31,720 per dolar AS. Ringgit Malaysia juga naik 0,02% ke 4,084 per dolar AS.

Yen Jepang bergerak stabil di 157,90 per dolar AS. Rupee India juga nyaris tidak berubah di 96,293 per dolar AS.

Rupiah Masih Tertekan Sepanjang 2026

Jika dihitung sejak akhir 2025, rupiah menjadi salah satu mata uang Asia yang mencatat pelemahan cukup besar terhadap dolar AS.

Rupiah berada di level Rp 17.900 per dolar AS pada perdagangan Selasa, melemah sekitar 6,87% dibandingkan posisi akhir 2025 di Rp 16.670 per dolar AS.

Rupiah India mencatat pelemahan 6,67% sejak akhir 2025. Baht Thailand turun 6,59%, sedangkan peso Filipina melemah 6,31%.

Won Korea Selatan menjadi salah satu mata uang yang mencatat perubahan terbesar dibandingkan akhir tahun lalu. Won berada di 1.343,28 per dolar AS, dibandingkan 1.440,51 pada akhir 2025.

Sementara itu, yuan China menguat 4,22% sepanjang 2026 ke level 6,705 per dolar AS, dari 6,9879 pada akhir tahun lalu.

Dolar Taiwan juga menguat 0,89% sepanjang tahun berjalan. Sebaliknya, dolar Singapura melemah 0,47%, sedangkan ringgit Malaysia turun 0,69%.

Pergerakan mata uang Asia masih dipengaruhi oleh arah kebijakan moneter AS, imbal hasil US Treasury, serta perkembangan ekonomi dan geopolitik global.

Ekonomi Diproyeksi Tumbuh 5,2%, Bank Dunia Soroti Risiko Fiskal

Selasa, 6 Oktober 2026 21:00 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/123783/ekonomi-diproyeksi-tumbuh-5-2-bank-dunia-soroti-risiko-fiskal/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di level 5,2% pada 2026, atau naik 0,5 poin persentase dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar 4,7%. Pertumbuhan tersebut diperkirakan bertahan pada level yang sama pada 2027, sebelum meningkat kembali jadi 5,3% pada 2028.

Dalam East Asia & Pasific Economic Update edisi Oktober 2026, Bank Dunia menyebut revisi ke atas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama mencerminkan dampak kenaikan harga energi yang ternyata lebih ringan dari perkiraan sebelumnya.

Selain itu, aktivitas ekonomi juga ditopang oleh peningkatan program prioritas pemerintah, investasi yang terkait dengan negara, serta adanya subsidi energi yang menahan rambatan kenaikan harga minyak dunia bagi konsumen domestik.

Dengan proyeksi tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara di kawasan Asia yang pertumbuhannya dinaikkan cukup signifikan. Bank Dunia menyebut kinerja itu juga ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat pada paruh pertama tahun ini.

Pada semester I-2026, pertumbuhan ekonomi domestik tercatat 5,45%, naik dari pertumbuhan ekonomi periode sama tahun sebelumnya yang sebesar 5,1%.

Bank Dunia mencatat laju tersebut sebagai rata-rata pertumbuhan dua kuartal terkuat sejak 2022. Penguatan ini berasal dari konsumsi dan lonjakan belanja pemerintah pada awal tahun.

Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengamini hal tersebut. Realisasi belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) tumbuh menjadi Rp912,4 triliun per 31 Agustus 2026. Dengan rincian, belanja barang naik 67,6% menjadi Rp389 triliun, belanja modal ikut naik 14,3% menjadi Rp159,8 triliun.

Belanja barang di antaranya termasuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp131,3 triliun, penyaluran dana BOS swasta sebesar Rp10,1 triliun, insentif biodiesel sebesar Rp21,4 triliun, dan stabilisasi pangan Rp3,3 triliun.

Di sisi lain, belanja pegawai juga ikut naik 21,7% jadi Rp259 triliun. Namun, belanja bansos hanya naik tipis 3,4% menjadi 104,5 triliun dari Rp101,1 triliun di tahun 2025.

Bank Dunia mencatat bahwa ramp-up program prioritas dan investasi yang terkait dengan negara serta adanya subsidi energi menjadi penopang aktivitas ekonomi RI. Namun, Bank Dunia menggarisbawahi, kombinasi kebijakan tersebut telah meningkatkan ketidakseimbangan fiskal dan eksternal.

"Kondisi tersebut diperkirakan masih akan berlanjut dalam beberapa tahun ke depan, seiring dengan defisit transaksi berjalan yang diproyeksikan melebar menjadi 1,5% dari PDB pada 2026. Sementara itu, inflasi diperkirakan tetap berada di sekitar batas atas kisaran target bank sentral," kata Laporan Bank Dunia.

Kerentanan Fiskal

Bank Dunia menilai, besarnya ekspansi fiskal pada lima bulan pertama tahun 2026 terlihat dari belanja pemerintah yang tumbuh 34% secara tahunan, jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan negara yang sebesar 19%.

Belanja yang lebih agresif itu terutama didorong oleh program MBG, pembayaran kompensasi energi yang dilakukan lebih cepat, front-loading belanja pemerintah, serta meningkatnya tekanan subsidi energi.

Kemenkeu mencatat realisasi subsidi dan kompensasi Rp331,4 triliun atau setara dengan 74,2% dari APBN, hingga 31 Agustus 2026.

Dalam catatan Bank Dunia, belanja pemerintah telah mencapai 36% dari pagu awal APBN pada lima bulan pertama 2026, sekitar 8 poin persentase lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun lalu.

Percepatan belanja ini, menurut Bank Dunia, memang dapat menopang pertumbuhan dalam jangka pendek, tetapi sekaligus meningkatkan risiko tekanan anggaran pada paruh kedua tahun 2026.

Defisit Mendekati Batas 3%

Dengan ekspansi belanja itu, Bank Dunia memperkirakan defisit fiskal Indonesia di tahun ini berada di kisaran 2,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Defisit itu tetap akan bertahan hingga tahun 2027, sebelum akhirnya turun tipis jadi 2,7% di tahun 2028, berdasarkan proyeksi Bank Dunia.

Bank Dunia menyebut, tekanan defisit utamanya berasal dari kombinasi kenaikan belanja subsidi energi dan program-program prioritas pemerintah.

Dengan begitu, ruang fiskal Indonesia memang masih tersedia, tetapi kian menyempit. Bank Dunia juga memperkirakan rasio utang pemerintah terhadap PDB meningkat secara bertahap dari 40,5% pada 2025, menjadi 41,2% pada 2028.

Bank Dunia memperingatkan bahwa ketergantungan terhadap stimulus fiskal tak dapat berlangsung lama dan tanpa batas. Apabila stimulus fiskal mulai moderat, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah akan sangat bergantung pada investasi swasta.

Karena itu, menurut Bank Dunia, penting untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi tak cuma mempertahankan belanja pemerintah, tetapi juga memperkuat kemampuan dalam menarik investasi swasta masuk ke dalam mesin perekonomian.

Laporan tersebut juga menyoroti soal sumber dan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung berbeda dari kawasan Asia yang mendapat dorongan dari ekspor produk teknologi dan kecerdasan buatan (AI).

"Indonesia belum memperoleh manfaat dari integrasi ke dalam rantai nilai yang terkair dengan AI, tetapi pertumbuhan permintaan domestiknya masih sehat," sebut laporan Bank Dunia.

Tak seperti Malaysia, Vietnam, Thailand yang mendapat dukungan dari produk teknologi, Indonesia justru masih mengandalkan konsumsi domestik, program prioritas pemerintah, dan investasi yang terkait dengan program-program tersebut.

Karena itu, meskipun Bank Dunia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi RI jadi lebih tinggi ke 5,2%, namun pekerjaan rumah pemerintah untuk merealisasikan dan memastikan pertumbuhan itu semakin berkualitas dengan adanya investasi swasta, dan peningkatan produktivitas serta kapasitas produksi, bukan oleh ekspansi belanja pemerintah dan subsidi.

Suahasill Pastikan Tak Intervensi Kebijakan Rupiah BI

Selasa, 6 Oktober 2026 17:30 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/123765/suahasill-pastikan-tak-intervensi-kebijakan-rupiah-bi/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Suhasill Nazara memastikan bahwa Kementerian Keuangan tak akan mengintervensi kebijakan Bank Indonesia (BI) terkait dengan rupiah, sembari menegaskan pentingnya independensi otoritas moneter tersebut.

"Saya nyaman dengan apa yang dilakukan BI dan bagaimana mereka menjalankan mandatnya," kata Suahasill dalam wawancara kepada Bloomberg Television dikutip Selasa (6/10/2026).

Suahasill mengelaborasi bahwa saat ini mandat BI adalah menjaga stabilitas ekonomi serta mendukung pertumbuhan.

Sementara mandat anggaran adalah memastikan belanja pemerintah dan uang yang berasal dari pembayar pajak digunakan sebaik mungkin untuk intervensi dalam perekonomian, perlindungan sosial, infrastruktur publik, dan layanan publik.

Suahasill juga menegaskan bahwa dirinya tak pernah berbicara dengan BI mengenai angka-angka tertentu, terutama terkait dengan suku bunga dan juga rupiah.

"Kami berbicara mengenai tujuan dan mandat. Namun, ketika kebijakan dibuat, selama kebijakan tersebut masih sesuai dengan mandat mereka, kami menerima setiap langkah yang diambil BI," kata Suahasill.

Sebagai pemerintah, Suahasill menyebut bahwa dirinya tidak pernah memberikan forward guidance. Hal ini karena arahan tersebut bukan peran otoritas fiskal.

Suahasill menyebut, Kementerian Keuangan memahami bahwa BI memiliki undang-undang dan mandat, yaitu menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan. Ia pun juga menekankan bahwa investor tak perlu khawatir mengenai hilangnya independensi BI.

“Karena apa yang dilakukan Bank Indonesia juga demi kebaikan dan kemajuan negara ini. Begitu juga dengan kami,” katanya.

Bank Dunia Revisi Naik Proyeksi Ekonomi RI Jadi Tumbuh 5,2%

Selasa, 6 Oktober 2026 16:50 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/123776/bank-dunia-revisi-naik-proyeksi-ekonomi-ri-jadi-tumbuh-5-2/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Dunia dalam laporan terbarunya memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran 5,2% hingga akhir tahun mendatang.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan tetap stabil di level 5,2% pada 2026 dan 2027,” kata Bank Dunia dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2026.

Bank Dunia menyebut bahwa proyeksi untuk 2026 tersebut naik 0,5% dari sebelumnya. Padahal, pada April 2026, Bank Dunia sempat menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi hanya 4,7% pada 2026.

Kenaikan proyeksi ini menurut Bank Dunia dilakukan dengan mempertimbangkan dampak kenaikan harga energi yang tidak akan separah dari yang sebelumnya diproyeksikan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini lebih tinggi ketimbang rata-rata pertumbuhan ekonomi negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik yang berada pada level 4,5%.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan kawasan ASEAN, pertumbuhan ekonomi RI hanya kalah dengan Vietnam yang diproyeksi dapat mencapai 7,4% hingga akhir tahun mendatang.

Meski demikian, angka tersebut masih di bawah target pemerintah yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,4%.

Sementara itu, aktivitas ekonomi Indonesia juga didukung oleh peningkatan pelaksanaan program prioritas pemerintah, investasi yang terkait dengan negara, serta subsidi energi.

“Kombinasi kebijakan tersebut mendukung pertumbuhan dalam jangka pendek, tetapi turut menyebabkan ketidakseimbangan fiskal dan eksternal yang lebih besar,” sebut laporan tersebut.

Ketidakseimbangan tersebut diperkirakan masih berlanjut dalam beberapa tahun mendatang, dengan defisit transaksi berjalan diproyeksikan melebar menjadi 1,5% dari PDB pada 2026.

Seiring dengan moderasi stimulus fiskal, pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah diproyeksikan semakin bergantung pada investasi swasta.

“Inflasi diperkirakan tetap berada di sekitar batas atas kisaran target bank sentral,” sebut laporan tersebut.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 tercatat sebesar 5,29% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibanding ekonomi kuartal II 2025.

Yield Treasury Terpangkas, Rupiah Menguat ke Rp17.901/US\$

Selasa, 6 Oktober 2026 15:16 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/123774/yield-treasury-terpangkas-rupiah-menguat-ke-rp17-901-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah menutup perdagangan Selasa (6/10/2026) dengan penguatan terbatas 0,03% ke Rp17.901/US\$. Penguatan rupiah ditopang oleh harga minyak mentah brent kembali terpangkas 0,68% ke posisi US\$99,7/barel.

Sementara, di pasar surat utang global tekanan juga sedikit mereda dengan turunnya yield US Treasury tenor 10 tahun sebesar 2,3 bps ke 5,28%. Meredanya tekanan ini memberi ruang penguatan bagi sebagian pasar valuta Asia.

Won Korea Selatan menguat 0,17%, disusul baht Thailand, yuan offshore, dolar Singapura, dan rupiah. Namun, tak sedikit juga yang tetap melemah. Seperti, peso Filipina, rupee India, yen Jepang, dolar Taiwan, ringgit Malaysia dan dolar Hong Kong.

Dari pasar obligasi dunia, meredanya tekanan yield di pasar Treasury juga membawa angin segar bagi sebagian negara. Yield obligasi Inggris, misalnya, terpangkas 5,6 bps ke 5,36%, bahkan Prancis dan Italia memangkas yield obligasi tenor 10 tahun sebesar 10,5 bps ke 4,74% dan 11,6 bps jadi 4,5%.

Namun, penurunan yield ini belum sepenuhnya menular di pasar obligasi Asia. Singapura masih mengalami kenaikan yield 3,4 bps jadi 2,47%, diikuti Thailand yang ikut naik 1,4 bps jadi 2,34%. Begitu juga dengan obligasi Australia naik 4,9 bps jadi 5,39% dan Selandia Baru naik 6,6 bps jadi 5,09%.

Sementara Taiwan naik 1,5 bps jadi 1,93%, dan Jepang naik 0,7 bps jadi 3,07%. Di Indonesia, kenaikan yield juga terjadi pada hampir semua tenor. Tenor acuan 10 tahun naik 2,5 bps jadi 7,21%, tenor 11 tahun naik 8,9 bps jadi 7,17% dan tenor 5 tahun terkerek naik 1,9 bps jadi 7,08%.

Dari domestik, belum banyak katalis yang berpotensi mempertahankan penguatan rupiah secara berkelanjutan. Bahkan, Bank Dunia baru-baru ini menyoroti Indonesia yang cenderung mengambil langkah untuk menekan harga bensin di tingkat konsumen dan mengalami pengurangan cadangan devisa dolar AS sekitar 15% hingga 40% sepanjang tahun ini.

Pasar akan mencermati data cadangan devisa yang akan rilis besok. Sebagai catatan, posisi devisa RI terakhir berada di US\$146,5 miliar.

Airlangga Beber Alasan Ekspor Vietnam Ungguli RI

Selasa, 6 Oktober 2026 14:50 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/123760/airlangga-beber-alasan-ekspor-vietnam-ungguli-ri/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa saat ini ekspor dari negara tetangga, Vietnam jauh melebihi ekspor Indonesia.

Menurut Airlangga, hal tersebut dikarenakan Vietnam memiliki sejumlah keunggulan. Pertama adalah karena Vietnam sudah melakukan hilirisasi dan masuk ke industri tier 3.

Sebagai ilustrasi, Airlangga mencontohkan bahwa industri tier 1 merupakan industri yang berbasis pada pertanian (agrobased industry), industri tier 2 merupakan industri manufaktur (bread and butter industrialization), sementara tier 3 masuk ke ranah digitalisasi dan semikonduktor.

“[Pertumbuhan ekonomi] kita rata-rata 5 [%] kalau kita mau mengejar Vietnam yang bisa mencapai 9% maka kita harus lari juga ke digitalisasi semikonduktor AI,” kata Airlangga dalam acara BIG Downstream Insights 2026 di Graha CIMB Niaga, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026).

Selain itu, Airlangga menyoroti kawasan ekonomi khusus yang jauh lebih besar daripada Indonesia, ditambah dengan kepastian usaha yang lebih baik ketimbang tanah air.

“Bayangkan Indonesia punya special economic zone itu kira-kira 24 ribu hektar Vietnam punya special economic zone 2 juta hektar jadi dia lebih masif dari kita,” kata Airlangga.

Airlangga juga menyebut bahwa Vietnam juga terlebih dahulu menandatangani kerjasama ekonomi komprehensif alias CEPA dengan sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan juga Uni Eropa.

Hal tersebut membuat Vietnam memperoleh perlakuan tarif dan non-tarif yang lebih baik ketimbang Indonesia sehingga eksponnya dapat melebihi Indonesia.

Meski begitu, Airlangga menyebut bahwa Vietnam tak memiliki pasar domestik, sehingga setiap pihak yang menanamkan modalnya ke Vietnam dipastikan untuk mendorong menuju pasar ekspor.

Penerimaan Bea Cukai Capai Rp240,28 T Hingga September 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 14:10 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/123749/penerimaan-bea-cukai-capai-rp240-28-t-hingga-september-2026/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut bahwa hingga September 2026, pendapatan yang berasal dari bea cukai mencatat penerimaan negara sebesar Rp240,28 triliun atau 71,51% dari target APBN, tumbuh 8,57% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Ia juga menggarisbawahi salah satu peran bea cukai terhadap keuangan negara, terutama terkait dengan pengamanan penerimaan negara. Hal ini disampaikan oleh Suahasil dalam Upacara Peringatan Hari Bea Cukai ke-80 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Selasa (6/10/2026).

Suahasil juga mengingatkan bahwa penerimaan bukan sekadar angka, melainkan sumber daya negara untuk membiayai pembangunan, memperkuat layanan publik, menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

Dalam pidatonya, Suahasil juga menyoroti fungsi pengawasan dan meminta Bea Cukai terus memperkuat penindakan terhadap penyelundupan dan peredaran barang ilegal.

Ia menyebut, pengawasan tidak hanya diarahkan terhadap narkoba dan barang yang membahayakan masyarakat, tetapi juga terhadap penyelundupan komoditas strategis dan sumber daya alam Indonesia, termasuk emas, nikel, dan komoditas strategis lainnya.

“Penindakan yang Anda lakukan adalah upaya menyelamatkan ekonomi Indonesia. Penindakan impor ilegal tidak hanya merupakan persoalan kepabeanan dan capaian kinerja organisasi saudara, di dalamnya ada kepentingan masyarakat banyak,” kata Suahasil, dalam keterangan tertulis, Selasa (6/10/2026)

Menurutnya, penindakan terhadap impor ilegal memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan perekonomian nasional.

Masuknya ballpress, misalnya, dapat merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah, penjahit, industri tekstil, serta industri pendukung tekstil. Demikian pula masuknya beras ilegal yang dapat merugikan petani dan konsumen dalam negeri.

Dari sisi pelayanan Suahasil meminta Bea Cukai untuk memberikan kemudahan, kecepatan, transparansi, dan kepastian bagi masyarakat serta dunia usaha.

Dengan demikian, Bea Cukai tidak hanya menjalankan fungsi sebagai revenue collector, tetapi juga sebagai community protector, trade facilitator, dan industrial assistance.

Ia menilai tantangan Bea Cukai ke depan akan semakin kompleks seiring perubahan geopolitik, perkembangan perdagangan dan teknologi, serta semakin beragamnya perdagangan lintas negara.

Sehingga menurut Suahasil, konsistensi penindakan, kepatuhan terhadap ketentuan, dan integritas seluruh jajaran menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan tersebut.

“Pengawasan yang kuat tidak semata-mata diukur dari banyaknya penindakan, tetapi pengawasan yang kuat juga diukur dari kepercayaan masyarakat kepada institusi kita. Jaga kepercayaan masyarakat melalui tindakan nyata,” katanya.

Airlangga Bidik Investasi Hilirisasi Tembus Rp3.800 T Sampai 2030

Selasa, 6 Oktober 2026 13:48 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/123761/airlangga-bidik-investasi-hilirisasi-tembus-rp3-800-t-sampai-2030/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah menargetkan total nilai investasi hilirisasi akan mencapai Rp3.800 triliun dalam empat tahun ke depan.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam agenda Downstream Insight di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Jelasnya, Airlangga menyebut bahwa target tersebut merupakan rencana investasi hilirisasi yang didorong pemerintah untuk mengembangkan industri pengolahan dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

"Investasi [hilirisasi] ke depan ditargetkan bisa Rp 3.800 triliun dalam 4 tahun ke depan," kata Airlangga.

Sejalan dengan target tersebut, untuk tahun depan sendiri Airlangga menekankan bahwa pemerintah juga mendorong total realisasi investasi menjadi Rp2.500 triliun dengan 40% nya didorong melalui industri hilirisasi.

"[40%] pasti [termasuk] mineral dan batu bara termasuk persiapan yang untuk logam lain," jelas Airlangga.

Sementara itu, berdasarkan data realisasi investasi hilirisasi pada semester I-2026, Airlangga mengatakan telah mencapai Rp300 triliun dari target realisasi investasi tahun 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun. Realisasi tersebut meningkat sekitar 6,9% hingga 7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Di sisi lain, ia mengatakan pemerintah turut memiliki peta jalan hilirisasi untuk 28 komoditas yang mencakup delapan sektor dengan kebutuhan investasi disebut mencapai US\$618 miliar.

Harapannya, hal ini dapat meningkatkan ekspor menjadi US\$857 miliar dan menghasilkan nilai tambah sebesar US\$235,9 miliar.

Kendati demikian, Airlangga tetap menekankan bahwa hilirisasi tidak hanya dilakukan pada komoditas mineral, tetapi juga kepada sektor strategis lainnya.

"Itu juga banyak yang perlu kita dorong agar kontribusi GDP (Produk Domestik Bruto) kita terhadap industri terhadap GDP itu bisa lebih tinggi dari 20%," pungkasnya.

BPK: Potensi Kerugian Negara Capai Rp45,6 T Semester I 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 11:40 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/123733/bpk-potensi-kerugian-negara-capai-rp45-6-t-semester-i-2026/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan bahwa potensi kerugian negara pada Semester I 2026 mencapai Rp45,6 triliun yang dirangkum melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester I-2026.

Dalam IHPS tersebut, BPK merangkum 762 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 706 LHP Keuangan, 20 LHP Kinerja, dan 36 LHP dengan Tujuan Tertentu.

"IHPS juga mengungkapkan peran BPK dalam mendukung upaya penyelamatan keuangan negara sebesar Rp49,28 triliun melalui pengungkapan permasalahan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp45,6 triliun," kata Isma Yaton, Ketua BPK RI dalam Rapat Paripurna ke-9 DPR Masa Persidangan Ke-9 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Selasa (6/10/2026).

Menurut Isma Rp1,8 triliun diantaranya telah berhasil dikembalikan ke kas negara atau daerah maupun perusahaan atau badan lainnya.

Sementara itu, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada 96 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), serta opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) atas satu LKKL.

Dari 546 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperiksa, 509 entitas memperoleh opini WTP, 35 memperoleh opini WDP, dan dua entitas memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Selama pemeriksaan berlangsung, BPK juga mengungkap permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan, terutama pada BUMN dan badan lainnya, dengan nilai sebesar Rp3,68 triliun.

BPK juga menyebut bahwa pihaknya telah melakukan pemberantasan korupsi melalui pemeriksaan investigatif dengan nilai indikasi kerugian negara sebesar Rp43,39 miliar. Selain itu, BPK melakukan penghitungan kerugian negara dengan nilai kerugian mencapai Rp2,21 triliun.

Soroti 3 Isu Strategis

Dalam kerangka IHPS tersebut, BPK menyoroti tiga isu strategis yakni ketahanan energi, optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan layanan pendidikan dan kesehatan.

Terkait dengan ketahanan energi, BPK mendorong perbaikan atas pengelolaan kegiatan usaha hulu migas yang belum efektif dalam mendukung ketahanan energi.

“Di antara persoalan mendasarnya ialah ketidakjelasan status kelembagaan yang berdampak pada tata kelola. BPK merekomendasikan pemerintah untuk memperjelas status kelembagaan SKK MIGAS serta menuntaskan tambatan perizinan dan komersialisasi pada proyek strategis nasional,” kata Isma Yatun.

Yang kedua adalah terkait dengan optimalisasi PNBP. BPK menemukan permasalahan hilangnya penerimaan negara bukan pajak atas tarif visa Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar Rp16,61 miliar serta potensi penerimaan dari pidana denda atas penyalahgunaan izin tinggal dengan nilai maksimal sebesar Rp3,91 triliun.

Kemudian, pada sektor perikanan tangkap, BPK mengungkap kehilangan kesempatan untuk memperoleh PNBP sebesar Rp5,63 triliun.

“Kesemuanya memerlukan koordinasi lintas kementerian agar dasar data, mekanisme pungutan, dan tindak lanjutnya dapat diperbaiki,” kata Isma Yatun.

Ketiga, mengenai layanan pendidikan dan kesehatan terutama soal pengelolaan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan pada 288 pemerintah daerah belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

“Dampaknya, Satuan Pendidikan dapat menerima barang yang tidak sesuai rencana dan terjadi kelebihan pembayaran,” katanya.

Sementara itu, BPK juga menemukan bahwa pada 57 pemerintah daerah, pembayaran, bantuan, iuran, serta jaminan kesehatan belum didasarkan pada data kepersetaan yang valid dan mutakhir sehingga beresiko tidak tepat sasaran.

Tindak Lanjut Laporan Sebelumnya

Sementara itu, BPK juga menyebut bahwa dari hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dari tahun 2005 hingga 2025 pada IHPS ke-1 tahun 2026 menunjukkan bahwa sebanyak 81,4% rekomendasi telah selesai ditindak lanjuti.

“Dari tindak lanjut rekomendasi tersebut diketahui telah dilakukan penyetoran uang dan atau penyerahan aset ke negara, daerah, atau perusahaan oleh entitas dari hasil pemeriksaan tahun 2005 hingga semester I-2026 sebesar Rp163,61 triliun, termasuk Rp3,68 triliun yang berasal dari hasil pemeriksaan periode 2025,” kata Isma Yatun

Selain itu, IHPS ke-1 tahun 2026 juga mencatat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara atau daerah periode tahun 2005 hingga semester I-2026 dengan status yang telah ditetapkan sebesar Rp6,23 triliun.

Dari jumlah tersebut Rp2,27 triliun telah dilakukan pelunasan, Rp1,9 triliun dalam proses angsuran, dan Rp211,46 miliar telah dilakukan penghapusan. Dengan demikian, masih terdapat sisa kerugian sebesar Rp1,85 triliun atau 29,7% dari total kasus kerugian yang telah ditetapkan.

Suahasil Tegaskan Dividen Danantara Belum Akan Masuk APBN

Selasa, 6 Oktober 2026 10:00 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/123724/suahasil-tegaskan-dividen-danantara-belum-akan-masuk-apbn/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa dividen Danantara belum akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dan 2027.

Menurutnya, saat ini pemerintah tengah menyelesaikan APBN 2026 dan telah mendapatkan persetujuan untuk APBN 2027. Namun, Suahasil menegaskan kontribusi dividen Danantara belum tercermin dalam APBN 2026 maupun APBN 2027.

“Jadi, kontribusi [dividen] tersebut belum tercermin dalam APBN 2026 dan 2027, tetapi mungkin akan tercermin di masa mendatang,” kata Suahasil dalam wawancara kepada Bloomberg Television dikutip Selasa (6/10/2026).

Saat ditanya mengenai kemungkinan dividen danantara untuk masuk pada APBN 2028, Suahasil masih enggan memberikan jawaban yang pasti.

“Kemungkinan adalah sesuatu yang berbeda, itu hipotetis,” kata Suahasil.

Sementara, Suahasil juga menjelaskan bahwa dividen perusahaan-perusahaan BUMN disalurkan kepada Danantara untuk kemudian digunakan kembali dalam berbagai proyek, investasi, dan intervensi ekonomi.

“Kami berharap dana tersebut dapat di-leverage, bukan digunakan secara langsung dengan skema satu banding satu, tetapi dimanfaatkan sebagai pengungkit,” ujarnya.

Menurut Suahasil, Danantara dapat berperan sebagai katalisator investasi dengan mengundang sektor swasta dan mendorong masuknya investasi.

“Danantara harus menggunakannya secara lebih efisien karena merupakan konsolidasi seperti sovereign wealth fund. Dengan demikian, Danantara dapat menjadi katalisator, mengundang sektor swasta, dan mendorong masuknya investasi,” katanya.

Di sisi lain, Suahasil mengatakan APBN dapat lebih difokuskan untuk membiayai layanan publik, infrastruktur dasar, serta perlindungan sosial masyarakat.

“Kami tetap akan berinvestasi pada infrastruktur dan juga berkonsentrasi pada perlindungan sosial masyarakat. Jadi, jawabannya adalah ya. Baik secara langsung maupun tidak langsung, Danantara berkontribusi terhadap perekonomian,” kata Suahasil.

Pernyataan Suahasil ini berbanding terbalik dengan Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengatakan bahwa Danantara akan menyetorkan dana sebesar Rp120 triliun pada tahun 2026. Purbaya menyebut bahwa setoran dividen tersebut akan dikirimkan tahun ini.

“Sudah dipastikan. Tinggal ditentukan kapan dia mau ngirim. Itu saja, sekitar 120 triliun,” sebut Purbaya di kompleks Kementerian Keuangan, Jumat (28/8/2026).

Purbaya menyebut bahwa jumlah tersebut ditentukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengatakan bahwa hal tersebut dapat menguntungkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Presiden sudah menghitung kira-kira kebutuhan investasi mereka berapa sih? Kalau lebih ya sebagian di taruh pemerintah gitu,” kata Purbaya.

Purbaya menegaskan bahwa dana tersebut menjadi sisa kelebihan dari kebutuhan investasi Danantara dan telah dihitung oleh Presiden.

Harga Pangan Naik: Cabai di Atas Rp100 Ribu, Beras Masih Tinggi

Selasa, 6 Oktober 2026 18:40 WIB

Ibnu Affan

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/123792/harga-pangan-naik-cabai-di-atas-rp100-ribu-beras-masih-tinggi/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Mayoritas rata-rata harga komoditas pangan nasional masih mengalami kenaikan secara harian per hari ini, Selasa (6/10/2026). Cabai bahkan masih ada yang di atas Rp100.000/kg, begitu juga seluruh jenis beras yang masih tinggi.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia per pukul 16.25 WIB, harga cabai merah besar naik 12,91% atau Rp7.750/kg, menjadi Rp67.800/kg. Begitu juga cabai merah keriting yang naik 15,29% atau Rp10.900/kg, menjadi Rp82.200/kg.

Kemudian, harga cabai rawit hijau naik 7,11% atau Rp4.900/kg, menjadi Rp73.850/kg. Harga cabai rawit merah naik 2,05% atau Rp2.050/kg, menjadi Rp101.900/kg, sekaligus menjadi yang tertinggi di jenis cabai-cabai.

Lalu, harga beras kualitas medium II naik 0,30% atau Rp50/kg, menjadi Rp16.450/kg. Tapi, harga beras kualitas medium I tetap atau tidak berubah di Rp16.600/kg. Beras kualitas bawah I dan II juga tetap di Rp14.900 dan Rp14.700/kg.

Harga beras kualitas super I dan II atau setara beras premium juga tidak mengalami perubahan atau masing-masing tetap di Rp17.950 dan Rp17.350/kg.

Sementara itu, harga daging sapi kualitas 1 naik 0,13% atau Rp200/kg, menjadi Rp152.700/kg. Begitu juga daging sapi kualitas 2 naik 0,63% atau Rp900/kg, menjadi Rp143.950/kg. Namun, daging ayam ras segar turun 1,07% atau Rp450/kg, menjadi Rp41.650/kg. Telur ayam ras segar juga turun 0,33% atau Rp100/kg, menjadi Rp29.850/kg.

Harga bawang putih ukuran sedang naik 0,20% atau Rp100/kg, menjadi Rp39.100/kg, sementara bawang merah ukuran sedang turun 0,27% atau Rp100/kg, menjadi Rp37.200/kg.

Harga minyak goreng kemasan bermerek 2 naik 0,21% atau Rp50/kg, menjadi Rp23.600/kg. Sementara, minyak goreng curah dan kemasan bermerk I tidak berubah atau tetap di Rp20.400 dan Rp24.350/kg.

Terakhir, harga gula pasir lokal naik 0,26% atau Rp50/kg, menjadi Rp19.200/kg. Gula pasir kualitas premium juga masih naik 0,25% atau Rp50/kg, menjadi Rp20.400/kg.

Perputaran Uang RI Diproyeksi Melambat pada 2026, Ekonom Ungkap Penyebabnya

Selasa, 6 Oktober 2026 20:55 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Handoyo

<https://nasional.kontan.co.id/news/perputaran-uang-ri-diproyeksi-melambat-pada-2026-ekonom-ungkap-penyebabnya>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Perputaran uang di perekonomian Indonesia diperkirakan belum akan kembali menguat pada 2026. Kondisi tersebut mencerminkan masih terbatasnya transmisi likuiditas ke konsumsi, investasi, dan aktivitas ekonomi produktif.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan velocity of money atau kecepatan perputaran uang pada 2026 berada di kisaran 6,8–7,0 kali, dengan titik tengah sekitar 6,9 kali.

Proyeksi tersebut lebih rendah dibandingkan kecepatan perputaran uang pada 2025 yang mencapai sekitar 7,03 kali. Meski demikian, penurunannya diperkirakan tidak sedalam tahun sebelumnya, ketika velocity of money turun dari 7,80 kali pada 2024 menjadi 7,03 kali pada 2025.

"Kecepatan perputaran uang pada 2026 masih berpotensi menurun, tetapi penurunannya kemungkinan tidak sedalam 2025," ujar Josua kepada Kontan.co.id, Selasa (6/10).

Menurut Josua, jika menggunakan pendekatan Badan Pusat Statistik (BPS), yakni membandingkan Produk Domestik Bruto (PDB) nominal dengan uang beredar sempit atau M1, arah pergerakan velocity pada 2026 masih menunjukkan pelemahan moderat.

Pelemahan tersebut terjadi karena pertumbuhan M1 cenderung lebih cepat dibandingkan pertumbuhan PDB nominal. Pada Maret 2026, M1 masih tumbuh sekitar 14,4% secara tahunan, sementara pada Juli pertumbuhannya berada di sekitar 10%.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi riil berada di kisaran 5% dengan inflasi sekitar 3%. Kombinasi tersebut membuat pertumbuhan uang beredar masih relatif tinggi dibandingkan pertumbuhan aktivitas ekonomi nominal.

Josua menegaskan, penurunan kecepatan perputaran uang bukan berarti jumlah uang di perekonomian berkurang. Sebaliknya, uang beredar dan kredit masih tumbuh cukup tinggi.

Persoalannya, setiap rupiah yang tersedia tidak berputar secepat sebelumnya untuk menghasilkan transaksi barang dan jasa.

"Ini dapat terjadi ketika rumah tangga lebih berhati-hati membelanjakan pendapatan, perusahaan menahan ekspansi, atau likuiditas lebih banyak tersimpan dalam rekening dan instrumen keuangan daripada segera kembali menjadi konsumsi dan investasi," jelasnya.

Belanja Rumah Tangga Belum Sepenuhnya Mencerminkan Penguatan Permintaan

Josua melihat data konsumsi rumah tangga pada 2026 memberikan sinyal yang beragam. Pengeluaran per kapita pada Maret 2026 memang meningkat sekitar 5,6% secara tahunan.

Namun, pengeluaran untuk pangan tumbuh lebih tinggi, yakni sekitar 6,4%. Sementara itu, pengeluaran nonpangan hanya tumbuh sekitar 4,8%.

Kondisi tersebut juga tercermin dari meningkatnya pangsa pengeluaran pangan, dari sekitar 49,4% menjadi 49,8%.

Menurut Josua, kondisi itu menunjukkan kenaikan belanja masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan penguatan permintaan domestik. Sebagian peningkatan pendapatan rumah tangga masih terserap untuk memenuhi kebutuhan pokok.

"Artinya, kenaikan belanja belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan permintaan yang kuat, karena sebagian lebih besar pendapatan rumah tangga terserap untuk kebutuhan pokok," katanya.

Di sisi lain, pertumbuhan likuiditas juga belum tersebar secara merata ke rumah tangga. Kredit perbankan pada Agustus 2026 tumbuh sekitar 13,7%, tetapi pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh kredit investasi dan korporasi.

Sementara itu, pertumbuhan kredit konsumsi relatif lebih rendah. Proporsi rumah tangga yang menerima kredit juga disebut turun dari sekitar 23,9% pada 2025 menjadi sekitar 22% pada 2026.

Uang Elektronik Naik, Velocity Belum Tentu Meningkat

Josua juga menyoroti peningkatan kepemilikan uang elektronik. Menurut dia, perkembangan tersebut menunjukkan digitalisasi transaksi terus berkembang.

Namun, digitalisasi pembayaran tidak otomatis membuat kecepatan perputaran uang meningkat.

Hal tersebut terjadi apabila masyarakat dan dunia usaha tetap menahan saldo karena ketidakpastian, tekanan biaya hidup, ataupun kebutuhan untuk berjaga-jaga.

Dengan demikian, tantangan perekonomian bukan semata-mata menyediakan likuiditas, melainkan memastikan likuiditas tersebut benar-benar mengalir ke konsumsi, investasi, dan kegiatan produksi.

Efektivitas Likuiditas Perlu Diwaspadai

Josua menjelaskan, kecepatan perputaran uang bukan satu-satunya faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Namun, indikator tersebut dapat mencerminkan kekuatan permintaan dalam perekonomian.

Secara sederhana, PDB nominal dapat dilihat sebagai hasil perkalian antara jumlah uang beredar dan kecepatan perputarannya.

"Jadi apabila uang beredar tumbuh 10%, tetapi kecepatannya turun sekitar 2%, dorongan efektif terhadap aktivitas nominal menjadi sekitar 8%," ujarnya.

Artinya, pertumbuhan likuiditas yang besar tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan besaran yang sama apabila uang tersebut semakin lambat berputar.

Dalam kondisi tersebut, efektivitas pelonggaran likuiditas dan pertumbuhan kredit terhadap konsumsi, investasi, produksi, hingga penciptaan lapangan kerja dapat menjadi lebih kecil.

Risiko terbesar muncul apabila perlambatan velocity terjadi bersamaan dengan pelemahan daya beli kelas menengah dan lemahnya belanja nonpangan.

Rumah tangga berpotensi semakin memprioritaskan kebutuhan seperti makanan, energi, pendidikan, dan kesehatan, sembari menunda pembelian kendaraan, elektronik, rekreasi maupun barang tahan lama.

Jika berlangsung berkepanjangan, kondisi tersebut dapat menekan penjualan ritel, industri manufaktur, UMKM, dan permintaan kredit. Perusahaan kemudian dapat merespons dengan mengurangi produksi dan investasi, yang pada akhirnya berpotensi melemahkan penciptaan lapangan kerja dan kembali menekan konsumsi.

Ekonom Minta Kebijakan Tak Sekadar Tambah Likuiditas

Untuk itu, Josua menilai respons kebijakan tidak cukup hanya dengan memperbesar likuiditas.

Pemerintah perlu memastikan uang yang tersedia benar-benar mengalir dan berputar di sektor riil.

Dari sisi fiskal, belanja pemerintah perlu diarahkan pada program yang memiliki efek pengganda tinggi, terutama perlindungan daya beli, pembangunan infrastruktur padat karya, serta program yang secara langsung meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dari sisi perbankan, penyaluran kredit juga dinilai perlu lebih banyak diarahkan kepada UMKM, manufaktur, perdagangan, dan sektor-sektor yang menciptakan lapangan kerja, bukan hanya terkonsentrasi pada korporasi besar.

Stabilitas harga pangan juga menjadi faktor penting. Semakin besar pendapatan rumah tangga terserap untuk kebutuhan dasar, semakin kecil ruang yang tersedia untuk konsumsi barang dan jasa lainnya.

Josua memperkirakan penurunan kecepatan perputaran uang pada 2026 masih dapat berlanjut ke sekitar 6,9 kali. Namun, menurutnya, angka tersebut bukan persoalan utama.

"Pertanyaan utamanya adalah apakah tambahan uang dan kredit yang sudah tersedia mampu diterjemahkan menjadi konsumsi, investasi, produksi dan pekerjaan," katanya.

Jika velocity terus melambat, target pertumbuhan ekonomi tetap dapat dicapai apabila jumlah uang beredar dan produktivitas meningkat cukup kuat. Namun, kualitas transmisi likuiditas menjadi kurang efisien.

Oleh karena itu, tantangan ekonomi Indonesia pada 2026 bukan sekadar menambah likuiditas, melainkan memastikan likuiditas yang sudah besar benar-benar bergerak lebih cepat menuju kegiatan ekonomi produktif.

Masuk Aset Migas AS, Danantara Gelontorkan Investasi Hingga US\$ 250 Juta

Selasa, 6 Oktober 2026 18:10 WIB

Reporter: Ahmad Febrian, Editor: Ahmad Febrian

<https://nasional.kontan.co.id/news/masuk-aset-migas-as-danantara-gelontorkan-investasi-hingga-us-250-juta>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Danantara Indonesia mulai membidik aset energi di pasar global. Melalui holding investasinya, PT Danantara Investment Management (DIM), Danantara menanamkan US\$ 250 juta di HighPeak Energy, perusahaan migas asal Texas yang memiliki aset di Permian Basin, Amerika Serikat (AS).

Investasi tersebut menjadi langkah DIM memperluas eksposur di sektor energi sekaligus membuka peluang transfer teknologi dan keahlian bagi tenaga kerja Indonesia. Transaksi melalui penerbitan convertible preferred stocks dalam beberapa tahap

Menurut US Energy Information Administration, Permian Basin menyumbang 48% dari total produksi minyak AS pada tahun 2025. Pertumbuhan produksi di wilayah tersebut antara lain didorong penggunaan teknik pengeboran horizontal dan rekahan hidrolik atau fracking.

Bagi Indonesia, investasi ini juga membuka peluang transfer pengetahuan dan keahlian teknis. Setelah transaksi rampung, HighPeak akan mengembangkan program pelatihan dan penugasan kerja (secondment) bagi tenaga kerja Indonesia.

Chief Executive Officer Danantara Investment Management, Pandu Sjahrir mengatakan, investasi tersebut sejalan dengan mandat DIM untuk berinvestasi di sektor strategis dengan imbal hasil berkelanjutan dalam jangka panjang.

“Posisi strategis HighPeak di salah satu pasar hulu minyak dan gas bumi paling maju di dunia menjadikannya peluang investasi yang potensial. Kami berharap, kerja sama ini dapat memfasilitasi transfer pengetahuan yang mendukung pengembangan sektor energi Indonesia,” ujar Pandu, dalam keterangannya, Selasa (6/10).

Dalam transaksi tersebut, DIM memperoleh perlindungan terhadap penurunan nilai investasi serta peluang mendapatkan manfaat dari kenaikan nilai ekuitas melalui konversi menjadi saham biasa.

DIM juga memiliki opsi untuk berpartisipasi dalam penawaran saham HighPeak berikutnya melalui private placement dan akan menempatkan satu perwakilan di jajaran direksi HighPeak.

Presiden dan Chief Executive Officer HighPeak, Michael Hollis mengatakan, investasi DIM akan mendukung pengembangan aset perusahaan di Permian Basin, termasuk melalui perluasan program pengeboran.

“Kerja sama dengan DIM akan mengakselerasi pengembangan aset tersebut melalui investasi berkelanjutan, termasuk perluasan program pengeboran,” ujar Michael.

Investasi ini sekaligus membuka ruang bagi Indonesia untuk mempelajari praktik pengembangan lapangan migas di Permian Basin yang dapat menjadi referensi dalam upaya meningkatkan produksi minyak dan gas bumi domestik.

Kejar Pertumbuhan 6%, Pemerintah Bidik Investasi Hilirisasi Rp 1.160 Triliun di 2027

Selasa, 6 Oktober 2026 13:49 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora. Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/kejar-pertumbuhan-6-pemerintah-bidik-investasi-hilirisasi-rp-1160-triliun-di-2027>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan investasi nasional pada 2027 mencapai sekitar Rp 2.900 triliun. Dari target tersebut, sekitar 40% atau setara Rp 1.160 triliun diharapkan berasal dari investasi sektor hilirisasi.

Besaran target tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2027 dapat mencapai 6% secara tahunan (year on year/yoy) sesuai target Presiden Prabowo dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

"Tahun depan target investasinya sekitar Rp 2.900 triliun. Ini termasuk mungkin 40% dari hilirisasi," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan Kontan, saat ditemui di Graha CIMB Niaga Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Airlangga mengatakan, investasi hilirisasi pada tahun depan masih akan diarahkan terutama pada sektor mineral dan batubara, termasuk persiapan pengembangan komoditas logam lainnya. "Ya pasti mineral dan batubara, termasuk persiapan yang untuk logam lain," ujarnya.

Lebih lanjut Airlangga menyebut pengembangan industri dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam (SDA) menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan yang ditargetkan 8% pada tahun 2029.

Pemerintah tidak hanya mengandalkan hilirisasi komoditas mineral, tetapi juga mulai memperluas pengembangan sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable resources.

Sumber daya alam tersebut terbagi menjadi renewable dan non-renewable. Untuk sektor renewable, pemerintah mendorong pengembangan industri berbasis kehutanan, pertanian, perkebunan, serta kelautan dan perikanan.

"Yang renewable adalah yang berbasis kepada hutan dan agro. Itu salah satu yang kita kembangkan dan relatif kita sudah punya turunan," ujarnya.

Airlangga mencontohkan, kelapa sawit saat ini telah memiliki lebih dari 200 produk turunan. Selain itu komoditas karet juga telah dikembangkan hingga produk ban. Industri berbasis pertanian juga diarahkan untuk menghasilkan produk pangan, pakan ternak, hingga bahan bakar.

Sementara itu, untuk sumber daya alam non-renewable, Airlangga menyebut fokus utama masih berada pada mineral dan batubara.

Pemerintah sendiri telah menyusun peta jalan hilirisasi untuk 28 komoditas yang mencakup delapan sektor. Airlangga menegaskan, hilirisasi perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi industrialisasi yang lebih luas.

"Hilirisasi tidak sama dengan industrialisasi. Hilirisasi salah satu daripada industri," ujarnya.

Karena itu, pemerintah juga akan mendorong sektor manufaktur lain seperti otomotif, tekstil dan produk tekstil, fast moving consumer goods (FMCG), serta industri strategis lainnya.

Langkah tersebut diperlukan agar kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dapat meningkat di atas 20%.

Airlangga menyebut, kebutuhan investasi untuk pengembangan 28 komoditas hilirisasi tersebut mencapai sekitar US\$ 618 miliar yang ditargetkan bisa tercapai pada 2040. Investasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan ekspor hingga US\$ 857 miliar, dengan tambahan nilai ekspor sekitar US\$ 235,9 miliar.

"Kalau hilirisasi ini bertambah, ekspor kita bisa double dari angka tersebut," katanya.

Adapun realisasi investasi di sektor hilirisasi pada semester I 2026 mencapai Rp 300,1 triliun, tumbuh 6,9% secara tahunan (year on year/yoy). Jumlah tersebut berkontribusi sebesar 29,7% dari total capaian realisasi investasi sebesar Rp 1.010,6 triliun pada semester I 2026.

Dalam rinciannya, investasi di sektor mineral mencapai Rp 206,5 triliun, keudian sektor perkebunan dan kehutanan sebesar Rp 54,4 triliun, minyak dan gas bumi Rp 35,4 triliun, dan sektor perikanan dan kelautan Rp 3,8 triliun.

Bank Dunia Ungkap Ekonomi Indonesia Mulai Melambat

Selasa, 06 Oktober 2026 11:59 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/bank-dunia-ungkap-ekonomi-indonesia-mulai-melambat>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank Dunia atau World Bank menyoroti tanda-tanda perlambatan aktivitas ekonomi Indonesia setelah mencatat pertumbuhan 5,4% pada semester I 2026.

Dalam laporan East Asia & Pacific Economic Update edisi Oktober 2026, World Bank menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada paruh pertama 2026 meningkat dari 5,1% pada 2025 menjadi 5,4%.

Capaian tersebut menjadi rata-rata pertumbuhan dua kuartal terkuat sejak 2022.

Namun, World Bank mencatat aktivitas ekonomi domestik Indonesia kemudian mulai melemah. Salah satu indikatornya terlihat dari Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur yang turun menjadi 49,3 pada Agustus 2026.

Selain itu, kepercayaan konsumen juga menurun menjadi 116,8 pada Juli 2026. Kedua indikator tersebut menunjukkan adanya pelemahan aktivitas ekonomi setelah kinerja yang kuat pada semester pertama tahun ini.

"Aktivitas ekonomi domestik tampaknya kemudian melemah," tulis World Bank dalam laporannya, Selasa (6/10/2026).

World Bank menjelaskan, penguatan ekonomi pada semester I 2026 terutama mencerminkan peningkatan konsumsi swasta dan lonjakan belanja pemerintah di sekitar pergantian tahun.

Belanja pemerintah yang lebih cepat tersebut dipengaruhi oleh Ramadan dan Idulfitri yang berlangsung lebih awal, pemberian tunjangan hari raya bagi pegawai sektor publik yang dilakukan lebih awal, serta percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kondisi tersebut membuat belanja pemerintah bergeser lebih awal dalam siklus fiskal

Meski menyoroti pelemahan aktivitas domestik, World Bank masih memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,2% pada 2026.

Bahkan, proyeksi tersebut merupakan revisi naik 0,5 poin persentase dibandingkan proyeksi sebelumnya. World Bank menilai dampak kenaikan harga energi terhadap ekonomi Indonesia lebih kecil dari perkiraan sebelumnya.

Aktivitas ekonomi juga masih ditopang oleh peningkatan program prioritas pemerintah, investasi yang terkait dengan badan usaha milik negara, serta subsidi energi.

Namun, World Bank memperingatkan kombinasi kebijakan tersebut turut berkontribusi terhadap pelebaran ketidakseimbangan fiskal dan eksternal. Defisit transaksi berjalan Indonesia diperkirakan mencapai 1,5% terhadap PDB pada 2026.

Ke depan, ketika stimulus fiskal mulai dimoderasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan semakin bergantung pada investasi swasta.

Tiga Hari Njajan Fest 3X di Rembang Berhasil Raup Omzet Rp2,56 Miliar

Selasa, 6 Oktober 2026

Penulis: Mifta Rembang, Editor: Di, Diskomdigi Jateng

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/tiga-hari-njajan-fest-3x-di-rembang-berhasil-raup-omzet-rp256-miliar/>

REMBANG – Njajan Fest 3X yang digelar di Taman Rekreasi Pantai (TRP) Kartini, pada Jumat (2/10/2026) hingga Minggu (4/10/2026) berhasil meraup omzet penjualan UMKM mencapai Rp2,56 miliar.

Ketua Panitia Njajan Fest 3X, Mohammad Gufron mengungkapkan rasa haru melihat antusiasme masyarakat, serta kerja keras seluruh tim yang akhirnya membuahkan hasil.

“Total penjualan UMKM kami mencapai Rp2,56 miliar. Ini tentu catatan yang luar biasa, saya rasa warga Rembang patut berbangga,” ungkap Ipong, sapaan akrabnya.

Menurutnya, penyelenggaraan festival dengan banyak panggung dan agenda secara bersamaan bukan pekerjaan mudah. Selain membutuhkan anggaran lebih besar, diperlukan koordinasi kuat antara panitia, vendor dan pengisi acara. Namun, kerja sama seluruh pihak membuat enam panggung yang disiapkan, mampu memiliki daya tarik masing-masing.

Disampaikan, Njajan Fest 3X mengusung tema Lorong Waktu, menjadi simbol keinginan untuk menghidupkan kembali kenangan masa kejayaan TRP Kartini, sebagai salah satu destinasi wisata yang pernah ramai dikunjungi masyarakat.

Melalui festival tersebut, dia berharap, TRP Kartini kembali menjadi ruang rekreasi dan hiburan yang menarik bagi masyarakat Rembang maupun wisatawan dari luar daerah.

Selain menjadi ajang hiburan, lanjutnya, Njajan Fest 3X juga menjadi ruang promosi bagi produk-produk UMKM lokal. Kehadiran ratusan tenant diharapkan mampu menggerakkan aktivitas ekonomi, sekaligus mendukung perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Rembang.

Ipong menambahkan, dengan konsep tersebut, Njajan Fest 3X tidak hanya menawarkan pengalaman wisata kuliner, tetapi juga berupaya menghadirkan kembali atmosfer keramaian TRP Kartini sekaligus membuka ruang bagi pelaku UMKM dan seniman lokal untuk tampil.

Sebagai informasi, rangkaian acara juga diisi dengan pentas seni, Rembang Idol serta berbagai permainan tradisional yang dapat dinikmati masyarakat selama festival berlangsung.

Luar biasa! NjajanFest 3X catat omzet Rp2,56 miliar dan diserbu 50.000 pengunjung

Selasa, 6 Oktober 2026 15:59 WIB

Pewarta: Aris Wasita, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/647565/luar-biasa-njajanfest-3x-catat-omzet-rp256-miliar-dan-diserbu-50000-pengunjung>

Rembang (ANTARA) - Festival kuliner terbesar NjajanFest 3X resmi ditutup dengan catatan luar biasa. Selama tiga hari penyelenggaraan pada 2–4 Oktober 2026 di area Taman Kartini Rembang, festival kuliner terbesar ini berhasil menarik lebih dari 50.000 pengunjung dan berhasil mencatatkan total perputaran uang serta omzet pelaku UMKM mencapai Rp2,56 miliar.

Mengusung perpaduan kuliner dan hiburan, NjajanFest 3X menghadirkan 113 tenant kuliner dan UMKM, dengan sajian mulai dari jajanan legendaris hingga kuliner kekinian.

Kemeriahan festival dilengkapi sembilan ajang pencarian bakat bagi anak muda Rembang, seperti Idola Cilik, Rembang Idol, dan Rembang Dangdut Academy, serta perlombaan Gobak Sodor antarsekolah yang menghidupkan kembali permainan tradisional.

NjajanFest 3X diselenggarakan oleh Rumah BUMN Rembang, yang secara co-partnership dikelola oleh PT Semen Gresik bersama induk perusahaan, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG).

Festival Director NjajanFest Ahmad “Iponk” Ghufroon menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan NjajanFest hingga edisi ketiga. Ia menyebut gelaran tahun ini menjadi catatan istimewa sekaligus penutup perjalanan NjajanFest yang telah menjadi bagian dari geliat kuliner dan UMKM di Rembang.

“Terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh masyarakat, para pelaku UMKM, dan tim yang telah berjuang bersama. NjajanFest 3X ini menjadi catatan sejarah yang sangat manis bagi kami. Kami memohon maaf sekaligus berpamitan, karena NjajanFest 3X ini adalah edisi terakhir yang kami selenggarakan. Semoga semangat memberdayakan kuliner lokal dan UMKM ini terus menyala di wadah-wadah lainnya,” jelasnya.

Apresiasi juga disampaikan Plt. Kepala Dinas Pariwisata Isti Chomawati yang menilai bahwa NjajanFest mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat.

Menurutnya, penyelenggaraan event secara mandiri tanpa mengandalkan anggaran pemerintah menjadi contoh positif kolaborasi dan kreativitas dalam mengembangkan potensi wisata serta UMKM daerah.

“Kami atas nama Dinas Pariwisata memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada penyelenggara NjajanFest. Ini adalah contoh konkret dan teladan baik bagaimana sebuah event non-APBD mampu dikemas secara profesional dan kreatif, serta memberikan dampak ekonomi yang luar biasa nyata bagi masyarakat dan UMKM lokal. Terima kasih juga karena telah membantu meramaikan kembali gairah wisata Taman Kartini, primadona wisata yang telah lama tertidur,” ungkap Isti Chomawati.

Sementara itu, Senior Manager of Communication & CSR PT Semen Gresik Taufik Susanto turut mengapresiasi keberhasilan NjajanFest 3X dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Ia menilai tingginya jumlah pengunjung dan perputaran ekonomi yang tercipta menjadi bukti bahwa UMKM Rembang memiliki potensi serta daya saing yang kuat.

“Kami melihat NjajanFest bukan sekadar festival kuliner, melainkan wadah nyata untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Pencapaian omzet Rp 2,56 miliar dan puluhan ribu pengunjung adalah bukti bahwa UMKM Rembang punya daya saing. Semen Gresik akan terus mendukung pemberdayaan ini melalui Rumah BUMN,” pungkasnya.

BUMDesa di Jepara Didorong Perluas Pasar, Gandeng Bulog hingga Ritel

Selasa, 6 Oktober 2026

Lia Barokatus Solikah

[https://joglojateng.com/2026/10/06/bumdesa-di-jepara-didorong-perluas-pasar-gandeng-bulog-hingga-ritel/#:~:text=BUMDesa%20di%20Jepara%20Didorong%20Perluas%20Pasar%2C%20Gandeng,Sela%20\(6%2F10%2F2026\).%20\(%20LIA%20BAROKATUS%20SOLIKAH%2FJOGLO%20JATEN G\)](https://joglojateng.com/2026/10/06/bumdesa-di-jepara-didorong-perluas-pasar-gandeng-bulog-hingga-ritel/#:~:text=BUMDesa%20di%20Jepara%20Didorong%20Perluas%20Pasar%2C%20Gandeng,Sela%20(6%2F10%2F2026).%20(%20LIA%20BAROKATUS%20SOLIKAH%2FJOGLO%20JATEN G))

JEPARA, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten Jepara mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan BUMDesa Bersama memperluas pasar usahanya dengan membangun kemitraan bersama perusahaan maupun lembaga berskala lebih besar.

Dorongan tersebut salah satunya dilakukan melalui Temu Bisnis BUMDesa/BUMDesa Bersama Kabupaten Jepara yang mempertemukan para pengelola BUMDesa dengan sejumlah calon mitra, mulai dari Bulog, Pertamina, perbankan, pelaku ritel, dunia usaha hingga berbagai lembaga lainnya, di Pendopo R.A. Kartini, Selasa (6/10/2026).

Bupati Jepara, Witiarso Utomo mengatakan, setiap desa memiliki potensi yang berbeda dan bisa dikembangkan menjadi usaha. Namun, potensi tersebut tidak akan memberikan hasil maksimal jika produk yang dihasilkan tidak memiliki akses menuju pasar.

“Potensi desa begitu beragam. Namun, potensi saja tidak cukup. Potensi harus terhubung dengan pasar, produk punya akses ke pembeli, dan pelaku usaha memperoleh mitra yang tepat,” ujar bupati.

Karena itu, ia meminta BUMDesa tidak hanya berpikir mengenai produk yang bisa dijual saat ini. Pengelola juga perlu melihat peluang agar produk desa dapat masuk ke rantai pasok yang lebih besar.

“BUMDesa jangan hanya berpikir tentang apa yang bisa dijual hari ini, tetapi juga bagaimana produk desa masuk ke dalam rantai pasok yang lebih besar,” katanya.

Menurut bupati, keberadaan mitra dari berbagai sektor menjadi peluang bagi BUMDesa untuk memperluas jaringan usaha. Namun, pertemuan tersebut diharapkan tidak berhenti pada komunikasi dan penajakan semata.

“Relasi yang terbentuk harus kita dorong menjadi kemitraan yang nyata,” tegasnya.

Selain membuka akses dengan dunia usaha, Witiarso meminta pengelola BUMDesa memperkuat komunikasi antardesa. Kerja sama antar-BUMDesa dinilai bisa membuka peluang baru, baik melalui pertukaran informasi maupun pengembangan usaha bersama.

“Saling kerja sama antara BUMDesa dan BUMDesa yang lain. Komunikasi intens setiap hari yang harus dijaga. Ekosistemnya harus dibentuk juga, biar bisa jalan semuanya. Koneksinya harus diperluas juga,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa (Dinsospermasdes) Kabupaten Jepara, Muh Ali menyampaikan, temu bisnis tersebut diarahkan untuk membangun kemitraan strategis yang saling menguntungkan antara BUMDesa dengan para calon mitra usaha.

Kemitraan itu diharapkan dapat membantu BUMDesa dan BUMDesa Bersama mengembangkan unit usaha sekaligus memperluas jaringan pemasaran.

“Tujuannya antara lain meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), mengoptimalkan potensi desa, memperkuat ekosistem ekonomi perdesaan serta mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat desa,” jelas Ali.

Menurutnya, forum tersebut juga menjadi ruang bagi pengelola BUMDesa untuk menemukan peluang kerja sama yang bisa disesuaikan dengan potensi masing-masing desa.

Temu Bisnis BUMDesa/BUMDesa Bersama Kabupaten Jepara Tahun 2026 diikuti 197 peserta. Rinciannya, 184 pengelola operasional BUMDesa se-Kabupaten Jepara, sembilan pengelola operasional BUMDesa Bersama, serta empat Ketua UPK DBM Eks PNPM MPd.

“Melalui forum ini, Pemkab Jepara berharap BUMDesa tidak hanya mampu mengembangkan usaha di tingkat desa, tetapi juga memiliki akses pasar yang lebih luas dan dapat membangun kemitraan bisnis yang berkelanjutan,” tandasnya. (oka/gih/rds)

UMKM dan Industri Halal Berpotensi Jadi Penggerak Ekonomi Syariah Jateng

Selasa, 6 Oktober 2026 14:28 WIB

Oleh : Ari Susilowati, Editor : Marnisa Nurdian Saritri

<https://rri.co.id/semarang/ekonomi/makro/2790720/umkm-dan-industri-halal-berpotensi-jadi-penggerak-ekonomi-syariah-jateng>

RRI.CO.ID, Semarang - Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Jawa Tengah. Besarnya jumlah UMKM, terutama yang bergerak di sektor makanan dan minuman, menjadi peluang yang dapat terus dikembangkan.

Pengamat ekonomi dari Universitas PGRI Semarang (UPGRIS), Dr. Heri Prabowo, S.E., M.M., mengatakan Jawa Tengah memiliki pasar yang besar untuk pengembangan produk halal. "Kita bisa melihat dari jumlah penduduk Jawa Tengah yang sangat besar, kemudian mayoritas penduduk yang muslim, sehingga ini menjadi pasar yang potensial," katanya dalam wawancara bersama RRI, Selasa, 6 Oktober 2026.

Menurutnya, industri makanan dan minuman menjadi salah satu sektor yang paling menjanjikan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Sebagian besar UMKM juga bergerak di sektor tersebut sehingga memiliki peluang besar untuk masuk dan memperkuat ekosistem industri halal.

"Industri UMKM di Indonesia, khususnya Jawa Tengah, banyak sekali. Kemudian dari UMKM itu banyaknya adalah food and beverage. Tentu kalau sifatnya makanan dan minuman itu kebutuhannya orang makan minimal tiga kali sehari," katanya.

Heri menilai perhatian UMKM terhadap aspek kehalalan produk dapat menjadi kekuatan dalam mengembangkan ekonomi syariah. Produk UMKM yang telah memenuhi standar halal dinilai lebih memiliki peluang untuk memperluas pasar sekaligus menarik minat investor.

Namun, pengembangan industri halal masih menghadapi tantangan, salah satunya kemudahan pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal. Pemerintah daerah dinilai perlu memberikan dukungan agar proses sertifikasi dapat diakses lebih mudah oleh pelaku usaha.

"Pasar yang besar ini apakah sudah digarap sepenuhnya. Kemudian terkait regulasi, mungkin perlu dukungan terhadap sertifikasi halal dan segala macam, itu juga menjadi tantangan untuk bisa menyebarkan ekonomi syariah ini," katanya.

Selain sertifikasi, promosi produk halal juga perlu diperkuat agar masyarakat mengetahui sekaligus memiliki pilihan terhadap produk yang telah mendapatkan jaminan kehalalan. Heri mengatakan, apabila dukungan regulasi, sertifikasi, promosi, dan akses pasar dapat diperkuat, UMKM Jawa Tengah berpotensi menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi syariah di daerah tersebut.

Defisit Perdagangan AS Melonjak Imbas Tarif dan Impor AI

Rabu, 7 Oktober 2026 16:20 WIB

Mark Niquette

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/123891/defisit-perdagangan-as-melonjak-imbis-tarif-dan-impor-ai/2>

Bloomberg, Defisit perdagangan Amerika Serikat (AS) melebar tajam pada Agustus ke level terbesar sejak awal 2025, setelah lonjakan pengiriman barang modal dari luar negeri mendorong impor mencapai rekor tertinggi.

Defisit perdagangan barang dan jasa meningkat 13,7% dari bulan sebelumnya menjadi US\$105,6 miliar, berdasarkan data Departemen Perdagangan AS pada Selasa (6/10). Ekonom memperkirakan defisit sebesar US\$102,1 miliar, berdasarkan median proyeksi dalam survei Bloomberg.

Data perdagangan bulanan tersebut, yang belum disesuaikan dengan inflasi, mengalami fluktuasi besar sejak awal 2025 akibat tarif AS dan, belakangan, volatilitas harga minyak mentah yang dipicu perang. Tantangan rantai pasokan serta ketergantungan terhadap teknologi impor untuk memenuhi investasi besar-besaran di sektor kecerdasan buatan (AI) juga turut berperan.

Defisit perdagangan barang dan jasa pada Agustus kemungkinan akan membebani produk domestik bruto (PDB) AS pada kuartal III. Sebelum data terbaru dirilis, perkiraan GDPNow dari Federal Reserve Bank of Atlanta menunjukkan ekspor neto akan mengurangi 2,59 poin persentase dari perhitungan PDB.

Angka tersebut akan menjadi penurunan terbesar sejak awal 2025, sebelum pemerintahan Trump mengumumkan tarif tinggi pada "Hari Pembebasan."

Nilai impor barang dan jasa meningkat 4,3%, sementara ekspor naik 1,4%.

Setelah disesuaikan dengan inflasi, defisit perdagangan barang melebar menjadi US\$114,7 miliar pada Agustus, juga menjadi defisit terbesar sejak Maret 2025.

Barang Modal

Nilai impor barang modal—kategori yang mencakup komputer dan aksesoris, semikonduktor, serta peralatan telekomunikasi—meningkat US\$6,2 miliar dari bulan sebelumnya. Investasi dalam pembangunan infrastruktur kecerdasan buatan telah menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi AS.

Impor semikonduktor melonjak US\$2,4 miliar dari bulan sebelumnya, kenaikan bulanan terbesar yang pernah tercatat. Pengiriman pesawat sipil dan peralatan telekomunikasi dari luar negeri juga meningkat.

Nilai nominal impor pasokan industri, yang mencakup minyak dan produk minyak bumi, meningkat US\$9,1 miliar dari bulan sebelumnya. Sementara itu, pengiriman pasokan industri ke luar negeri naik US\$6,3 miliar. Impor dan ekspor emas nonmoneter, kategori yang sangat bergejolak sejak awal tahun lalu, juga meningkat.

Sementara itu, ekspor jasa relatif tidak berubah, tertekan oleh pengeluaran wisatawan di AS yang mencapai level terendah sejak Agustus 2023.

Berdasarkan negara, defisit perdagangan barang AS dengan Kanada melebar ke level terbesar sejak awal 2025. Perusahaan di kedua negara mempercepat pengiriman barang untuk menghindari tarif setelah pembicaraan perdagangan terhenti pada Agustus. Tarif AS sebesar 50% terhadap barang-barang Kanada senilai miliaran dolar mulai berlaku pada 22 Agustus, mendorong Kanada membalas dengan memberlakukan tarif baru.

Defisit perdagangan barang AS dengan Meksiko dan Vietnam sedikit melebar ke rekor baru, sementara defisit dengan Taiwan, pemasok utama semikonduktor, juga meningkat.

China Tambah Cadangan Emas 23 Bulan Beruntun, Tembus 77,47 Juta Ons

Rabu, 7 Oktober 2026 10:21 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/china-tambah-cadangan-emas-23-bulan-beruntun-tembus-7747-juta-ons>

KONTAN.CO.ID - Bank sentral China kembali menambah cadangan emas pada September 2026. Langkah tersebut memperpanjang tren pembelian emas oleh bank sentral China menjadi 23 bulan berturut-turut, meski harga emas mengalami volatilitas tinggi sepanjang tahun ini.

Mengutip Reuters, Rabu (7/10/2026), data resmi menunjukkan kepemilikan emas People's Bank of China (PBoC) meningkat menjadi 77,47 juta fine ons troy pada akhir September. Jumlah tersebut naik dari 76,73 juta fine ons troy pada akhir Agustus.

Dengan demikian, PBoC terus melakukan akumulasi emas di tengah pergerakan harga logam mulia yang cukup tajam sepanjang tahun.

Namun, nilai cadangan emas China justru mengalami penurunan pada September. Nilainya turun menjadi US\$323,52 miliar pada akhir September dari US\$350,08 miliar sebulan sebelumnya.

Penurunan nilai tersebut sejalan dengan koreksi harga emas pada September. Harga emas tercatat turun lebih dari 6% sepanjang bulan tersebut.

Meski harga emas mengalami tekanan, keputusan PBoC untuk kembali menambah kepemilikan menunjukkan bank sentral China masih mempertahankan strategi diversifikasi cadangan devisa melalui aset emas.

Pada perdagangan Rabu (7/10/2026) pukul 02.44 GMT, harga emas spot berada di sekitar US\$4.147,47 per ons troy.

Dolar AS Bertahan Melemah Rabu (7/10) Pagi, Pasar Tunggu Sinyal Suku Bunga The Fed

Rabu, 7 Oktober 2026 08:27 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/dolar-as-bertahan-melemah-rabu-710-pagi-pasar-tunggu-sinyal-suku-bunga-the-fed>

KONTAN.CO.ID - Dolar Amerika Serikat (AS) bertahan melemah pada perdagangan Rabu (7/10/2026). Pasar menunggu risalah pertemuan Federal Reserve (The Fed) serta pernyataan sejumlah pejabat bank sentral AS untuk mencari petunjuk mengenai arah suku bunga selanjutnya.

Meredanya tekanan di pasar obligasi Eropa turut membebani dolar AS. Pada perdagangan sebelumnya, euro melonjak paling tinggi dalam tujuh pekan setelah imbal hasil obligasi Prancis turun menyusul rencana kandidat terdepan dalam pemilihan presiden tahun depan untuk memangkas belanja pemerintah.

Di sisi lain, yen Jepang melemah meski salah satu anggota dewan Bank of Japan (BOJ) yang cenderung dovish menyatakan dukungan terhadap kenaikan suku bunga.

The Fed dijadwalkan merilis risalah pertemuan kebijakan 15-16 September pada Rabu waktu AS. Dalam pertemuan tersebut, The Fed menaikkan suku bunga untuk meredam inflasi.

Namun, pernyataan sejumlah pejabat The Fed belakangan cenderung kurang hawkish setelah data personal consumption expenditures (PCE) dan laporan ketenagakerjaan AS yang lebih lemah dari perkiraan pada pekan lalu.

"Ada sedikit urgensi bagi The Fed untuk menaikkan suku bunga setelah data PCE dan nonfarm payrolls yang lebih lemah baru-baru ini," ujar Gavin Friend, senior markets strategist National Australia Bank, dalam sebuah podcast.

Melansir Reuters, Indeks dolar, yang mengukur kinerja greenback terhadap sejumlah mata uang utama, naik tipis 0,03% menjadi 101,94 setelah merosot 0,27% pada perdagangan sebelumnya.

Sementara itu, euro melemah 0,08% menjadi US\$ 1,1249. Yen Jepang turun 0,19% terhadap dolar AS menjadi 158,43 yen per dolar. Pound sterling juga turun 0,08% menjadi US\$ 1,3262.

Imbal hasil obligasi di berbagai negara telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir karena ekspektasi kenaikan suku bunga bank sentral serta kekhawatiran terhadap kondisi fiskal pemerintah.

Tekanan terhadap obligasi Prancis meningkat ketika para politikus kesulitan memangkas defisit anggaran menjelang pemilu 2027 yang diperkirakan berlangsung sengit. Pemilu cepat di Spanyol juga menambah tekanan terhadap euro.

Euro menguat tajam pada Selasa setelah kandidat presiden Prancis dari sayap kanan, Marine Le Pen, menaikkan target pemangkasan belanja menjadi €140 miliar atau sekitar US\$158 miliar dari rencana sebelumnya sebesar €125 miliar jika memenangkan pemilu 2027.

Dari Jepang, anggota baru dewan kebijakan BOJ Ayano Sato mengatakan kepada kantor berita Kyodo pada Rabu bahwa dirinya mendukung kenaikan suku bunga secara bertahap.

BOJ juga berpotensi memberikan sinyal pada bulan ini bahwa inflasi yang mendasari telah mendekati target 2%.

Tiga sumber yang mengetahui pemikiran bank sentral Jepang mengatakan hal tersebut dapat memperkuat kesiapan BOJ untuk kembali menaikkan suku bunga.

Ekspektasi Kenaikan Suku Bunga The Fed Oktober Menurun

Ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed pada akhir Oktober terus menurun. Meski demikian, pasar masih memperkirakan adanya kenaikan suku bunga pada akhir tahun ini maupun tahun depan.

Presiden Federal Reserve Bank of Kansas City Jeff Schmid pada Selasa mengatakan The Fed masih perlu menaikkan suku bunga lebih lanjut untuk menekan inflasi.

Pernyataan tersebut muncul meski kenaikan imbal hasil obligasi jangka panjang mulai menekan aktivitas ekonomi di sejumlah sektor.

Berdasarkan CME FedWatch, probabilitas kenaikan suku bunga minimal 25 basis poin pada Oktober kini berada di 20,5%, turun dari sekitar 51% sepekan sebelumnya. Namun, pasar memperkirakan peluang kenaikan suku bunga pada pertemuan Desember mencapai 84,5%.

"Karena minimnya panduan ke depan dari Ketua (Kevin) Warsh, pasar bereaksi tajam terhadap setiap rilis data ekonomi AS dan pernyataan pejabat The Fed," ujar Samara Hammoud, currency strategist Commonwealth Bank of Australia.

"Kami memperkirakan The Fed akan menunggu hingga Desember sebelum kembali menaikkan suku bunga," lanjutnya.

Sejumlah pejabat The Fed, yakni Christopher Waller, Neel Kashkari dan Alberto Musalem, dijadwalkan menyampaikan pidato pada Rabu.

Bank sentral AS juga akan merilis data kredit konsumen. Data tersebut diperkirakan menunjukkan penurunan kredit menjadi US\$15 miliar pada Agustus dari US\$18,06 miliar pada Juli.

Di pasar valuta asing lainnya, dolar Australia melemah 0,04% menjadi US\$0,6979, sedangkan dolar Selandia Baru turun 0,07% menjadi US\$0,5617.

Sementara itu, harga Bitcoin turun 0,22% menjadi US\$85.438,59. Ethereum juga melemah 0,12% menjadi US\$2.695,22.

IMF Peringatkan 3 Ancaman Besar Ekonomi Global: Energi, Utang, dan AI

Rabu, 7 Oktober 2026 13:50 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/imf-peringatan-3-ancaman-besar-ekonomi-global-energi-utang-dan-ai>

KONTAN.CO.ID - Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan ekonomi global menghadapi sejumlah risiko yang dapat menekan pertumbuhan, mulai dari harga energi yang masih tinggi, beban utang pemerintah yang membengkak, hingga risiko dari lonjakan investasi kecerdasan buatan (AI).

Mengutip Reuters, Rabu (7/10/2026), Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan pemerintah perlu memperkuat kebijakan fiskal dan moneter untuk menghadapi berbagai tekanan tersebut.

Dalam pidatonya menjelang Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia di Bangkok pekan depan, Georgieva mengatakan ekonomi dunia saat ini menghadapi dua kekuatan yang bergerak berlawanan. Konflik di Timur Tengah memicu guncangan negatif dari sisi pasokan energi, sementara ledakan permintaan terkait AI menjadi guncangan positif yang turut mendorong inflasi.

“Dampak gabungan dari kedua kekuatan ini sangat tidak merata di seluruh dunia,” kata Georgieva.

IMF akan merilis proyeksi ekonomi terbaru dalam pertemuan tersebut.

Georgieva mengatakan penurunan proyeksi pertumbuhan terbesar akan terjadi di negara-negara yang terdampak perang, termasuk Ukraina yang mengalami kerusakan besar pada infrastruktur sipil dan ekonominya, serta negara-negara Teluk yang terdampak serangan Iran dan penurunan tajam ekspor energi.

Georgieva belum mengungkapkan apakah IMF akan mengubah proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2026 yang sebelumnya dipatok 3% dalam proyeksi Juli. IMF sebelumnya memperkirakan pertumbuhan global meningkat menjadi 3,4% pada 2027.

Proyeksi tersebut sebelumnya mengasumsikan Selat Hormuz mulai kembali terbuka pada pertengahan Juli dan berangsur kembali ke kondisi sebelum perang pada Maret 2027. IMF juga memperkirakan harga minyak rata-rata US\$89 per barel pada 2026 dan US\$78 per barel pada 2027.

Namun, kondisi pasar energi kini berubah. Georgieva mengatakan harga minyak masih berada di sekitar US\$100 per barel.

Gangguan kapasitas pengolahan minyak juga meningkatkan margin pengolahan atau crack spread hingga sekitar US\$100 per barel untuk sejumlah produk utama, termasuk diesel.

Tekanan energi berpotensi semakin besar memasuki musim dingin ketika permintaan pemanas meningkat, sementara pasokan gas alam masih terganggu akibat ancaman terhadap pengiriman LNG melalui Selat Hormuz.

“Bahkan jika perang di Teluk segera berakhir, masalah harga energi yang tinggi kemungkinan masih akan bertahan selama beberapa waktu,” ujar Georgieva.

Menurut dia, kontrak berjangka minyak Brent juga menunjukkan harga minyak berpotensi tetap tinggi hingga 2027.

Harga energi yang tinggi kemudian berimbas pada inflasi, suku bunga acuan, dan imbal hasil obligasi pemerintah. Georgieva mencatat imbal hasil obligasi pemerintah AS, Jerman, dan Jepang bertenor 10 tahun telah berada pada level tertinggi masing-masing sejak 2007, 2009, dan 1996.

Utang Pemerintah Membengkak

Selain energi, beban utang pemerintah menjadi persoalan lain yang menjadi perhatian IMF. Menurut Georgieva, utang publik global kini berada pada level tertinggi sejak Perang Dunia II dan diproyeksikan melampaui 100% dari produk domestik bruto (PDB) sebelum 2030.

Negara-negara maju, terutama Amerika Serikat, disebut menjadi kelompok dengan beban utang terbesar.

Rasio utang terhadap PDB negara maju kini lebih tinggi dibandingkan negara berkembang maupun negara berpendapatan rendah.

Georgieva menilai pemerintah tidak bisa lagi hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk menyelesaikan persoalan fiskal.

“Namun, kami tidak melihat tindakan tegas di negara-negara maju dengan utang tinggi, padahal yang dibutuhkan saat ini adalah rencana konsolidasi fiskal jangka menengah yang kredibel,” katanya.

Ia juga memperingatkan tekanan inflasi masih bertahan setelah lebih dari lima tahun inflasi berada di atas target.

Tekanan tersebut berasal dari pembangunan infrastruktur AI, guncangan harga energi dan pangan, tarif, peningkatan belanja pertahanan, serta biaya pembayaran utang yang semakin tinggi.

Karena itu, Georgieva menilai sejumlah negara perlu menerapkan kebijakan moneter dengan kecenderungan lebih ketat secara hati-hati. Ia menyebut kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve AS, Bank Sentral Eropa (ECB), dan Bank of Japan sebagai langkah yang tepat.

Risiko Ledakan Investasi AI

Georgieva juga menyoroti risiko dari ledakan investasi AI. Investasi AI sebagai bagian dari PDB diperkirakan dapat melampaui investasi pada era pembangunan jaringan kereta api, jaringan listrik, maupun infrastruktur telekomunikasi.

Konsentrasi ekonomi dan keuangan yang semakin besar di sektor AI meningkatkan tekanan bagi perusahaan teknologi untuk membuktikan kenaikan produktivitas dan keuntungan guna membenarkan valuasi yang tinggi.

Jika ekspektasi pasar tidak terpenuhi, Georgieva memperingatkan kekecewaan investor dapat berkembang menjadi guncangan ekonomi dan keuangan yang lebih luas.

Meski demikian, AI juga memiliki potensi mendorong pertumbuhan. Riset IMF menunjukkan penggunaan AI yang tepat dapat menambah pertumbuhan ekonomi dunia sekitar 0,5 poin persentase per tahun.

Menurut Georgieva, kesiapan menghadapi AI menjadi penting, termasuk melalui regulasi yang dapat mengendalikan risiko teknologi tersebut.

Risiko itu mencakup dampak besar terhadap pasar tenaga kerja, ancaman siber, risiko terhadap stabilitas keuangan, hingga kemungkinan model AI generasi berikutnya beroperasi di luar kendali manusia.

Selain memperkuat kondisi fiskal, pemerintah juga perlu mendorong reformasi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, mempermudah pendirian dan penutupan perusahaan, memperkuat ketahanan energi, serta menyederhanakan regulasi guna menopang pertumbuhan ekonomi.

Beban Bunga Tembus 10% Penerimaan, Negara Berkembang Butuh Skema Utang Baru

Rabu, 7 Oktober 2026 11:40 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/beban-bunga-tembus-10-penerimaan-negara-berkembang-butuh-skema-utang-baru>

KONTAN.CO.ID - Sejumlah pakar pembangunan mengusulkan skema pembiayaan baru untuk membantu negara berkembang yang terbebani utang agar tetap memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Usulan tersebut digagas Rockefeller Foundation bersama sejumlah mitra melalui inisiatif bernama Growth and Investment Reset.

Program ini ditujukan untuk membantu negara berpendapatan rendah dan menengah bawah yang menghadapi tekanan utang tinggi sekaligus membutuhkan tambahan pembiayaan untuk investasi.

Mengutip Reuters, Rabu (7/10/2026), tiga pakar pembangunan mengatakan inisiatif tersebut bertujuan mengoordinasikan peran Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, kreditur bilateral serta pemberi pinjaman swasta.

Skema tersebut diharapkan dapat menyediakan pembiayaan dengan biaya lebih terjangkau bagi negara yang memiliki tingkat utang tinggi.

Dengan begitu, negara-negara tersebut tidak perlu menggunakan pinjaman multilateral berbunga rendah hanya untuk membayar kewajiban kepada kreditur bilateral seperti China.

Para penggagas berharap proposal ini memperoleh dukungan politik dan dapat dijalankan melalui forum G20.

Inggris dijadwalkan mengambil alih kepemimpinan G20 pada tahun depan setelah Amerika Serikat (AS) memegang presidensi tahun ini.

"Negara-negara berkembang menghadapi beban bunga yang belum pernah terjadi sebelumnya sehingga mengurangi ruang untuk investasi penting. Tanpa tindakan segera, kondisi ini akan semakin buruk," tulis para penulis dalam laporan tersebut.

Mereka menilai gelombang pembayaran utang luar negeri berbiaya rendah yang dilakukan pada era Covid-19 mulai jatuh tempo ketika biaya pinjaman global justru melonjak.

Beban Bunga Menggerus Investasi

Christina Segal-Knowles, mantan pejabat senior pemerintahan Presiden Joe Biden sekaligus salah satu penulis proposal mengatakan, pembayaran bunga kini rata-rata telah melampaui 10% penerimaan negara berkembang.

Di 10 negara, pembayaran bunga bahkan telah melebihi belanja investasi publik.

Menurut Segal-Knowles, sekitar 40 negara dengan tingkat utang yang masih berkelanjutan dapat menjadi penerima manfaat program tersebut.

Meski demikian, sejumlah negara tetap membutuhkan restrukturisasi utang.

Proposal ini muncul menjelang pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia yang akan digelar di Bangkok pada pekan depan.

Pertemuan tersebut akan membahas berbagai persoalan yang dihadapi negara berkembang, mulai dari fenomena super El Nino, tingginya biaya energi, penurunan tajam bantuan pembangunan resmi hingga melonjaknya biaya pinjaman.

Libatkan IMF, Bank Dunia hingga China

Dalam proposal tersebut, IMF diharapkan membentuk program khusus untuk menyalurkan pembiayaan jangka panjang dalam jumlah besar kepada negara-negara yang telah melalui proses evaluasi. Program tersebut akan berjalan berdampingan dengan fasilitas pinjaman reguler IMF.

Sementara itu, Bank Dunia akan berperan melalui pembiayaan dan pemberian jaminan. Para kreditur bilateral, termasuk China, juga diharapkan menyepakati perpanjangan jatuh tempo utang dari negara-negara yang masuk dalam program Reset.

Skema tersebut juga akan memanfaatkan peningkatan jaminan dari Bank Dunia dan bank pembangunan multilateral lainnya.

Jaminan tersebut diharapkan membantu negara berkembang melakukan pembiayaan kembali atas utang kepada kreditur swasta ketika struktur utangnya sudah tidak berkelanjutan.

Sejumlah bank pembangunan multilateral telah menggunakan skema serupa. Bank Dunia, Inter-American Development Bank dan African Development Bank sebelumnya memberikan jaminan untuk membantu negara menukar utang lama yang berbiaya tinggi atau menekan biaya pinjaman baru.

Jika mendapat dukungan politik dari negara-negara G20, inisiatif tersebut diharapkan dapat membuka ruang fiskal bagi negara berkembang untuk kembali mengalokasikan dana ke investasi produktif, tanpa mengabaikan kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan utang.

Cadangan Devisa Tetap Tebal Meski Rupiah Tertekan

Rabu, 7 Oktober 2026 15:28 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/123894/cadangan-devisa-tetap-tebal-meski-rupiah-tertekan/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa US\$146,3 miliar pada September. Turun tipis US\$0,2 miliar dari posisi akhir Agustus yang sebesar US\$146,5 miliar.

“Perkembangan posisi cadangan devisa September dipengaruhi terutama oleh penarikan pinjaman luar negeri pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa, di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah yang jatuh tempo dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respons terhadap ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi,” sebut laporan BI.

Penurunan yang terbatas itu menjadi sinyal bagi pasar. Pasalnya, September bukan bulan yang sepenuhnya bersahabat bagi pasar keuangan domestik. Tekanan terhadap rupiah masih tinggi, sementara kenaikan yield surat utang Amerika Serikat (AS) dan penguatan nilai tukar mata uang Negeri Paman Sam membuat aset negara-negara berkembang menghadapi tekanan.

Rupiah bahkan sempat menembus level Rp18.000/US\$ secara intraday pada akhir September di pasar luar negeri. Namun, tekanan itu tidak diikuti dengan pengurangan cadangan devisa dalam jumlah besar.

Kondisi ini menunjukkan bahwa BI masih memiliki ruang yang cukup untuk melakukan stabilisasi nilai tukar tanpa harus mengorbankan cadangan devisa secara agresif. Sebelumnya, BI mengurangi ketergantungannya terhadap intervensi di pasar spot dalam strategi menjaga stabilitas rupiah.

Agaknya upaya instrumen non-spot itu cukup efektif digunakan. Sebab, BI terlihat mampu mempertahankan stabilitas nilai tukar tanpa menggerus banyak cadangan devisa secara berlebihan.

Sepanjang September rupiah memang melemah 0,81%, tetapi posisi pelemahannya masih lebih baik daripada ringgit Malaysia yang melemah paling tajam.

Bantalan Eksternal

Secara fundamental, posisi US\$146,3 miliar memberi bantalan yang cukup bagi perekonomian Indonesia. Cadangan tersebut setara dengan pembiayaan sekitar 5,3 bulan impor, atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka tersebut masih jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Dari sisi likuiditas eksternal, Indonesia sebenarnya memasuki kuartal IV-2026 dengan posisi yang bisa dikatakan kuat. Namun, jika dibandingkan dengan posisi devisa pada periode sama tahun lalu yang berada di US\$148,73 miliar, posisi devisa kali ini lebih rendah.

Akan tetapi, cadangan devisa yang stabil tidak secara otomatis membuat tekanan terhadap rupiah sepenuhnya hilang. Rupiah masih akan menghadapi rezim bunga tinggi dengan tingginya yield US Treasury, penguatan dolar AS, dan volatilitas pasar obligasi global serta harga minyak yang masih tinggi.

Terlebih, besarnya cadangan devisa belum cukup menggambarkan kualitas sumber pembentuk devisa itu sendiri. Cadangan yang bertambah karena penerimaan ekspor, jasa dan arus modal yang berkelanjutan punya karakter yang berbeda dengan cadangan yang bertambah lantaran adanya penarikan utang luar negeri.

Penarikan pinjaman luar negeri memang dapat memperkuat posisi cadangan devisa dalam jangka pendek, dan menyediakan likuiditas untuk memenuhi kebutuhan eksternal. Namun, sumber tersebut pada akhirnya akan menciptakan kewajiban yang harus dibayar kembali.

Dalam konteks tersebut, kinerja neraca dagang menjadi salah satu indikator penting kualitas ketahanan eksternal. Indonesia memang masih mencatat surplus perdagangan, senilai US\$3,55 miliar pada Agustus.

Namun, jika dilihat secara kumulatif, gambarnya tidak sekuat periode sama tahun sebelumnya. Surplus perdagangan Januari-Agustus 2026 hanya US\$7,25 miliar, jauh menyusut dibandingkan US\$29,35 miliar di periode Januari-Agustus 2025.

Rupiah Ditutup Menguat, Terjangkar Cadangan Devisa

Rabu, 7 Oktober 2026 15:24 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/123899/rupee-ditutup-menguat-terjangkar-cadangan-devisa/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah menutup perdagangan dengan penguatan 0,1% ke Rp17.882/US\$, tertopang aksi beli obligasi yang cukup meluas pada Rabu (7/10/2026).

Indeks dolar Amerika Serikat (AS) bertahan tinggi berada di posisi 102,3, menguat 0,47%, kala yield US Treasury 10 tahun melanjutkan kenaikan 1,9 basis poin ke 5,29%.

Kenaikan US Treasury diikuti sebagian besar obligasi global. Yield obligasi Korea Selatan naik 1,5 bps ke 4,37%, India naik 3,1 bps ke 7,22%, dan Filipina naik 4,3 bps ke 7,55%. Adapun yield obligasi RI tenor 10 tahun juga terkerek 4,6 bps jadi 7,16%.

Hal ini membuat sebagian mata uang kawasan melemah. Rupee melemah paling tajam hari ini, disusul dolar Singapura, baht Thailand, ringgit Malaysia, dolar Taiwan, dan yuan offshore.

Dari dalam negeri, cadangan devisa yang relatif terjaga dan hanya terkuras US\$0,2 miliar memberi jangkar stabilitas bagi gerak rupiah hari ini. Hal ini menunjukkan intervensi Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter efektif dalam menjaga rupiah tanpa banyak menguras cadangan devisa.

Penurunan yang relatif kecil di tengah gejolak pasar keuangan pada September memberi sinyal bahwa BI masih punya ruang yang memadai untuk menjaga stabilitas mata uang Garuda.

Terlebih, stabilitas cadangan devisa ini juga menunjukkan adanya perubahan pendekatan BI dalam menjaga rupiah. BI dalam beberapa waktu terakhir semakin mengandalkan instrumen berbasis derivatif dan operasi pasar valuta asing non-spot, sehingga kebutuhan untuk menggunakan cadangan devisa secara langsung dapat ditekan.

Strategi ini menjadi penting kala tekanan eksternal masih tinggi dan risiko pelemahan rupiah berlangsung lebih lama.

Sebagai catatan, sepanjang September rupiah memang melemah 0,81%, tetapi posisi pelemahannya masih lebih baik daripada ringgit Malaysia yang melemah paling tajam.

Rupiah bergerak di rentang Rp17.72617.870/US\$, rupiah kembali stabil di rentang tersebut setelah sempat hampir menyentuh Rp18.000/US\$, tepatnya di Rp17.975/US\$, pada 28 September.

Ekonom: Pangan, Energi & Rupiah Sumber Tekanan Inflasi Akhir 2026

Rabu, 7 Oktober 2026 15:10 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/123793/ekonom-pangan-energi-rupiah-sumber-tekanan-inflasi-akhir-2026/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom menilai risiko terbesar inflasi sampai akhir 2026 berasal dari kombinasi antara energi, nilai tukar rupiah, dengan pangan sebagai sumber tekanan paling langsung.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan laju inflasi pada September 2026 tercatat 3,28% secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka ini hampir mendekati sasaran pemerintah yang menjadi target sepanjang tahun ini, sebesar 2,5%+-1%.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menjelaskan komponen harga pangan bergejolak atau volatile food sudah naik 5,03% yoy pada September, karena produksi di sentra terganggu cuaca dan biaya input meningkat.

"Jika gangguan pasokan berlanjut menjelang akhir tahun, harga beras, cabai, telur, dan ayam dapat menciptakan inflasi berulang serta menaikkan ekspektasi rumah tangga," kata Syafruddin, dikutip Rabu (7/10/2026).

Risiko kedua datang dari harga minyak dunia dan pelemahan rupiah yang dapat mendorong biaya bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, transportasi, pupuk, dan distribusi.

Maka itu, lanjut dia, mitigasinya harus berlapis. Dia menyarankan pemerintah untuk melakukan stabilisasi pasokan melalui operasi pasar, mobilisasi stok, kelancaran distribusi antardaerah, dan impor terukur bila neraca pangan menunjukkan defisit.

Selain itu, pemerintah perlu melakukan penundaan penyesuaian komponen harga diatur pemerintah atau administered prices yang tidak mendesak. Terakhir, pemangku kepentingan perlu menjaga stabilisasi rupiah untuk menahan inflasi barang impor atau imported inflation.

"Kebijakan moneter perlu tetap menjaga ekspektasi, tetapi respons utama terhadap stok pangan harus datang dari sisi pasokan. Jika pemerintah hanya mengandalkan suku bunga, biaya disinflasi terhadap kredit dan pertumbuhan akan terlalu besar," paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, dia menyebutkan inflasi September 2026 sebesar 3,28% memang sudah mendekati batas atas sasaran pemerintah, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan inflasi akhir tahun akan menembus 3,5%.

Kendati demikian, risiko kenaikan inflasi tetap ada karena inflasi bulanan September mencapai 0,30% dan volatile food melonjak 5,03% yoy. Tekanan terutama datang dari cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, beras, dan telur akibat gangguan cuaca serta kenaikan biaya input.

Meski begitu, dua penahan penting masih bekerja. Inflasi inti turun menjadi 2,84% yoy, sedangkan administered prices melambat menjadi 3,25%.

Ini menunjukkan tekanan harga belum menyebar kuat ke seluruh keranjang konsumsi. Karena itu, skenario dasar masih memungkinkan inflasi akhir tahun bertahan dalam rentang sasaran, selama lonjakan pangan tidak berulang dan pemerintah tidak melakukan penyesuaian besar pada harga energi. Titik kritisnya bukan angka 3,28% saat ini, melainkan apakah pangan dan energi berubah menjadi tekanan yang persisten?

Cadangan Devisa RI Turun, Ini Penyebabnya

Rabu, 7 Oktober 2026 11:09 WIB

Hidayat Setiaji

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/123860/cadangan-devisa-ri-turun-ini-penyebabnya/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) melaporkan kondisi cadangan devisa per akhir September. Terjadi penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.

Pada Rabu (7/10/2026), BI mencatat cadangan devisa Indonesia posisi September sebesar US\$ 146,3 miliar. Sedikit lebih rendah ketimbang Agustus yang sebesar US\$ 146,5 miliar.

“Perkembangan posisi cadangan devisa September dipengaruhi terutama oleh penarikan pinjaman luar negeri pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa, di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah yang jatuh tempo dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah Bank Indonesia sebagai respons terhadap ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi,” ungkap laporan BI.

Posisi cadangan devisa pada akhir September setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

“Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal, serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Ke depan, Bank Indonesia meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik,” tambah laporan BI.

Mayoritas Harga Pangan Melandai Hari Ini, Tapi Cabai Belum Jinak

Rabu, 7 Oktober 2026 13:10 WIB

Ibnu Affan

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/123869/mayoritas-harga-pangan-melandai-hari-ini-tapi-cabai-belum-jinak/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Sejumlah rata-rata harga komoditas pangan nasional kembali melandai pada hari ini, Rabu (7/10/2026), seperti beberapa jenis beras hingga daging. Namun, harga cabai-cabaian masih bertahan naik.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis hari ini per pukul 9.45 WIB, harga cabai rawit merah tercatat masih melonjak 17,4% menjadi Rp118.050/kg secara harian.

Kemudian, harga cabai merah keriting dan merah besar masing-masing juga melonjak 37,39% dan 7,94% menjadi Rp99.400 dan Rp65.950/kg. Hanya cabai rawit hijau yang turun 7,22% menjadi Rp64.300/kg.

Sementara itu, harga beras kualitas medium I turun Rp150 atau 0,9%, menjadi Rp16.450/kg. Begitu juga beras kualitas medium II tidak berubah, tetap Rp16.400/kg.

Harga beras kualitas super I atau setara premium juga turun Rp200 atau 1,11%, menjadi Rp17.750/kg. Beras kualitas super II turun Rp200 atau 1,15%, menjadi Rp17.150/kg.

Hanya beras kualitas bawah I yang masih naik Rp300 atau 2,01%, menjadi Rp15.200/kg. Beras kualitas bawah II juga naik Rp50 atau 0,34%, menjadi Rp14.750/kg.

Lalu, harga daging ayam ras segar turun Rp1.350 atau 3,22%, menjadi Rp40.550/kg. Daging sapi kualitas 1 juga turun Rp2.000 atau 1,31%, menjadi Rp150.450/kg. Begitu juga daging sapi kualitas 2 tidak berubah atau tetap Rp143.300/kg.

Harga minyak goreng curah tidak berubah, tetap Rp20.400/kg. Minyak goreng kemasan bermerek 1 juga tetap di Rp24.350/kg. Hanya minyak goreng kemasan bermerek 2 yang naik Rp250 atau 1,06%, menjadi Rp23.750/kg.

Harga telur ayam ras kini turun Rp300 atau 1,01%, menjadi Rp29.550/kg. Bawang merah ukuran sedang juga turun Rp500 atau 1,34%, menjadi Rp36.800/kg. Sementara, bawang putih ukuran sedang tidak berubah atau tetap Rp38.900/kg.

Terakhir, harga gula pasir kualitas premium naik Rp100 atau 0,49%, menjadi Rp20.450/kg. Sementara, gula pasir lokal naik Rp100 atau 0,52%, menjadi Rp19.250/kg.

BI: Pertumbuhan Uang Primer (M0) Melambat Tajam, Jadi 9,3% YoY Per September 2026

Rabu, 7 Oktober 2026 14:06 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/bi-pertumbuhan-uang-primer-m0-melambat-tajam-jadi-93-yoy-per-september-2026>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan uang primer (M0) adjusted sebesar 9,3% secara tahunan (year on year/YoY) pada September 2026 dengan nilai mencapai Rp 2.353,1 triliun.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan, pertumbuhan uang primer adjusted pada September 2026 melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 16,3% YoY.

"Perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan uang kartal yang diedarkan sebesar 11,8% YoY dan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 3,9% YoY," ungkap Denny dalam keterangannya, Rabu (7/10/2026).

Jika melihat perkembangannya sepanjang tahun, posisi uang primer adjusted justru menunjukkan tren penurunan. Pada Desember 2025, uang primer adjusted tercatat sebesar Rp 2.367,8 triliun.

Artinya, hingga September 2026, posisi uang primer adjusted telah turun sekitar Rp 14,7 triliun dibandingkan akhir tahun lalu.

Sebagai informasi, uang primer merupakan uang kartal, baik uang kertas maupun logam yang beredar di masyarakat, serta simpanan giro bank umum di Bank Indonesia.

Sementara itu, uang primer adjusted menggambarkan perkembangan uang primer yang telah mengisolasi dampak penurunan giro bank di BI akibat pemberian insentif likuiditas.

Berdasarkan faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan uang primer adjusted telah memperhitungkan dampak pemberian insentif likuiditas atau pengendalian moneter adjusted.

Adapun berdasarkan data per April 2026, komponen uang primer terdiri dari Rp 1.301 triliun uang kartal, Rp 887,4 triliun giro bank umum di BI adjusted, Rp 7,6 triliun giro sektor swasta di BI, serta Rp 36 triliun surat berharga yang diterbitkan BI dan dimiliki sektor swasta.

Surat berharga tersebut mencakup Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) yang dimiliki oleh sektor swasta.

BPS: Ekonomi RI Tak Bisa Lagi Bergantung Ekspor Komoditas Mentah, Harus Naik Level

Rabu, 7 Oktober 2026 18:54 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/bps-ekonomi-ri-tak-bisa-lagi-bergantung-ekspor-komoditas-mentah-harus-naik-level>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan ekspor komoditas mentah sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengingatkan, kekayaan sumber daya alam tidak akan cukup untuk menjaga daya saing Indonesia apabila tidak diikuti teknologi dan pengolahan yang mampu menciptakan nilai tambah.

“Perekonomian yang berbasis komoditas tanpa sentuhan teknologi, tanpa diolah menjadi produk hilir yang bernilai tambah tinggi tidak akan sustain,” ujar Amalia dalam agenda Mata Lokal Fest 2026 di Jakarta Selatan, Rabu (7/10/2026).

Amalia menyampaikan bagaimana historis posisi sejumlah komoditas Indonesia di pasar global berubah dibandingkan hampir satu abad lalu. Ia mencontohkan karet, gula dan teh yang pada 1927 pernah memiliki kontribusi besar terhadap ekspor dunia.

Pada 1927, Indonesia memasok sekitar 37% ekspor karet dunia. Namun, saat ini pangsa tersebut tinggal sekitar 2,4%. Untuk gula, kontribusi Indonesia yang pada 1927 mencapai sekitar 10% kini hanya sekitar 0,75%. Sementara pangsa ekspor teh turun dari sekitar 16% menjadi hanya 0,67%.

Menurut Amalia, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa keunggulan berbasis komoditas saja tidak cukup untuk mempertahankan posisi Indonesia dalam perdagangan global.

Persoalannya bukan hanya mengenai seberapa besar produksi komoditas yang dapat dihasilkan, tetapi juga bagaimana komoditas tersebut dapat diolah sehingga memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Amalia menilai Indonesia perlu mendorong proses pengolahan dengan dukungan teknologi agar komoditas yang dihasilkan tidak terbatas hanya sebagai bahan baku, tetapi dapat berkembang menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Dalam paparannya, Amalia juga memberikan sejumlah contoh mengenai besarnya nilai tambah yang dapat diperoleh dari pengolahan komoditas. Kelapa sawit misalnya, dapat diolah menjadi minyak goreng dengan nilai tambah sekitar empat hingga enam kali lipat.

Selain itu, kopi juga memiliki peluang serupa di mana biji kopi yang diolah menjadi kopi bubuk dapat menghasilkan nilai tambah sekitar dua hingga tiga kali lipat. Sementara kelapa dapat diolah menjadi coconut oil dengan nilai tambah sekitar dua hingga lima kali lipat.

Pengolahan kelapa bahkan disebut dapat dikembangkan lebih jauh menjadi produk turunan seperti MCT yang memiliki harga tinggi di pasar global. Artinya, Indonesia tidak cukup hanya memiliki komoditas.

Menurut Amalia, teknologi dan kemampuan mengolah komoditas menjadi produk bernilai tambah menjadi faktor penting agar Indonesia bisa naik kelas.

Salah satu contoh dari dampak hilirisasi adalah Maluku Utara, yang menjadi provinsi yang mencatat pertumbuhan ekonomi sangat tinggi seiring berkembangnya industri pengolahan berbasis sumber daya alam, terutama nikel.

Data BPS Maluku Utara mencatat ekonomi provinsi tersebut tumbuh 17,43% secara kumulatif pada semester I 2026. Pada saat yang sama, industri pengolahan menjadi salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan tinggi.

Dalam paparannya, Amalia menyebut Maluku Utara sebagai salah satu daerah yang pertumbuhannya sangat tinggi. Perkembangan tersebut berkaitan dengan proses hilirisasi pertambangan, khususnya nikel.

Namun, Amalia mengingatkan bahwa hilirisasi tidak semestinya hanya dipahami dalam konteks pertambangan.

Daerah yang tidak memiliki tambang pun memiliki peluang untuk menciptakan pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas, teknologi dan pengolahan komoditas.

Amalia juga menekankan bahwa pengembangan ekonomi di daerah tidak harus bertumpu pada tambang.

Ia mencontohkan Ngawi yang mengembangkan sektor pertanian dengan memanfaatkan teknologi. Daerah tersebut menerapkan pertanian berkelanjutan 2.0, smart farming dan penggunaan drone.

Menurut Amalia, pengembangan tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian juga dapat menjadi sumber pertumbuhan apabila produktivitasnya ditingkatkan dan hasil produksinya dapat memberikan nilai tambah lebih besar.

Contoh lainnya adalah Sidrap Sulawesi Selatan dimana daerah tersebut mengembangkan komoditas porang dan berupaya menarik investor untuk mengembangkan pengolahannya. Di sektor peternakan, teknologi juga digunakan untuk meningkatkan produktivitas.

Dengan demikian, menurutnya daerah tidak harus memiliki sumber daya tambang untuk dapat tumbuh tinggi. Yang diperlukan adalah kemampuan membaca potensi ekonomi masing-masing daerah dan mengolahnya menjadi aktivitas ekonomi yang lebih produktif.

"Tidak hanya komoditas tambang, komoditas pertanian juga harus kita hilirisasikan," ujarnya.

Amalia juga memperlihatkan bahwa nilai sebuah komoditas tidak hanya ditentukan oleh bahan bakunya. Teknologi, pengolahan, kemasan hingga merek dapat membuat nilai ekonomi sebuah produk meningkat.

Ia mencontohkan komoditas teh di Singapura yang memiliki merek teh TWG, meskipun negara tersebut tidak memiliki perkebunan teh sebagai sumber bahan baku utama.

Contoh tersebut memperlihatkan bahwa nilai ekonomi dapat tercipta dari berbagai tahapan dalam rantai produksi. Negara atau perusahaan yang menguasai teknologi, pengolahan, merek dan pemasaran dapat memperoleh nilai lebih besar dibandingkan pihak yang hanya menjual bahan baku.

Hal serupa dapat dilihat dari komoditas kopi Indonesia. Indonesia memiliki berbagai kopi unggulan seperti Gayo, Kintamani, Toraja dan Java.

Jumlah kedai kopi di Indonesia juga telah mencapai sekitar 461.991. Sementara pada semester I 2026, ekspor kopi Indonesia tercatat sekitar 208.000 ton dengan nilai sekitar US\$ 1 miliar.

Potensi tersebut menunjukkan bahwa kopi Indonesia tak harus diekspor hanya dalam bentuk biji mentah, tetapi bisa ditingkatkan nilai tambahnya melalui pengolahan, pengemasan, branding hingga pemasaran produk siap konsumsi.

Menurutnya, kekayaan sumber daya alam harus diikuti dengan kemampuan mengolah dan meningkatkan nilai tambah.

“Perekonomian yang berbasis komoditas tanpa sentuhan teknologi, tanpa diolah menjadi produk hilir yang bernilai tambah tinggi tidak akan sustain,” tegas Amalia.

Amalia mengingatkan, tantangan Indonesia ke depan bukan hanya meningkatkan produksi komoditas, tetapi juga mengembangkan teknologi, memperkuat pengolahan dan menciptakan produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Dengan hilirisasi, Indonesia diharapkan tidak berhenti sebagai pemasok bahan baku, tetapi mampu mengambil porsi yang lebih besar dalam rantai nilai global.

Cadangan Devisa RI Stabil di US\$146,3 Miliar September, tapi Turun dari Awal Tahun

Rabu, 7 Oktober 2026 11:48 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Yudho Winarto

<https://nasional.kontan.co.id/news/cadangan-devisa-ri-stabil-di-us1463-miliar-september-tapi-turun-dari-awal-tahun>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2026 sebesar US\$146,3 miliar.

Posisi tersebut relatif stabil dibandingkan dengan cadangan devisa pada akhir Agustus 2026 yang mencapai US\$146,5 miliar.

Meski secara bulanan hanya turun US\$200 juta, posisi cadangan devisa September masih lebih rendah dibandingkan dengan posisi awal tahun.

Pada akhir Desember 2025, cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar US\$156,47 miliar.

Dengan demikian, cadangan devisa Indonesia telah berkurang sekitar US\$10,17 miliar sejak awal tahun.

Posisi September 2026 juga lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, ketika cadangan devisa mencapai US\$148,74 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, posisi cadangan devisa pada September 2026 tetap terjaga di tengah dinamika pasar keuangan global.

"Perkembangan posisi cadangan devisa September 2026 tersebut dipengaruhi terutama oleh penarikan pinjaman luar negeri pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa," kata Ramdan dalam keterangan resmi, Rabu (7/10/2026).

Di sisi lain, pergerakan cadangan devisa turut dipengaruhi pembayaran utang luar negeri pemerintah yang jatuh tempo.

Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang ditempuh BI untuk merespons ketidakpastian pasar keuangan global juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi posisi cadangan devisa.

Cadangan Devisa Masih di Atas Standar Internasional

Meski mengalami penurunan sejak awal tahun, BI menilai posisi cadangan devisa Indonesia masih memadai.

Pada akhir September 2026, cadangan devisa setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Posisi tersebut juga masih berada di atas standar kecukupan internasional yang berada di sekitar tiga bulan impor.

"Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal, serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," ujar Ramdan.

Ke depan, BI meyakini ketahanan sektor eksternal Indonesia tetap terjaga. Kondisi tersebut didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta potensi aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional.

Selain itu, tingkat imbal hasil investasi di Indonesia yang masih menarik dinilai menjadi salah satu faktor yang dapat menopang aliran modal asing.

BI juga akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah untuk menjaga ketahanan eksternal dan stabilitas perekonomian.

Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

Ahmad Luthfi Dorong 4,2 Juta UMKM di Jateng Naik Kelas

Rabu, 7 Oktober 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/ahmad-luthfi-dorong-42-juta-umkm-di-jateng-naik-kelas/>

SEMARANG — Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan, 4,2 juta unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tersebar di 35 kabupaten/ kota, harus bertransformasi dari skala mikro menjadi usaha kecil, menengah, hingga mampu menembus pasar ekspor.

“UMKM harus mempunyai dampak dan naik kelas. Mulai dari mikro menjadi kecil hingga menengah, dan dapat ekspor produk. Di saat kondisi geopolitik kemudian keterbatasan fiskal, UMKM kita harus bisa naik kelas,” kata Luthfi, saat Bursa Wirausaha Unggulan 2026, di Muladi Dome, Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Rabu (7/10/2026).

Acara tersebut dihadiri Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza, Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding, sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah, 27 lembaga inkubator Jateng-DIY, pelaku UMKM, serta kurang lebih 760 mahasiswa calon pengusaha dari 17 perguruan tinggi di Jateng-DIY.

Menurut Luthfi, bursa wirausaha serta pameran UMKM dan produk wirausaha, menjadi ruang penting untuk pengembangan ekonomi dan peningkatan peluang usaha bagi anak muda. Sebab, dapat membuka akses pasar dan kemitraan yang lebih luas.

Apalagi, kata dia, UMKM merupakan salah satu urat nadi perekonomian di Jawa Tengah. Sebab, dari 4,2 juta UMKM, sekitar 97,95 persennya merupakan usaha mikro.

Sejauh ini Pemprov Jateng terus melakukan pendampingan dan pembinaan UMKM yang ada di wilayahnya. Dinas Koperasi dan UKM Jateng hingga triwulan II tahun 2026 membina 201.035 unit usaha. UKM tersebut memiliki nilai aset sekitar Rp39,74 triliun, dan omzet sekitar Rp70,74 triliun.

Luthfi menambahkan, Pemprov Jateng juga terus mendorong lahirnya wirausaha baru, sekaligus memperkuat kapasitas pelaku usaha yang sudah ada, melalui akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, pasar, teknologi, dan kemitraan.

Untuk mendukung proses tersebut, Jateng memiliki berbagai program, antara lain Akademi Balatkop dan Hetero Business Leap. Melalui program itu, para pelaku UMKM diberikan materi penguatan pola pikir kewirausahaan, pengembangan produk dan pemasaran, pemanfaatan teknologi digital, pengelolaan usaha, hingga perluasan pasar.

Antusiasme masyarakat terhadap pengembangan kapasitas kewirausahaan, ujarinya, juga terus meningkat. Pada 2025, Akademi Balatkop mencatat 4.193 pendaftar, dengan peminatan terbesar pada digital marketing, keuangan bisnis, dan English conversation.

Pada 2026, terang gubernur, terdapat 2.282 wirausaha binaan, terdiri atas 1.398 calon wirausaha, 436 wirausaha pemula, dan 448 wirausaha mapan. Bidang peminatan terbesar meliputi makanan 48,9%, kerajinan 13,3%, dan jasa digital 13,3%.

Penguatan UMKM tersebut juga didukung melalui program KUR dengan bunga 6% dari Bank Jateng. Akses permodalan itu, menurutnya, juga sangat penting untuk mendukung berkembangnya pelaku usaha muda, sehingga tercipta lapangan pekerjaan baru. Kemudian pembinaan dan pendampingan pelaku usaha meliputi peningkatan kualitas produk, kemasan, dan pemasaran.

“Kita gandeng seluruh stakeholder yang ada, kemudian memperbanyak kegiatan-kegiatan pameran sehingga bisa berkembang bersama, termasuk juga soal digitalisasi,” kata Luthfi.

Sementara itu, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementarian UMKM, M Riza Damanik mengatakan, bursa wirausaha unggulan tersebut diharapkan menjadi ruang yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa atau calon wirausaha muda, untuk lebih produktif. (Humas Jateng) *ul

“Gebrak Bio”, Ubah Ampas Biogas Jadi Produk Bernilai Ekonomi

Rabu, 7 Oktober 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/gebrak-bio-ubah-ampas-biogas-jadi-produk-bernilai-ekonomi/>

JEPARA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong pemanfaatan biogas tidak hanya sebagai sumber energi bersih, tetapi juga menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Salah satunya, melalui program Gebrak Bio (Gebrakan Bernilai Ekonomi Produk Biogas) di Kabupaten Jepara.

Program tersebut diluncurkan, sebagai upaya mengolah bio-slurry atau ampas biogas menjadi produk bernilai guna, seperti pupuk organik padat, pupuk organik cair (POC), dan media tanam.

Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria, pada Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Diana Kristina mengatakan, secara resmi program tersebut diluncurkan pada Senin (5/10/2026). Menurutnya, pemanfaatan biogas seharusnya tidak berhenti pada penggunaan gas sebagai sumber energi rumah tangga.

“Biogas tidak berhenti pada gas. Dari prosesnya kita mendapatkan bio-slurry yang masih memiliki potensi. Melalui Gebrak Bio, potensi tersebut kita olah menjadi produk yang bermanfaat, dan diharapkan dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat,” ujarinya, saat dikonfirmasi Rabu (7/10/2026).

Menurutnya, pengolahan bio-slurry menjadi produk pertanian merupakan bagian dari penerapan ekonomi sirkular. Kotoran ternak yang sebelumnya menjadi bahan baku biogas, setelah melalui proses fermentasi, menghasilkan gas sekaligus ampas yang masih dapat dimanfaatkan.

Dalam skema tersebut, kotoran ternak diolah menjadi biogas sebagai energi bersih. Sementara bio-slurry yang dihasilkan kemudian diproses menjadi pupuk organik dan media tanam, sehingga memiliki nilai tambah dan berpotensi menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat.

Ditambahkan, program Gebrak Bio dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat, dan dunia usaha. Sejumlah pihak yang terlibat antara lain Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Pemkab Jepara melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris), TP PKK Provinsi Jawa Tengah, Dharma Wanita Persatuan Dinas ESDM Jateng, serta sejumlah pelaku usaha.

Tidak hanya pengenalan pada potensi bio-slurry, Gebrak Bio juga dilanjutkan dengan bimbingan teknis, pada Selasa (6/10/2026). Kegiatan tersebut menyasar tiga kelompok tani penerima instalasi biogas di Kecamatan Kembang, yakni Kelompok Tani Guyub Rukun di Desa Sumanding, Kelompok Tani Makmur II di Desa Bucu, dan Kelompok Tani Morodadi I di Desa Cepogo.

Dalam bimtek tersebut, para kelompok tani mendapatkan pengetahuan dan praktik pengelolaan bio-slurry, mulai dari penanganan bahan, pemisahan fraksi padat dan cair, fermentasi, formulasi produk, hingga pengemasan dan pemasaran.

Diana mengatakan, peningkatan kapasitas masyarakat menjadi bagian penting, agar manfaat instalasi biogas dapat dirasakan secara berkelanjutan.

“Kita ingin manfaat biogas tidak berhenti ketika gasnya sudah digunakan. Ampas biogas juga harus memberikan manfaat. Ketika bio-slurry dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi, maka manfaat instalasi biogas menjadi semakin lengkap,” ujarnya.

Upaya tersebut diapresiasi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara, Mudhofir. Dia mengatakan, pemanfaatan bio-slurry membuka peluang baru bagi masyarakat, khususnya kelompok tani.

“Jangan melihat limbah sebagai akhir dari sebuah proses. Lihatlah sebagai awal dari sebuah nilai,” pungkas Mudhofir. (Pd/UI, Diskomdigi Jateng)

Chandra Dorong Kadin Pati Gaspol Jemput Investor

Rabu, 7 Oktober 2026

Penulis: Kontributor Kab Pati, Editor: Di, Diskomdigi Jateng

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/chandra-dorong-kadin-pati-gaspol-jemput-investor/>

SEMARANG – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra mendorong Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Pati, untuk segera bergerak aktif menjemput investor dan membawanya ke Pati.

Hal itu ditegaskannya pada pengesahan dan pengukuhan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten Pati, di Kantor Kadin Provinsi Jawa Tengah, Selasa (6/10/2026). Menurutny, pengesahan Kadin tersebut bukan hanya seremonial.

“Segeralah bersinergi dengan kami. Tolong investor-investor yang ada di jejaring Kadin dibawa ke Pati,” tegas Chandra.

Disampaikan, peluang tersebut semakin terbuka setelah pihaknya menggelar Pati Business Forum, pada pekan sebelumnya. Forum yang diikuti sekitar 70 pengusaha itu menghasilkan kesepakatan investasi

senilai Rp12,6 triliun dari delapan perusahaan, termasuk pengusaha lokal maupun dari Penanaman Modal Asing (PMA).

“Agreement yang kami tandatangani kemarin mencapai Rp12,6 triliun dari delapan perusahaan yang berencana berinvestasi,” kata Chandra.

Kemudahan perizinan, lanjutnya, juga terus didorong untuk meningkatkan kenyamanan investor. pihaknya memangkas tarif persetujuan bangunan gedung (PBG) hingga 50 persen dan menyiapkan satu person in charge (PIC) atau penanggungjawab, untuk mengawal kebutuhan perizinan masing-masing investor.

“Ada beberapa perusahaan yang izinnya sampai berbulan-bulan tidak jadi. Kami selesaikan cuma dalam waktu 100 hari kerja,” ungkapny.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan, karena persoalan investasi tidak hanya berkaitan dengan besaran modal, tetapi juga kepastian proses administrasi. Ia menilai, birokrasi yang sederhana dan terukur akan memperkuat kepercayaan pelaku usaha terhadap Pati.

Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Tengah, Harry Nuryanto Soediro menyatakan siap membantu membuka akses investasi bagi Kabupaten Pati. Pihaknya memiliki tim percepatan investasi, yang dapat membantu mendatangkan investor sekaligus mendukung pembentukan kawasan industri.

“Kami punya tim yang bisa mendatangkan para investor, juga bisa berkolaborasi dalam membentuk suatu kawasan industri,” ujar Harry.

Disampaikan, Pati memiliki peluang untuk menjadi salah satu tujuan investasi baru di Jawa Tengah. Dia berharap, potensi tersebut tidak hanya dikembangkan untuk Pati, tetapi juga mendorong kolaborasi ekonomi antardaerah di kawasan Pati Raya.

“Pati ini sudah menjadi nama besar dari kawasan Pati Raya. Kami berharap, Pati Raya bisa menjadi pemimpin untuk mengolaborasikan kegiatan ekonomi yang ada di Pati Raya,” kata Harry.

Bupati Jepara Dorong BUM Desa Jepara Tidak Hanya Mengandalkan Potensi Lokal

Rabu, 7 Oktober 2026

Penulis: Kontributor Kab Jepara, Editor: Di, Diskomdigi Jateng

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/bupati-jepara-dorong-bum-desa-jepara-tidak-hanya-mengandalkan-potensi-lokal/>

JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan BUM Desa Bersama untuk tidak hanya mengandalkan potensi desa, tetapi mampu menghubungkannya dengan pasar dan rantai pasok yang lebih luas.

Hal tersebut disampaikan Bupati Jepara Witiarso Utomo, saat membuka Temu Bisnis bagi Pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama Kabupaten Jepara, di Pendapa RA Kartini, Selasa (6/10/2026). Menurutnya, setiap desa memiliki potensi yang beragam. Namun, potensi tersebut tidak akan memberikan dampak maksimal, apabila tidak dibarengi akses pasar dan kemitraan yang tepat.

“Potensi desa begitu beragam. Namun, potensi saja tidak cukup. Potensi harus terhubung dengan pasar, produk punya akses ke pembeli, dan pelaku usaha memperoleh mitra yang tepat,” ujar Witiarso.

Disampaikan, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kelembagaan yang kuat. Dalam konteks itu, BUM Desa maupun BUM Desa Bersama memiliki posisi strategis, dalam mengembangkan perekonomian desa.

Untuk itu, dia meminta pengelola BUM Desa tidak hanya berpikir mengenai produk yang dapat dijual saat ini. Lebih dari itu, BUM Desa harus mulai memikirkan bagaimana produk-produk desa dapat masuk ke dalam rantai pasok yang lebih besar.

“BUM Desa jangan hanya berpikir tentang apa yang bisa dijual hari ini, tetapi juga bagaimana produk desa masuk ke dalam rantai pasok yang lebih besar,” katanya.

Pada kesempatan itu, dia menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan temu bisnis tersebut. Sebab, kegiatan ini mempertemukan BUM Desa dengan sejumlah pihak yang berpotensi menjadi mitra usaha, seperti Bulog, Pertamina, perbankan, pelaku ritel, dunia usaha, hingga berbagai lembaga lainnya, sehingga diharapkan tidak berhenti pada komunikasi semata, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi kerja sama konkret.

“Relasi yang terbentuk harus kita dorong menjadi kemitraan yang nyata,” tegasnya.

Selain memperluas jejaring dengan dunia usaha, Witiarso menekankan pentingnya komunikasi dan kerja sama antarsesama BUM Desa dan BUM Desa Bersama. Ia meminta komunikasi antarpengelola terus dijaga secara intensif, agar dapat saling bertukar informasi, pengalaman, hingga membuka peluang usaha bersama.

“Saling kerja sama antara BUM Desa dan BUM Desa yang lain. Komunikasi intens setiap hari yang harus dijaga. Ekosistemnya harus dibentuk juga, biar bisa jalan semuanya. Koneksinya harus diperluas juga,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Desa Kabupaten Jepara, Moh Ali berharap, kemitraan tersebut dapat memperluas unit usaha BUM Desa dan BUM Desa Bersama, sekaligus membuka jaringan pasar yang lebih luas.

“Tujuannya antara lain meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), mengoptimalkan potensi desa, memperkuat ekosistem ekonomi perdesaan serta mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat desa,” kata Moh Ali.

Menurutnya, peserta tidak hanya mendapatkan ruang untuk membangun relasi bisnis, tetapi juga diharapkan mampu menemukan peluang kemitraan yang dapat dikembangkan sesuai dengan potensi masing-masing desa.

Taj Yasin Bidik Produk UMKM Jateng Masuk Pasar Eropa hingga Arab Lewat Ajang Inacraft 2026

Rabu, 7 Oktober 2026, 21:41 WIB

H. Nugraha

<https://www.rmoljawatengah.id/taj-yasin-bidik-produk-umkm-jateng-masuk-pasar-eropa-hingga-arab-lewat-ajang-inacraft-2026>

Sebanyak 72 UMKM asal Jawa Tengah membidik pasar internasional melalui ajang Inacraft Oktober Vol. 5 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen mendorong produk UMKM tidak berhenti di pasar nasional.

Jawa Tengah membuka 14 stan dalam pameran tersebut yang menjadi wadah bagi 72 UMKM dari berbagai daerah. Sebanyak 50 UMKM bergerak di sektor fashion, 10 UMKM bidang craft, sedangkan lainnya menampilkan produk kerajinan dan produk unggulan daerah, termasuk sapu.

Taj Yasin bersama Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin mengunjungi langsung stan UMKM Jawa Tengah pada Selasa, 7 Oktober 2026.

Sejumlah daerah yang ambil bagian antara lain Kabupaten Kendal, Purbalingga, Klaten, Jepara, Sukoharjo, Kebumen, Kota Semarang, Tegal, Pekalongan, dan Salatiga.

Dalam kunjungannya, Taj Yasin mengatakan keikutsertaan UMKM Jawa Tengah dalam Inacraft menjadi momentum untuk memetakan produk yang memiliki peluang menembus pasar luar negeri.

Menurut Taj Yasin, produk UMKM Jawa Tengah memiliki potensi untuk diarahkan ke berbagai pasar internasional. Proses pemetaan tersebut dilakukan dengan melihat karakter dan kebutuhan pasar masing-masing negara.

“Dengan Inacraft saya melihat potensinya besar. Tadi kita coba arahkan mana yang harus dikirim untuk pameran ke luar negeri, ada yang ke Eropa, Afrika, dan mana yang bisa dikirim ke Arab,” kata Taj Yasin.

Ia menekankan pentingnya proses kurasi agar produk yang dipasarkan ke luar negeri sesuai dengan karakter konsumen dan standar pasar internasional.

Taj Yasin berharap pameran berskala nasional dan internasional tidak hanya menjadi ruang promosi bagi pelaku UMKM. Menurutnya, kegiatan tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas jaringan pemasaran sekaligus meningkatkan daya saing produk Jawa Tengah.

Ketua Dekranasda Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin menilai inovasi produk yang ditampilkan dalam Inacraft cukup beragam. Salah satunya terlihat dari pengembangan produk turunan batik dan wastra menjadi berbagai produk siap pakai.

“Inovasi-inovasinya bagus-bagus. Produk-produk turunannya juga sangat bagus, mulai dari ready to wear (siap pakai) sampai pengelolaan limbah, seperti kain perca yang dibuat menjadi berbagai aksesoris,” ujar Nawal.

Nawal menyebut inovasi dan segmentasi pasar menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan konsumen. Karena itu, pengembangan produk perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang dituju.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah Linda Widiastuti Ariningrum mengatakan produk yang ditampilkan telah melalui sejumlah kriteria. Di antaranya merupakan produk unggulan daerah, memiliki kualitas dan kontinuitas produksi yang terjaga, serta berorientasi pada pasar nasional dan global.

“Produk yang kita tampilkan merupakan produk unggulan Jawa Tengah atau masing-masing daerah dengan kualitas dan kontinuitas terjaga. Mengapa? Karena memang orientasinya sudah global market,” jelas Linda.

Selain kualitas dan kontinuitas produksi, seleksi produk juga mempertimbangkan aspek inovasi, kreativitas, kebaruan, serta keberlanjutan. Hal ini dinilai penting karena konsumen semakin memperhatikan produk yang memiliki nilai lingkungan.

Salah satu inovasi ditampilkan oleh pelaku usaha asal Sragen melalui pemanfaatan bahan turunan tekstil. Material tersebut diolah menjadi produk kreatif yang menyasar konsumen milenial dan generasi Z.

Desainer asal Sragen, Akhsan melalui brand Ikaten, mengembangkan teknologi upcycle woven dengan memanfaatkan limbah benang sarung goyor. Limbah tersebut diolah menjadi karya tenun secara manual oleh Simbah Surati, perajin tenun tradisional di Sragen.

Hasil pengolahan tersebut kemudian dikembangkan menjadi produk fashion yang telah memiliki pasar di tingkat nasional. Inovasi ini sekaligus menjadi upaya menggabungkan teknik tenun tradisional dengan konsep keberlanjutan dan kebutuhan pasar modern.

Akhsan mengapresiasi fasilitasi Dekranasda Kabupaten Sragen yang mempertemukannya dengan hasil tenun Simbah Surati. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat membuka peluang regenerasi bagi tenun tradisional di Sragen.

“Terima kasih sekali karena sudah difasilitasi dengan pameran, ke depannya bisa ada regenerasi untuk tenun tradisional yang saat ini dikembangkan Simbah Surati,” harap Akhsan. Article Image

Investasi Rp 506 Miliar, Godrej Bangun Pabrik Baru di KIK

Rabu, 7 Oktober 2026 21:22 WIB

Penulis: Agus Salim Irsyadullah, Editor: Vito

<https://jateng.tribunnews.com/bisnis/1268846/investasi-rp-506-miliar-godrej-bangun-pabrik-baru-di-kik>

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - PT Godrej Consumer Products Indonesia (GCPI) melakukan ekspansi dengan membangun pabrik baru di Kawasan Industri Kendal (KIK) dengan investasi sekitar Rp 506 miliar.

Fasilitas manufaktur baru yang mulai dibangun sejak Agustus 2025 itu diarahkan untuk menjadikan Indonesia sebagai satu basis produksi Godrej, dan diproyeksikan menyerap sekitar 680 tenaga kerja.

CEO PT Godrej Consumer Products Indonesia, Rajesh Sakhurama mengatakan, Indonesia merupakan satu negara yang cukup menjanjikan untuk pengembangan bisnis Godrej.

Menurutnya, perusahaan yang telah beroperasi di Indonesia sejak 2010 itu terus menyesuaikan pengembangan produk dengan perubahan kebutuhan dan gaya hidup konsumen.

"Fokus kami jelas, yaitu mengubah peluang hubungan India-Indonesia menjadi kesempatan untuk melayani masyarakat Indonesia, sekaligus juga untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan." katanya, saat peresmian pabrik di KIK, Selasa (6/10).

Rajesh menuturkan, pembangunan fasilitas di Kendal merupakan bagian dari investasi yang dialokasikan perusahaan untuk mengembangkan bisnis di kawasan itu.

Ia menyebut, Kendal dipilih untuk memperkuat kemampuan manufaktur, sekaligus memberikan ruang bagi perusahaan untuk meningkatkan kecepatan produksi dan merespons permintaan pasar.

“Kendal memberikan kami skala untuk tumbuh, kecepatan untuk merespons, serta kelincahan untuk tetap berada di depan,” ucapnya.

Dia menambahkan, fasilitas baru itu juga disiapkan untuk mendukung ekspansi ekspor. Godrej ingin menjadikan Indonesia bukan hanya sebagai pasar penjualan, tetapi juga sebagai satu basis produksi yang dapat memasok kebutuhan negara lain.

“Kami ingin terus melayani konsumen di Indonesia, tetapi juga menggunakan ini sebagai peluang untuk mengekspor ke pasar lain,” jelasnya.

Rajesh menyatakan, pembangunan fasilitas itu merupakan bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang. Ia berujar, keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari berdirinya pabrik, tetapi dari kemampuan perusahaan menjaga kinerja secara berkelanjutan.

“Yang paling penting sebenarnya adalah apa yang akan terjadi setelah ini. Kami harus mengubah pencapaian ini menjadi kinerja, dan memastikan kinerja tersebut dapat terus bertahan serta memberikan hasil secara berkelanjutan,” bebernya. (Agus Salim)

Harga Cabai di Blora Melonjak hingga Rp70 Ribu per Kilogram, Pedagang Pasar Mengeluh

Rabu, 7 Oktober 2026 17:24 WIB

Penulis: M Iqbal Shukri, Editor: rival al manaf

<https://jateng.tribunnews.com/jawa-tengah/1268805/harga-cabai-di-blora-melonjak-hingga-rp70-ribu-per-kilogram-pedagang-pasar-mengeluh>

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Harga cabai di Blora mengalami kenaikan hingga 100 persen.

Hal itu berdampak pada penjualan cabai pedagang Pasar Sido Makmur, Kabupaten Blora.

Pedagang mengaku stok cabai yang biasanya cepat habis kini justru kerap tersisa karena pembeli mengurangi jumlah belanja setelah harga komoditas tersebut melonjak.

Pedagang sembako Pasar Sido Makmur, Prapti, mengatakan, harga cabai merah keriting saat ini mencapai Rp60 ribu per kilogram.

Padahal, sebelumnya harga cabai merah keriting hanya sekitar Rp30 ribu per kilogram.

Sementara harga cabai rawit merah kini mencapai Rp70 ribu per kilogram.

"Kenaikan harga cabai itu sudah sekitar satu bulan terakhir. Kalau untuk harga cabai hijau kriting itu normal di angka Rp30 ribu per kilogram," katanya, Rabu (7/10/2026).

Menurutnya, kenaikan harga tersebut turut berdampak pada jumlah cabai yang mampu dijual setiap harinya.

Saat harga masih normal, Prapti bisa membawa sekitar 5 kilogram cabai untuk dijual dan biasanya habis dalam sehari.

Namun, ketika harga mulai tinggi, Prapti hanya berani membawa sekitar 2 kilogram cabai karena khawatir tidak laku dan akhirnya membusuk.

"Biasanya bawa 5 kilogram cabai untuk dijual bisa habis dalam sehari saat harganya normal. Pas harga tinggi ini bawa 2 kilogram cabai saja belum habis," ujarnya.

Prapti mengatakan kondisi tersebut menjadi persoalan bagi pedagang karena cabai merupakan komoditas yang mudah mengalami pembusukan apabila tidak segera terjual.

Keluhan serupa disampaikan pedagang sembako lainnya, Sarofah.

Sarofah mengatakan harga cabai merah keriting di Pasar Sido Makmur saat ini sekitar Rp58 ribu per kilogram.

Sedangkan cabai rawit merah mencapai Rp70 ribu per kilogram dan cabai rawit lokal sekitar Rp35 ribu per kilogram.

"Kalau sekarang yang naik itu cabai merah kriting dan cabai rawit setan. Naiknya itu sekitar satu minggu yang lalu," katanya.

Menurutnya, kenaikan harga membuat konsumen mengurangi jumlah pembelian.

Jika sebelumnya pembeli membeli sekitar setengah kilogram, kini sebagian memilih membeli hanya seperempat kilogram.

"Kalau harga naik ini bawa lima kilogram cabai, masih sisa dua kilogram. Pembeli yang biasanya belinya setengah kilogram jadi seperempat kilogram," terangnya.

Sarofah menyebut kondisi tersebut juga dirasakan oleh para pelaku usaha kuliner yang menggunakan cabai sebagai bahan utama masakan.

Sejumlah pedagang nasi goreng, angkringan hingga nasi geprek disebut mengeluhkan tingginya harga cabai karena berdampak pada biaya bahan baku mereka.

"Harapannya ya harganya turun, kasihan yang jualan nasi goreng, angkringan dan nasi geprek itu pada mengeluh," paparnya. (Iqs)

Penyaluran KUR Jateng Tembus Rp42,8 Triliun, Pati Terbesar Capai Rp2,87 Triliun

Rabu, 7 Oktober 2026 17:14 WIB

Penulis: Idayatul Rohmah, Editor: rival al manaf

<https://jateng.tribunnews.com/jawa-tengah/1268801/penyaluran-kur-jateng-tebus-rp428-triliun-pati-terbesar-capai-rp287-triliun>

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Tengah telah mencapai Rp42,8 triliun. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Pati menjadi daerah dengan nilai penyaluran terbesar, yakni Rp2,87 triliun kepada 42.804 debitur.

Kabupaten Grobogan menyusul dengan penyaluran KUR sebesar Rp2,40 triliun kepada 40.346 debitur.

Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Helvi Moraza mengatakan, secara keseluruhan penyaluran KUR di Jawa Tengah telah menjangkau 760.477 debitur. Dari total tersebut, Rp25,5 triliun disalurkan ke sektor produksi.

"Untuk Jawa Tengah, nilai penyaluran Rp42,8 triliun. Itu sudah tersalur kepada 760.477 debitur dengan sektor produksi 25,5 triliun. Nah, jadi kami memang diarahkan untuk KUR ini kepada sektor produksi.

Kami sudah mencapai sekarang 65 persen," jelas Helvi saat menghadiri kegiatan 'Bursa Wirausaha Unggulan', program Kementerian UMKM bersama pemerintah daerah dan perguruan tinggi, di gedung Muladi Dome, jalan Prof Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Rabu (7/10/2026).

Menurut Helvi, porsi pembiayaan ke sektor produksi perlu terus ditingkatkan karena sektor tersebut dinilai memiliki kaitan dengan penciptaan lapangan kerja.

"Kenapa kami harus genjot itu? Karena di situlah banyaknya penciptaan lapangan kerja di produksi ini," ucapnya.

Helvi menyebut sektor yang paling banyak menyerap pembiayaan produksi di Jawa Tengah berkaitan dengan potensi masing-masing daerah. Pertanian masih menjadi sektor utama, disusul perikanan dan pengolahan makanan.

"Kalau sektor itu tergantung potensi daerah ya. Kalau Jawa Tengah, tetap pertanian yang paling tinggi, kemudian perikanan. Nah, kemudian pengolahan makanan," sebutnya.

Ia menilai peluang peningkatan porsi KUR sektor produksi di Jawa Tengah masih terbuka. Apalagi, Jawa Tengah memiliki basis tenaga kerja yang besar dan beragam potensi ekonomi daerah.

"Kami berharap kalau bisa, karena Jawa Tengah itu adalah penghasil tenaga kerja yang sangat banyak, kami berharap sektor produksi khusus Jawa Tengah itu bukan 65 persen lagi. Kalau bisa sekitar 67 persen. Dan saya lihat kesempatan itu ada," ungkapnya.

Sementara itu, secara nasional, penyaluran KUR telah mencapai Rp243,3 triliun kepada 3.768.245 debitur.

Helvi mengatakan, pembiayaan tersebut diharapkan benar-benar menjangkau UMKM. Menurutnya, pemerintah juga melakukan koordinasi dengan lembaga terkait agar penyaluran KUR dapat mendukung pelaku usaha yang membutuhkan.

"Sehingga KUR itu kami harapkan betul-betul jatuh ke tangan UMKM," ungkapnya. (idy)

Ada 960 Ribu Pengangguran di Jateng, Pemerintah Minta Sarjana Ciptakan Lapangan Kerja

Rabu, 7 Oktober 2026 16:40 WIB

Penulis: Idayatul Rohmah, Editor: rival al manaf

<https://jateng.tribunnews.com/jawa-tengah/1268793/ada-960-ribu-pengangguran-di-jateng-pemerintah-minta-sarjana-ciptakan-lapangan-kerja>

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Persoalan pengangguran masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan di Jawa Tengah.

Dari total penduduk yang mencapai 38,5 juta jiwa, sekitar 960.000 orang tercatat masih menganggur.

Kondisi ini menjadi salah satu perhatian dalam upaya penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Wakil Menteri UMKM Republik Indonesia, Helvi Moraza mengatakan, potensi pengembangan kewirausahaan di Jawa Tengah cukup besar.

Hal itu didukung keberadaan 241 perguruan tinggi yang setiap tahun melahirkan sekitar 105.000 lulusan baru, sementara jumlah mahasiswa aktif mencapai 678.000 orang.

Menurutnya, potensi tersebut perlu diarahkan menjadi kekuatan ekonomi produktif agar lulusan perguruan tinggi tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja.

"Jawa Tengah sendiri menghadapi beban 960.000 pengangguran dari jumlah penduduk 38,5 juta penduduk," kata Helvi saat menghadiri kegiatan 'Bursa Wirausaha Unggulan' di gedung Muladi Dome, jalan Prof Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Rabu (7/10/2026).

Sementara secara nasional, Helvi menyebut dari 85,3 juta penduduk, 57,8 persen masih bergerak di sektor informal. Di sisi lain, sebanyak 7,24 juta jiwa masih menganggur.

Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan pentingnya UMKM dalam menjawab persoalan ketenagakerjaan sekaligus kemiskinan.

"UMKM itu bisa memecahkan dua masalah sekaligus. Pertama adalah kesempatan kerja, kemudian pengentasan kemiskinan," katanya.

Helvi mengatakan pemerintah saat ini berupaya mengatasi dua persoalan klasik yang dihadapi UMKM, yakni keterbatasan akses pembiayaan dan pemasaran.

Salah satu dukungannya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dia menyebut, pemerintah menyiapkan Rp300 triliun untuk KUR UMKM yang disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

"Presiden Prabowo menyiapkan Rp300 triliun untuk KUR UMKM (disalurkan melalui) Bank Himbara. Ada BRI, Mandiri, BRI, ada BTN, dan sebagainya," sebutnya.

Helvi menyebut, pembiayaan tersebut diharapkan benar-benar menjangkau UMKM yang membutuhkan.

Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengevaluasi pelaksanaan program tersebut.

"Sehingga KUR itu kami harapkan betul-betul jatuh ke tangan UMKM," ujarnya.

Namun, menurut Helvi, persoalan UMKM tidak selesai hanya dengan pemberian modal. Pelaku usaha juga membutuhkan pendampingan agar mampu tumbuh dan naik kelas.

Ia menekankan pentingnya empat karakter yang dirangkum dalam istilah Lidi, yakni loyalitas, integritas, disiplin, dan inovasi.

Sementara selain pembiayaan, kata dia, pemerintah juga menyiapkan dukungan akses pasar.

Program tersebut diarahkan untuk membuka peluang UMKM masuk pasar ekspor sekaligus menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar.

"Sehingga akan terbentuk paling tidak ada dua nanti. Pertama adalah UMKM Go Ekspor, kemudian kerja sama UMKM dengan perusahaan-perusahaan," tuturnya. (idy)

Semarang Great Event 2026 Jadi Mesin Ekonomi, Pemkot Bidik UMKM hingga Hotel

Rabu, 7 Oktober 2026 14:14 WIB

Penulis: Rezanda Akbar D, Editor: muh radlis

<https://jateng.tribunnews.com/semarang/1268774/semarang-great-event-2026-jadi-mesin-ekonomi-pemkot-bidik-umkm-hingga-hotel>

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Kota Semarang tidak ingin Semarang Great Event (SGE) 2026 sekadar menjadi parade kegiatan sepanjang Oktober.

Rangkaian event tersebut didorong menjadi mesin penggerak ekonomi yang memberikan dampak langsung bagi pelaku UMKM, hotel, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi hingga sektor pariwisata.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan SGE 2026 dikembangkan dari konsep Semarang Great Sale menjadi festival kota yang menggabungkan berbagai sektor, mulai ekonomi, pariwisata, budaya, olahraga hingga ekonomi kreatif.

Menurutnya, banyaknya agenda yang digelar selama sebulan menjadi peluang untuk mempertemukan pelaku usaha dengan pasar.

"Semarang Great Event saya harapkan menjadi ruang bertemunya produk dengan pasar, pelaku usaha dengan konsumen, komunitas dengan ruang kreativitas, dan wisatawan dengan pengalaman baru," kata Agustina, dari keterangan yang diterima Tribun Jateng, Rabu (7/10/2026).

Ia mengatakan, Semarang memiliki beragam potensi yang dapat dikemas menjadi daya tarik bagi masyarakat maupun wisatawan.

Mulai dari kuliner, budaya, olahraga, kreativitas komunitas hingga destinasi wisata.

Karena itu, SGE 2026 tidak hanya diarahkan untuk mendatangkan pengunjung, tetapi juga membuat kunjungan tersebut menghasilkan perputaran ekonomi di berbagai sektor.

"Semarang memiliki banyak wajah: budaya, kuliner, olahraga, kreativitas, komunitas, dan pariwisata. Kita tidak sekadar mengajak orang datang ke Semarang, kita mengajak mereka mengalami Semarang," ujarnya.

Dorongan terhadap sektor UMKM juga menjadi bagian dari agenda tersebut.

Program Waras Ekonomi yang dijalankan Pemkot Semarang per 27 September 2026 telah mencatat 1.004 akun UMKM terdaftar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 555 akun telah terverifikasi.

Pemkot juga telah memfasilitasi 100 sertifikat halal dan 50 sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi produk lokal.

Angka tersebut menjadi salah satu modal untuk memperkuat pelaku usaha lokal agar tidak hanya hadir sebagai peserta event, tetapi mampu masuk ke pasar yang lebih luas.

Ketua KADIN Kota Semarang Arnaz Agung Andrarasmara menilai efek penyelenggaraan event tidak berhenti pada lokasi kegiatan.

Menurutnya, ketika kunjungan wisatawan dan masyarakat meningkat, sektor usaha lain ikut mendapatkan dampaknya.

"Kalau event-nya jalan, hotel, restoran, toko oleh-oleh, transport, semua enggak ada yang sepi," kata Arnaz.

Ia menilai pola tersebut dapat dikembangkan untuk menjadikan Kota Semarang sebagai destinasi event.

Artinya, orang datang ke Semarang bukan hanya untuk menghadiri satu agenda, tetapi juga menginap, makan, berbelanja, menggunakan transportasi, hingga mengunjungi destinasi wisata.

SGE 2026 mengusung tema Celebrate the City, Empower the Economy.

Puluhan agenda dijadwalkan berlangsung sepanjang Oktober. Di antaranya Semarang Cocoa Day, Central Java Health & Wellness Expo, Festival Dalang Anak dan Remaja, Semarang Hitz Market, serta PHRI Vaganza.

Rangkaian kegiatan tersebut masih berlangsung pada Oktober sehingga pemerintah berharap efek ekonominya dapat terasa lebih panjang, tidak berhenti pada momentum pembukaan.

Agustina berharap penyelenggaraan SGE dapat menghasilkan lebih banyak transaksi sekaligus membuka jejaring dan peluang usaha bagi pelaku ekonomi lokal.

"Harapannya, event-event ini tidak hanya ramai di lokasi kegiatan, tetapi juga memberikan dampak bagi perekonomian kota," ujarnya. (Rad)

Risalah The Fed: Suku Bunga Naik demi Redam Inflasi

Kamis, 8 Oktober 2026 08:50 WIB

Andrew Ackerman

<https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/123957/risalah-the-fed-suku-bunga-naik-demi-redam-inflasi/2>

Bloomberg, Seluruh dari 19 pejabat Federal Reserve (The Fed) mendukung keputusan pada September untuk menaikkan suku bunga acuan, dengan banyak di antaranya menilai kenaikan diperlukan untuk mengantisipasi risiko tekanan inflasi yang semakin kuat.

Kelompok pejabat lainnya mengatakan suku bunga yang lebih tinggi diperlukan berdasarkan prospek ekonomi mereka, yang menunjukkan kekhawatiran lebih besar terhadap tingginya inflasi. Hal itu tercantum dalam risalah rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pada 15-16 September yang dirilis di Washington pada Rabu (7/10).

"Sebagian besar peserta menilai kenaikan kembali kisaran target suku bunga federal funds kemungkinan akan tepat dilakukan sebelum akhir tahun," kata risalah tersebut.

Para pemilih FOMC secara bulat mendukung keputusan bulan lalu untuk menaikkan kisaran target suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%-4%. Kenaikan tersebut merupakan yang pertama sejak Juli 2023 dan dilakukan di tengah tanda-tanda bahwa perekonomian secara keseluruhan mulai kembali menguat.

"Beberapa peserta berkomentar bahwa momentum mendasar dalam perekonomian tampaknya telah meningkat," kata risalah tersebut.

Risalah itu juga mengungkap pembahasan mengenai kondisi keuangan. Banyak pejabat mengatakan bahwa meski imbal hasil Treasury jangka panjang baru-baru ini meningkat, "kondisi keuangan tampaknya mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan harga saham naik cukup besar sepanjang tahun ini dan spread obligasi korporasi tetap sempit."

Gubernur The Fed Kevin Warsh mengatakan kepada wartawan setelah keputusan 16 September bahwa kenaikan suku bunga bertujuan mengurangi "dosis akomodasi" kebijakan moneter ketika inflasi masih

bertahan tinggi. Pernyataan tersebut mendorong pasar memperkirakan kenaikan suku bunga berikutnya pada Oktober.

Keputusan tersebut juga menuai kritik dari Donald Trump, yang menyalahkan rekan-rekan Warsh atas kenaikan suku bunga dan menuding mereka bersikap "sangat politis."

Namun, sejak rapat tersebut, serangkaian pernyataan dari sejumlah pejabat utama The Fed mengindikasikan bahwa bank sentral AS mungkin tidak terburu-buru menaikkan suku bunga kembali.

Wakil Gubernur The Fed Philip Jefferson dan Gubernur Federal Reserve Bank of New York John Williams dalam pidato terpisah pekan lalu mengatakan mereka menilai bank sentral masih memiliki waktu untuk menilai kondisi perekonomian sebelum mempertimbangkan kenaikan suku bunga berikutnya. Investor pun segera memangkas ekspektasi kenaikan suku bunga pada bulan ini.

Penyesuaian Ekspektasi

Investor pada Rabu memperkirakan peluang sekitar 20% untuk kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin dalam rapat The Fed pada 27-28 Oktober, turun dari sekitar 70% pada beberapa hari setelah keputusan September, berdasarkan kontrak berjangka federal funds. Imbal hasil Treasury bertenor dua tahun, yang dianggap paling sensitif terhadap kebijakan The Fed, turun lebih dari 10 basis poin dalam sepekan terakhir menjadi sekitar 4,8%.

Pernyataan Williams dan Jefferson pekan lalu tidak berarti The Fed tidak akan kembali menyesuaikan kebijakannya. Para pejabat masih memperingatkan bahwa inflasi terlalu tinggi. Data inflasi konsumen yang akan dirilis pada 14 Oktober masih dapat kembali memunculkan seruan untuk menaikkan suku bunga dalam waktu dekat.

Sejumlah pejabat, termasuk tiga pejabat yang menentang keputusan FOMC untuk mempertahankan suku bunga pada Juli, dapat kembali berbeda pendapat dan mendukung kenaikan suku bunga jika mayoritas memilih mempertahankan suku bunga pada rapat Oktober.

"Beberapa peserta menyatakan bahwa mereka menilai tingkat suku bunga kebijakan saat ini belum bersifat restriktif atau hanya sedikit restriktif," kata risalah tersebut, merujuk pada suku bunga acuan sebelum kenaikan pada September.

Menkeu AS Era Bill Clinton: AI Berisiko bagi Ekonomi & Pasar AS

Kamis, 8 Oktober 2026 06:40 WIB

Natalia Kniazhevich dan Lisa Abramowicz

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/123940/menkeu-as-era-bill-clinton-ai-berisiko-bagi-ekonomi-pasar-as/2>

Bloomberg, Mantan Menteri Keuangan Robert Rubin memperingatkan bahwa booming investasi di bidang kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dapat membawa peningkatan produktivitas yang signifikan, namun juga menimbulkan risiko finansial dan sosial yang mungkin belum sepenuhnya diperhitungkan oleh pasar.

Robert Rubin, yang menjabat sebagai Menteri Keuangan selama booming internet pada akhir 1990-an, mengatakan bahwa ia sangat prihatin dengan "risiko sirkularitas" dalam ekosistem AI. Istilah ini merujuk pada tumpang tindihnya komitmen di antara pemasok, pelanggan, dan investor — seperti antara produsen chip dan perusahaan perangkat lunak.

“Beberapa perusahaan AI besar ini memiliki komitmen yang sangat besar, dan ada banyak pemasok, serta banyak pemasok yang telah meminjam dana berdasarkan komitmen tersebut,” kata Rubin dalam wawancara di Greenwich Economic Forum.

“Apa yang akan terjadi jika mereka tidak dapat memenuhi komitmen tersebut atau semua pinjaman yang diambil berdasarkan komitmen tersebut? Itulah yang disebut risiko sirkularitas.”

Risiko terjadinya gangguan — di mana salah satu pihak melanggar komitmennya, sehingga menyebabkan kegagalan beruntun — cukup signifikan, menurut Rubin. Mantan wakil ketua Goldman Sachs ini menggambarkannya sebagai risiko yang tidak “hampir nol.”

Skala penerbitan utang tahun ini oleh perusahaan-perusahaan yang membangun pusat data dan mengembangkan software AI begitu besar sehingga banyak pelaku pasar mengatakan hal itu berkontribusi terhadap kenaikan biaya pinjaman secara global. Imbal hasil obligasi pemerintah acuan terus merangkak naik pekan ini, dengan suku bunga Treasury 10 tahun mencapai level tertinggi sejak 2002.

Hal ini pada gilirannya mendorong kenaikan biaya pembayaran utang pemerintah, sehingga memicu kekhawatiran tentang keberlanjutan fiskal di AS, Prancis, dan negara-negara lain.

Rubin, yang bergabung dengan pemerintahan Presiden Bill Clinton pada saat kekhawatiran atas defisit anggaran sedang meluas, mengatakan bahwa kecemasan atas skala pinjaman tersebut mulai terlihat jelas.

“Saya pikir apa yang terjadi saat ini adalah kesadaran akan situasi fiskal kita yang mulai memengaruhi pasar dengan cara yang belum pernah terjadi dalam waktu yang lama,” jelas dia.

Dia menyoroti inflasi dan hilangnya kepercayaan yang lebih luas terhadap kemampuan pemerintah untuk mengatasi masalah fiskal.

“Saat Anda menghadapi kondisi fiskal yang buruk atau tidak stabil, hal itu dapat memengaruhi kepercayaan secara lebih luas terhadap kemampuan pemerintah Anda untuk menangani masalah ini,” katanya.

Dinamika tersebut pada akhirnya juga dapat berdampak pada pasar saham, katanya — karena ketidakpastian cenderung menghambat investasi dan produktivitas.

IMF Siapkan Dana US\$ 1,21 Miliar untuk Pakistan, Tunggu Persetujuan Dewan

Kamis, 8 Oktober 2026 07:22 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Noverius Laoli

<https://internasional.kontan.co.id/news/imf-siapkan-dana-us-121-miliar-untuk-pakistan-tunggu-persetujuan-dewan>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pakistan berpotensi memperoleh tambahan pembiayaan sekitar US\$ 1,21 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF) setelah lembaga tersebut mencapai kesepakatan tingkat staf dengan pemerintah Pakistan untuk melanjutkan evaluasi sejumlah program pinjaman.

Kesepakatan tersebut masih membutuhkan persetujuan Dewan Eksekutif IMF. Jika disetujui, sekitar US\$ 1 miliar akan dicairkan melalui Extended Fund Facility (EFF) dan US\$ 210 juta melalui Resilience and Sustainability Facility (RSF) yang berfokus pada isu iklim.

“Risiko tetap tinggi akibat ketegangan geopolitik dan volatilitas harga energi,” kata IMF seperti dilansir Reuters, Kamis (8/10/2026).

Dengan pencairan tersebut, total dana yang telah disalurkan melalui kedua program diperkirakan mencapai sekitar US\$5,7 miliar. Dukungan IMF menjadi penting bagi Pakistan yang masih bergantung pada pembiayaan eksternal untuk memperkuat cadangan devisa sekaligus memenuhi kewajiban pembayaran utang.

IMF menilai kebijakan pemerintah Pakistan sejauh ini membantu menjaga stabilitas makroekonomi, termasuk dalam menghadapi dampak konflik di Timur Tengah.

Namun, IMF memperingatkan sejumlah risiko masih membayangi, mulai dari ketegangan geopolitik, perubahan harga energi, kondisi keuangan global yang lebih ketat hingga gangguan perdagangan.

Ketergantungan Pakistan terhadap kawasan Teluk juga menjadi sumber kerentanan. Ekonomi negara tersebut bergantung pada impor energi dari kawasan tersebut, remitansi pekerja migran, serta dukungan pembiayaan dari negara-negara Teluk.

Ahmad Mobeen, principal economist S&P Global Market Intelligence, sebelumnya menilai Pakistan termasuk ekonomi utama Asia-Pasifik yang paling rentan jika konflik Timur Tengah berlangsung berkepanjangan.

Pound Inggris Melemah Jelang Pidato Gubernur Bank of England

Kamis, 8 Oktober 2026 17:02 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/pound-inggris-melemah-jelang-pidato-gubernur-bank-of-england>

KONTAN.CO.ID - LONDON. Nilai tukar pound Inggris melemah tipis terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan euro pada Kamis (8/10/2026), menjelang pidato Gubernur Bank of England (BoE) Andrew Bailey yang dinilai dapat memberikan petunjuk mengenai arah kebijakan moneter bank sentral Inggris selanjutnya.

Mengutip Reuters, pound sterling terakhir tercatat turun 0,2% terhadap dolar AS menjadi US\$ 1,3185. Posisi tersebut hanya sedikit berada di atas level terendah dalam tiga bulan sebesar US\$ 1,3181 yang dicapai pada pekan lalu.

Terhadap euro, pound Inggris melemah sekitar 0,1% dan mengakhiri tren penguatan selama sembilan hari berturut-turut. Pound terakhir berada di level 84,79 pence per euro.

"Pasar mengkhawatirkan utang publik dan kenaikan premi berjangka di pasar gilt Inggris, tetapi sejauh ini pound masih bertahan dengan baik," kata Tommy von Brömsen, ahli strategi valuta asing di Handelsbanken.

Menurut dia, perhatian pasar global saat ini belum banyak tertuju pada Inggris. Fokus investor lebih besar mengarah ke Eropa dan Amerika Serikat.

"Fokus global saat ini tidak banyak tertuju pada Inggris. Perhatian lebih besar berada di Eropa dan Amerika Serikat," ujarnya.

Sementara itu, euro berada di bawah tekanan cukup besar dan merosot ke level terendah dalam 17 bulan terhadap dolar AS. Kekhawatiran fiskal di Prancis mendorong imbal hasil obligasi naik tajam sehingga mengurangi ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga lanjutan oleh Bank Sentral Eropa (ECB).

Pidato Bank of England Jadi Perhatian Pasar

Investor kini menantikan pidato Gubernur BoE Andrew Bailey dan pembuat kebijakan Clare Lombardelli untuk mencari petunjuk mengenai kemungkinan bank sentral menaikkan suku bunga pada bulan depan.

Bailey dan Lombardelli dipandang sebagai anggota berhaluan moderat dalam Monetary Policy Committee (MPC), komite yang menentukan kebijakan suku bunga Inggris. Keduanya menjadi sorotan karena pada pertemuan terakhir memilih mempertahankan suku bunga tetap.

"Setiap indikasi bahwa mereka siap mengambil langkah besar dan memilih kenaikan suku bunga dapat semakin menekan euro terhadap pound pada hari ini," kata Chris Turner, kepala global pasar di ING.

Ekspektasi kenaikan suku bunga Inggris juga tercermin dari pasar keuangan. Kontrak berjangka pasar uang menunjukkan probabilitas lebih dari 80% bahwa BoE akan menaikkan suku bunga pada bulan depan.

Selain itu, pasar sepenuhnya memperhitungkan kemungkinan dua kali kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin hingga pertemuan BoE pada Februari mendatang.

Impor Kontainer AS Tembus Rekor September 2026, Kiriman dari China Melonjak

Kamis, 8 Oktober 2026 16:21 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/impor-kontainer-as-tembus-rekor-september-2026-kiriman-dari-china-melonjak>

KONTAN.CO.ID - LOS ANGELES. Impor kontainer Amerika Serikat (AS) mencatat rekor baru untuk bulan September 2026. Lonjakan tersebut terutama didorong oleh peningkatan pengiriman barang dari China yang mencapai lebih dari 20% secara tahunan.

Mengutip Reuters, Rabu (8/10/2026), volume impor kontainer AS pada September 2026 meningkat 10,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya menjadi 2,55 juta twenty-foot equivalent units (TEUs).

TEUs merupakan satuan standar yang digunakan industri pelayaran untuk mengukur volume kontainer, dengan satu TEU setara dengan kontainer sepanjang 20 kaki atau sekitar 6,1 meter.

Data tersebut disampaikan oleh Descartes Systems Group (DSG), penyedia teknologi rantai pasok. Kenaikan impor AS juga menjadi perhatian karena data perdagangan tersebut kerap digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi perekonomian, permintaan konsumen, serta respons terhadap kebijakan perdagangan.

Salah satu pendorong utama kenaikan impor AS pada September 2026 berasal dari China. Volume barang impor asal China mencapai 924.454 TEUs, atau setara dengan 36,3% dari total volume impor kontainer AS pada bulan tersebut.

Jumlah pengiriman dari China tersebut meningkat 21,2% secara tahunan, sehingga menjadi salah satu faktor utama yang mendorong volume impor AS mencatat rekor untuk September.

Barang-barang ritel dari China mendominasi pengiriman tersebut. Produk yang masuk antara lain barang berbahan plastik, furnitur dan perlengkapan tempat tidur, serta mainan dan peralatan olahraga.

Produk-produk tersebut merupakan jenis barang yang banyak dipasarkan oleh peritel besar di AS, termasuk Walmart dan Costco.

Secara kumulatif, volume impor kontainer AS sepanjang Januari-September 2026 meningkat 0,8% dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Vietnam Ungkap Negosiasi Kesepakatan Dagang dengan AS Hampir Rampung

Kamis, 8 Oktober 2026 12:30 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://internasional.kontan.co.id/news/vietnam-ungkap-negosiasi-kesepakatan-dagang-dengan-as-hampir-rampung>

KONTAN.CO.ID - HANOI. Pemerintah Vietnam menyatakan bahwa negosiasi dengan Amerika Serikat mengenai perjanjian perdagangan timbal balik sebagian besar telah rampung setelah tujuh putaran pembicaraan sejak April 2025.

Mengutip Reuters, Kamis (8/10/2026), Ngo Chung Khanh, seorang pejabat kementerian perdagangan, dalam pernyataan yang dirilis pada Rabu malam mengatakan, kedua belah pihak pada dasarnya telah menyelesaikan hampir seluruh materi negosiasi dan kini sedang menuntaskan sejumlah kecil masalah teknis yang tersisa.

Koordinasi erat dengan berbagai instansi AS—khususnya Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR)—diharapkan dapat dilakukan untuk merampungkan masalah-masalah yang tersisa serta membuka jalan bagi penandatanganan dan pelaksanaan kesepakatan tersebut.

Surplus perdagangan Vietnam dengan AS mencapai US\$ 122,62 miliar pada sembilan bulan pertama tahun 2026, naik 23,8% dibandingkan tahun sebelumnya, menurut Kantor Statistik Nasional Vietnam.

Pemimpin Vietnam, To Lam, bulan lalu menyatakan bahwa negosiasi perjanjian perdagangan antara kedua negara berjalan positif dan kesepakatan tersebut dapat segera ditandatangani.

Risalah The Fed Bernada Hawkish, Dolar AS Dekati Level Tertinggi 18 Bulan

Kamis, 8 Oktober 2026 12:11 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/risalah-the-fed-bernada-hawkish-dolar-as-dekati-level-tertinggi-18-bulan>

KONTAN.CO.ID - Dolar Amerika Serikat (AS) bertahan di dekat level terkuat dalam 18 bulan pada perdagangan Asia, Kamis (8/10/2026).

Penguatan dolar terjadi setelah risalah rapat Federal Open Market Committee (FOMC) menunjukkan kekhawatiran terhadap risiko inflasi masih menjadi perhatian utama para pembuat kebijakan The Fed.

Melansir Reuters, Indeks dolar, yang mengukur kinerja greenback terhadap enam mata uang utama, stabil di level 102,25 setelah menguat 0,3% pada perdagangan Rabu (7/10/2026).

Posisi tersebut membuat indeks dolar hanya berjarak beberapa poin dari level tertingginya sejak 9 April 2025.

Penguatan dolar sebelumnya terjadi setelah gejolak pasar yang menyertai pengumuman tarif yang dikenal sebagai Liberation Day.

Dalam rapat 15-16 September 2026, para pejabat The Fed secara bulat menyetujui kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin.

Namun, risalah rapat yang dirilis Rabu menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai alasan di balik keputusan tersebut.

Analisis Westpac menilai, risalah FOMC memperkuat sinyal hawkish yang menyertai kenaikan suku bunga The Fed pada September.

"Risalah FOMC memperkuat nada hawkish yang menyertai kenaikan suku bunga The Fed pada September. Sebagian besar peserta masih memandang pengetatan lebih lanjut sebagai langkah yang tepat, sementara hampir seluruh peserta melihat risiko inflasi cenderung meningkat pada saat rapat berlangsung," tulis analisis Westpac.

Penguatan dolar juga didukung kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS. Imbal hasil US Treasury 10 tahun naik 3 basis poin menjadi 5,303%.

Analisis MUFG menilai, pelemahan pasar US Treasury menjadi salah satu faktor yang semakin penting bagi pasar keuangan global. "Penjualan besar-besaran US Treasury yang terus berlanjut menjadi pendorong yang semakin penting bagi pasar global. Jika imbal hasil obligasi tenor panjang kembali meningkat, perhatian pasar dapat beralih pada pengetatan kondisi keuangan AS secara lebih luas dan apakah para pembuat kebijakan mulai menunjukkan kekhawatiran yang lebih besar terhadap kondisi pasar Treasury," tulis analisis MUFG.

Ekspektasi Suku Bunga The Fed

Meski risalah menunjukkan kekhawatiran terhadap inflasi, ekspektasi pasar belum banyak berubah terkait keputusan The Fed pada akhir Oktober.

Kontrak berjangka suku bunga The Fed menunjukkan probabilitas 81,7% bahwa bank sentral AS akan mempertahankan suku bunga pada pertemuan yang berakhir 28 Oktober.

Angka tersebut sedikit meningkat dibandingkan 80,1% sehari sebelumnya berdasarkan CME Group FedWatch.

Di pasar valuta asing, dolar AS menguat 0,1% terhadap yen menjadi 158,18 yen per dolar. Pergerakan tersebut terjadi setelah yen sempat menguat menyusul data yang menunjukkan surplus transaksi berjalan Jepang mencapai 4,062 triliun yen atau sekitar US\$25,7 miliar pada Agustus.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan median perkiraan ekonom sebesar 3,19 triliun yen.

Sementara itu, dolar Australia melemah 0,1% menjadi US\$0,6955. Dolar Selandia Baru relatif stabil di US\$0,5602.

Dolar AS juga bergerak datar terhadap yuan China di level 6,7035 yuan dalam perdagangan offshore.

Di sisi lain, euro menguat 0,1% menjadi US\$1,1202, sedangkan poundsterling Inggris tidak berubah di level US\$1,3212.

Di pasar aset kripto, Bitcoin melemah 1,3% menjadi US\$82.360,17. Ethereum juga turun 0,8% menjadi US\$2.554,41.

Kepercayaan Konsumen Thailand Turun, Banjir dan Biaya Hidup Jadi Beban

Kamis, 8 Oktober 2026 12:18 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/kepercayaan-konsumen-thailand-turun-banjir-dan-biaya-hidup-jadi-beban>

KONTAN.CO.ID - Kepercayaan konsumen Thailand turun untuk pertama kalinya dalam empat bulan pada September 2026. Kondisi ini dipengaruhi oleh banjir, pemulihan ekonomi yang masih lambat, serta tingginya biaya hidup.

Melansir Reuters, berdasarkan survei University of the Thai Chamber of Commerce yang dirilis Kamis (8/10/2026), indeks kepercayaan konsumen Thailand turun menjadi 52,1 pada September dari 53,2 pada Agustus.

Penurunan kepercayaan konsumen terjadi di tengah tekanan akibat banjir yang melanda sejumlah wilayah, termasuk Bangkok.

Pada akhir September, Gubernur Bangkok menetapkan ibu kota Thailand sebagai wilayah terdampak bencana setelah hujan hampir 300 milimeter mengguyur kota tersebut hanya dalam tiga hari.

Curah hujan tersebut setara dengan jumlah hujan yang biasanya diterima Bangkok sepanjang September.

Presiden University of the Thai Chamber of Commerce Thanavath Phonvichai memperkirakan, kerugian ekonomi akibat banjir mencapai 22 miliar baht hingga 30 miliar baht atau sekitar US\$655 juta-US\$893 juta.

"Kerugian ekonomi akibat banjir diperkirakan berada pada kisaran 22 miliar baht hingga 30 miliar baht dan masih dapat bertahan dalam kisaran tersebut jika kondisi mulai membaik pekan depan," ujar Thanavath dalam konferensi pers.

Selain banjir, ketegangan global turut menekan kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian Thailand.

Meski demikian, University of the Thai Chamber of Commerce memperkirakan sentimen konsumen dapat membaik menjelang akhir tahun apabila risiko banjir mereda, harga minyak turun, sektor pariwisata kembali meningkat, serta stimulus pemerintah mulai memberikan dampak terhadap perekonomian.

Thanavath memperkirakan ekonomi Thailand akan tumbuh 2,2%-2,5% pada tahun ini. Proyeksi tersebut menunjukkan pemulihan yang masih relatif terbatas dibandingkan sejumlah negara lain di kawasan Asia Tenggara.

Sebagai perbandingan, ekonomi Thailand tumbuh 2,4% pada tahun lalu dan masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di kawasan tersebut.

Mata Uang Asia Bergerak Terbatas Kamis (8/10), Rupiah Menguat Tipis

Kamis, 8 Oktober 2026 09:32 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/mata-uang-asia-bergerak-terbatas-kamis-810-rupiah-menguat-tipis>

KONTAN.CO.ID - Pergerakan mata uang Asia cenderung terbatas terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (8/10/2026).

Pelaku pasar masih mencermati arah kebijakan moneter AS dan perkembangan ekonomi global.

Berdasarkan data Reuters pada pukul 02.06 GMT, sejumlah mata uang Asia bergerak tipis terhadap dolar AS.

Yen Jepang menguat 0,18% ke level 157,78 per dolar AS, sementara dolar Singapura naik 0,04% menjadi 1,279.

Won Korea Selatan juga menguat 0,13% ke 1.337,40 per dolar AS. Baht Thailand naik 0,08% menjadi 33,603 dan yuan China menguat 0,05% ke 6,702 per dolar AS.

Di kawasan Asia Tenggara, ringgit Malaysia menguat 0,07% ke 4,083 per dolar AS. Sementara itu, peso Filipina melemah 0,04% ke 62,697 per dolar AS.

Rupiah juga mencatat penguatan tipis. Rupiah berada di level Rp17.860 per dolar AS, menguat 0,08% dibandingkan posisi sebelumnya Rp17.875 per dolar AS.

Namun, secara keseluruhan kinerja rupiah masih tertekan sepanjang 2026. Dibandingkan posisi akhir 2025 di level Rp16.670 per dolar AS, rupiah telah melemah sekitar 6,66%.

Tekanan serupa juga terlihat pada sejumlah mata uang Asia lainnya. Rupee India menjadi salah satu mata uang dengan pelemahan terbesar sepanjang tahun, yakni 7,14% terhadap dolar AS. Baht Thailand melemah 6,41%, peso Filipina turun 6,22%, sedangkan dolar Taiwan terkoreksi 1,23%.

Sebaliknya, won Korea Selatan menjadi salah satu mata uang Asia dengan kinerja terbaik sepanjang tahun. Won menguat 7,71% terhadap dolar AS dari posisi akhir 2025.

Yuan China juga menguat 4,27% sepanjang 2026. Dolar Singapura naik 0,50%, sementara yen Jepang melemah 0,72% dan ringgit Malaysia turun 0,66%.

Pergerakan mata uang Asia berlangsung di tengah dolar AS yang relatif stabil. Investor masih mencermati prospek kebijakan suku bunga Federal Reserve serta perkembangan ekonomi global yang berpotensi memengaruhi arus modal ke pasar negara berkembang.

Bank Dunia Beber Mata Uang ASEAN yang Turun Dalam, Ada Rupiah

Kamis, 8 Oktober 2026 18:50 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124040/bank-dunia-beber-mata-uang-asean-yang-turun-dalam-ada-rupiah/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Dunia mencatat sejumlah mata uang di kawasan Asia Tenggara telah terdepresiasi cukup tajam pada tahun 2026 termasuk Rupiah.

“Rupiah Indonesia, peso Filipina, dan baht Thailand—tiga pasar mata uang dengan tingkat perdagangan yang lebih dalam dan lebih aktif secara internasional di kawasan—masing-masing telah terdepresiasi setidaknya 5% sejak Februari 2026,” kata Bank Dunia dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2026.

Ketiga negara ini mencatatkan depresiasi cukup dalam apabila dibandingkan dengan 18 negara emerging market and developing economies (EMDE) dengan rata-rata depresiasi 2%

Sebagai catatan, kedelapan belas negara ini merupakan negara berkembang yang menggunakan nilai tukar mengambang dan tercantum dalam indeks saham pasar berkembang MSCI.

Menurut Bank Dunia, kawasan Asia Timur dan Pasifik masih sangat bergantung pada impor energi.

“Kenaikan harga minyak setelah konflik di Timur Tengah telah meningkatkan tekanan terhadap perekonomian negara-negara di kawasan,” kata Bank Dunia.

Bank Dunia menyebut bahwa meskipun volume impor minyak telah menurun di seluruh kawasan, nilai tagihan impor meningkat tajam sejak awal konflik.

Melansir Bloomberg pada pukul 16.42 hari ini, rupiah tercatat sebesar Rp17.898/US\$, atau turun sebesar 6,75% secara year-to-date (ytd).

Bank Dunia Ramal Defisit Transaksi Berjalan RI Melebar 1,5% PDB

Kamis, 8 Oktober 2026 16:40 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124030/bank-dunia-ramal-defisit-transaksi-berjalan-ri-melebar-1-5-pdb/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Dunia meramalkan bahwa defisit transaksi berjalan Indonesia pada akhir tahun 2026 ini bisa melebar hingga 1,5% produk domestik bruto (PDB).

Menurut lembaga tersebut, sejumlah aktivitas ekonomi yang didukung oleh peningkatan pelaksanaan program-program prioritas pemerintah, investasi yang terkait dengan perusahaan negara, serta subsidi energi memang menjadi motor pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

“Tetapi juga berkontribusi terhadap pelebaran ketidakseimbangan fiskal dan eksternal, yang diperkirakan akan terus berlangsung dalam beberapa tahun mendatang,” kata Bank Dunia dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2026.

Bank Dunia menyebut faktor-faktor tersebut juga punya andil terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka, dalam laporan tersebut, Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran 5,2% hingga akhir tahun mendatang, jauh lebih besar ketimbang proyeksi pada bulan Maret yang sebesar 4,7%.

Hal ini juga disebabkan karena Bank Dunia mempertimbangkan dampak kenaikan harga energi yang tidak akan separah dari yang sebelumnya diproyeksikan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini lebih tinggi ketimbang rata-rata pertumbuhan ekonomi negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik yang berada pada level 4,5%. Sementara itu, jika dibandingkan dengan kawasan ASEAN, pertumbuhan ekonomi RI hanya kalah dengan Vietnam yang diproyeksi dapat mencapai 7,4% hingga akhir tahun mendatang.

Meski demikian, angka tersebut masih di bawah target pemerintah yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,4%.

Sebelumnya, Bank Indonesia mencatat pada kuartal II-2026, transaksi berjalan RI tercatat defisit US\$ 12,5 miliar atau 3,3% dari PDB. Jauh melebar ketimbang defisit kuartal sebelumnya yakni US\$ 3,6 miliar (1% PDB).

"Transaksi berjalan mencatat defisit yang lebih tinggi didorong kenaikan defisit neraca perdagangan migas dan penurunan surplus neraca perdagangan non-migas. Defisit neraca perdagangan migas meningkat akibat kenaikan impor minyak sejalan tingginya harga minyak dunia," papar laporan BI.

APBN Alami Defisit Rp319 T September 2026, Tembus 1,24% PDB

Kamis, 8 Oktober 2026 19:20 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124056/apbn-alami-defisit-rp319-t-september-2026-tembus-1-24-pdb/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan realisasi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai September 2026 mengalami defisit sebesar Rp319 triliun atau 1,24% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Porsi defisit melonjak dibanding bulan sebelumnya yang hanya tercatat 0,9% terhadap PDB. Kendati demikian, angka ini lebih rendah dibanding posisi pada periode yang sama tahun lalu, yakni Rp371,5 triliun atau 1,56% terhadap PDB.

"Belanja negara sudah dibelanjakan Rp2.660,5 triliun. Ini adalah 69%. Relatively on track, tentu nanti akan ada percepatan belanja, terutama di bulan November dan di bulan Desember. Tetapi 3/4 tahun belanja, hampir 70%, ini artinya juga oke, on track," jelas Suahasil dalam Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Kamis (8/10/2026) malam.

Di sisi lain, posisi keseimbangan primer APBN 2026 mencatatkan surplus Rp125,52 triliun sampai September 2026. Angka ini lebih tinggi dibanding nominal surplus pada periode yang sama tahun lalu Rp18 triliun.

Suahasil mengatakan defisit tersebut sejatinya sesuai dengan desain APBN yang sejak awal memang disusun dalam posisi defisit.

Artinya memang sejak awal pemerintah sengaja merancang belanja negara lebih besar daripada pendapatan untuk menjalankan berbagai program dan kebijakan pemerintah.

"APBN akan terus menjadi APBN yang menumbuhkan, APBN yang melindungi, dan APBN yang akan terus kredibel," jelasnya.

"Angka-angkanya kita jaga, sehingga dapat dipercaya bahwa APBN ini adalah APBN yang mengumpulkan uang dari rakyat, namun juga belanjanya kembali lagi kepada masyarakat Indonesia," pungkasnya.

Suahasil Beber Peran Danantara ke Pertumbuhan Ekonomi RI

Kamis, 8 Oktober 2026 14:00 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124006/suahasil-beber-peran-danantara-ke-pertumbuhan-ekonomi-ri/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Suahasil Nazara membeberkan peran Danantara dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Ia mengibaratkan Danantara dan otoritas bak dua anak kembar.

"Fiskal sama Danantara itu saudara kembar, kerjanya bareng, sinerginya harus terjadi. Komunikasinya harus lancar," kata Suahasil dalam acara Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Kerja Nyata Melanjutkan Asta Cita, Kamis (8/10/2026).

Suahasil menyebutkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pada tahun 2027 mendatang, Investasi harus mencapai 7%. Di sinilah menurutnya peran Danantara menjadi krusial.

“Kita berharap bersama Danantara kita desain bagaimana APBN dan Danantara kemudian bersatu, sehingga bisa mendorong pertumbuhan investasi kaliber 7%. Ini pekerjaan besar dan membutuhkan yang namanya kita bekerja bersama.” kata Suahasil.

Suahasil juga mengatakan bahwa APBN dan Danantara menjadi dua lengan negara. Apabila APBN mengatur pelayanan publik, infrastruktur publik dan perlindungan sosial serta operasional pemerintah maka Danantara mengatur konsolidasi aset dan investasi.

Meski APBN juga memiliki investasi, namun biasanya hal tersebut digunakan untuk infrastruktur dasar, sementara investasi dari Danantara berperan sebagai katalis investasi yang bekerja untuk memastikan dan meyakinkan kelompok usaha dan perekonomian harus bekerjasama.

Suahasil juga menyinggung pentingnya kerjasama untuk menjaga stabilitas keuangan yang terdiri dari kebijakan fiskal, kebijakan moneter, OJK, dan juga Danantara.

“Karena ini adalah kerja bersama, gak bisa hanya satu pihak yang menjamin stabilitas. Tidak bisa hanya satu pihak yang menjamin pertumbuhan,” kata Suahasil.

Tak Minta Dividen Danantara

Suahasil juga memastikan bahwa pemerintah tak akan meminta porsi dividen dari Danantara. Ia mengatakan bahwa pada APBN 2026 yang tengah dijalankan oleh Kementerian Keuangan, tak terdapat pos dividen Danantara.

“Saat ini saya bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Danantara di situ,” tegas Suahasil.

Suahasil juga mengatakan dalam persiapannya menyusun APBN 2027, ia tak memasukkan unsur dividen Danantara. Menurutnya, peran terpenting Danantara bukanlah memberikan uang ke pemerintahan.

“Apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia Itulah dividen Danantara yang paling utama,” kata Suahasil.

Menkeu: Kejar Ekonomi 6%, Konsumsi Rumah Tangga Harus Tumbuh 5,4%

Kamis, 8 Oktober 2026 11:00 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/123983/menkeu-kejar-ekonomi-6-konsumsi-rumah-tangga-harus-tumbuh-5-4/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Suahasil Nazara membeberkan sejumlah syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 6% pada tahun 2027 mendatang.

“Aspirasi kita tahun depan pertumbuhan ekonomi 6%. Kita harus bekerja keras untuk itu. Dan saya ingin sampaikan, kalau untuk mendapatkan 6%, maka konsumsi rumah tangga itu harus lebih tinggi dari 5,4% pertumbuhannya,” kata Suahasil dalam acara Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Kerja Nyata Melanjutkan Asta Cita, Kamis (8/10/2026).

Sementara itu, Suahasil menilai bahwa konsumsi pemerintah juga harus naik lebih besar lagi yakni sebesar 5,6%. Sementara itu, investasi ditargetkan untuk bisa tumbuh sebesar 7%.

“Dan kita berharap bersama Danantara kita desain bagaimana APBN dan Danantara kemudian bersatu, sehingga bisa mendorong pertumbuhan investasi kaliber 7%,” kata Suahasil.

Suahasil mengibaratkan APBN dan Danantara menjadi dua lengan negara. Apabila APBN mengatur pelayanan publik, infrastruktur publik dan perlindungan sosial serta operasional pemerintah maka Danantara mengatur konsolidasi aset dan investasi.

Ia juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan pekerjaan bersama, sehingga tidak dapat hanya mengandalkan satu pihak untuk menjamin stabilitas maupun mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan secara bersama-sama dengan tetap menjalankan reformasi struktural.

Sebagai informasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Semester I 2026 tercatat sebesar 5,45% dibandingkan dengan semester I-2025. Pertumbuhan ini terjadi pada seluruh komponen pengeluaran.

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 18,62%, sementara kenaikan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada semester I 2026 hanyalah sebesar 5,28%.

Selain itu, kenaikan pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPR) sebesar 6,61% sementara pembentukan modal tetap bruto sebesar 6,43%.

Ekspor barang dan jasa sebesar mencatat pertumbuhan 2,56%. Sementara itu, impor barang dan jasa sebagai faktor pengurang mencatat pertumbuhan sebesar 7,68%.

Ekonom Ingatkan Potensi Pelebaran Defisit Imbas Restitusi

Kamis, 8 Oktober 2026 10:00 WIB

<https://www.bloombergtchnoz.com/detail-news/123965/ekonom-ingatkan-potensi-pelebaran-defisit-imbas-restitusi/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai Agustus 2026 tercatat mengalami defisit sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Realisasi pendapatan negara tercatat baru 65,2% dari total target APBN yang sebesar Rp3.153 triliun, sementara realisasi belanja negara tercatat Rp2.295,7 triliun atau 59,7% dari target belanja yang mencapai Rp3.842 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa angka tersebut harus dibaca bersama dengan pos penerimaan yang masih berpotensi berubah, terutama restitusi.

“Kalau hanya melihat persentase realisasi, posisi APBN bisa terlihat lebih longgar daripada kondisi sebenarnya,” sebut Yusuf kepada Bloomberg Technoz, Rabu (7/10/2026).

Menurut Yusuf, kualitas penerimaan di balik angka tersebut harus diperhatikan dengan restitusi pajak yang belum dibayarkan dan berpotensi membuat penerimaan bersih untuk sementara terlihat lebih tinggi, meskipun negara sebenarnya memiliki kewajiban pengembalian kepada wajib pajak.

Ketika restitusi dicairkan pada kuartal IV, terutama bersamaan dengan meningkatnya pengembalian PPN eksportir dan penyelesaian kewajiban pajak badan, penerimaan bersih dapat turun dan defisit melebar tanpa ada tambahan belanja baru.

Meski demikian, Yusuf menyebut bahwa hal ini bukan berarti seluruh restitusi yang belum cair akan otomatis menjadi tambahan defisit. Besarnya dampak tergantung pada stok restitusi yang masih menunggu pembayaran dan kapan pembayaran tersebut dilakukan.

“Masalahnya, rincian stok restitusi yang belum cair tidak tersedia dalam rilis Agustus. Jadi risikonya bisa diidentifikasi, tetapi belum bisa dihitung secara presisi,” katanya.

Ruang Penerimaan Tak Cukup Besar

Yusuf menyebut tekanan tersebut menjadi penting karena ruang penerimaan pajak sendiri tidak terlalu lebar. Sampai Agustus, penerimaan pajak baru Rp1.409 triliun atau 59,8% dari target Rp2.357,7 triliun.

Dengan proyeksi akhir tahun sekitar Rp2.310,8 triliun, penerimaan pajak masih berpotensi kurang sekitar Rp47 triliun dari target, bahkan sebelum memperhitungkan kemungkinan restitusi tambahan.

“Bea dan cukai juga hanya tumbuh 7,8%. Artinya, bantalan penerimaan dari sisi pajak tidak terlalu besar jika tekanan restitusi meningkat pada kuartal IV,” kata Yusuf.

Yusuf bilang, PNBPN memang masih menjadi penyangga yang cukup kuat. Realisasinya sudah mencapai 94,8% dari target dan tumbuh 41,7%.

Jika harga minyak bertahan di sekitar 100 dolar AS per barel, penerimaan dari sektor sumber daya dapat memberikan tambahan ruang.

Namun, manfaatnya tidak seluruhnya menjadi ruang fiskal bersih karena kenaikan harga energi juga dapat meningkatkan kebutuhan subsidi dan kompensasi. Jadi, kenaikan PNBPN membantu, tetapi tidak sepenuhnya menghilangkan risiko tekanan pada defisit.

Realokasi Harus Selektif

Dalam kondisi seperti ini, realokasi belanja perlu dilakukan secara selektif. Yusuf bilang, yang dimaksud bukan memangkas bantuan sosial yang sudah berjalan seperti PKH, PIP, KIP Kuliah, atau Makan Bergizi Gratis.

Sampai Agustus, belanja perlindungan dan dukungan sosial tersebut sudah mencapai sekitar Rp134,2 triliun. Mengurangi penyaluran yang sudah terikat justru berisiko menekan konsumsi rumah tangga pada saat pemerintah ingin menjaga momentum pertumbuhan.

Ruang yang lebih rasional ada pada belanja yang belum memiliki keterikatan kontraktual kuat dan secara realistis tidak akan terserap sampai akhir tahun.

Ia memaparkan saat ini belanja pemerintah pusat baru mencapai 56,9% dari pagu Rp3.149,7 triliun. Belanja kementerian dan lembaga baru Rp912,4 triliun atau 60,4% dari pagu Rp1.510,5 triliun, sementara belanja nonkementerian baru 53,6% dari pagu Rp1.639,2 triliun.

“Di sinilah penyisiran anggaran menjadi penting. Sisa belanja modal untuk proyek yang belum terkontrak atau secara teknis tidak mungkin selesai tahun ini lebih masuk akal untuk ditunda atau dialihkan daripada memangkas program yang langsung menopang konsumsi,” katanya.

Belanja barang dan jasa yang sifatnya perjalanan dinas, rapat, atau pengadaan yang belum mendesak juga memiliki ruang efisiensi. Sebaliknya, belanja pegawai yang sudah mencapai 72,3% dan transfer ke daerah 72,8% relatif lebih kaku sehingga bukan sumber utama realokasi.

Tetapi, Yusuf mengingatkan, pemerintah harus membedakan antara anggaran yang benar-benar tidak akan terserap dan anggaran yang hanya terlambat secara administratif.

Menurutnya, jika proyek yang sebenarnya masih akan berjalan pada November dan Desember dipindahkan sekarang, belanja itu pada akhirnya tetap muncul. Dampaknya hanya bergeser waktunya dan tekanan terhadap defisit tetap ada.

Kemenkeu: Perputaran Uang Harus Dorong Sektor Produktif

Kamis, 8 Oktober 2026 08:40 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/123955/kemenkeu-perputaran-uang-harus-dorong-sektor-produktif/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menekankan pentingnya memastikan likuiditas dan uang beredar mengalir ke sektor produktif untuk menjaga momentum pergerakan roda ekonomi nasional.

Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu Noor Faisal Achmad menilai perputaran uang sejatinya harus diarahkan secara tepat ke sektor-sektor yang produktif.

Sebab rupiah yang hanya diam menurutnya tidak akan menghasilkan aktivitas ekonomi apa pun.

"Rupiah yang diam belum menjadi aktivitas ekonomi. Likuiditas menjadi bermakna ketika transaksi yang produktif terjadi," kata Noor Faisal di Jakarta, dikutip Kamis (8/10/2026).

Sebagai contoh, Noor mengatakan bahwa likuiditas baru berdampak nyata ketika petani menggunakan pembiayaan untuk musim tanam, usaha kecil membeli bahan baku dan peralatan, hingga eksportir memperluas kapasitas produksi.

Karena itu, dia menilai kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, serta aktivitas ekonomi riil perlu bekerja dalam satu ekosistem untuk memastikan perputaran rupiah dapat mendukung pertumbuhan.

"Jadi pada akhirnya dunia usaha serta rumah tangga mengubah pembiayaan tersebut menjadi produksi, menjadi investasi, menjadi lapangan kerja, dan juga konsumsi," jelas Noor.

"Tujuannya bukan agar satu institusi melakukan semuanya. Tujuannya adalah agar sistem bekerja bersama, kolaboratif, agar rupiah terus bergerak, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang ada," terangnya.

Tak luput ia menambahkan bahwa belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) turut berperan sebagai katalis penting untuk mendorong investasi, konektivitas, hingga perlindungan sosial.

Noor bilang, realisasi belanja pemerintah tercatat mencapai Rp1.791,5 triliun hingga Agustus 2026, termasuk alokasi belanja modal sebesar Rp159,8 triliun untuk mendukung infrastruktur dasar seperti jalan dan irigasi.

Namun, Noor mengingatkan ketahanan ekonomi pada prinsipnya juga akan sangat bergantung pada kredibilitas tata kelola fiskal di tengah dinamika global dan geopolitik yang tidak pasti.

Tercatat defisit anggaran per Agustus 2026 sebesar Rp240,1 triliun atau 0,96% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Jadi saya menekankan, rupiah APBN tidak hanya menjadi katalis aktivitas ekonomi. Rupiah APBN juga menjaga agar masyarakat tetap memiliki kemampuan untuk bertahan, berusaha, dan mengambil

bagian dalam pertumbuhan. Kemudian melindungi bukan sekedar memberikan bantuan, melindungi juga berarti memberdayakan," pungkasnya.

Harga Pangan Beterbangan, Beras hingga Cabai Melejit

Kamis, 8 Oktober 2026 16:20 WIB

Ibnu Affan

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124028/harga-pangan-beterbangan-beras-hingga-cabai-melejit/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Mayoritas rata-rata harga komoditas pangan nasional masih mengalami kenaikan secara harian per hari ini, Selasa (6/10/2026). Salah satunya beras hingga cabai-cabaian.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia per pukul 14.30 WIB, harga beras kualitas bawah II naik 0,34% atau Rp50, menjadi Rp14.750/kg.

Harga beras kualitas medium II naik 0,30% atau Rp50, menjadi Rp16.450/kg. Begitu juga beras kualitas super I naik 0,28% atau Rp50, menjadi Rp18.000/kg. Beras kualitas super II naik 0,29% atau Rp50 menjadi Rp17.400/kg.

Namun, harga beras kualitas bawah I tidak berubah atau tetap Rp14.900/kg. Harga beras kualitas medium I juga tidak berubah atau tetap Rp16.650/kg.

Kemudian, harga cabai merah besar naik 12,89% atau Rp8.050, menjadi Rp70.500/kg. Harga cabai merah keriting juga naik 13,23% atau Rp9.800, menjadi Rp83.900/kg. Harga cabai rawit hijau naik 10,22% atau Rp7.150, menjadi Rp77.100/kg.

Harga cabai rawit merah naik 2,23% atau Rp2.250, menjadi Rp103.300/kg, sekaligus masih menjadi harga jenis cabai yang tertinggi.

Sementara itu, harga daging ayam ras segar kini turun 0,95% atau Rp400, menjadi Rp41.500/kg. Tetapi, daging sapi kualitas I masih naik 0,46% atau Rp700, menjadi Rp153.200/kg. Begitu juga daging sapi kualitas II yang naik 0,56% atau Rp800, menjadi Rp144.050/kg.

Harga bawang merah ukuran sedang turun 1,21% atau Rp450, menjadi Rp36.850/kg. Sementara, bawang putih ukuran sedang naik 0,39% atau Rp150, menjadi Rp39.050/kg.

Lalu, harga minyak goreng curah naik 0,25% atau Rp50, menjadi Rp20.450/kg. Begitu juga minyak goreng kemasan bermerek 1 naik 0,41% atau Rp100, menjadi Rp24.450/kg.

Harga minyak goreng kemasan bermerek 2 naik 0,42% atau Rp100, menjadi Rp23.650/kg. Sementara, harga telur ayam ras segar turun 0,50% atau Rp150 menjadi Rp29.700/kg.

Gula pasir kualitas premium naik 0,74% atau Rp150, menjadi Rp20.500/kg. Begitu juga gula pasir lokal naik 0,78% atau Rp150 menjadi Rp19.300/kg.

BPS: 99 Kabupaten/Kota Mampu Tumbuh di Atas 6% pada Semester I

Kamis, 8 Oktober 2026 07:50 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/123951/bps-99-kabupaten-kota-mampu-tumbuh-di-atas-6-pada-semester-i/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 99 kabupaten/kota di Indonesia mampu mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 6% pada semester I-2026. "Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia pada semester I-2026, 99 kabupaten/kota mampu tumbuh di atas 6%," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, dikutip Kamis (8/10/2026).

Dari 99 kabupaten/kota yang tumbuh di atas 6%, sebanyak 39 kabupaten/kota berada di Pulau Jawa. Sementara itu, Sulawesi menyumbang 29 kabupaten/kota dan Sumatera sebanyak 9 kabupaten/kota. Amalia lantas memberikan salah satu contoh yakni Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, yang mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 8,14% pada semester I-2026.

Menurutnya, pertumbuhan tinggi daerah berjudul 'Bumi Ketonggo' ini ditopang inovasi di sektor pertanian, termasuk perluasan penerapan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan yang mencakup sekitar 35 ribu hektare lahan.

Selain itu, pemerintah daerah mendorong transformasi sektor pertanian melalui teknologi smart farming, termasuk pemanfaatan drone oleh komunitas petani muda. Sementara, contoh lain disebutkan berada di Kabupaten Sidenreng Rappang atau Sidrap, Sulawesi Selatan, yang mencatat pertumbuhan ekonomi 6,85% pada semester I-2026.

Tak jauh berbeda, Amalia mengatakan pertumbuhan Sidrap ditopang inovasi pertanian melalui peningkatan produktivitas tanaman pangan, peternakan, serta optimalisasi perkebunan porang yang dilanjutkan dengan pengembangan industri pengolahan.

Sektor peternakan telur di Sidrap juga telah mengadopsi teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Menurutnya, penggunaan teknologi tersebut memungkinkan produktivitas ayam petelur lebih tinggi dibandingkan metode konvensional.

Dengan demikian, ia menilai potensi pertumbuhan ekonomi daerah juga dapat berasal dari sektor lain selama mampu meningkatkan produktivitas dan nilai tambah.

"Jadi intinya adalah kalau daerah itu mau tumbuh tinggi tidak perlu harus berbasis tambang. Bisa kalau dia punya sumber daya alam lainnya asal dinaikkan produktivitasnya kemudian digerakkan agar bisa menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi untuk ekonomi di wilayah tersebut," terang dia.

Sebelumnya, BPS menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 tercatat sebesar 5,29% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibanding ekonomi kuartal II-2025.

M. Edy Mahmud, Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS menyebut dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar pada PDB adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 53,32%, tumbuh 5,06% secara yoy. Disusul kemudian Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi langsung dengan kontribusi 29,36% dan tumbuh 6,87%. Kontribusi total kedua komponen ini sebesar 82,68%.

Edy menyebut, komponen pengeluaran yang tumbuh tinggi yaitu konsumsi pemerintah yang didorong oleh peningkatan realisasi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa pada triwulan II-2026. Menurut BPS, belanja pemerintah mencatatkan kenaikan sebesar 15,97%.

"Jika dilihat dari sumber pertumbuhannya pada triwulan II-2026 ini konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar yakni sebesar 2,67%. Selain itu pertumbuhan ekonomi triwulan II-2026 juga ditopang oleh komponen PMTB dengan sumber pertumbuhan sebesar 2,06% dan konsumsi pemerintah memberikan sumber pertumbuhan sebesar 1,07%," pungkask dia. Sementara itu Edy juga menyebut bahwa net export mencatatkan penurunan sebesar 0,78%.

Menkeu Minta K/L Efisiensi Belanja di Kuartal IV, Defisit Diprediksi di Bawah 3%

Kamis, 8 Oktober 2026 20:28 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/menkeu-minta-kl-efisiensi-belanja-di-kuartal-iv-defisit-diprediksi-di-bawah-3>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menginstruksikan kementerian/lembaga (K/L) untuk melakukan efisiensi belanja pada kuartal IV 2026. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja sekaligus menjaga disiplin anggaran hingga akhir tahun.

Berdasarkan surat edaran yang dirilis Kamis (8/10/2026), Suahasil meminta pemerintah terutama K/L melakukan penajaman dan optimalisasi belanja agar tetap fokus pada pencapaian target prioritas Presiden.

Salah satu langkah yang diminta adalah penghematan perjalanan dinas sebesar 30% dari pagu perjalanan dinas yang belum direalisasikan hingga 8 Oktober 2026.

Efisiensi dilakukan melalui optimalisasi pertemuan secara daring, pembatasan perjalanan yang tidak prioritas, serta pengurangan jumlah dan frekuensi perjalanan dinas.

Selain itu, pemerintah meminta K/L menunda sejumlah belanja pendukung aparatur yang belum direalisasikan. Belanja yang ditunda mencakup pengadaan kendaraan bermotor baru, pembangunan atau pengadaan rumah dinas baru, serta renovasi atau rehabilitasi gedung dan kantor.

Pagu anggaran dari penghematan dan penundaan belanja tersebut akan dicatat sebagai automatic adjustment. K/L juga diminta menyampaikan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan paling lambat 16 Oktober 2026.

Suahasil menegaskan, langkah efisiensi tersebut tetap harus memperhatikan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik serta tidak mengganggu pelayanan publik.

Di sisi lain, Ekonom CORE Indonesia Dipo Satria Ramli menilai langkah efisiensi tersebut membuka kemungkinan adanya refocusing belanja pemerintah kembali hingga akhir tahun.

Menurutnya, meski realisasi belanja pemerintah biasanya meningkat pada November dan Desember, defisit APBN 2026 masih berpeluang berada di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Saya rasa bakal di bawah 3% akhir tahun. Pak Presiden sudah concern 3% dan Pak Suahasil juga sudah beberapa kali mengkonfirmasi bahwa 3%," ujar Dipo kepada Kontan, Kamis (8/10/2026).

Dipo mengatakan, potensi lonjakan belanja pada dua bulan terakhir tahun ini tetap perlu dicermati. Namun, adanya kebijakan refocusing dan efisiensi belanja K/L dinilai dapat menahan kenaikan defisit.

"Kalau November-Desember bakal melonjak, ini mungkin perlu dilihat lebih lanjut, karena baru ada refocusing belanja lagi. Tapi walaupun ada refocusing kayaknya akan tetap akan di bawah 3%," ujar Dipo.

Menurut Dipo, sebagian hasil efisiensi belanja tersebut berpotensi dialihkan untuk membiayai program pemerintah lainnya.

"Untuk pastinya kita belum tahu, antara bantuan sosial Rp 900.000 untuk tiga bulan atau mungkin bantuan lain," jelasnya.

Indeks Keyakinan Konsumen September Stabil, Tapi Daya Beli Rumah Tangga Tertekan

Kamis, 8 Oktober 2026 19:54 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/indeks-keyakinan-konsumen-september-stabil-tapi-daya-beli-rumah-tangga-tertekan>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Stabilitasnya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada September 2026 diyakini belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi rumah tangga, justru masih tertekan.

Pasalnya, Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan optimisme konsumen masih lebih banyak ditopang oleh harapan terhadap kondisi ekonomi ke depan dibandingkan perbaikan yang telah dirasakan saat ini.

Sebagai gambaran, IKK September 2026 tercatat sebesar 118,1, turun tipis dibandingkan 118,5 pada Agustus 2026. Namun, jika dilihat berdasarkan komponennya, penilaian konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini justru turun dari 109,4 menjadi 107,5.

Sebaliknya, ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi enam bulan mendatang meningkat dari 127,6 menjadi 128,7.

"Artinya, optimisme konsumen saat ini lebih banyak ditopang harapan terhadap kondisi ke depan daripada perbaikan yang sudah dirasakan. Kesenjangan ini perlu dijaga karena jika harapan tersebut tidak segera terwujud, optimisme bisa cepat terkoreksi," ujar Yusuf kepada Kontan, Kamis (8/10/2026).

Menurut Yusuf, tekanan juga semakin terlihat pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Konsumen memang masih berharap penghasilan dan lapangan kerja membaik, tetapi ekspektasi terhadap kegiatan usaha justru melemah.

Padahal, penghasilan dan lapangan kerja sangat bergantung pada aktivitas dunia usaha. Yusuf menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan daya beli semakin terasa, khususnya pada kelompok bawah dan menengah bawah.

"Keyakinan terhadap penghasilan saat ini pada kelompok pengeluaran Rp 1 juta sampai Rp 2 juta sudah berada di level pesimis, sementara responden berpendidikan SMA juga turun ke 96,9," katanya.

Dengan kondisi tersebut, Yusuf memperkirakan konsumsi rumah tangga masih akan tumbuh, tetapi cenderung moderat dan tidak merata.

Kelompok masyarakat berpenghasilan lebih tinggi masih menjadi penopang konsumsi, sementara kelompok bawah cenderung menahan belanja.

Pola penggunaan pendapatan masyarakat juga memperkuat sinyal tersebut. Porsi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi meningkat dari 74,2% pada Agustus menjadi 74,9% pada September.

Di sisi lain, porsi pendapatan yang disimpan sebagai tabungan justru turun dari 15,8% menjadi 15,4%.

Yusuf menilai kenaikan porsi konsumsi tersebut belum tentu menunjukkan perbaikan daya beli masyarakat.

"Saya melihat ini lebih sebagai tanda tekanan daripada perbaikan daya beli. Konsumsi meningkat, tetapi ruang untuk menabung justru menyusut," ujarnya.

Menurut dia, kondisi tersebut perlu dibaca bersama tekanan eksternal, termasuk nilai tukar rupiah yang berada di sekitar Rp 17.900 per dolar AS dan harga energi yang masih tinggi.

Kenaikan porsi konsumsi bisa saja mencerminkan meningkatnya biaya hidup, bukan semata-mata bertambahnya volume konsumsi rumah tangga.

Di sisi lain, turunnya porsi pendapatan yang digunakan untuk membayar cicilan juga belum dapat langsung diartikan sebagai membaiknya kondisi keuangan rumah tangga.

Menurut Yusuf, masyarakat bisa saja lebih berhati-hati mengambil kredit karena prospek penghasilan masih belum pasti.

Hal ini mengindikasikan sebagian rumah tangga mulai menggunakan tabungan untuk mempertahankan tingkat konsumsi, meski skalanya saat ini belum mengkhawatirkan.

"Jika pola ini berlanjut, bantalan keuangan rumah tangga akan semakin tipis dan konsumsi menjadi lebih rentan terhadap guncangan, seperti kenaikan harga energi atau kehilangan pekerjaan," jelas Yusuf.

Kondisi ini menurutnya menjadi penting karena konsumsi rumah tangga masih menyumbang lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Yusuf mengingatkan agar upaya mengejar pertumbuhan ekonomi 6% pada tahun depan perlu dibarengi dengan kebijakan yang mampu menjaga daya beli, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja informal.

"Untuk mengejar pertumbuhan 6% tahun depan, menjaga daya beli perlu diarahkan terutama kepada kelompok berpenghasilan rendah dan pekerja informal, sekaligus menjaga stabilitas rupiah agar tekanan dari harga barang impor tidak semakin besar," pungkasnya.

Suahasil: Sinergi Fiskal APBN-Danantara Harus Diperkuat untuk Pertumbuhan Ekonomi RI

Kamis, 8 Oktober 2026 17:52 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/suahasil-sinergi-fiskal-apbn-danantara-harus-diperkuat-untuk-pertumbuhan-ekonomi-ri>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan Danantara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta membangun kapasitas investasi Indonesia ke depan.

Suahasil mengibaratkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Danantara sebagai dua lengan negara yang harus bekerja bersama, saling mengisi dan memperkuat.

"Fiskal sama Danantara itu saudara kembar, kerjanya bareng, sinerginya harus terjadi. Komunikasinya harus lancar," kata Suahasil dalam forum refleksi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka di Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Menurut Suahasil, APBN memiliki fungsi utama untuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur publik, perlindungan sosial, hingga mendukung operasional pemerintahan.

Sementara itu, Danantara sebagai konsolidator aset negara memiliki fungsi yang lebih diarahkan pada investasi.

Meski APBN juga menjalankan investasi, Suahasil mengatakan investasi melalui APBN lebih banyak difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar.

Adapun investasi Danantara diharapkan menjadi katalis bagi dunia usaha dan perekonomian sehingga mampu mendorong pelaku usaha untuk bergerak dan berinvestasi bersama.

"Investasi dari Danantara adalah investment catalyst. Bekerja untuk memastikan, meyakinkan kelompok pelaku usaha dan perekonomian, ayo bekerja bareng, bersama-sama," ujarnya.

Suahasil menilai sinergi fiskal dan Danantara juga harus berjalan beriringan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan. Menurutnya, stabilitas tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab satu institusi.

Ia menyebut koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) antara kebijakan fiskal, moneter, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Danantara menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Karena ini adalah kerja bersama, enggak bisa hanya satu pihak yang menjamin stabilitas. Tidak bisa hanya satu pihak yang menjamin pertumbuhan. Kita kerjakan, kita bangun negeri ini bersama-sama dengan reformasi struktural yang harus tetap dijalankan," jelasnya.

Danantara dan APBN Saling Mengisi

Suahasil mengatakan pembentukan Danantara dalam dua tahun terakhir menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kapasitas investasi nasional dengan mengonsolidasikan kekayaan negara yang dipisahkan.

Menurut dia, aset-aset tersebut perlu digabungkan dan disinergikan agar dapat dikelola secara lebih efisien dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian.

"Gabungkan, sinergikan, buat supaya lebih efisien," katanya.

Ia pun berharap terdapat ruang-ruang efisiensi yang dapat membuat Danantara bekerja lebih kuat bersama APBN.

Suahasil kembali menegaskan bahwa hubungan APBN dan Danantara dapat dilihat sebagai dua lengan negara yang memiliki fungsi berbeda tetapi bekerja untuk tujuan yang sama.

"APBN dan Danantara itu, mau bilang anak kembar boleh, mau bilang saudara dekat boleh, mau bilang teman bekerja sejalan boleh. Untuk apa? Untuk mewujudkan visi-visi besar Presiden, untuk mewujudkan visi-visi besar Republik Indonesia," tegasnya.

Menurut Suahasil, sinergi tersebut menjadi salah satu refleksi penting dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Kehadiran Danantara membuat kapasitas investasi negara dapat berjalan berdampingan dengan fungsi APBN.

"APBN dan Danantara itu harus bekerja bersama, seperti dua lengan kita yang bekerja bersama, saling mengisi, saling membantu. Dan ini adalah kita gunakan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik," ujarnya.

Ia menambahkan, APBN akan terus didisiplinkan sekaligus dibuat tetap mampu bekerja keras dalam merespons kebutuhan perekonomian. Sementara itu, Danantara akan memiliki posisi strategis dalam memperkuat kapasitas investasi dan mendorong kegiatan ekonomi.

Investasi Rp1.010,6 Triliun pada Semester I 2026 Serap 1,448 Juta Tenaga Kerja

Kamis, 08 Oktober 2026 17:34 WIB

Reporter: Prayogi Ikhrwinata, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/investasi-rp10106-triliun-pada-semester-i-2026-serap-1448-juta-tenaga-kerja>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi investasi di Indonesia mencapai Rp 1.010,6 triliun pada semester I 2026. Dari realisasi tersebut, sebanyak 1,448 juta tenaga kerja terserap dalam proyek investasi sepanjang enam bulan pertama tahun ini.

Penyerapan tenaga kerja itu berasal dari proyek investasi langsung yang dijalankan perusahaan, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Data tersebut mencakup tenaga kerja yang dilaporkan perusahaan melalui kegiatan investasi yang berjalan di Indonesia.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan mengatakan, penyerapan tenaga kerja tersebut berasal dari proyek investasi yang tercatat dalam laporan perusahaan.

Data penyerapan tenaga kerja dihimpun melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan perusahaan kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

"Pencatatannya dilakukan secara transparan per proyek melalui laporan resmi yang disampaikan oleh perusahaan kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berupa Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)," ujar Ichwan dalam keterangan resmi, Kamis (8/10/2026).

Dalam lima tahun terakhir, penyerapan tenaga kerja dari investasi langsung disebut menunjukkan tren peningkatan. Rata-rata pertumbuhannya mencapai 22,4%.

"Penyerapan tenaga kerja dari investasi langsung dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 22,4%," ungkap Ichwan.

Realisasi investasi pada semester I 2026 tersebut mencakup penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Data penyerapan tenaga kerja dihitung berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal yang disampaikan perusahaan kepada BKPM.

Survei BI: Pendapatan Kelas Menengah untuk Konsumsi Meningkat, Porsi Tabungan Turun

Kamis, 8 Oktober 2026 15:40 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/survei-bi-pendapatan-kelas-menengah-untuk-konsumsi-meningkat-porsi-tabungan-turun>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Porsi pendapatan masyarakat terutama kelas menengah yang digunakan untuk konsumsi terus meningkat pada September 2026. Sebaliknya, porsi pendapatan yang disisihkan untuk tabungan dan cicilan kembali menurun pada sebagian besar kelompok pengeluaran.

Berdasarkan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia (BI), rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi atau average propensity to consume ratio pada September 2026 tercatat sebesar 74,9%.

Angka tersebut meningkat dibandingkan Agustus 2026 yang sebesar 74,2%. Bahkan, dalam dua bulan terakhir, porsi konsumsi menunjukkan tren peningkatan.

Pada Juli 2026, proporsi konsumsi tercatat sebesar 72,7% dan kemudian naik menjadi 74,2% pada Agustus, sebelum kembali meningkat menjadi 74,9% pada September.

Sementara itu, proporsi pendapatan yang digunakan untuk pembayaran cicilan atau utang (debt installment to income ratio) pada September 2026 tercatat sebesar 9,7%.

Angka tersebut relatif stabil meski cenderung menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 10,0%. Pada Juli 2026, proporsi pembayaran cicilan atau utang masih mencapai 10,5%.

Di sisi lain, proporsi pendapatan konsumen yang disimpan atau saving to income ratio tercatat sebesar 15,4% pada September 2026.

Angka ini kembali turun dibandingkan Agustus 2026 yang sebesar 15,8%. Pada Juli 2026, proporsi pendapatan yang disimpan bahkan masih berada di level 16,8%.

Dengan demikian, dalam dua bulan terakhir terlihat kecenderungan masyarakat mengalokasikan porsi pendapatan yang lebih besar untuk konsumsi, sementara porsi yang disisihkan untuk tabungan dan juga bayar cicilan semakin mengecil.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, proporsi konsumsi terhadap pendapatan terindikasi meningkat pada seluruh kelompok pengeluaran, kecuali kelompok Rp 1 juta sampai Rp 2 juta yang mengalami sedikit penurunan menjadi 77,2%.

Sementara itu, porsi pendapatan yang ditabung mengalami penurunan pada sebagian besar kelompok pengeluaran.

Perkembangan tersebut menunjukkan perubahan pola alokasi pendapatan konsumen. Artinya, ketika porsi konsumsi meningkat dan porsi tabungan menurun, ruang pendapatan yang disisihkan masyarakat untuk menghadapi kebutuhan di masa mendatang juga cenderung lebih kecil.

Kondisi ini terjadi terutama karena peningkatan konsumsi berlangsung bersamaan dengan penurunan proporsi pendapatan yang ditabung dan pembayaran untuk dalam beberapa bulan terakhir.

Penerimaan Cukai Melemah, Pemerintah Diminta Evaluasi Kebijakan Fiskal Tembakau

Kamis, 8 Oktober 2026 13:52 WIB

Reporter: Asnil Bambani Amri, Editor: Asnil Amri

<https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-cukai-melemah-pemerintah-diminta-evaluasi-kebijakan-fiskal-tembakau>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sampai dengan September 2026, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) hanya mampu mengantongi Rp 240,28 triliun dari cukai. Angka ini hanya 71,51% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Capaian yang jauh di bawah target itu mendapatkan sorotan dari Tubagus Haryo Karbyanto, Sekretaris Jenderal FAKTA Indonesia. Ia menilai pelemahan penerimaan cukai, khususnya dari hasil tembakau, harus dijadikan momentum mengevaluasi kebijakan fiskal sektor tembakau.

“FAKTA Indonesia meminta pemerintah tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa kenaikan cukai hasil tembakau telah kehilangan efektivitas hanya karena penerimaan negara melemah. Evaluasi kebijakan harus memperhitungkan struktur tarif, perubahan konsumsi, perpindahan ke produk lebih murah, kepatuhan industri, serta dampaknya terhadap kesehatan dan perekonomian masyarakat,” kata Tubagus kepada KONTAN, Kamis (8/10).

Tubagus juga menanggapi penilaian ekonom INDEF, Tauhid Ahmad, yang menyebut kenaikan cukai dianggapnya tidak lagi efektif meningkatkan penerimaan negara. Tauhid Ahmad juga mengusulkan moratorium kenaikan tarif dan penguatan pemberantasan rokok ilegal.

Menurut Tubagus, penerimaan cukai yang melemah adalah alasan untuk memeriksa desain dan pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh. “Kesimpulan bahwa cukai sudah tidak efektif membutuhkan pembuktian yang jauh lebih kuat daripada perbandingan penerimaan beberapa tahun,” ujar Tubagus.

Dalam analisis Tubagus, penerimaan cukai itu tidak membuktikan kenaikan tarif cukai itu gagal. FAKTA Indonesia menilai, penerimaan cukai dipengaruhi tarif efektif, volume produk yang membayar cukai, komposisi produk, serta waktu pelunasan.

“Pemerintah harus membuka data agar kita dapat membedakan: berapa penurunan karena masyarakat mengurangi konsumsi, berapa karena berpindah ke rokok legal yang lebih murah, dan berapa karena penghindaran atau pelanggaran cukai. Ketiganya membutuhkan respons yang berbeda,” tegas Haryo.

Menurut FAKTA, moratorium kenaikan cukai juga memiliki konsekuensi ekonomi. Ketika harga produk tidak mengimbangi inflasi dan pertumbuhan pendapatan, rokok berpotensi menjadi lebih terjangkau khususnya bagi anak-anak.

Sementara, WHO sudah merekomendasikan kenaikan pajak tembakau secara signifikan dan berkala dengan memperhatikan harga relatif terhadap pendapatan, disertai penguatan administrasi dan penegakan hukum.

Tubagus juga mengingatkan bahwa penerimaan cukai merupakan penerimaan bruto. Penilaian manfaat ekonomi tembakau harus turut menghitung biaya pengobatan, kehilangan produktivitas, kematian dini, dan tekanan terhadap keuangan keluarga.

“APBN menerima cukai, sementara keluarga, fasilitas kesehatan, dan perekonomian ikut menanggung dampak konsumsi tembakau. Neraca fiskal yang bertanggung jawab harus melihat kedua sisi tersebut. Pemerintah perlu menghitung biaya itu secara terbuka, menggunakan metode yang dapat diuji,” tambahnya.

Secara hukum, Pasal 2 ayat (1) UU Cukai sebagaimana diubah melalui UU Nomor 39 Tahun 2007 menempatkan pengendalian konsumsi, pengawasan peredaran, dampak negatif terhadap masyarakat atau lingkungan, serta keadilan dan keseimbangan sebagai karakteristik yang mendasari pengenaan cukai. Karena itu, keberhasilannya tidak cukup dinilai dari pencapaian target penerimaan cukai semata.

“Jika konsumsi benar-benar turun, negara memperoleh manfaat kesehatan dan produktivitas. Jika yang terjadi hanya perpindahan ke produk lebih murah atau ilegal, pemerintah harus memperbaiki kebijakan agar tujuan pengendalian tetap tercapai,” ujarnya.

FAKTA Indonesia juga mendukung penindakan tegas terhadap rokok ilegal. Pemerintah harus membongkar jaringan produksi, distribusi, pemalsuan pita cukai, dan aliran dananya. “Pada saat bersamaan, struktur tarif perlu diperbaiki agar perpindahan ke produk murah tidak terus melemahkan pengendalian,” kata Haryo.

Untuk itu, FAKTA Indonesia mengusulkan enam langkah kepada Menteri Keuangan dan kementerian/lembaga terkait. Pertama, menerbitkan evaluasi terbuka mengenai penerimaan, produksi, pelunasan cukai, harga aktual, dan perubahan konsumsi berdasarkan kategori produk.

Kedua, menyusun peta jalan cukai beberapa tahun yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan pendapatan.

Ketiga, menyederhanakan lapisan tarif dan mengurangi kesenjangan tarif antarproduk.

Keempat, memperkuat pemberantasan rokok ilegal dari hulu hingga hilir.

Kelima, memasukkan rokok elektronik dan produk tembakau lainnya dalam evaluasi fiskal dan pengawasan peredaran.

Keenam, memperkuat pembiayaan kesehatan dan perlindungan penghidupan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sesuai ketentuan.

"Negara membutuhkan penerimaan yang berkelanjutan dan warga yang sehat. Menteri Keuangan harus menjawab pelemahan penerimaan dengan reformasi berbasis bukti: memperbaiki struktur cukai, menutup kebocoran, mengurangi keterjangkauan produk, dan melindungi penghidupan masyarakat," tutup Haryo.

Suahasil Sebut APBN 2027 Akan Dioptimalkan untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi 6%

Kamis, 8 Oktober 2026 17:12 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/suahasil-sebut-apbn-2027-akan-dioptimalkan-untuk-kejar-pertumbuhan-ekonomi-6>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Memasuki tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah mulai mengarahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 untuk memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, optimalisasi kebijakan fiskal menjadi salah satu kunci untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6%, lebih tinggi dibandingkan target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2026 yang sebesar 5,4%.

Menurut Suahasil, APBN tidak hanya akan difungsikan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan fiskal, tetapi juga dioptimalkan sebagai katalis untuk mendorong investasi, produksi, ekspor, penciptaan lapangan kerja formal, serta memperkuat daya saing ekonomi nasional.

"Ke depan, APBN harus semakin optimal. Kita ingin APBN tetap sehat dan kredibel, tetapi pada saat yang sama mampu memberikan dorongan yang cukup kuat terhadap pertumbuhan. Jadi, disiplin fiskal dan pertumbuhan bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya harus berjalan bersama," tegas Suahasil dalam forum bertajuk Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kerja Nyata Melanjutkan Asta Cita yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (8/10/2026)

Dalam APBN 2027, pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp 4.097,2 triliun dan pendapatan negara sebesar Rp 3.426,0 triliun. Dengan postur tersebut, defisit anggaran ditetapkan sebesar 2,40% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Suahasil mengatakan, postur tersebut dirancang untuk memberikan ruang fiskal yang memadai dalam mendukung agenda pembangunan sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal.

Untuk mencapai pertumbuhan 6%, pemerintah juga tidak akan hanya mengandalkan APBN. Pemerintah akan memperkuat sinergi dengan sektor swasta dan Danantara untuk meningkatkan investasi, memperluas kapasitas produksi, mendorong hilirisasi, serta menciptakan lapangan kerja.

Pemerintah sebelumnya menyampaikan bahwa pertumbuhan investasi perlu dipacu hingga sekitar 7% agar target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027 dapat dicapai.

Dengan demikian, memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran, tantangan kebijakan fiskal tidak hanya menjaga kesehatan APBN, tetapi juga memastikan belanja negara mampu memberikan dorongan yang cukup kuat terhadap aktivitas ekonomi.

Suahasil mengatakan, APBN akan tetap menjalankan tiga fungsi utama, yakni mendorong pertumbuhan, melindungi masyarakat, dan menjaga kredibilitas fiskal.

"Tagline yang selalu saya gaungkan selama dua tahun terakhir, APBN menumbuhkan, APBN melindungi dan APBN yang kredibel. Demikian refleksi dua tahun pemerintahan di bawah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, semoga kita bisa melanjutkan pekerjaan besar kita untuk Indonesia lebih baik," tegasnya.

Warga Derongisor Sambut Baik Verifikasi Bantuan untuk Percepatan Penanganan Kemiskinan

Kamis, 8 Oktober 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/warga-derongisor-sambut-baik-verifikasi-bantuan-untuk-percepatan-penanganan-kemiskinan/>

WONOSOBO – Miskumaeri (60) tampak bingung ketika rumahnya di Desa Derongisor, Kecamatan Mojotengah, didatangi perangkat desa bersama rombongan Bank Jateng dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital Provinsi Jawa Tengah, Kamis (8/10/2026). Terlebih, ketika dia dikabari akan mendapatkan bantuan sambungan listrik gratis.

Selama ini, perempuan yang kesehariannya tinggal sendiri ini, mendapatkan sambungan listrik dari tetangganya. Sebulan, Miskumaeri membayar iuran Rp20.000, untuk nyala empat lampu yang dia gunakan.

Meski awalnya sempat tidak yakin dengan bantuan itu, namun dia tersenyum ketika pihak Bank Jateng memastikan kabar gembira tersebut.

“Nggih remen. Biasane kula nyalur ting sebelah (Ya senang. Biasanya saya menyalur listrik dari tetangga sebelah),” ungkap penjual tempe ini.

Berbeda dengan Miskumaeri, Wahidi menunjukkan wajah semringah, saat tahu jambannya yang ala kadarnya akan diperbaiki. Dia siap membantu perbaikan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

“Alhamdulillah, semoga segera dibangun,” ungkap Wahidi yang kesehariannya menjadi buruh serabutan.

Sementara, Ahmad Tasim, pedagang mi ongklok, juga bersemangat menantikan bantuan gerobak. Dengan gerobak baru yang akan menemani berjualan keliling kampung sekitar wilayah Kalianget, diharapkan usahanya semakin laris

Ya, hari itu Bank Jateng melakukan Verifikasi dan Validasi dalam Rangka Percepatan Penanganan Kemiskinan, di Desa Derongisor, yang merupakan desa binaan Diskomdigi Jateng. Mereka mendatangi langsung rumah calon penerima bantuan, untuk memastikan bantuan yang akan diberikan benar-benar tepat sasaran.

Kepala Bagian Sekretaris Bank Jateng, Anton Sugiharto, menyampaikan, verifikasi dilakukan agar bantuan yang diberikan melalui corporate social responsibility (CSR) tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Ditambahkan, Bank Jateng terus bermitra, berkolaborasi, mendorong pemerintah provinsi dalam mengentaskan kemiskinan. Termasuk, mendorong masyarakat Desa Derongisor, agar lebih sejahtera.

“Saya hadir ke Desa Derongisor, sehingga bisa merasakan bagaimana desa ini memang membutuhkan. Semoga bantuan ini bisa bermanfaat dan berdampak panjang,” ujarnya.

Sementara, Sekretaris Diskomdigi Jateng, Dikki Ruly Perkasa, menyampaikan apresiasi kepada pihak Bank Jateng yang telah berkolaborasi dalam pengentasan kemiskinan, selaras dengan program Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.

Untuk kali itu, imbuhnya, dilakukan verifikasi terhadap bantuan untuk anak stunting, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), perbaikan jamban, sambungan listrik gratis, gerobak, bantuan alat kesenian, bantuan untuk difabel. Nantinya, ada puka pelatihan untuk pelaku usaha mi ongklok dari Desa Derongisor. Bantuan yang akan diberikan sekitar Rp197 juta.

“Alhamdulillah Bank Jateng akan memberikan bantuannya. Program ini merupakan program keberlanjutan, bahkan sudah satu dasawarsa. Semoga bisa membantu, menjado pengungkit sehingga di tahun-tahun mendatang bisa mandiri mengentaskan warganya. Kami, pemerintah provinsi, bersama kabupaten, akan selalu mendampingi desa,” tandas Dikki. (Ul, Diskomdigi Jateng)

Sektor Produktif Dominasi Penyaluran KUR Jateng

Kamis, 8 Oktober 2026 21:37 WIB

Penulis: Idayatul Rohmah, Editor: Vito

<https://jateng.tribunnews.com/bisnis/1268963/sektor-produktif-dominasi-penyaluran-kur-jateng>

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jateng telah mencapai Rp 42,8 triliun. Jumlah itu menjangkau 760.477 debitur, dengan Rp 25,5 triliun disalurkan ke sektor produksi.

Dari jumlah itu, Kabupaten Pati menjadi daerah dengan nilai penyaluran terbesar, yakni Rp 2,87 triliun kepada 42.804 debitur. Kabupaten Grobogan menyusul dengan penyaluran KUR sebesar Rp 2,40 triliun kepada 40.346 debitur.

Hal itu diungkapkan Wakil Menteri UMKM, Helvi Moraza, saat menghadiri 'Bursa Wirausaha Unggulan', di gedung Muladi Dome, Jalan Prof Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Rabu (7/10).

"Nah, jadi untuk KUR ini memang kami arahkan kepada sektor produksi. Sekarang (penyaluran-Red) kami sudah mencapai 65 persen (di sektor produksi-Red)," katanya.

Menurut dia, porsi pembiayaan ke sektor produksi perlu terus ditingkatkan, karena sektor itu dinilai memiliki kaitan dengan penciptaan lapangan kerja.

"Kenapa kami harus genjot itu? Karena di situlah banyaknya penciptaan lapangan kerja, di produksi ini," ujarnya.

Helvi menuturkan, sektor yang paling banyak menyerap pembiayaan produksi di Jateng berkaitan dengan potensi masing-masing daerah. Pertanian masih menjadi sektor utama, disusul perikanan, dan pengolahan makanan.

"Kalau sektor itu tergantung potensi daerah ya. Kalau Jawa Tengah, tetap pertanian yang paling tinggi, kemudian perikanan. Nah, kemudian pengolahan makanan," sebutnya.

Ia menyebut, peluang peningkatan porsi KUR sektor produksi di Jateng masih terbuka. Apalagi, provinsi ini memiliki basis tenaga kerja yang besar dan beragam potensi ekonomi daerah.

"Kami berharap kalau bisa, karena Jawa Tengah itu adalah penghasil tenaga kerja yang sangat banyak, kami berharap sektor produksi khusus Jawa Tengah itu bukan 65 persen lagi. Kalau bisa sekitar 67 persen. Dan saya lihat kesempatan itu ada," bebrnya.

Secara nasional, Helvi menyatakan, penyaluran KUR telah mencapai Rp 243,3 triliun kepada 3,76 juta debitur. Pembiayaan itupun diharapkan benar-benar menjangkau UMKM.

Menurutnya, pemerintah juga melakukan koordinasi dengan lembaga terkait agar penyaluran KUR dapat mendukung pelaku usaha yang membutuhkan.

"Sehingga KUR itu kami harapkan betul-betul jatuh ke tangan UMKM," tandasnya. (Idayatul Rohmah)

Incar Potensi Ekonomi Baru, Kementerian UMKM Pacu Kewirausahaan

Kamis, 8 Oktober 2026 21:32 WIB

Penulis: Idayatul Rohmah, Editor: Vito

<https://jateng.tribunnews.com/bisnis/1268962/incar-potensi-ekonomi-baru-kementerian-umkm-pacu-kewirausahaan>

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kementerian UMKM terus mendorong penguatan kewirausahaan. Hal itu seperti dilakukan lewat program Prokesra Produktif yang diikuti sekitar 1.000 peserta, di Gedung Muladi Dome, Jalan Prof Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Rabu (7/10).

Para peserta yang terdiri dari UMKM, mahasiswa, dan calon pengusaha itu diarahkan untuk mengembangkan kapasitas usaha dan menjadi wirausaha baru.

Diketahui, Prokesra Produktif merupakan program yang diampu Kementerian UMKM dengan melibatkan 18 kementerian dan lembaga. Program itu diarahkan untuk mendukung target capaian 10 juta penduduk berusaha dan bekerja pada 2029.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, M Riza Damanik mengatakan, para peserta yang hadir berasal dari lingkungan Jateng dan DIY. Mereka sebelumnya telah melewati tahapan inkubasi dan pendampingan.

"Peserta yang hadir kali ini lebih dari 1.000 UMKM, mahasiswa-mahasiswa, calon-calon pengusaha yang ada di lingkungan Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Tentunya tidak lain mereka-mereka telah melewati fase inkubasi," katanya.

Menurut dia, proses inkubasi itu dilakukan dengan melibatkan 27 lembaga inkubator. Pendampingan diberikan dalam rentang waktu yang berbeda, mulai dari 3 minggu, 3 bulan, hingga 6 bulan.

Lembaga inkubator yang terlibat berasal dari sejumlah perguruan tinggi, antara lain Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Negeri Semarang (Unnes), Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), serta perguruan tinggi lain di Jateng dan DIY.

Selain pelaku UMKM, Riza menyebut, sekitar 700 mahasiswa dari 17 perguruan tinggi di Jateng turut mengikuti program itu sebagai calon pengusaha.

"Mudah-mudahan tekadnya ingin jadi pengusaha sukses itu bulat, enggak belok-belok, dan nantinya bisa menjadi pengusaha-pengusaha unggul di kemudian hari," ungkapnya.

Riza menuturkan, kegiatan itu merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem kewirausahaan melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga inkubator, pelaku usaha, lembaga pembiayaan, serta kementerian dan lembaga terkait.

Selain mahasiswa dan calon pengusaha, dia menambahkan, kegiatan itu juga melibatkan sekitar 500 UMKM di Jateng.

Sebagian besar di antaranya merupakan perempuan yang sebelumnya mendapatkan pendampingan dari lembaga inkubator dan lembaga pembiayaan.

Para pelaku UMKM yang telah melewati proses inkubasi dan pendampingan juga diarahkan untuk memperoleh akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Jadi, mereka akan dapat mengakses pembiayaan untuk bisa mengembangkan usahanya," ucapnya.

Riza menyatakan, pengembangan peserta melalui inkubasi dan akses pembiayaan diharapkan dapat mendorong munculnya kegiatan usaha yang lebih produktif dan menciptakan lapangan pekerjaan.

"Ini kami harapkan nantinya bisa menjadi ekonomi baru Indonesia yang lebih produktif, yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas, yang bisa menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi," harapnya.

Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi menyampaikan, UMKM merupakan urat nadi perekonomian Jateng.

Perguruan tinggi dinilai memiliki peran penting sebagai penghubung antara kreativitas dan inovasi mahasiswa dengan kebutuhan nyata pengusaha UMKM, terutama dalam menjawab persoalan pembiayaan dan pemasaran.

"Berbagai ide kreatif yang lahir dari kampus harus bisa masuk dan memberikan manfaat bagi UMKM, termasuk dalam menjawab persoalan akses modal dan pemasaran," tuturnya.

Ia pun mengungkap komitmen Pemprov Jateng untuk membuka akses pembiayaan dengan bunga yang terjangkau bagi UMKM, serta menyediakan ruang promosi agar produk lokal semakin dikenal dan memperoleh akses pasar yang lebih luas.

Sementara, Rektor Undip, Suharnomo mengatakan, Undip ditunjuk sebagai hub koordinator pembinaan dan inkubasi kewirausahaan di Jateng.

Menurutnya, pengembangan UMKM membutuhkan proses pendampingan yang berkelanjutan. Keberadaan berbagai inkubator di perguruan tinggi perlu dioptimalkan sekaligus dihubungkan dalam sebuah jejaring yang mampu menjawab kebutuhan wirausaha.

"Dalam kegiatan ini, para UMKM tidak hanya mendapatkan pembinaan, tetapi juga dipertemukan dengan investor, Himbara, BPOM, Barantin, dan berbagai pihak yang dapat membantu menjawab kebutuhan mereka," terangnya.

Dalam pelaksanaan di Jateng, Undip berperan sebagai konsolidator yang mempertemukan berbagai pihak dalam program itu. Sebanyak 17 perguruan tinggi di provinsi ini terlibat dalam kegiatan itu.

Program tersebut juga menghadirkan lebih dari 30 tenant dan startup hasil inkubasi. Produk yang ditampilkan berasal dari berbagai sektor, seperti perikanan, pertanian, perkebunan, teknologi, dan teknologi tinggi. (idayatul Rohmah)

960 Ribu Menganggur di Jateng, Fraksi PPP Jateng Dorong UMKM Jadi Mesin Pencipta Kerja

Kamis, 8 Oktober 2026 13:25 WIB

Eko Edi Nuryanto

<https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/0417734321/960-ribu-menganggur-di-jateng-fraksi-ppp-jateng-dorong-umkm-jadi-mesin-pencipta-kerja>

SEMARANG, suaramerdeka.com – Persoalan pengangguran di Jawa Tengah kembali menjadi sorotan.

Dari total penduduk 38,5 juta jiwa, sebanyak 960.000 orang tercatat masih menganggur.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah sekaligus Wakil Ketua Fraksi PPP Ja'far Shodiq menegaskan bahwa angka tersebut merupakan alarm struktural yang tidak bisa diselesaikan dengan program seremonial.

“960 ribu penganggur bukan sekadar statistik, itu 960 ribu kepala keluarga yang kehilangan akses pekerjaan layak. Kita tidak bisa lagi mengandalkan job fair tahunan dan pelatihan 3-7 hari yang tidak ada penempatannya,” tegasnya di Gedung Berlian, Kamis (8/10/2026).

Menurutnya, ada tiga akar masalah pengangguran di Jateng, yaitu mismatch kompetensi lulusan SMK/SMA dengan kebutuhan industri, 4,6 juta UMKM Jateng yang 87 % masih skala mikro dan belum naik kelas, serta investasi yang masih padat modal, bukan padat karya.

Sebagai solusi, ia mengusulkan tiga jurus penguatan UMKM yang telah terbukti di daerah lain:

Pertama, UMKM Naik Kelas.

Ia mendorong setiap kabupaten/kota memiliki Rumah Kemasan & Pusat Kurasi Produk yang dibiayai APBD.

Ia juga mendorong kebijakan perlindungan UMKM seperti melarang penambahan toko ritel modern agar warung rakyat hidup, serta mewajibkan 40% belanja APBD untuk produk UMKM lokal.

Termasuk SPPG MBG belanja dari UMKM sekitar

Kedua, Dari Pelatihan ke Penempatan.

Ia mendorong Perda Link and Match SMK-UMKM-Industri.

Setiap SMK wajib memiliki teaching factory bersama UMKM.

Ia juga mendorong replikasi inovasi Aplikasi "Ayo Kerja" milik Dinas Tenaga Kerja agar transparansi penyerapan tenaga kerja lokal.

Ketiga, Digitalisasi dan Jaminan Hukum. Mendorong dan Mengawal pembentukan Korps Mediator Ketenagakerjaan, serta mendorong KUR Super Mikro 0% dari Bank Jateng untuk penganggur yang ingin berwirausaha.

“Dulu ada satu kabupaten di ujung pulau Jawa yang bisa menurunkan kemiskinan ke 6,13 persen terendah dalam sejarah karena berani bela UMKM. Jawa Tengah baik di provinsi maupun kabupaten perlu keberanian mengalihkan belanja dari kosmetik statistik menjadi investasi manusia,” pungkasnya.

Anggota Komisi E DPRD Jateng itu menghitung, satu UMKM naik kelas mampu menyerap 3-5 tenaga kerja.

Jika 100 ribu UMKM di Jateng naik kelas, maka 500 ribu pengangguran akan teratasi.***

Pemprov Jateng Dorong 4,2 Juta UMKM Tembus Pasar Ekspor, Ini Langkahnya

Kamis, 8 Oktober 2026

Luthfi Majid

<https://joglojateng.com/2026/10/08/pemprov-jateng-dorong-42-juta-umkm-tembus-pasar-ekspor-ini-langkahnya/>

SEMARANG, Joglo Jateng – Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan, 4,2 juta unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tersebar di 35 kabupaten/kota harus bertransformasi dari skala mikro menjadi usaha kecil, menengah, hingga mampu menembus pasar ekspor.

“UMKM harus mempunyai dampak dan naik kelas. Mulai dari mikro menjadi kecil hingga menengah dan dapat ekspor produk. Di saat kondisi geopolitik kemudian keterbatasan fiskal, UMKM kita harus bisa naik kelas,” kata Luthfi saat Bursa Wirausaha Unggulan 2026 di Muladi Dome, Universitas Diponegoro (Undip), Semarang pada Rabu (7/10/2026).

Acara tersebut dihadiri juga oleh Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza, Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding, sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah, 27 lembaga inkubator Jateng-DIY, pelaku UMKM, serta kurang lebih 760 mahasiswa calon pengusaha dari 17 perguruan tinggi di Jateng-DIY.

Menurut Luthfi, bursa wirausaha serta pameran UMKM dan produk wirausaha menjadi ruang penting untuk pengembangan ekonomi dan peningkatan peluang usaha bagi anak muda. Sebab, dapat membuka akses pasar dan kemitraan yang lebih luas.

Apalagi, kata dia, UMKM merupakan salah satu urat nadi perekonomian di Jawa Tengah. Sebab, dari 4,2 juta UMKM, sekitar 97,95% dari jumlah itu merupakan usaha mikro.

Sejauh ini Pemprov Jateng terus melakukan pendampingan dan pembinaan UMKM yang ada di wilayahnya. Dinas Koperasi dan UKM Jateng hingga triwulan II tahun 2026 membina 201.035 unit usaha. UKM tersebut memiliki nilai aset sekitar Rp39,74 triliun dan omzet sekitar Rp70,74 triliun.

Pemprov Jateng juga terus mendorong lahirnya wirausaha baru, sekaligus memperkuat kapasitas pelaku usaha yang sudah ada, melalui akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, pasar, teknologi, dan kemitraan.

Untuk mendukung proses tersebut, Jateng memiliki berbagai program, antara lain Akademi Balatkop dan Hetero Business Leap. Melalui program ini, para pelaku UMKM diberikan materi penguatan pola pikir kewirausahaan, pengembangan produk dan pemasaran, pemanfaatan teknologi digital, pengelolaan usaha, hingga perluasan pasar.

Antusiasme masyarakat terhadap pengembangan kapasitas kewirausahaan juga terus meningkat. Pada 2025, Akademi Balatkop mencatat 4.193 pendaftar, dengan peminatan terbesar pada digital marketing, keuangan bisnis, dan English conversation.

Pada 2026, terdapat 2.282 wirausaha binaan, terdiri atas 1.398 calon wirausaha, 436 wirausaha pemula, dan 448 wirausaha mapan. Bidang peminatan terbesar meliputi makanan 48,9%, kerajinan 13,3%, dan jasa digital 13,3%.

Penguatan UMKM tersebut juga didukung melalui program KUR dengan bunga 6% dari Bank Jateng. Akses permodalan ini juga sangat penting untuk mendukung berkembangnya pelaku usaha muda,

sehingga tercipta lapangan pekerjaan baru. Kemudian pembinaan dan pendampingan pelaku usaha meliputi peningkatan kualitas produk, kemasan, dan pemasaran.

“Kita gandeng seluruh stakeholder yang ada kemudian memperbanyak kegiatan-kegiatan pameran sehingga bisa berkembang bersama. Termasuk juga soal digitalisasi,” kata Luthfi.

Sementara itu, Deputy Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, M Riza Damanik mengatakan, bursa wirausaha unggulan tersebut diharapkan menjadi ruang yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa atau calon wirausaha muda untuk lebih produktif. (lut/iza/rds)

INACRAFT 2026 Jadi Panggung UMKM Jateng Tembus Pasar Global

Kamis, 8 Oktober 2026 10:23 WIB

<https://kabarjateng.id/ekonomi-dan-bisnis/inacraft-2026-jadi-panggung-umkm-jateng-tembus-pasar-global/#:~:text=INACRAFT%202026%20Jadi%20Panggung%20UMKM%20Jateng%20Tembus,Jakarta%20diarahkan%20menjadi%20langkah%20menuju%20pasar%20internasional.>

SEMARANG | Kabarjateng.id – Produk UMKM Jawa Tengah mendapat dorongan untuk tidak sekadar menguasai pasar dalam negeri.

Keikutsertaan dalam INACRAFT Oktober Vol. 5 2026 di Jakarta diarahkan menjadi langkah menuju pasar internasional.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyampaikan hal itu saat meninjau Paviliun Dekranasda Jawa Tengah di Jakarta International Convention Center (JICC), Selasa (7/10/2026).

Menurut Taj Yasin, ajang INACRAFT menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk melihat langsung perkembangan produk kriya dan UMKM dari berbagai daerah di Jawa Tengah.

Dari sana, produk potensial dapat dipetakan sesuai karakter pasar negara tujuan.

“Potensinya besar. Kita coba arahkan produk mana yang bisa dibawa ke pameran luar negeri, baik Eropa, Afrika, maupun kawasan Arab,” ujar Taj Yasin.

Ia menekankan pentingnya proses kurasi sebelum produk UMKM dibawa ke pasar internasional.

Langkah tersebut diperlukan agar produk yang dipasarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan karakter konsumen di negara tujuan.

“Ini yang harus kita kurasi lagi supaya yang hari ini pameran di sini bisa berlanjut ke internasional,” katanya.

Taj Yasin berharap pameran seperti INACRAFT tidak berhenti sebagai sarana memperkenalkan produk.

Lebih jauh, kegiatan tersebut harus membuka jejaring bisnis, memperluas pasar, sekaligus meningkatkan daya saing UMKM Jawa Tengah.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin melihat banyak produk inovatif yang ditampilkan dalam paviliun Jawa Tengah.

Salah satu yang menarik perhatian adalah pengembangan produk turunan batik dan wastra.

“Banyak inovasi yang bagus, termasuk produk turunannya. Mulai dari ready to wear hingga pemanfaatan kain perca menjadi berbagai aksesoris,” kata Nawal.

Menurutnya, inovasi harus berjalan beriringan dengan ketepatan menentukan segmen konsumen.

Dengan strategi tersebut, produk UMKM tidak hanya memiliki nilai seni, tetapi juga peluang komersial yang lebih luas.

Nawal pun mengajak masyarakat melihat langsung berbagai produk karya pelaku UMKM Jawa Tengah selama INACRAFT berlangsung.

“Kita ingin UMKM Jawa Tengah semakin keren. Silakan datang ke Paviliun Jawa Tengah karena banyak produk kriya, batik, dan produk kreatif lainnya,” ujarnya.

Kepala Dinas Koperasi Jawa Tengah Linda Widiastuti Ariningrum menjelaskan, partisipasi Jawa Tengah tahun ini mengangkat tema “From Smart Village to Global Market”.

Sebanyak 14 stan disiapkan untuk menampilkan produk dari 72 UMKM.

Rinciannya, 50 UMKM bergerak di sektor fashion, 10 UMKM bidang craft, sedangkan lainnya menghadirkan beragam produk kerajinan, termasuk sapu dan produk kreatif lainnya.

Linda mengatakan, peserta yang tampil telah melalui proses seleksi. Produk yang dipilih merupakan unggulan daerah, memiliki kualitas dan kapasitas produksi yang relatif terjaga, serta mempunyai orientasi untuk berkembang di pasar nasional maupun global.

“Produk yang ditampilkan merupakan unggulan Jawa Tengah dan daerah masing-masing. Kualitas serta kontinuitas produksinya harus terjaga karena orientasinya memang menuju global market,” jelasnya.

Selain kualitas, aspek kreativitas, inovasi, kebaruan, dan keberlanjutan juga menjadi pertimbangan.

Menurut Linda, tren pasar saat ini semakin memberikan perhatian terhadap produk yang menggunakan bahan ramah lingkungan maupun material hasil daur ulang.

“Yang kita dorong bukan hanya inovasi dan kreativitas, tetapi juga keberlanjutan, termasuk bagaimana produk memanfaatkan limbah dan menggunakan material recycle,” katanya.

Salah satu contoh datang dari Kabupaten Sragen. Pelaku UMKM di daerah tersebut mengembangkan produk berbasis material turunan tekstil yang dikemas menjadi produk kreatif untuk menyasar konsumen milenial dan Generasi Z.

Inovasi itu dikembangkan desainer muda asal Sragen, Akhsan, melalui brand Ikaten.

Ia memperkenalkan teknologi upcycle woven dengan memanfaatkan limbah benang dari kain sarung goyor.

Material tersebut kemudian diolah menjadi karya tenun bersama perajin tradisional Sragen, Simbah Surati.

Kolaborasi tersebut menghasilkan produk fashion yang telah mendapat respons positif di pasar nasional.

Akhsan mengaku terbantu dengan fasilitasi Dekranasda Kabupaten Sragen yang mempertemukannya dengan karya tenun Simbah Surati.

“Terima kasih karena sudah difasilitasi mengikuti pameran. Ke depan, mudah-mudahan bisa mendorong regenerasi tenun tradisional yang saat ini masih dikembangkan Simbah Surati,” ujarnya.

Dalam peninjauan tersebut, Taj Yasin dan Nawal juga melihat sejumlah stan kabupaten/kota yang ikut membawa produk unggulan Jawa Tengah.

Di antaranya Kendal, Purbalingga, Klaten, Jepara, Sukoharjo, Kebumen, Kota Semarang, Tegal, Pekalongan, dan Salatiga.

Pada keikutsertaan sebelumnya, Jawa Tengah menargetkan nilai transaksi sekitar Rp800 juta.

Tahun ini, kehadiran puluhan UMKM di INACRAFT diharapkan tidak hanya menghasilkan transaksi, tetapi juga membuka peluang kemitraan dan akses pasar baru hingga mancanegara. (dkp)